



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026**





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

TAHUN 2021-2026



**SALINAN**

BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
dan  
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021 – 2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
7. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
8. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
13. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
14. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja

untuk ...



untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

22. Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
23. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
24. Bupati adalah Bupati Manggarai.
25. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, kemampuan keuangan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Manggarai periode 2021-2026;
  - b. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dan perencanaan penganggaran;
  - c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

## BAB II

### ISI DAN SISTEMATIKA RPJMD

## Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
  - a. Bab I pendahuluan;
  - b. Bab II gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. Bab III gambaran keuangan;
  - d. Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;

e. Bab V ...

- e. Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
  - g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Daerah;
  - h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - i. Bab IX penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

#### Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 6 Juli 2021


BUPATI MANGGARAI,  
ttd  
HERYBERTUS GERADUS LAJU  
NABIT


Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

JAHANG FANSI ALDUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Harum Siprianus, SH  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19631104 199302 1 002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021  
NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2021



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Manggarai serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. RPJMD memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang terdiri dari: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi Daerah; Bab III gambaran keuangan Daerah; Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah; Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah; Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; Bab VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Bab IX penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN  
2021 NOMOR 03.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2021 – 2026

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021-2026

BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan izin-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2021-2026 telah diselesaikan dengan melalui berbagai tahapan dengan sebaik-baiknya. RPJMD Kabupaten Manggarai merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMD berupa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan perangkat daerah, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi masyarakat, kebutuhan daerah, serta capaian pembangunan daerah pada periode sebelumnya untuk memberikan gambaran terkait persoalan, tantangan, keberhasilan, hingga kebutuhan riil masyarakat. RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 disusun dengan berbagai pendekatan perencanaan berupa teknokratik, politis, partisipatif, atas-bawah bawah-atas, tematik holistik, integratif, dan spasial.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang utamanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, kaidah dan tata cara penyusunan RPJMD berdasarkan pedoman teknis yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat vertikal dan horizontal agar terciptanya sinergi perencanaan. RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 telah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai 2005-2025, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Upaya sinergi antar dokumen perencanaan juga dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang memuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), dan seluruh perangkat daerah serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026. Dokumen RPJMD diharapkan dapat menjadi panduan dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan dalam rangka mencapai visi pembangunan 2021-2026 yaitu “Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing”.

**BUPATI MANGGARAI**

**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	7
1.3.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025	8
1.3.2. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	12
1.3.3. Keselarasan RPJMD dengan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	15
1.3.4. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai 2012-2032	17
1.3.5. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030	18
1.3.6. Keselarasan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	19
1.3.7. Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan RPJMD	21
1.3.8. Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD	21
1.3.9. Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan RPJMD	22
1.4. Maksud dan Tujuan	22
1.4.1. Maksud	22
1.4.2. Tujuan	22
1.5. Sistematika Penulisan	23
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	<b>25</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	25
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	25
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	40
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	49
2.1.4. Demografi	52
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	56
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	56
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	68
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	75
2.3. Aspek Pelayanan Umum	77
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	77
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	165
2.3.3. Penunjang Urusan	182
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	195

2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	195
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	196
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	199
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	201
2.5.	Hasil Evaluasi Capaian RPJMD 2016 – 2021	202
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>256</b>
3.1.	Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	256
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	257
3.1.2.	Neraca Daerah	268
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	274
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	274
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	277
3.3.	Kerangka Pendanaan	281
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	281
3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	285
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH</b>		<b>288</b>
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	288
4.1.1.	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar	289
4.1.2.	Layanan Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar	297
4.1.3.	Urusan Pilihan	312
4.1.4.	Penunjang Urusan	315
4.2.	Isu Strategis	322
4.2.1.	Isu Internasional	322
4.2.2.	Isu Nasional RPJMN 2020-2024	326
4.2.3.	Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur	331
4.2.4.	Isu Strategis Daerah Sekitar Kabupaten Manggarai	333
4.2.5.	Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Manggarai	337
4.2.6.	Telaah RTRW Kabupaten Manggarai	339
4.2.7.	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Manggarai	368
4.2.8.	Penentuan Isu Strategis Menggunakan Konsep Dynamic Governance	381
4.2.9.	Penetapan Isu Strategis Kabupaten Manggarai	388
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>		<b>397</b>
5.1.	Visi	397
5.2.	Misi	400
5.2.1.	Misi 1 Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia	400
5.2.2.	Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	401
5.2.3.	Misi 3 Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	403
5.2.4.	Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani	404
5.3.	Tujuan dan Sasaran	407
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>419</b>
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	419
6.2.	Tema dan Fokus Pembangunan	435
6.3.	Program Pembangunan Daerah	437
6.4.	Integrasi Program Rekomendasi KLHS	520



<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>544</b>
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>610</b>
8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah	610
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	612
8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)	622
<b>BAB IX PENUTUP</b>	<b>662</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Keselarasan RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	9
Tabel 1. 2. Prioritas Pembangunan Tahap 4 RPJPD Kabupaten Manggarai 2021-2026	10
Tabel 1. 3. Keselarasan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	13
Tabel 1. 4. Target Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam RPJMN 2020-2024	14
Tabel 1. 5. Keselarasan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	15
Tabel 1. 6. Indikator Makro RPJMD-P Provinsi NTT 2019-2023	16
Tabel 1. 7. Keselarasan RTRW Kabupaten Manggarai 2012-2032 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	17
Tabel 1. 8. Pilar Pembangunan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	19
Tabel 1. 9. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026	23
Tabel 2. 1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai	27
Tabel 2. 2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai	28
Tabel 2. 3. Data Geologi Kabupaten Manggarai	29
Tabel 2. 4. Jenis Tanah di Kabupaten Manggarai	30
Tabel 2. 5. Hidrologi Kabupaten Manggarai	32
Tabel 2. 6. Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Manggarai	34
Tabel 2. 7. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega, 2019 (suhu rata-rata)	35
Tabel 2. 8. Rata-rata Kecepatan Angin di Kabupaten Manggarai	35
Tabel 2. 9. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Manggarai	36
Tabel 2. 10. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Manggarai	49
Tabel 2. 11. Desa/Kelurahan Rawan Epidemi di Kabupaten Manggarai	50
Tabel 2. 12. Desa/Kelurahan Rawan Konflik di Kabupaten Manggarai	51
Tabel 2. 13. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai	52
Tabel 2. 14. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai	53
Tabel 2. 15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019	55
Tabel 2. 16. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan (Persen) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	59
Tabel 2. 17. PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	65
Tabel 2. 18. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	67
Tabel 2. 19. Perkembangan IPM di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	69

Tabel 2. 20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai dan Beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020	70
Tabel 2. 21. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	74
Tabel 2. 22. Capaian Urusan yang Berkaitan dengan Budaya di Kabupaten Manggarai	76
Tabel 2. 23. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)	79
Tabel 2. 24. Disparitas APK Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020	82
Tabel 2. 25. Disparitas APM Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020	84
Tabel 2. 26. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016 – 2020	84
Tabel 2. 27. Keadaan Guru di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang dan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020	87
Tabel 2. 28. Rasio Guru dan Siswa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	90
Tabel 2. 29. Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi dan Status Akreditasinya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	90
Tabel 2. 30. Kondisi Sarana Pendidikan di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2020	91
Tabel 2. 31. Persentase Kehadiran Guru SD dan SMP, dan Cakupan Anak Kebutuhan Khusus yang Terlayani Pendidikan Khusus di Kabupaten Manggarai Pada Tahun 2016 – 2020	92
Tabel 2. 32. Data Status Gizi Balita Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	97
Tabel 2. 33. Rasio dan Cakupan Pelayanan Sarana Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	98
Tabel 2. 34. Cakupan Pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi	99
Tabel 2. 35. Rasio Pelayanan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	100
Tabel 2. 36. Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Panjang Jalan Seluruh Kabupaten Tahun 2016 – 2020	104
Tabel 2. 37. Presentase Ketersediaan Jaringan Irigasi (%) dan Panjang Jaringan Irigasi Primer (km) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	108
Tabel 2. 38. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	108
Tabel 2. 39. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Manggarai Tahun 2019	109
Tabel 2. 40. Tabel Jumlah Banunan ber IMB dan Jumlah Total Bangunan di Kabupaten Manggarai (unit rumah)	111
Tabel 2. 41. Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	112
Tabel 2. 42. Capaian Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	114
Tabel 2. 43. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	115
Tabel 2. 44. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	116
Tabel 2. 45. Jumlah Pelanggaran dan Penegakan Perda di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	116

Tabel 2. 46. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	118
Tabel 2. 47. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) dalam Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	119
Tabel 2. 48. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	120
Tabel 2. 49. Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2018 (Kelompok)	121
Tabel 2. 50. Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Unit)	121
Tabel 2. 51. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	126
Tabel 2. 52. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	127
Tabel 2. 53. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	129
Tabel 2. 54. Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	129
Tabel 2. 55. Capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 (Persen)	130
Tabel 2. 56. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	133
Tabel 2. 57. Ketersediaan Energi dan Protein perkapita di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	134
Tabel 2. 58. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	135
Tabel 2. 59. Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020	136
Tabel 2. 60. Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	137
Tabel 2. 61. Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020	137
Tabel 2. 62. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk, Rasio Pasangan Berakta Nikah, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	139
Tabel 2. 63. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Berkondisi Baik Tahun 2016 - 2020	140
Tabel 2. 64. Status Kemandirian Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Desa)	141
Tabel 2. 65. Kondisi Lembaga Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	142
Tabel 2. 66. Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	143
Tabel 2. 67. Jumlah Rumah yang dibangun dari dana Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	143
Tabel 2. 68. Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun dari Dana Desa	144
Tabel 2. 69. Jumlah PUS, Target, dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019	146
Tabel 2. 70. Klinik KB di Kabupaten Manggarai Menurut Kecamatan Tahun 2019	147
Tabel 2. 71. Rasio Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan, dan Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2020	148

Tabel 2. 72. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan	150
Tabel 2. 73. Capaian Kinerja Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika	151
Tabel 2. 74. Persentase Koperasi yang Meningkatkan SHU-nya dan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 (Persen)	152
Tabel 2. 75. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	153
Tabel 2. 76. Omzet UMKM di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	154
Tabel 2. 77. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	154
Tabel 2. 78. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	155
Tabel 2. 79. Cabang Olahraga dan Nama Induk Organisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	158
Tabel 2. 80. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	161
Tabel 2. 81. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	162
Tabel 2. 82. Jumlah kelompok kebudayaan, bahasa daerah, tari-tarian dan budaya yang dikembangkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020	162
Tabel 2. 83. Perkembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	163
Tabel 2. 84. Jumlah Produksi Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	166
Tabel 2. 85. Cakupan Bina kelompok Pengrajin Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	171
Tabel 2. 86. Kunjungan Wisata Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	172
Tabel 2. 87. Kunjungan Wisata di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	173
Tabel 2. 88. Produksi (Ton) dan Luas areal Tamanan Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Hektar) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	175
Tabel 2. 89. Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	177
Tabel 2. 90. Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Ekor) menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	178
Tabel 2. 91. Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	179
Tabel 2. 92. Data Produksi Hasil Ternak (Kg) Kabupaten Manggarai 2016 - 2020	179
Tabel 2. 93. Jumlah Pedagang (Orang) Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2019	182
Tabel 2. 94. Ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen pendukungnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	183
Tabel 2. 95. Tingkat keterpaduan dokumen perencanaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Persen)	184
Tabel 2. 96. Opini BPK Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2019	184
Tabel 2. 97. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Orang)	186
Tabel 2. 98. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	186

Tabel 2. 99. Nilai Indeks Profesionalistas ASN Kabupaten Manggarai Tahun 2020	187
Tabel 2. 100. Rekapitulasi ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Orang)	187
Tabel 2. 101. Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Persen)	188
Tabel 2. 102. Hasil penelitian yang ditindaklanjuti di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	189
Tabel 2. 103. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI periode 2016 - 2020	189
Tabel 2. 104. Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	190
Tabel 2. 105. Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti pada alat kelengkapan dewan	191
Tabel 2. 106. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2020	193
Tabel 2. 107. Nilai dan Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2017	194
Tabel 2. 108. Pengeluaran per Kapita (Rupiah) Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2020	195
Tabel 2. 109. Capaian Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2020	197
Tabel 2. 110. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga, Bandara, dan Terminal Bus di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	197
Tabel 2. 111. Indikator Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	200
Tabel 2. 112. Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2020	201
Tabel 2. 113. Hasil evaluasi capaian RPJMD 2016-2021	203
Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	258
Tabel 3. 2. Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	260
Tabel 3. 3. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	264
Tabel 3. 4. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	267
Tabel 3. 5. Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2020 (Rupiah)	270
Tabel 3. 6. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016-2020	274
Tabel 3. 7. Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016-2020 (Rupiah)	276
Tabel 3. 8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manggarai, Tahun 2016-2020	277
Tabel 3. 9. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	279
Tabel 3. 10. Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	280
Tabel 3. 11. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026	283
Tabel 3. 12. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026	286
Tabel 3. 13. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026 (Juta Rupiah)	287

Tabel 4. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan	289
Tabel 4. 2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	291
Tabel 4. 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	293
Tabel 4. 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	294
Tabel 4. 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	295
Tabel 4. 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial	297
Tabel 4. 7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja	298
Tabel 4. 8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	298
Tabel 4. 9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pangan	299
Tabel 4. 10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan	300
Tabel 4. 11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	300
Tabel 4. 12. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	302
Tabel 4. 13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	302
Tabel 4. 14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	303
Tabel 4. 15. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan	304
Tabel 4. 16. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	306
Tabel 4. 17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	307
Tabel 4. 18. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal	307
Tabel 4. 19. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	308
Tabel 4. 20. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik	309
Tabel 4. 21. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian	309



Tabel 4. 22. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan	310
Tabel 4. 23. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan	310
Tabel 4. 24. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan	311
Tabel 4. 25. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perikanan	312
Tabel 4. 26. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian	313
Tabel 4. 27. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata	313
Tabel 4. 28. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian	314
Tabel 4. 29. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan	315
Tabel 4. 30. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan	316
Tabel 4. 31. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan	317
Tabel 4. 32. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian	318
Tabel 4. 33. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan	318
Tabel 4. 34. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan	319
Tabel 4. 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sekretariat DPRD	320
Tabel 4. 36. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sekretariat Daerah	320
Tabel 4. 37. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kewilayahan-Kecamatan	321
Tabel 4. 38. Tujuh Agenda pembangunan dengan lingkungan dan isu strategis	327
Tabel 4. 39. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	332
Tabel 4. 40. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024	335
Tabel 4. 41. Telaah Isu Strategis Penataan Ruang	349
Tabel 4. 42. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Manggarai	371
Tabel 4. 43. Isu Strategis Kabupaten Manggarai Berdasarkan Analisis dalam KLHS	373
Tabel 4. 44. Keterkaitan Kelompok Isu Startegis Pilar Sosial dengan Indikator TPB	377
Tabel 4. 45. Keterkaitan Kelompok Isu Startegis Pilar Ekonomi dengan Indikator TPB	379
Tabel 4. 46. Keterkaitan Kelompok Isu Startegis Pilar Lingkungan dengan Indikator TPB	380
Tabel 4. 47. Keterkaitan Kelompok Isu Startegis Pilar Tata Kelola dengan Indikator TPB	381
Tabel 4. 48. Penentuan Isu Strategis Kabupaten Manggarai	382

Tabel 5. 1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	398
Tabel 5. 2. Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai dengan Visi dan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	405
Tabel 5. 3. Tujuan dan Sasaran Misi 1 Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia	408
Tabel 5. 4. Tujuan dan Sasaran Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	412
Tabel 5. 5. Tujuan dan Sasaran Misi 3 Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	416
Tabel 5. 6. Tujuan dan Sasaran Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani	417
Tabel 6. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai 2021-2026	420
Tabel 6. 2. Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026	437
Tabel 6. 3. Integrasi Program Rekomendasi KLHS	521
Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026	545
Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	546
Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026	611
Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026	612
Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 - 2026	623

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1. Struktur Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020	54
Grafik 2. 2. Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019	55
Grafik 2. 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Persen)	57
Grafik 2. 4. PDRB ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Manggarai dan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020	61
Grafik 2. 5. Kontribusi PDRB ADHB (%) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	62
Grafik 2. 6. Laju Inflasi Tahunan (%) Kota Maumere, Kota Kupang, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019	64
Grafik 2. 7. Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT Tahun 2018-2020	66
Grafik 2. 8. Perbandingan IPM Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Lain di Sekitar Manggarai Tahun 2016-2020.	70
Grafik 2. 9. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Manggarai tahun 2015-2019 (Persen)	71
Grafik 2. 10. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)	72
Grafik 2. 11. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)	73
Grafik 2. 12. Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)	75
Grafik 2. 13. Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)	78
Grafik 2. 14. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Menurut Tingkat Pendidikan 2016 – 2020	80
Grafik 2. 15. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	83
Grafik 2. 16. Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)	85
Grafik 2. 17. Persentase Kelulusan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	86
Grafik 2. 18. Rata-Rata Nilai Ujian nasional SMP di Kabupaten Manggarai Tahun 2015/2016 – 2018/2019	86
Grafik 2. 19. Jumlah Guru Mismatch Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	88

Grafik 2. 20. Persentase Guru di Seluruh Jenjang Pendidikan yang Bersertifikat Pendidik Tahun 2016 – 2020	89
Grafik 2. 21. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	93
Grafik 2. 22. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	95
Grafik 2. 23. Jumlah Bayi yang diimunisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	101
Grafik 2. 24. Jumlah Penderita Penyakit DBD, HIV/AIDS, dan Infeksi Menular Seksual di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 – 2020	102
Grafik 2. 25. Statistik Covid-19 di Kabupaten Manggarai Per 9 Maret 2021 (Orang)	103
Grafik 2. 26. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik terhadap Panjang Jalan Total di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Angka)	104
Grafik 2. 27 Rasio Panjang Jalan dilalui Roda Empat terhadap Total Panjang Jalan (km)	105
Grafik 2. 28. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 (meter)	106
Grafik 2. 29. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	106
Grafik 2. 30. Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	107
Grafik 2. 31. Perbandingan Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga	110
Grafik 2. 32. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	111
Grafik 2. 33. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi terhadap Total Seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (%)	113
Grafik 2. 34. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	117
Grafik 2. 35. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	122
Grafik 2. 36. Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	124
Grafik 2. 37. Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021	124
Grafik 2. 38. Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2016 – 2020	125
Grafik 2. 39. Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	128
Grafik 2. 40. Indeks Ketahanan Pangan dan Komponennya di Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020	132
Grafik 2. 41. Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	134
Grafik 2. 42. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	135
Grafik 2. 43. Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Manggarai Tahun 2018 - 2019	138
Grafik 2. 44. Persentase Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	145
Grafik 2. 45. Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2019	149

Grafik 2. 46. Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional (Rp) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	155
Grafik 2. 47. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2017	157
Grafik 2. 48. Persentase Kelompok Pemuda Aktif dalam Pembangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)	158
Grafik 2. 49. Informasi Daerah yang Diamankan Persandian dan Jumlah Perangkat yang Menggunakan Sandi Dalam di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	160
Grafik 2. 50. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	164
Grafik 2. 51. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2015 – 2019 (Persen)	165
Grafik 2. 52. Persentase Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020	167
Grafik 2. 53. Persentase Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Ikan yang Dihasilkan Kelompok Nelayan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	168
Grafik 2. 54. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)	169
Grafik 2. 55. Pertumbuhan Industri Kecil Sektor Formal dan Non-Formal Kabupaten Manggarai 2016 - 2020	170
Grafik 2. 56. Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	170
Grafik 2. 57. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Rupiah)	172
Grafik 2. 58. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Manggarai 2016 – 2020 (Persen)	174
Grafik 2. 59. Persentase Produktivitas Padi/Bahan Pangan Lokal dan Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	175
Grafik 2. 60. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020	176
Grafik 2. 61. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)	181
Grafik 2. 62. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Persen)	185
Grafik 2. 63. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2019	198
Grafik 2. 64. Angka Kriminalitas dan Demonstrasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	199
Grafik 3. 1. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020	262

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD	2
Gambar 1. 2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8
Gambar 1. 3. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025	9
Gambar 1. 4. Misi, Arah, dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Presiden Tahun 2020-2024	13
Gambar 2. 1. Peta Adiministrasi Kabupaten Manggarai	27
Gambar 2. 2. Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Manggarai	41
Gambar 5. 1. Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok-Pokok Visi	405
Gambar 6. 1. Tema/ Fokus Pembangunan Kabupaten Manggarai	436

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Bagian latar belakang mengulas tentang arti pentingnya RPJMD. Bagian dasar hukum memaparkan beberapa dasar hukum yang digunakan untuk menyusun RPJMD, sedangkan bagian hubungan antar dokumen memberi penekanan bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya. Adapun bagian maksud dan tujuan mempertegas urgensi dokumen RPJMD, serta bagian sistematika penulisan memandu memahami substansi umum dari seluruh muatan RPJMD.

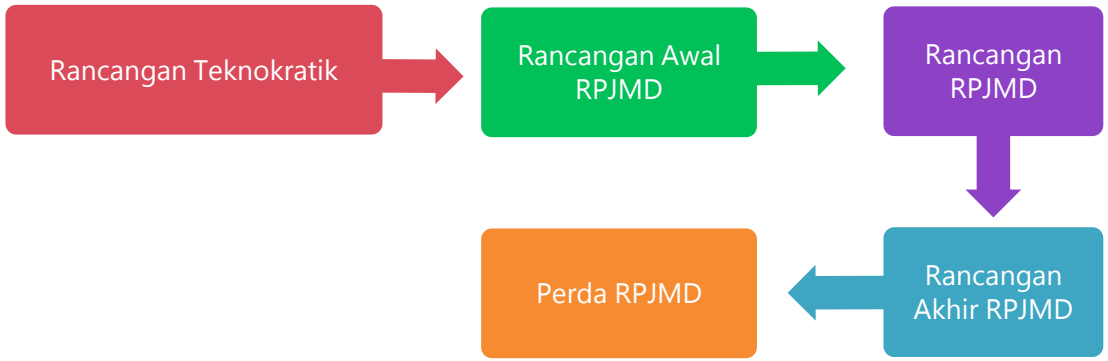
### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan strategis di dalam proses pembangunan. Perencanaan menjadi tahapan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan dan dicapai daerah. Dokumen perencanaan sendiri menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan berorientasi kinerja yang membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagian dari perencanaan pembangunan yang memiliki jangka waktu lima tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5



(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Muatan RPJMD tersebut merupakan sinkronisasi dari berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, politik, partisipatif, serta atas-bawah, dan bawah-atas. Substansi RPJMD tidak kalah penting juga mengadopsi pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif, dan spasial, agar terdapat kesalingterpaduan antar urusan pemerintahan dalam menjawab tantangan pembangunan.



**Gambar 1. 1. Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD**

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai 2021-2026 telah memasuki serangkaian tahapan untuk mempertemukan pendekatan politik berupa visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dengan pendekatan teknokratik yang berbasis data kinerja dari periode lima tahun sebelumnya. Pendekatan politik dan teknokratik kemudian diperkuat dengan pendekatan partisipatif berupa forum konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. Adapun implementasi pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dijalankan melalui konsultasi dan evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta menjaga keterpaduan antar dokumen perencanaan mulai dari desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Kabupaten Manggarai pada periode RPJMD 2021-2026 dipimpin oleh pasangan Bupati Herybertus G.L. Nabit, S.E., M.A. dan Wakil Bupati Heribertus Ngabut, S.H. yang dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 26 Februari 2021. Nilai yang mendasari dalam pembangunan Manggarai periode 2021-2026 adalah *Bolek Loke-Baca Tara, Tela Galang Pe'ang-Kete Api One*. *Bolek Loke-Baca Tara* bermakna pemimpin dan orang yang dipimpinnya merupakan orang-orang yang sehat, sehingga mampu mengurus Manggarai secara baik dan benar, sementara *Tela Galang Pe'ang-Kete Api One* bermakna

kecukupan sandang, pangan, dan papan untuk seluruh rakyat Manggarai. Periode RPJMD sekaligus merupakan tahap akhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai 2005-2025, oleh karena itu RPJMD ini diarahkan untuk mencapai Visi RPJPD berupa **“Manggarai yang Makmur, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan”**.

## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032.
29. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sususnan Organisasi Sekretariat Daerah Kabubupaten Manggarai
30. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

31. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan
32. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 41 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian
33. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan lainnya agar tercipta keselarasan dalam pembangunan. Berbagai dokumen perencanaan tersebut, yaitu RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RTRW Kabupaten Manggarai, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta dokumen RPJMD harus dijadikan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan sebagai bahan penyelarasan bagi RPJM Desa agar terdapat keselarasan antara pembangunan desa dengan kabupaten.





Gambar 1. 3. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025

Misi RPJPD telah memuat berbagai aspek pembangunan, yakni pembangunan ekonomi dan sosial, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan tata kelola pemerintahan dan ketertiban sosial, pembangunan berwawasan lingkungan, serta terdapat misi khusus untuk mewujudkan Kota Ruteng sebagai ibukota kabupaten yang menjadi kota layak bagi berbagai pelayanan publik. Muatan umum misi RPJPD tersebut menjadi dasar bagi perumusan misi RPJMD Kabupaten Manggarai.

Tabel 1. 1. Keselarasan RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

No	RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025	RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026
VISI		
	Manggarai yang Makmur, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan	Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing
MISI		
1	Mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi dan penataan kelembagaan sistem perlindungan sosial masyarakat Manggarai	Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat



No	RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025	RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026
VISI		
	Manggarai yang Makmur, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan	Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing
MISI		
2	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia manggarai	Misi 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
3	Mewujudkan penataan birokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia dan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat Manggarai	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani
4	Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang berwawasan ekologis dan berbasis tata ruang di Kabupaten Manggarai	Misi 3: Meningkatkan Mutu Lingkungna Hidup
5	Mewujudkan Kota Ruteng sebagai pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, industri, dan perdagangan serta kota asri.	Seluruh misi

RPJMD 2021-2026 merupakan sebagai tahap 4 RPJPD. Tahap 4 ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Manggarai yang sejahtera, maju, adil dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan pada berbagai bidang kehidupan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan SDM berkualitas dan berdaya saing. Tahap 4 (empat) ini memiliki prioritas sebagai berikut:

**Tabel 1. 2. Prioritas Pembangunan Tahap 4 RPJPD Kabupaten Manggarai 2021-2026**

Bidang	Prioritas dan Kondisi yang akan Dicapai
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pemerataan akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan</li> <li>• Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak</li> <li>• Terwujudnya kesetaraan gender</li> </ul>

Bidang	Prioritas dan Kondisi yang akan Dicapai
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang</li> <li>Masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari</li> </ul>
Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh</li> <li>Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa</li> <li>Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik</li> <li>Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi</li> <li>Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk yang miskin makin rendah</li> </ul>
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat</li> <li>Elektrifikasi perdesaan dan rumah tangga</li> <li>Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh</li> </ul>
Politik dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta</li> </ul>

Bidang	Prioritas dan Kondisi yang akan Dicapai
	<p>supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat</li> <li>• Terwujudnya sistem hukum daerah yang akomodatif</li> <li>• Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional</li> <li>• Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang maju dan adil</li> </ul>
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa depan</li> <li>• Kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat makin baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan</li> </ul>

### 1.3.2. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menempatkan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD, sekaligus RPJMD sebagai instrumen penjabaran program di dalam RPJMN. Oleh karena itu, RPJMD bagian dari upaya mencapai visi pembangunan nasional, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diturunkan ke dalam 9 Misi yang merupakan Nawa Cita Jilid 2 dan 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:



Gambar 1. 4. Misi, Arahana, dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Presiden Tahun 2020-2024

Sumber: Lampiran 1, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Misi, arahan presiden dan tujuh agenda pembangunan ini harus ditindaklanjuti di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai. Sinergitas antara RPJMN dengan RPJMD harus dijaga dengan baik. Berikut adalah keselarasan agenda pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026.

Tabel 1. 3. Keselarasan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

No	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026
	Agenda Pembangunan	Kesesuaian Dengan Misi dan Tujuan
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Misi 2: Meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan: Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi, menurunnya kemiskinan.
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Misi 2: Meningkatkan perekonomian masyarakat.

No	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026
	Agenda Pembangunan	Kesesuaian Dengan Misi dan Tujuan
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar	Tujuan: Meningkatnya pemerataan kesejahteraan, meningkatnya tingkat kemandirian desa
4	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Misi 1: Meningkatkan mutu sumber daya manusia. Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat, meningkatnya ketahanan sosial
5	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Misi 3: Meningkatkan mutu lingkungan hidup. Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Misi 4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani. Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, profesional, dan responsif terhadap pelayanan publik.

Substansi misi, arahan Presiden Republik Indonesia, dan 7 agenda pembangunan harus termuat pula di dalam dokumen RPJMD Manggarai, agar tercipta keselarasan antara pembangunan daerah dengan pusat. Implementasi muatan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN perlu memperhatikan kondisi aktual berupa kebijakan penanganan Pandemi Covid-19. Pemerintah pusat memberikan arahan kebijakan setidaknya terkait percepatan pelayanan kesehatan berupa fasilitas perawatan, *tracing*, penguatan protokol kesehatan, maupun implementasi vaksinasi, serta tidak kalah penting terkait pemulihan dampak perekonomian.

**Tabel 1. 4. Target Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam RPJMN 2020-2024**

Indikator Pembangunan	Target NTT dalam RPJMN 2020-2024			
	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,50	6,90	7,30	7,50
Tingkat Kemiskinan (%)	17,35	16,15	14,56	12,35

Indikator Pembangunan	Target NTT dalam RPJMN 2020-2024			
	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,70	2,60	2,20	2,00
Perkiraan kebutuhan investasi (Rp triliun)	63,91	71,47	80,94	91,78

Kabupaten Manggarai dalam RPJMD 2021-2026 perlu mencermati arah dan target pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Kabupaten Manggarai di dalam RPJMN ditetapkan sebagai bagian dari koridor pertumbuhan, dengan program/kegiatan prioritas antara lain pembangunan desa terpadu yang terdiri dari desa wisata yang menopang destinasi super prioritas Labuan Bajo, desa digital, transformasi ekonomi kampung terpadu, konvergensi pencegahan stunting di desa, usaha ekonomi desa yang dikembangkan terintegrasi dengan BUMDes, dan pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat.

### 1.3.3. Keselarasan RPJMD dengan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

Kabupaten Manggarai perlu menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang menjalankan periode pembangunan 2018-2023. Arah pembangunan dalam periode tersebut direpresentasikan melalui rumusan visi dan misi sebagai berikut:

**Tabel 1. 5. Keselarasan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026**

No	RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026
VISI		
	NTT Bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia	Manggarai maju, Adil, dan Berdaya Saing
MISI		
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Adil	Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
2	Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional ( <i>ring of beauty</i> )	2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Misi 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup

No	RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026
VISI		
	NTT Bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia	Manggarai maju, Adil, dan Berdaya Saing
MISI		
3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan	2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
5	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

**Tabel 1. 6. Indikator Makro RPJMD-P Provinsi NTT 2019-2023**

Indikator	Baseline	Target		
		2021	2022	2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,20	5,87-6,50	6,33-6,90	6,7-7,3
PDRB per kapita (Rp juta)	19,5	20-23	23-25	25-27
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,23	65,54-67	67,35-69	70-71
Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,62	21-19,63	19,35-16,15	15-12
Inflasi (%)	0,67	3-3,34	3-3,32	3-3,32
Prevalensi stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10-12
Indeks Gini (poin)	0,355	0,35-0,34	0,34-0,33	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	94	95	95
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,35	3,2-2,6	2,5-1,9	1,9-1,5
Rasio PAD (%)	23,90	25,31	30,12	39,74
Emisi gas rumah kaca (tCO2 <sup>eq</sup> )	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan investasi (Rp triliun)	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	60,37	65	69	71

Indikator makro Provinsi NTT di dalam RPJMD-P merupakan representasi seluruh misi yang akan dijalankan dan dicapai hingga tahun 2023.

Visi dan misi provinsi memuat tentang pembangunan perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan potensi unggulan provinsi, yaitu sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur sebagai penopang efektivitas pembangunan, pembangunan sumber daya manusia, serta pembangunan tata kelola pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**1.3.4. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai 2012-2032**

Penyusunan RPJMD harus mempedomani tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan pola ruang di dalam RTRW. Tujuan penataan ruang Daerah yang termuat di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012, yaitu mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian yang sinergis demi terwujudnya kehidupan seluruh masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata. Adapun kebijakan penataan ruang daerah akan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 7. Keselarasan RTRW Kabupaten Manggarai 2012-2032 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026**

No	Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021 - 2026	RTRW Kabupaten Manggarai 2013 - 2032
1	Meningkatkan mutu sumber daya manusia	Pendukung
2	Meningkatkan perekonomian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten</li><li>• Pengembangan industri pertanian, kelautan, dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat</li><li>• Pengembangan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten</li><li>• Pengembangan kerjasama jaringan prasarana dan sarana/infrastruktur antar daerah perbatasan</li></ul>



No	Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021 - 2026	RTRW Kabupaten Manggarai 2013 - 2032
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kerjasama jaringan prasarana dan sarana/infrastruktur antar daerah perbatasan</li> <li>• Pembagian pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhierarki di setiap kecamatan</li> <li>• Pelestarian kawasan pertanian, kehutanan, dan perikanan</li> <li>• Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ul>
3	Meningkatkan mutu lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap kawasan lingkungan yang ada di daerah</li> <li>• Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan</li> </ul>
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Pendukung

Kebijakan pembangunan yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 diarahkan selaras dengan kebijakan penataan ruang, baik dalam rangka mengoptimalkan kawasan peruntukaan budidaya untuk pengembangan potensi dan akselerasi pembangunan ekonomi daerah, maupun menjaga kawasan lindung. Rencana struktur ruang wilayah di dalam RTRW Kabupaten Manggarai terdiri dari pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya, sedangkan rencana pola ruang wilayah terdiri kawasan lindung dan kawasan budidaya.

**1.3.5. Keselarasan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030**

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat yang berkualitas, adil, dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana. Kebijakan penataan ruang daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

1. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi;
2. Pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama;
4. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya;
5. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang;
7. Pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

**1.3.6. Keselarasan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyusunan RPJMD disertai dengan penyusunan KLHS dalam rangka memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar di dalam perencanaan pembangunan. Penyusunan KLHS RPJMD dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola, dengan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 1. 8. Pilar Pembangunan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Misi 1: Meningkatkan mutu sumber daya manusia	Pembangunan Sosial	Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
		Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
		Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan

Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
		Tujuan 4: Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
		Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Misi 2: Meningkatkan perekonomian masyarakat	Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
		Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
		Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
		Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
		Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 3: Meningkatkan mutu lingkungan hidup	Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua
		Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
		Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		Tujuan 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	Pilar Pembangunan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
		Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan keanekaragaman hayati
Misi 4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16: Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

### 1.3.7. Keselarasan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan RPJMD

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD, sekaligus Renstra memiliki peran untuk menjabarkan program pembangunan daerah dan perangkat daerah yang terdapat di dalam RPJMD melalui rumusan kegiatan dan sub kegiatan. Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra memiliki peran strategis untuk mencapai target indikator kinerja kepala daerah yang ditopang dengan pencapaian indikator kinerja kepala perangkat daerah beserta struktur yang berada di bawahnya.

### 1.3.8. Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, serta penyusunan dan pelaksanaan RKPD berpedoman pada fokus pembangunan daerah setiap tahun

yang telah tertuang di dalam RPJMD. RKPD memiliki peran penting untuk sinkronisasi antara RPJMD dengan dukungan penganggaran setiap tahun, karena RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **1.3.9. Keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan RPJMD**

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa harus sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan dengan menyelaraskan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### **1.4.1. Maksud**

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, yakni sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, yaitu:

1. Tersedianya dokumen untuk operasionalisasi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pogram pembangunan/perangkat daerah, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan
2. Tersedianya dokumen bagi perangkat daerah untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3. Tersedianya dokumen sebagai panduan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 1. 9. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026**

<b>Bab I</b> Pendahuluan	<b>Bab I</b> memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
<b>Bab II</b> Gambaran Umum Kondisi Daerah	<b>Bab II</b> disajikan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Substansi Bab II terkait data kinerja periode RPJMD 2016-2021 beserta analisisnya.
<b>Bab III</b> Gambaran Keuangan Daerah	<b>Bab III</b> Gambaran keuangan daerah yang disajikan di dalam Bab III terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan periode 2021-2026
<b>Bab IV</b> Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	<b>Bab IV</b> merupakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang berbasis analisis capaian kinerja di Bab II. Permasalahan pembangunan daerah kemudian menjadi dasar perumusan isu strategis daerah, yang memperhatikan isu strategis internasional, nasional, provinsi dan daerah sekitar.
<b>Bab V</b> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	<b>Bab V</b> memuat kondisi makro pembangunan daerah yang akan dicapai dan dijalankan pada periode 2021-2026 yang dimulai rumusan visi dan misi, kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran beserta indikatornya.

<b>Bab VI</b> Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah	<b>Bab VI</b> memuat berbagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran berupa strategi dan arah kebijakan. Bab VI juga memuat program pembangunan daerah yang merupakan program strategis untuk mencapai visi dan menjalankan misi pembangunan.
<b>Bab VII</b> Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	<b>Bab VII</b> memuat kerangka pendanaan sebagai dasar alokasi belanja bagi program perangkat daerah. Sedangkan program perangkat daerah sendiri yang terdapat di <b>Bab VII</b> merupakan program prioritas dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai indikator kinerja.
<b>Bab VIII</b> Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<b>Bab VIII</b> merupakan penetapan indikator kinerja daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci di setiap urusan pemerintah daerah.
<b>Bab IX</b> Penutup	<b>Bab IX</b> sebagai penutup memuat kaidah pelaksanaan RPJMD untuk dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan dan perangkat daerah, serta berbagai indikator kinerja yang termuat di dalam RPJMD juga menjadi bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan selama periode 2021-2026.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kondisi umum Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari proses perencanaan. Kondisi umum Kabupaten Manggarai dianalisis melalui empat aspek, yaitu: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Penjelasan mengenai empat aspek tersebut disajikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut adalah gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Manggarai:

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub-bab ini berisi tentang gambaran kondisi geografi maupun demografi Kabupaten Manggarai. Aspek geografi yang dijelaskan pada sub-bab ini meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi akan mendeskripsikan struktur dan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai.

#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Manggarai dapat dideskripsikan melalui beberapa hal, meliputi: letak dan kondisi geografis,



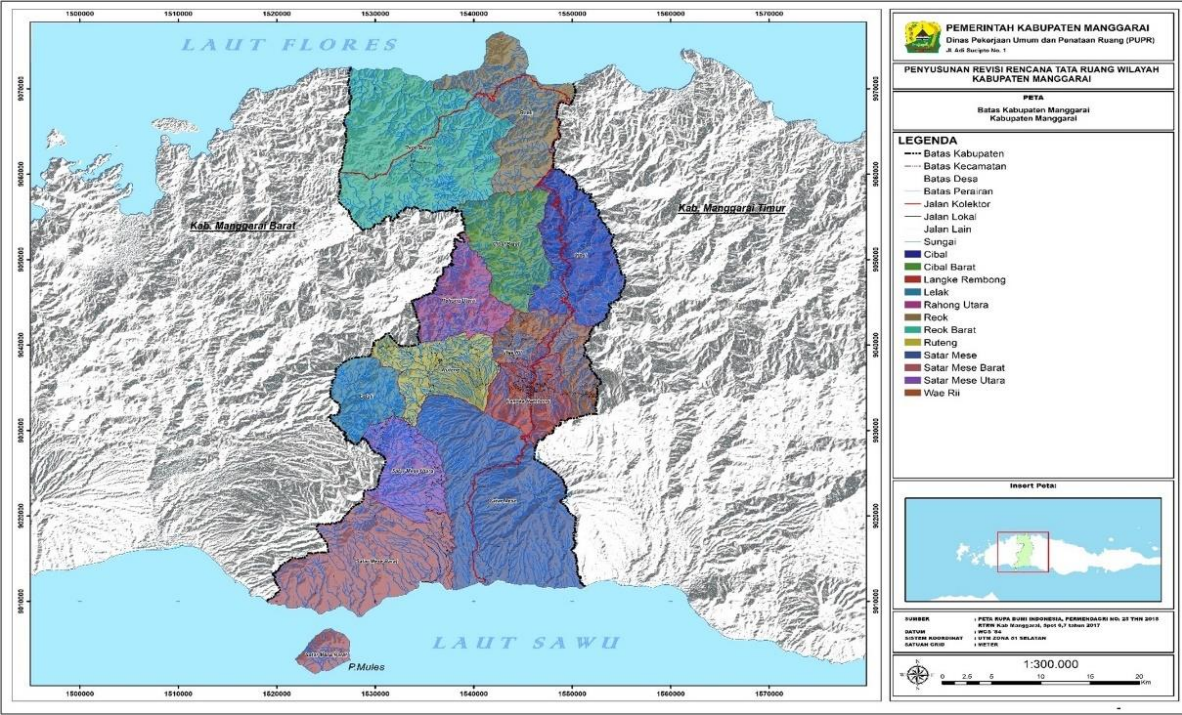
kondisi kawasan, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Data-data tersebut penting untuk membangun kebijakan berbasis spasial. Penjabaran karakteristik lokasi dan wilayah dilengkapi dengan analisis terhadap data sekunder dan narasi kualitatif yang relevan.

**2.1.1.1. Luas Batas dan Wilayah Administratif**

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki Luas wilayah 2.096,44 km<sup>2</sup> atau 134.107.951 Ha. Secara administratif, kabupaten Manggarai dibagi menjadi 12 kecamatan, 145 desa, dan 26 kelurahan dengan pusat pemerintahan di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong. Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Manggarai:

- Sebelah Barat : Kabupaten Manggarai Barat;
- Sebelah Utara : Laut Flores;
- Sebelah Timur : Kabupaten Manggarai Timur;
- Sebelah Selatan : Laut Sawu.

Kabupaten Manggarai memiliki batas utara yaitu Laut Flores; Batas selatan yaitu Laut Sawu; Batas barat yaitu Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, batas sebelah timur Kabupaten Manggarai adalah Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur adalah hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan peta Kabupaten Manggarai:



Gambar 2. 1. Peta Adiministrasi Kabupaten Manggarai  
Sumber: RTRW Kabupaten Manggarai, 2012-2032

Kabupaten Manggarai memiliki 12 kecamatan, dengan kecamatan paling terluas adalah Kecamatan Reok Barat dan Kecamatan Satar Mese. Luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2. 1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Satar Mese	Iteng	298,80
2	Satar Mese Barat	Narang	199,93
3	Satar Mese utara	Langke Majok	179,00
4	Langke Rembong	Ruteng	60,54
5	Ruteng	Cancar	136,26
6	Wae Rii	Timung	129,89
7	Lelak	Rejeng	64,64
8	Rahong Utara	Nanu	131,95
9	Cibal	Pagal	139,94
10	Cibal Barat	Golo Woi	118,95
11	Reok	Reo	236,80
12	Reok Barat	Sambi	399,74
Total			2.096,44

Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka 2020

Luasan total Kabupaten Manggarai yakni 2.096,44 km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan 11 Kecamatan lainnya, Kecamatan Reok Barat adalah kecamatan terluas dengan luasan mencapai 399,74 km<sup>2</sup>. Kecamatan Langke Rembong merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 60,54 km<sup>2</sup>. Masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbeda tergantung dengan kondisi geografi dan klimatologi.

**2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Manggarai terletak di 8° 14' 27,32"- 8° 54' 57,17" LS dan 120° 13' 41,34" - 120° 32' 47,22" BT (Data Peta Rupa Bumi Indonesia) dengan ketinggian dari permukaan laut antara 12 hingga 1200 mdpl. Kabupaten Manggarai memiliki letak yang strategis karena berada di jalur penghubung antar kabupaten di Pulau Flores (Trans-Flores). Kabupaten Manggarai diapit oleh dua kabupaten hasil pemekaran, yakni Kabupaten Manggarai Barat dengan Ibu Kota Labuan Bajo – yang telah menjadi Kawasan Pariwisata Super-Premium – dan Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Manggarai yang secara umum memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan sumber energi listrik dengan beroperasinya PLTP Ulumbu. Berikut merupakan tabel jarak ke ibu kota menurut kecamatan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai**

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km)
1.	Satar Mese	Iteng	37
2.	Satar Mese Barat	Narang	65
3.	Satar Mese Utara	Langke Majok	32
4.	Langke Rembong	Ruteng	0
5.	Ruteng	Cancar	15
6.	Wae Rii	Timung	14
7.	Lelak	Rejeng	32
8.	Rahong Utara	Purang	23
9.	Cibal	Pagal	21
10.	Cibal Barat	Golo Woi	42
11.	Reok	Reo	65
12.	Reok Barat	Sambi	105

*Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2020*

Kota Ruteng yang terletak di Kecamatan Langke Rembong merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Manggarai, sekaligus sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perekonomian, dan mobilitas lainnya. Jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten memiliki rentang yang jauh, yakni 14 sampai 105 Km. Kecamatan Reok Barat adalah kecamatan yang letaknya paling jauh dengan jarak 105 km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan yang paling dekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Wae Rii dengan jarak 14 km.

2.1.1.3. Geologi

Kondisi geologi terkait dengan gambaran kondisi bumi di Kabupaten Manggarai. Kondisi tersebut berhubungan dengan jenis bantuan, bahan galian pasir dan lain sebagainya. Berikut adalah kondisi geologi Kabupaten Manggarai:

A. Bahan Galian Pasir dan Batu

Kabupaten Manggarai merupakan sebuah wilayah yang memiliki jenis batuan aluvium sungai-sungai muda, aluvium lempung tua, aluvium endapan bahan-bahan kipas, andesit, basalt, diorite, gabro, batu gamping, tefra berbutir halus, tefra berbutir kasar, marl, dan koral. Luasan jenis batuan yang ada di Kabupaten Manggarai adalah 134.196,75249 ha. Data Geologi Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3. Data Geologi Kabupaten Manggarai

Jenis Batuan	Luas (Ha)
Aluvium marin muda (pasir pantai, kerikil)	5
Aluvium sungai-sungai muda; aluvium lempung tua; aluvium endapan bahan-bahan kipas	703
Aluvium sungai-sungai muda; aluvium marin estuarin; gambut	467
Aluvium vulkanik muda; koluvium; endapan-endapan bahan kipas aluvium	807
Andesit; basalt	16.107,00
Andesit; basalt; breksi; tefra berbutir halus; tefra berbutir kasar	5.541,00
Andesit; basalt; diorit; gabro	58.531,30
Basalt; andesit	8.037,00
Basalt; andesit; breksi	2.779,00
Batu gamping	456
Batu gamping; koral	33
Batu gamping; koral; marl; aluvium (endapan bahan kipas)	2.282,00
Batu gamping; marl	7.113,00

Jenis Batuan	Luas (Ha)
Batu gamping; marl; tefra berbutir halus	1.405,00
Batu gamping; tefra berbutir halus; marl	4.753,00
Endapan bahan-bahan kipas aluvium; aluvium vulkanik muda	1.700,00
Endapan bahan-bahan kipas aluvium; koluviium	8.385,00
Koral	1.010,00
Riolit; andesit	69
Tefra berbutir halus; tefra berbutir kasar	13.924,00
<b>Grand Total</b>	<b>134.107,3</b>

Sumber: Data KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

### B. Jenis Tanah

Usaha pertambangan di Kabupaten Manggarai belum begitu berkembang hingga saat ini. Namun, Kabupaten Manggarai memiliki potensi bahan tambang dan uap panas bumi yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah. Formasi geologi Kabupaten Manggarai sebagian besar terdiri dari batuan intrusi plutonik asam yang mencapai 48,84 persen.

Tabel 2. 4. Jenis Tanah di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Satar Mese	Andosol Vitrik	805,43847
		Gleisol	524,12838
		Kambisol Distrik	19.103,09458
		Kambisol Humik	3.332,39397
		<b>Total</b>	<b>23.765,05540</b>
2	Satar Mese Barat	Gleisol	169,60984
		Kambisol Distrik	14.278,6694875
		Renzina	964,34337
		<b>Total</b>	<b>15.412,6226975</b>
3	Satar Mese Utara	Kambisol Distrik	6.702,73362
		<b>Total</b>	<b>6.702,73362</b>
4	Langke Rembong	Andosol Eutrik	1.433,43131
		Kambisol Distrik	3.341,02355
		Kambisol Humik	3.332.39397
		<b>Total</b>	<b>8.106,84883</b>
5	Ruteng	Andosol Eutrik	995,10012
		Kambisol Distrik	6.244,14668
		Kambisol Humik	609.83734
		<b>Total</b>	<b>7.849,08414</b>
6	Wae Rii	Renzina	465,10304
		Kambisol Distrik	5.380.50435
		Latosol Humik	68,88190

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
		Total	5.914,48929
7	Lelak	Kambisol Distrik	5.208,21462
		Total	5.208,21462
8	Rahong Utara	Kambisol Distrik	4.441,28867
		Renzina	2.349,97291
		Total	6.791,26158
9	Cibal	Andosol Distrik	3.784,57539
		Kambisol Distrik	3.751,5944975
		Renzina	938,45757
		Total	8.474,6274575
10	Cibal Barat	Andosol Distrik	5.952,7315275
		Kambisol Distrik	5.895,59780
		Renzina	1.602,64820
		Total	13.450,9775275
11	Reok	Andosol Distrik	460,87632
		Kambisol Distrik	5.801,4604575
		Kambisol Ustik	1.705,52840
		Mediteran Haplik	32,563
		Renzina	879,7267
		Aluvial	460,87632
		Total	9.341,0311975
12	Reok Barat	Kambisol Distrik	8.663,63744
		Kambisol Ustik	1.278,90427
		Mediteran Haplik	2.279,09484
		Podsolik	3.397,52705
		Renzina	7.471,18504
		Total	23.090,34864
TOTAL			134.107,295

Sumber: Data KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Manggarai adalah berupa tanah andosol vitric, gleisol, kambisol distrik, kambisol humik, mediteran hapik, podsolik, dan alluvial. Kabupaten Manggarai memiliki potensi bahan galian, seperti pasir kuarsa, kaolin, ball clay, granit, dan gambut.

#### 2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Manggarai terdiri atas sumber-sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan, dan curah hujan. Topografi Kabupaten Manggarai sangat berpengaruh terhadap kondisi hidrologi yang ada. Sebagai daerah yang mempunyai topografi bergunung atau curam, air di Kabupaten Manggarai pada umumnya bersumber dari mata air yang di

kawasan pegunungan yang mengalir melalui sungai hingga daerah dataran. Terdapat beberapa sungai besar yang memiliki tipe aliran tahunan, di antaranya adalah Sungai Wae Pesi, Sungai Wae Nuring, dan Sungai Wae Renca yang bermuara di Pantai Utara (Kecamatan Reok). Selanjutnya yaitu Sungai Wae Naong, Sungai Wae Reno dan Sungai Wae Mese yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Pantai Selatan (Kecamatan Satar Mese). Sumber air permukaan atau sungai di Kabupaten Manggarai memiliki debit cukup besar sehingga keberadaannya sangat vital bagi Masyarakat di Kabupaten Manggarai. Sebagian besar alirannya bersumber dari mata air di Gunung Golo Lusang, Gunung Poco Ranaka, serta gunung-gunung lainnya.

Tabel 2. 5. Hidrologi Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Daerah DAS Yang Dialiri	Luas (Ha)
1	Satar Mese	DAS Bacal	1.773,73
		DAS Belang	463,33
		DAS Care	1.018,77
		DAS Koe Iteng	6.941,94
		DAS Mese	9.066,11
		DAS Nanas	1.511,38
		DAS Nawu	13,02
		DAS Nurur	1.062,61
		DAS Reo Waepesi	14,63
		DAS Tembang	356,74
		DAS Tilir Nangapaang	1.542,19
		<b>Total</b>	<b>23.764,46</b>
2	Satar Mese Barat	DAS Aweng	1.929,15
		DAS Berang	683,71
		DAS Buntar	3.138,38
		DAS Cinca Kantor Radi	132,78
		DAS Jamal	7,91
		DAS Laja	1.420,02
		DAS Laru	1.087,89
		DAS Mese	3.433,53
		DAS Nangakalo Rombok	1.159,41
		DAS P. Mules	1.801,72
		DAS Rokot Kenjoro	1.818,16
		DAS Wuang	889,17
		<b>Total</b>	<b>15.412,62</b>
3	Satar Mese Utara	DAS Jamal	293,02
		DAS Mese	6.409,71
		<b>Total</b>	<b>6.702,73</b>
4	Langke Rembong	DAS Mese	76,14

No	Kecamatan	Daerah DAS Yang Dialiri	Luas (Ha)
		DAS Nawu	14,99
		DAS Reo Waepesi	6.273,86
		<b>Total</b>	<b>6.364,98</b>
5	Ruteng	DAS Jamal	36,31
		DAS Mese	4.454,29
		DAS Reo Waepesi	3.358,49
		<b>Total</b>	<b>7.849,08</b>
6	Wae Rii	DAS Nawu	15,96
		DAS Reo Waepesi	6.338,14
		<b>Total</b>	<b>6.354,09</b>
7	Lelak	DAS Jamal	3.692,16
		DAS Mese	1.513,40
		DAS Reo Waepesi	2,65
		<b>Total</b>	<b>5.208,21</b>
8	Rahong Utara	DAS Reo Waepesi	6.791,26
		<b>Total</b>	<b>6.791,26</b>
9	Cibal	DAS Reo Waepesi	8.474,63
		<b>Total</b>	<b>8.474,63</b>
10	Cibal Barat	DAS Reo Waepesi	8.681,25
		<b>Total</b>	<b>8.681,25</b>
11	Reok	DAS Kedindi	1.270,01
		DAS Pogo	285,79
		DAS Reo Waepesi	6.477,47
		DAS Robek	1.243,00
		DAS Torongbesi	1.776,84
		<b>Total</b>	<b>9.341,03</b>
12	Reok Barat	DAS Nggilat	8.553,70
		DAS Pogo	1.238,63
		DAS Reo Waepesi	11.687,57
		DAS Robek	1.610,43
		<b>Total</b>	<b>23.090,32</b>
<b>TOTAL</b>			<b>134.107,30</b>

Sumber: Data KLHS RPJMD Kabupaten Mangarai 2021-2026

Kabupaten Manggarai terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai yakni DAS Bacal, DAS Belang, DAS Care, DAS Koe Iteng, DAS Mese, DAS Nanas, DAS Nawu, DAS Nurur, DAS Reo Waepesi, DAS Tembang, DAS Tilir Nangapaang, DAS Aweng, DAS Berang, DAS Buntar, DAS Jamal, DAS Laja, DAS Laru, DAS Nangkalorombok, DAS P.Mules, DAS Rokot Kenjoro, DAS Kendidi, DAS Pogo dan DAS Robek. Kestabilan kondisi DAS memegang peran sangat penting



dalam mendorong aktivitas masyarakat terutama di bidang pertanian tanaman pangan, budidaya perikanan, peternakan, dan/atau bidang lainnya.

2.1.1.5. Klimatologi

Kabupaten Manggarai mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau terjadi di bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan terjadi di bulan Desember hingga Maret. Kabupaten Manggarai memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bulan dengan curah hujan tinggi yakni Januari hingga April kemudian menurun di bulan Mei dan kembali naik di bulan November. Jika dilihat berdasarkan pola yang ada dari data 2016-2020, bulan Juli dan Agustus merupakan bulan dengan curah hujan terendah. Berikut adalah curah hujan tahunan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 hingga 2020:

Tabel 2. 6. Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Manggarai

Bulan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Curah hujan	Hari hujan	Curah hujan	Hari hujan	Curah hujan	Hari hujan	Curah hujan	Hari hujan	Curah hujan	Hari hujan
Januari	369,6	20	823,7	26	359,4	18	715,3	27	534	21
Pebruari	623,6	25	537,4	26	649,2	23	387,8	23	375	24
Maret	406,5	25	354,2	30	542,0	25	239,5	21	629	25
April	529,9	25	518,9	30	452,0	21	464,4	16	584	21
Mei	158,8	10	405,5	25	302,6	16	135,6	8	129	10
Juni	89,5	2	151,6	9	255,4	15	41,3	10	13	3
Juli	4,90	3	180,4	11	79,6	9	21,4	5	42	5
Agustus	Tidak terukur	1	131,3	12	86,4	10	13,5	6	0	1
September	12,0	2	464,1	23	130,7	12	127,0	10	63	6
Oktober	43,1	5	342,8	20	405,7	22	70,9	7	260	12
Nopember	216,8	19	408,3	23	748,6	29	406,4	24	456	24
Desember	376,8	20	581,7	24	468,2	29	480,4	23	404	23

Sumber: Badan Meteorologi Kilmatologi dan Geofisika Ruteng/Kab.Manggarai Dalam Angka 2020

Curah hujan tertinggi biasanya terjadi di bulan Januari sampai bulan Maret dengan jumlah hari hujan yang berbeda. Tahun 2016 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan 25 hari. Tahun 2017 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan hari hujan sebanyak 26 hari. Tahun 2018 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari

dengan jumlah hari hujan 23 hari; Tahun 2019 terjadi pada bulan Januari (25 hari), dan tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan jumlah hari hujan 25 hari.

Iklim di Kabupaten Manggarai yang memiliki curah hujan tinggi tentu disertai dengan cuaca ekstrim. Perubahan global terutama karena krisis iklim sangat berpengaruh dan dimungkinkan dapat menimbulkan bencana lain seperti terjadinya angin ribut, longsor ataupun banjir saat curah hujan tinggi.

Selain curah hujan aspek suhu menjadi salah satu komponen penyusun iklim. Suhu rata – rata di Kabupaten Manggarai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah antara 17° C sampai 22° C. Suhu ini tergolong dingin jika dibandingkan dengan rata-rata suhu di kabupaten sekitarnya. Berikut adalah data suhu rata – rata di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 7. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega, 2019 (suhu rata-rata)**

Bulan	Suhu Rata-Rata (°C) tahun 2016	Suhu Rata-Rata (°C) tahun 2017	Suhu Rata-Rata (°C) tahun 2018	Suhu Rata-Rata (°C) tahun 2019	Suhu Rata-rata(°C) tahun 2020
Januari	20,30	20,5	20,6	20,0	20,9
Pebruari	18,90	20,4	19,2	19,5	21,2
Maret	19,80	20,7	20,2	19,7	21,0
April	19,80	20,3	20,2	19,9	21,5
Mei	19,00	20,4	19,9	20,3	21,6
Juni	18,80	19,6	18,9	19,2	20,7
Juli	17,90	19,8	18,7	18,5	20,2
Agustus	19,10	19,5	19,7	19,4	20,3
September	20,50	20,3	20,9	20,0	20,8
Oktober	22,20	21,6	21,6	22,5	22,0
Nopember	21,60	21,3	20,7	21,9	21,8
Desember	21,30	20,5	20,3	21,0	22,1

Sumber: Badan Meteorologi Kilmatologi dan Geofisika Ruteng/Kab.Manggarai Dalam Angka 2020

Suhu rata-rata di Kabupaten Manggarai mengalami tren yang semakin meningkat. Artinya Kabupaten Manggarai semakin bertambah panas dari tahun 2016 hingga 2020. Suhu rata-rata ini dihitung dari perbandingan antara suhu terendah (minimum) dan suhu tertinggi (maksimum) pada setiap bulannya (Januari-Desember).

**Tabel 2. 8. Rata-rata Kecepatan Angin di Kabupaten Manggarai**

Bulan	Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2016	Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2017	Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2018	Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2019	Rata-Rata Kecepatan angin (knot) 2020
Januari	9,60	4,3	5,3	11,0	4,8
Pebruari	7,20	4,0	6,0	9,0	3,5
Maret	7,90	3,0	4,0	8,0	4,0
April	7,60	3,5	4,0	8,0	3,0
Mei	7,30	3,5	3,2	8,0	3,1
Juni	7,50	3,5	3,1	7,0	3,3
Juli	9,00	4,1	3,0	7,0	3,5
Agustus	8,00	3,9	4,0	7,0	3,9
September	10,00	4,1	4,2	8,0	3,9
Oktober	9,50	4,3	4,0	9,0	4,1
Nopember	8,00	4,0	3,0	9,0	3,1
Desember	9,00	5,2	3,0	9,0	2,8

Sumber: Badan Meteorologi Kilmatologi dan Geofisika Ruteng/Kab.Manggarai Dalam Angka 2020

Rata-rata kecepatan angin tiap bulan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Manggarai berkisar antara 2,8 knot sampai 110 knot. Rata-rata kecepatan angin ini menurun dari tahun 2016 hingga 2020. Perubahan suhu menjadi salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap rata-rata kecepatan angin di Kabupaten Manggarai.

### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan tutupan lahan yang telah dipengaruhi oleh aktivitas manusia di dalamnya. Tata guna lahan di Kabupaten Manggarai dibagi menjadi beberapa kategori pemanfaatan, yakni permukiman, bangunan, tambak, sungai, hutan, rawa, persawahan, perkebunan, sawah, padang rumput, dan lain-lain. Tabel berikut mencantumkan informasi rinci penggunaan lahan di Kabupaten Manggarai berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah:

Tabel 2. 9. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Manggarai

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (Ha)
<b>Bangunan</b>	<b>5,52</b>
Kec. Cibal	0,09
Kec. LangkeRembong	1,17
Kec. Lelak	0,34

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (Ha)
Kec. Rahong Utara	0,04
Kec. Reok	0,97
Kec. Reok Barat	0,09
Kec. Ruteng	1,77
Kec. SatarMese	0,71
Kec. SatarMese Barat	0,2
Kec. SatarMese Utara	0,03
Kec. WaeRii	0,11
<b>Hutan</b>	<b>29.639,57</b>
Kec. Cibal	834,88
Kec. Cibal Barat	346,19
Kec. LangkeRembong	1.518,05
Kec. Lelak	517,05
Kec. Rahong Utara	28,84
Kec. Reok	2.020,77
Kec. Reok Barat	8.717,79
Kec. Ruteng	566,59
Kec. SatarMese	8.795,57
Kec. SatarMese Barat	4.186,56
Kec. SatarMese Utara	1.613,11
Kec. WaeRii	494,16
<b>Hutan Bakau</b>	<b>100,15</b>
Kec. Reok	15,53
Kec. Reok Barat	70,32
Kec. SatarMese	14,3
<b>Kolam Ikan</b>	<b>65,86</b>
Kec. Reok	55,55
Kec. Reok Barat	10,31
<b>Ladang</b>	<b>26.739,68</b>
Kec. Cibal	3.187,83
Kec. Cibal Barat	1.939,42
Kec. LangkeRembong	1.553,18
Kec. Lelak	1.238,50
Kec. Rahong Utara	2.307,30
Kec. Reok	1.370,21
Kec. Reok Barat	2.694,53
Kec. Ruteng	2.840,96
Kec. SatarMese	3.768,91
Kec. SatarMese Barat	2.169,55
Kec. SatarMese Utara	1.180,52
Kec. WaeRii	2.488,79
<b>Padang Rumput</b>	<b>7.208,53</b>
Kec. Cibal	260,36
Kec. Cibal Barat	386,56

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (Ha)
Kec. LangkeRembong	134,72
Kec. Lelak	393,5
Kec. Rahong Utara	239,97
Kec. Reok	407,06
Kec. Reok Barat	2.802,73
Kec. Ruteng	122,45
Kec. SatarMese	714,91
Kec. SatarMese Barat	1.550,70
Kec. SatarMese Utara	100,22
Kec. WaeRii	95,36
<b>Pasir Laut</b>	<b>311,81</b>
Kec. Reok	311,8
Kec. Reok Barat	0
Kec. SatarMese Barat	0,01
<b>Pemukiman</b>	<b>2.723,04</b>
Kec. Cibal	228,91
Kec. Cibal Barat	174,48
Kec. LangkeRembong	684,62
Kec. Lelak	65,92
Kec. Rahong Utara	185,64
Kec. Reok	155,33
Kec. Reok Barat	101,23
Kec. Ruteng	381,35
Kec. SatarMese	269,61
Kec. SatarMese Barat	122,73
Kec. SatarMese Utara	86,04
Kec. WaeRii	267,18
<b>Pengisi Area Air</b>	<b>558,03</b>
Kec. Cibal	82,08
Kec. Cibal Barat	70,83
Kec. LangkeRembong	5,42
Kec. Lelak	11,73
Kec. Rahong Utara	60,74
Kec. Reok	96,41
Kec. Reok Barat	31,02
Kec. Ruteng	13,39
Kec. SatarMese	84,85
Kec. SatarMese Barat	11,12
Kec. SatarMese Utara	40
Kec. WaeRii	50,43
<b>Perkebunan</b>	<b>3.865,76</b>
Kec. Cibal	375,58
Kec. Cibal Barat	385,33
Kec. LangkeRembong	176,23

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (Ha)
Kec. Lelak	80,18
Kec. Rahong Utara	368,3
Kec. Reok	468
Kec. Reok Barat	259,6
Kec. Ruteng	264,49
Kec. SatarMese	847,65
Kec. SatarMese Barat	414,41
Kec. SatarMese Utara	92,2
Kec. WaeRii	133,79
<b>Sawah Irigasi</b>	<b>1.772,51</b>
Kec. Cibal	74,96
Kec. Cibal Barat	16,69
Kec. LangkeRembong	402,92
Kec. Rahong Utara	68,96
Kec. Reok	137,6
Kec. Reok Barat	3,57
Kec. Ruteng	607,47
Kec. SatarMese	306,93
Kec. SatarMese Barat	33,46
Kec. SatarMese Utara	38,71
Kec. WaeRii	81,24
<b>Sawah Tadah Hujan</b>	<b>8.568,44</b>
Kec. Cibal	1.100,48
Kec. Cibal Barat	485,53
Kec. LangkeRembong	621,12
Kec. Lelak	362,98
Kec. Rahong Utara	646,16
Kec. Reok	275,35
Kec. Reok Barat	201,31
Kec. Ruteng	1.202,62
Kec. SatarMese	1.391,73
Kec. SatarMese Barat	840,66
Kec. SatarMese Utara	256,28
Kec. WaeRii	1.184,21
<b>Semak Belukar</b>	<b>52.530,44</b>
Kec. Cibal	4.170,78
Kec. Cibal Barat	4.876,07
Kec. LangkeRembong	1.200,12
Kec. Lelak	2.537,84
Kec. Rahong Utara	2.885,19
Kec. Reok	5.698,14
Kec. Reok Barat	8.186,72
Kec. Ruteng	1.847,98
Kec. SatarMese	7.734,76

Penggunaan Lahan Per Kecamatan	Luas (Ha)
Kec. SatarMese Barat	6.514,04
Kec. SatarMese Utara	4.899,64
Kec. WaeRii	1.979,16
<b>Tanah Berbatu</b>	<b>16,66</b>
Kec. LangkeRembong	12,85
Kec. Reok	0,59
Kec. SatarMese	3,22
<b>Tanah Rawa</b>	<b>9,01</b>
Kec. SatarMese	9,01
<b>Tanggul Pasir</b>	<b>9</b>
Kec. Reok	3,23
Kec. SatarMese Barat	5,77
<b>Grand Total</b>	<b>134.124,00</b>

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai 2019

Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Manggarai didominasi oleh semak belukar, yaitu seluas 52.530,44 Ha, hutan seluas 29.639,57 Ha, dan ladang seluas 26.739,68 Ha. Penggunaan lahan yang paling sedikit adalah lahan terbangun, yakni seluas 5,52 ha, tanah pasir seluas 9 ha, dan tanah rawa seluas 9,01 ha.

Proporsi lahan terbangun dibandingkan lahan non terbangun kecuali hutan dan area konservasi atau daerah lindung lainnya masih sangat kecil. Artinya, Kabupaten Manggarai masih memiliki lahan non terbangun berupa tanah kosong dan semak belukar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Kabupaten Manggarai. Masih luasnya lahan non terbangun (diluar daerah lindung dan kawasan konservasi) ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk ekspansi industri, pemanfaatan untuk kawasan pemukiman, usaha pertanian, persawahan, perkebunan, dan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang cenderung lambat juga menjadi sebab dari belum optimalnya pemanfaatan lahan.

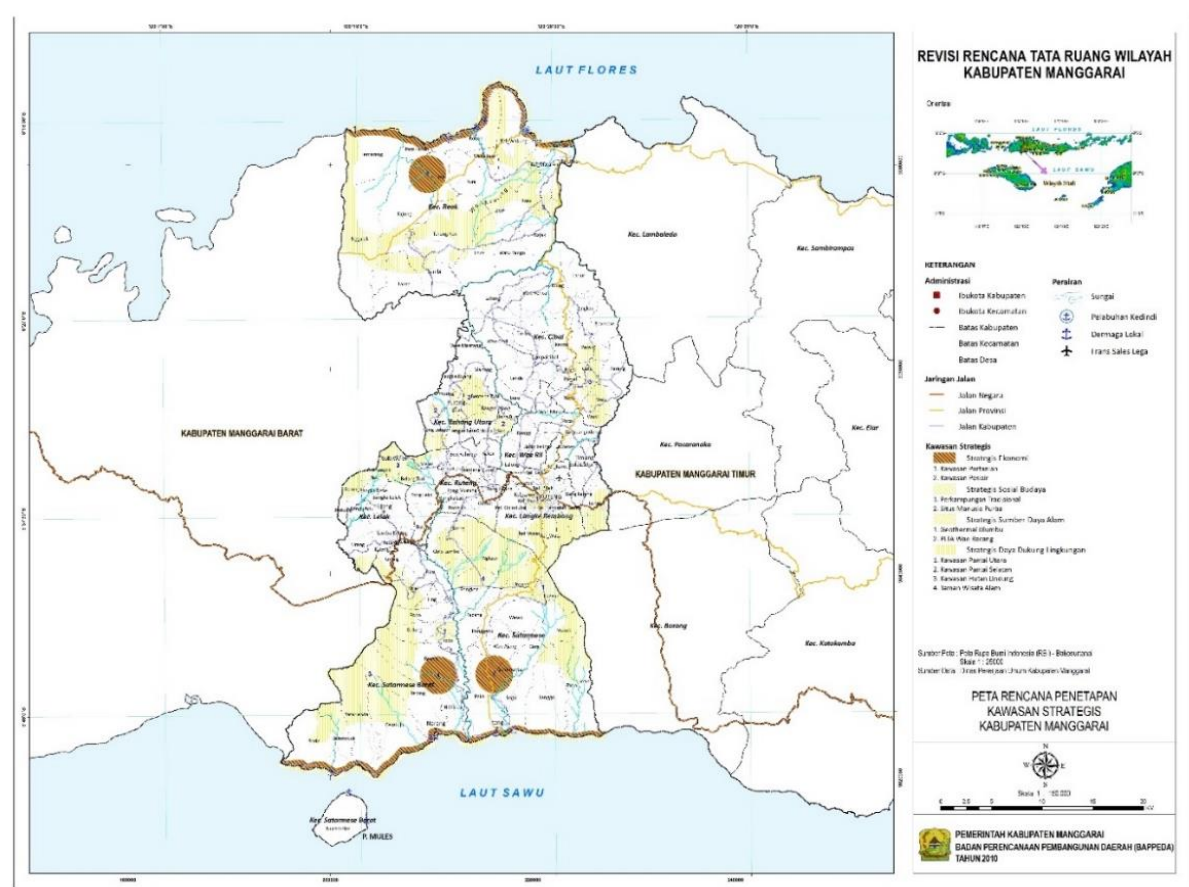
### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032, berbagai kegiatan pemanfaatan kawasan dan penggunaan lahan disesuaikan dengan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah yang telah ditetapkan dan meliputi dua kawasan, yakni kawasan lindung dan kawasan

budidaya. Keduanya bermanfaat sebagai basis untuk menentukan arah pembangunan berbasis kawasan. Berikut adalah deskripsi kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Manggarai:

2.1.2.1. Kawasan Lindung

Kabupaten Manggarai merupakan kawasan yang sangat strategis secara nasional, regional dan internasional. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan di Kabupaten Manggarai lebih mengutamakan pembangunan wilayah yang berpedoman pada perencanaan tata ruang yang merupakan perwujudan dan penyempurnaan dari struktur ruang wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai faktor lingkungan strategis yang dinilai mempengaruhi perkembangan Kota Ruteng secara keseluruhan telah diperhitungkan dalam penataan ruang. Rencana tata ruang yang dikembangkan oleh Kabupaten Manggarai meliputi tiga struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem jaringan infrastruktur utama, dan sistem jaringan infrastruktur lainnya.



Gambar 2. 2. Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Manggarai  
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Manggarai



Gambar di atas merupakan peta dari pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Manggarai. Sistem pusat kegiatan terdiri dari pusat kegiatan regional, pusat kegiatan lokal, pusat layanan regional, dan pusat jasa lingkungan. Sistem jaringan prasarana utama terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan transportasi udara, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

#### **2.1.2.2. Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya di Kabupaten Manggarai terdiri dari kawasan budidaya kehutanan, budidaya non-kehutanan dan budidaya non-pertanian dan kehutanan. Kawasan-kawasan ini harus diperhatikan dan dijadikan acuan dalam pembuatan arah kebijakan di RPJMD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah. Berikut adalah berbagai jenis kawasan budidaya di Kabupaten Manggarai:

##### **1. Kawasan Budidaya Kehutanan;**

##### **2. Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK);**

###### **Kawasan Peruntukan Kelautan, Perikanan dan Pesisir**

- a. Kawasan perikanan budidaya air tawar  
Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Ruteng, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat.
- b. Kawasan perikanan tangkap  
Wilayah perairan Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Reok dan Kecamatan Reok Barat.
- c. Kawasan peruntukan perikanan budidaya laut  
Wilayah perairan Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Reok dan Kecamatan Reok Barat.
- d. Kawasan peruntukan budidaya pesisir  
Kawasan budidaya air payau dan sawah garam
- e. Kawasan peruntukan budidaya air payau  
Kawasan pesisir Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Satar Mese, dan Kecamatan Satar Mese Barat

## **Kawasan Peruntukan Pertanian**

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan
  - Kecamatan Reok dengan luasan kurang lebih 23.326 ha;
  - Kecamatan Cibal dengan luasan kurang lebih 3.769 ha;
  - Kecamatan Wae Rii dengan luasan kurang lebih 4.004 ha;
  - Kecamatan Langke Rembong dengan luasan kurang lebih 1.522 ha;
  - Kecamatan Ruteng dengan luasan kurang lebih 1.439 ha;
  - Kecamatan Rahong Utara dengan luasan kurang lebih 530 ha;
  - Kecamatan Lelak dengan luasan kurang lebih 769 ha;
  - Kecamatan Satar Mese dengan luasan kurang lebih 6.200 ha; dan
  - Kecamatan Satar Mese Barat dengan luasan kurang lebih 3.451 ha.
- b. Kawasan pertanian hortikultura
  - Kecamatan Reok dengan luasan kurang lebih 20.000 ha;
  - Kecamatan Cibal dengan luasan kurang lebih 2.000 ha;
  - Kecamatan Wae Rii dengan luasan kurang lebih 300 ha;
  - Kecamatan Langke Rembong dengan luasan kurang lebih 40 ha;
  - Kecamatan Ruteng dengan luasan kurang lebih 300 ha;
  - Kecamatan Rahong Utara dengan luasan kurang lebih 125 ha;
  - Kecamatan Lelak dengan luasan kurang lebih 150 ha;
  - Kecamatan Satar Mese dengan luasan kurang lebih 3.000 ha; dan
  - Kecamatan Satar Mese Barat dengan luasan kurang lebih 162 ha.
- c. Kawasan perkebunan
  - Kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 2.229 ha;
  - Kawasan perkebunan kopi robusta, terdapat di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 450 ha;
  - Kawasan perkebunan kopi arabika, terdapat di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 1.500 ha;
  - Kawasan perkebunan vanili, terdapat di Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Cibal, Kecamatan Reok, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat dan Kecamatan Lelak dengan luas kurang lebih 115 ha;
  - Kawasan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Cibal,

Kecamatan Reok, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas kurang lebih 2.760 ha;

- Kawasan perkebunan kelapa, terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas kurang lebih 1.400 ha;
- Kawasan perkebunan kemiri, terdapat di Kecamatan Cibal, Reok, Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas kurang lebih 350 ha; dan
- Kawasan perkebunan jambu mete, terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dengan luas kurang lebih 1.350 ha.

d. Kawasan peternakan

- Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Reok sebagai kawasan pengembangan ternak besar, unggas dan ternak kecil terbatas dengan luas kurang lebih 30.399 ha; dan
- Kecamatan Cibal, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Ruteng sebagai kawasan pengembangan ternak kecil, unggas dan ternak besar terbatas dengan luas kurang lebih 8.675 ha.

### **3. Kawasan Budidaya Non-Pertanian dan Kehutanan.**

#### **Kawasan peruntukan pariwisata**

Berikut adalah data potensi Kawasan peruntukan Pariwisata Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2021 - 2025.

1. Destinasi Pariwisata Kawasan Pantai utara dan sekitarnya.

- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Reok dan sekitarnya sebagai ekowisata berbasis pesisir pantai.
- Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Torong Besi dan sekitarnya.
- Daya Tarik Wisata :

- a. Alam yaitu Pantai Torong Besi, Pantai sengari, Pantai Ketebe, Pantai Nanga Banda, Pantai Robek, Tengku Romot, Kali Wae Pesi di Kecamatan Reok.  
Hutan Mangrove Lemarang, Air Terjun Tengku Siwa dan Gua Kali wae Kuli di Kecamatan Reok Barat.
  - b. Budaya yaitu Gua Maria Torong Besi, Gereja Tua Jengkalang dan Situs Sejarah Tiwu Wali di Kecamatan Reok.
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Cibal dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata budaya dan heritage
  - Daya Tarik Wisata:
    - a. Alam yaitu Liang Woja, Danau Wae Kebong dan Watu Heping di Kecamatan Cibal  
Air Terjun Pangka Dari di Kecamatan Cibal Barat
    - b. Budaya yaitu Gereja Pagal, Gua Maria Golo Cuwing, Tempat Doa St. Benediktus, Watu lanur dan Gua Maria Liang Rakeng di Kecamatan Cibal.  
Compang Cibal di Kecamatan Cibal Barat.
- 2. Destinasi Pariwisata Kawasan Ruteng dan Sekitarnya
  - A. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Langke Rembong dan Wae Rii sebagai Wisata Budaya.
    - Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Ruteng Puu dan sekitarnya
    - Daya Tarik Wisata:
      - a. Alam yaitu Taman Wisata Alam Ruteng, Wae Garit, Danau Mbeang Ledas, Pong Panas Taga dan Golo Lusang di Kecamatan Wae Rii Langke Rembong.  
Gunung Ranaka di Kecamatan Wae Rii
      - b. Budaya yaitu 38 Rumah Gendang, Kampung Ruteng Puu, Gereja St. Yoseph, Mbaru Wunut, Gua Maria Golo Curu, Lingko Ratung dan Bangka Tuke di Kecamatan Langke Rembong.
  - B. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Golo Timur dan Lelak sebagai Kawasan Pariwisata Perkotaan.
    - Daya Tarik Wisata:

- a. Alam yaitu pemandangan Alam Golo Timur di Kecamatan Ruteng. Tiwu Tara dan Cunca Tara di Kecamatan Ielak
  - b. Budaya yaitu Lodok Lingko Meler di Kecamatan Ruteng
  - c. Buatan yaitu Agromina Dalo Paradise di Kecamatan Ruteng. Villa Alam Flores di Kecamatan Ielak
- C. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Rahong Utara sebagai Kawasan Wisata Alam yang rekreatif dan edukatif.
  - Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Liang Bua dan sekitarnya
  - Daya Tarik Wisata:
    - a. Alam yaitu Situs Sejarah Purbakala Liang Bua, Air Terjun Tengku Lese, Air Terjun Tongke, Cunca Ruca, Liang Rondep dan Watu Benta di Kecamatan Rahong Utara
    - b. Budaya yaitu Makam Motang Rua di Kecamatan Rahong Utara.
- 3. Kawasan Pantai Selatan dan Sekitarnya.
  - A. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Kampung Todo dan sekitarnya sebagai Kawasan Ekowisata Tradisional.
    - Daya Tarik Wisata:
      - a. Alam yaitu Kali Wae Maras dan Pemandangan Alam Todo di Kecamatan Satarmese Utara.
      - b. Budaya yaitu Kampung Todo dan Compang Popo di Kecamatan Satarmese Utara.
  - B. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Satarmese dan Sekitarnya sebagai Kawasan Ekowisata berbasis Rekreasi dan Petualangan.
    - Daya Tarik Wisata :
      - a. Alam yaitu Hutan Inembele, Air Panas Ulumbu, Kawasan Poco Leok di Kecamatan Satarmese
      - b. Budaya yaitu Niang Pongkor dan Benteng Pongkor di Kecamatan Satarmese.
      - c. Buatan yaitu Nanga Woja di Kecamatan Satarmese
  - C. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Satarmese Barat dan Sekitarnya sebagai Kawasan Ekowisata Tradisional dan Kawasan

Pesisir Pantai.

- Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Wae Rebo dan Sekitarnya
- Daya Tarik Wisata :
  - a. Alam yaitu Kawasan Hutan Todo TRK-14, Pantai Dintor, Pantai Borik dan Pantai Wae Maras, Nanga Ramut dan Watu Nase di Kecamatan Satarmese Barat
  - b. Budaya yaitu Kampung Adat Wae Rebo dan Benteng Tureng di Kecamatan Satarmese Barat
- Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Pulau Mules dan Sekitarnya
- Daya Tarik Wisata :

Alam yaitu Pantai Mules dan Bukit Pulau Mules di Kecamatan Satarmese Barat.

#### **Kawasan peruntukan industri**

- b. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas:
  - Industri kopi di Kecamatan Langke Rembong; dan
  - Industri air minum di Kecamatan Langke Rembong.
- c. Kawasan peruntukan industri mikro, terdiri atas:
  - Industri pengolahan hasil pertanian di semua kecamatan;
  - Industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Reok dan Kecamatan Satar Mese;
  - Industri tenun di Kecamatan Cibal dan Kecamatan Satar Mese Barat; dan
  - Industri mebel di semua kecamatan.

#### **Kawasan peruntukan pertambangan**

- 1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara, meliputi antara lain:
  - Sirtu terdapat di Wae Pesi Desa Bajak dan Desa Salama Kecamatan Reok dan Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Rii;
  - Andesit terdapat di Desa Wae Rii Kecamatan Wae Rii dan Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng;

- Tras terdapat di Tuke Nikit Desa Poco Likang Kecamatan Ruteng, di Wae Lengkas Kecamatan Langke Rembong, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Desa Umung Kecamatan Satar Mese dan Desa Cireng Kecamatan Satar Mese Barat;
  - Lempung terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat;
  - Gamping terdapat di Kecamatan Reok, Kecamatan Cibal dan Kecamatan Ruteng;
  - Zeolit terdapat di Kecamatan Reok;
  - Mangan terdapat di Ropang dan Ojang Desa Lante, Ngancar Desa Bajak, Wae Beci Desa Ruis, Desa Watu Tango, Desa Robek, Sambor Desa Nggalak, Wangkal Desa Kajong, Desa Lemarang, Kampung Baru Desa Paralando Kecamatan Reok dan Timbang Kecamatan Cibal;
  - Emas terdapat di Desa Lante, Kajong dan Desa Nggalak Kecamatan Reok;
  - Timah terdapat di Keka Desa Golomuntas Kecamatan Satar Mese; dan
  - Pasir Besi terdapat di sepanjang pantai selatan Kecamatan Satar Mese dan antara lain Satar Mese Barat.
- 2) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, terdapat di Ulumbu Desa Wewo Kecamatan Satar Mese dan Wae Pesi Kecamatan Reok.

### **Kawasan peruntukan permukiman**

- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan antara lain:
  - Ruteng dengan luas kurang lebih 3.884,6 ha;
  - Reok dengan luas kurang lebih 282 ha;
  - Pagal dengan luas kurang lebih 249 ha; dan
  - Cancar dengan luas kurang lebih 323 ha.
- b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan antara lain :
  - Iteng dengan luas kurang lebih 449 ha;
  - Narang dengan luas kurang lebih 870 ha;
  - Rejeng dengan luas kurang lebih 677 ha;
  - Timung dengan luas kurang lebih 868 ha;

- Purang dengan luas kurang lebih 538 ha.

**Kawasan peruntukan lainnya**

Kawasan peruntukan lainnya, yaitu kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1612/Manggarai yang berada di Kecamatan Langke Rembong;
- b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) 1612-01/Ruteng yang berada di Kecamatan Langke Rembong, KORAMIL 1612-03/Reok di Kecamatan Reok dan KORAMIL 1612-7/Satar Mese di Kecamatan Satar Mese;
- c. Pos Bantuan bimbingan masyarakat (Babinsa) Cancar di Kecamatan Ruteng, Pos Babinsa Wae Rii di Kecamatan Wae Rii dan Pos Babinsa Cibal di Kecamatan Cibal;
- d. Kepolisian Resor (Polres) Manggarai di Kecamatan Langke Rembong;
- e. Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Reok, Cibal dan Kecamatan Satar Mese; dan
- f. Pos Polisi (Pospol) di Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Ruteng.

**2.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Manggarai merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dan topografis beragam sehingga terdapat kemungkinan untuk mengalami beberapa jenis bencana. Klasifikasi bencana tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana sosial. Berikut adalah deskripsi wilayah rawan bencana di Kabupaten Manggarai:

**2.1.3.1. Bencana Alam**

Beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Manggarai adalah gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan gunung berapi (mengingat wilayah Kabupaten Manggarai termasuk dalam busur vulkanik dalam kalkalkalin yang sampai saat ini masih aktif). Selain itu, terdapat juga bencana yang diakibatkan gelombang pasang, tsunami, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Berikut adalah wilayah rawan bencana per-Kecamatan:

**Tabel 2. 10. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Manggarai**



No	Jenis Bencana Alam	Kecamatan
1	Banjir	Reok, Reok Barat, Cibal, Cibal Barat, Rahong Utara, Satar Mese Barat, Satar Mese, Langke Rembong, Ruteng, Wae Rii
2	Kebakaran	Semua kecamatan (karena terdapat hutan lindung)
3	Tanah longsor	Cibal, Cibal Barat, Ruteng, Rahong Utara, Wae Rii, Langke Rembong, Satar Mese
4	Gempa bumi	Semua kecamatan
5	Gunung api	Langke Rembong, Wae Rii, Satar Mese
6	Tsunami	Reok, Reok Barat, Satar Mese Barat, Satar Mese
7	Kekeringan	Reok, Rahong Utara, Satar Mese Barat, Lelak, Reok Barat, Cibal Barat
8	Puting beliung	Reok, Cibal, Cibal Barat, Rahong Utara, Satarmese Barat, Satar Mese, Langke Rembong, Ruteng, Lelak

Sumber Data: BPBD Kab. Manggarai tahun 2020

Bencana banjir, kebakaran, tanah longsong dan putting beliung adalah jenis bencana terbanyak yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Manggarai. Jenis bencana alam dan identifikasi wilayah kecamatan ini membantu bagi daerah untuk mempersiapkan intervensi kebijakan dengan memperhatikan aspek kewilayahan. Berbagai jenis bencana ini harus diidentifikasi dan ditanggulangi dengan baik agar dampaknya dapat diminimalkan.

### 2.1.3.2. Bencana Sosial

Bencana sosial perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Manggarai, terutama wabah penyakit (epidemi) dan konflik sosial perebutan batas tanah, serta masalah tanah perorangan maupun kelompok. Jenis bencana ini dapat berpengaruh terhadap kohesivitas sosial, sumber daya manusia dan ekonomi. Berikut adalah jenis kawasan yang teridentifikasi sering terdapat bencana sosial di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 11. Desa/Kelurahan Rawan Epidemi di Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Desa/kelurahan
1	Reok	Semua Desa/Kelurahan
2	Reok Barat	Semua Desa/Kelurahan
3	Satar Mese	Semua Desa/Kelurahan
4	Satar Mese Barat	Semua Desa/Kelurahan
5	Satar Mese Utara	Semua Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Desa/kelurahan
6	Cibal	Semua Desa/Kelurahan
7	Cibal Barat	Semua Desa/Kelurahan
8	Ruteng	Semua Desa/Kelurahan
9	Lelak	Semua Desa/Kelurahan
10	Wae Rii	Semua Desa/Kelurahan
11	Langke Rembong	Semua Desa/Kelurahan
12	Rahong Utara	Semua Desa/Kelurahan

Sumber data: BPBD Kab. Manggarai tahun 2020

Bencana sosial hampir teridentifikasi di semua kecamatan, desa atau kelurahan. Identifikasi ini dilakukan sebagai dasar kebijakan deteksi dini dan pemetaan intervensi. Salah satu bencana sosial yang mungkin terjadi adalah konflik. Berikut adalah data mengenai desa atau kelurahan rawan konflik di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 12. Desa/Kelurahan Rawan Konflik di Kabupaten Manggarai**

No	Kecamatan	Desa/kelurahan
1	Reok	Kel. Wangkung, Desa Salama
2	Langke Rembong	Kel. Carep, Kel. Satar Tacik, Kel. Tenda dan Kel Pitak
3	Satar Mese	Desa Tal, Desa Paka
4	Satar Mese Barat	-
5	Lelak	Desa Bangka Dese
6	Cibal	Desa Pinggang
7	Rahong Utara	-
8	Ruteng	Desa Bulan, Desa Bea Rahong
9	Wae Rii	Desa Bangka Kenda
10	Reok Barat	-
11	Cibal Barat	Desa Golo Woi
12	Satar Mese Utara	-

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Manggarai tahun 2020

Konflik hampir teridentifikasi di berbagai kecamatan kecuali Kecamatan Satar Mese Barat, Rahong Utara, Reok Barat dan Satar Mese Utara. Konflik ini harus diidentifikasi untuk memetakan langkah pencegahan dan penanggulangan. Kedua upaya pengelolaan konflik tersebut harus dijalankan dengan baik.

2.1.4. Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan. Pembahasan ilmu ini melingkupi jumlah, persebaran teritorial, struktur atau komposisi, dan perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sub-bab demografi memuat analisa penting terkait proses pembangunan. Kondisi demografis Kabupaten Manggarai secara umum dapat disimpulkan oleh dua indikator utama yakni jumlah penduduk dan struktur penduduk. Berikut adalah beberapa indikator demografi di Kabupaten Manggarai:

2.1.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai saat ini adalah 342.908 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan. Kecamatan Langke Rembong memiliki penduduk yang terbanyak sebesar 87.792 jiwa pada tahun 2020; sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Lelak, yakni sebesar 11.311 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kabupaten Manggarai menurut kecamatan tahun 2016 hingga 2020:

Tabel 2. 13. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Satar Mese	33.386	33.829	34.219	37.418	34.939
2	Satar Mese Barat	18.571	18.796	18.991	20.774	19.348
3	Satar Mese Utara	12.779	12.741	12.680	16.465	12.535
4	Langke Rembong	79.150	81.375	83.517	67.355	87.792
5	Ruteng	41.636	42.054	42.402	45.422	43.019
6	Wae Rii	29.640	30.327	30.976	31.066	32.249
7	Lelak	11.196	11.245	11.275	13.331	11.311
8	Rahong Utara	22.617	22.926	23.202	24.877	23.712
9	Cibal	25.965	26.264	26.521	28.288	26.985
10	Cibal Barat	14.028	14.054	14.056	16.469	14.032
11	Reok	20.242	20.537	20.799	20.847	21.292
12	Reok Barat	14.804	15.050	15.274	15.952	15.694
Total		324.014	329.198	333.912	338.264	342.908

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar 5,5 %. Rata-rata persentase laju pertumbuhan

penduduk bervariasi dan mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Perpindahan penduduk dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap populasi penduduk memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel persentase laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai tahun 2010-2019:

**Tabel 2. 14. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Tahun)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2010	2018	2019	2010-2018	2018-2019
1	Satar Mese	30.728	34.219	37.418	1,35	- 4,70
2	Satar Mese Barat	17.207	18.991	20.774	1,24	- 4,68
3	Satar Mese Utara	12.960	12.680	16.465	-0,27	- 4,97
4	Langke Rembong	66.759	83.517	67.355	2,84	-11,04
5	Ruteng	39.061	42.402	45.422	1,03	-6,60
6	Wae Rii	25.737	30.976	31.066	2,34	-2,11
7	Lelak	10.863	11.275	13.331	0,47	-5,99
8	Rahong Utara	20.758	23.202	24.877	1,40	-4,89
9	Cibal	24.146	26.521	28.288	1,18	-2,86
10	Cibal Barat	13.816	14.056	16.469	0,22	-2,28
11	Reok	18.492	20.799	20.847	1,48	-6,01
12	Reok Barat	13.361	15.274	15.952	1,69	-1,01
Total		293.888	333.912	338.264	1,61	-5,79

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020*

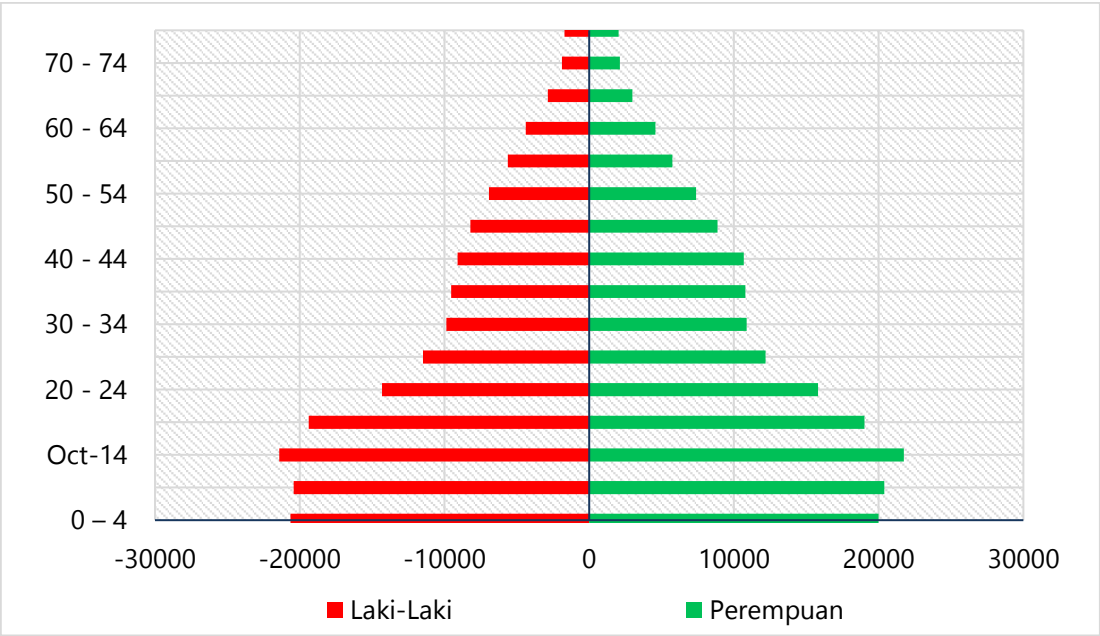
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai per tahun pada periode 2010-2018 adalah 1,61%. Persentase tersebut mengalami penurunan pada periode 2018-2019 sebesar 0,26% menjadi 1,35%. Faktor kelahiran dan kematian sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai.

#### 2.1.4.2. Struktur Penduduk

Struktur penduduk suatu daerah adalah komposisi penduduk yang dikelompokkan berdasarkan kategori jenis kelamin dan umur. Struktur penduduk selalu dinamis seiring terjadinya kelahiran dan kematian. Berikut

adalah tabel struktur penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan jenis kelamin dan umur pada tahun 2016-2020:

**Grafik 2. 1. Struktur Penduduk Kabupaten Manggarai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020**



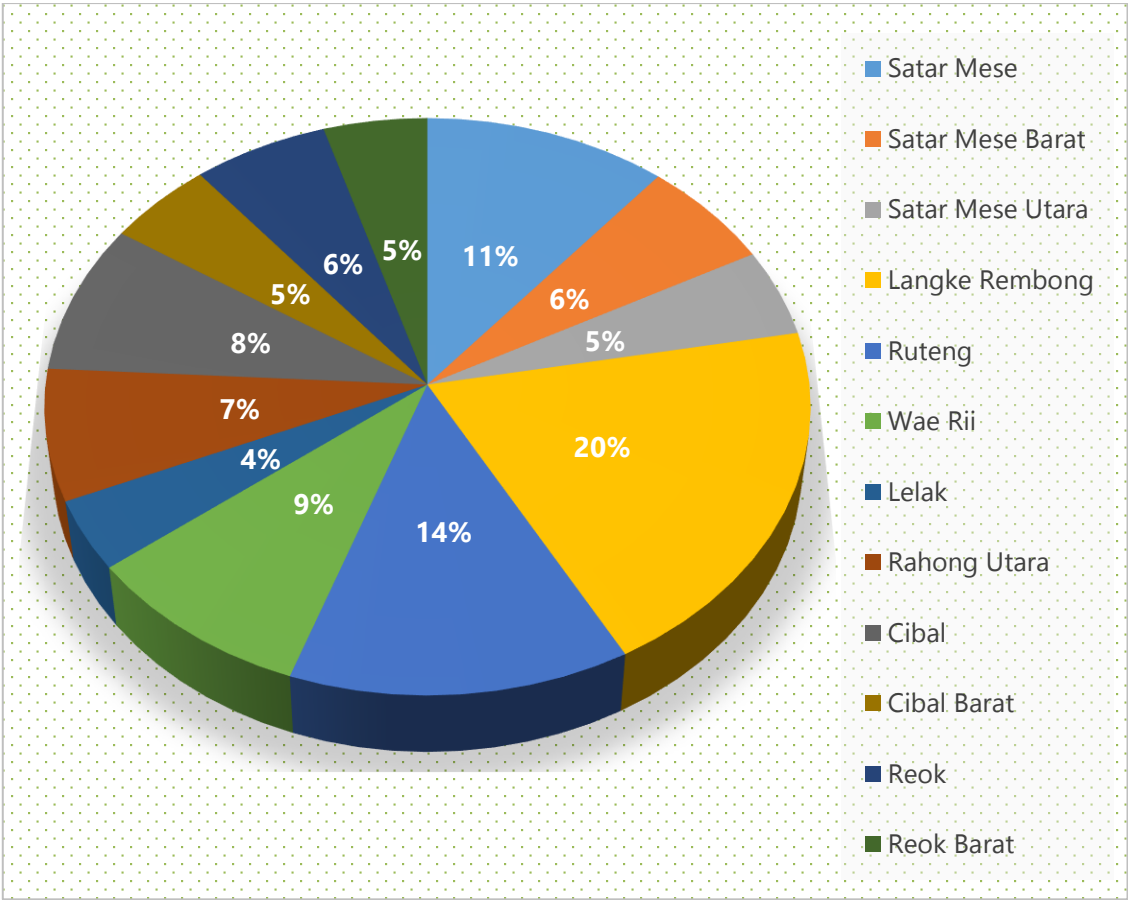
Sumber Data: BPS Kabupaten Manggarai 2020

Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Manggarai lebih banyak dari penduduk laki-laki di semua kelompok usia kecuali 55-59 tahun dari periode 2016 hingga 2020. Total persentase penduduk perempuan adalah sebesar 51,1%. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai berusia 0-14 tahun yakni sebesar 37%, diikuti oleh usia 15-29 tahun sebesar 26% dan usia 30-49 tahun sebesar 23%. Tidak ada kesenjangan signifikan antara kelompok usia produktif dengan non-produktif di kabupaten ini. Piramida penduduk Kabupaten Manggarai adalah piramida penduduk muda (kategori ekspansif) yang menandakan tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian bayi. Piramida ini juga menunjukkan cepatnya pertumbuhan penduduk.

**2.1.4.3. Distribusi Penduduk**

Sebaran penduduk di suatu daerah dapat ditunjukkan oleh data distribusi penduduk. Konteks Kabupaten Manggarai, daya dukung dan daya tampung setiap kecamatan dapat diketahui dengan melakukan analisa distribusi penduduk. Berikut adalah grafik distribusi penduduk Kabupaten Manggarai pada tahun 2019:

Grafik 2. 2. Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020

Persebaran penduduk di Kabupaten Manggarai yang terbesar berada di Kecamatan Langke Rembong, Ruteng dan Satar Mese. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai. Persebaran penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Lelak. Kondisi geografis dan pembangunan ekonomi sangat berpengaruh terhadap persebaran penduduk di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel mengenai distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Manggarai tahun 2019:

Tabel 2. 15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas wilayah (Km2)	Kepadatan penduduk (jiwa/per Km2)
Satar Mese	37.418	298,80	125,23
Satar Mese Barat	20.774	199,93	103,91
Satar Mese Utara	16.465	179,00	91,98
Langke Rembong	67.355	60,54	1.112,57

Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas wilayah (Km2)	Kepadatan penduduk (jiwa/per Km2)
Ruteng	45.422	136,26	333,35
Wae Rii	31.066	129,89	239,17
Lelak	13.331	64,64	206,23
Rahong Utara	24.877	131,95	188,53
Cibal	28.288	139,94	202,14
Cibal Barat	16.469	118,95	138,45
Reok	20.847	236,80	88,04
Reok Barat	15.952	399,74	39,91
Jumlah	338.264	2.096,44	161,35

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020

Kepadatan penduduk di setiap kecamatan cenderung timpang dan terkonsentrasi di Kota Ruteng, kecamatan Langke Rembong, yang merupakan kawasan pusat kota dan pusat pemerintahan Hal ini terjadi akibat Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai cukup tinggi pada periode 2017 – 2018, yakni sebesar 1,43 % dan sedikit mengalami perlambatan sebesar 0.08% pada periode 2018 – 2019 menjadi 1,35 %. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 20% dari total populasi meski luas wilayah kecamatan Langke Rembong adalah yang tersempit.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya serta olahraga. Berbagai indikator makro di masing-masing fokus tersebut pada umumnya dapat dijadikan dasar bagi permusuan isu strategis daerah. Berikut adalah gambaran tentang ketiga fokus dari aspek kesejahteraan masyarakat tersebut:

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

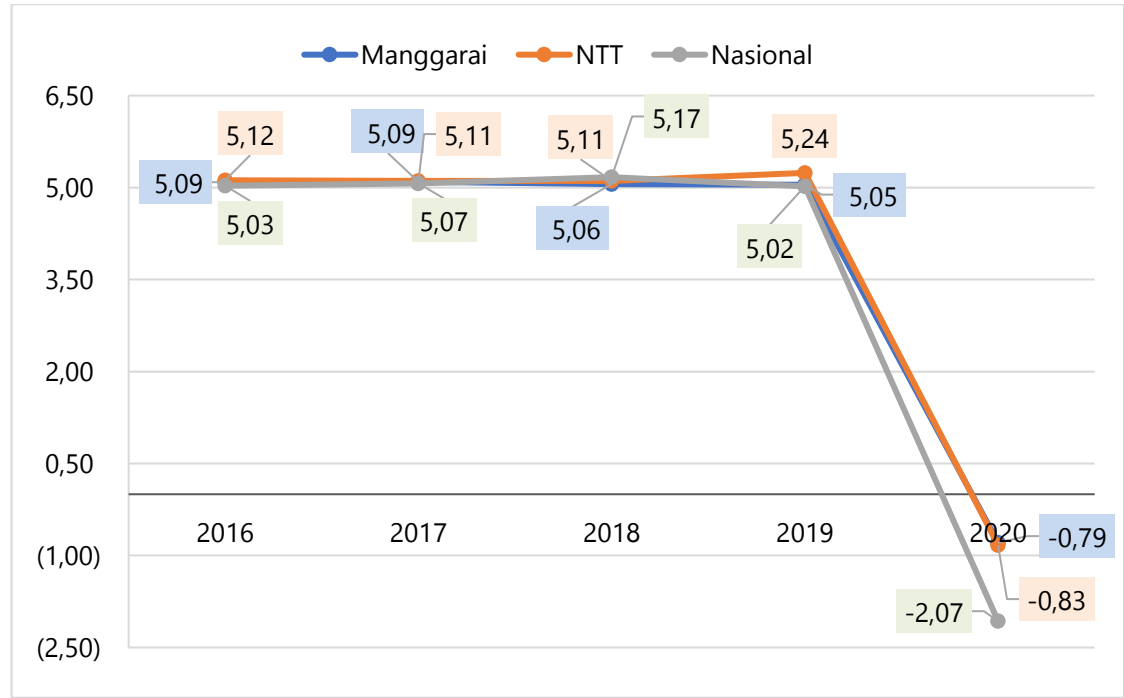
Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut dapat diindikasikan oleh beberapa

indikator makro seperti LPE, PDRB, Laju Inflasi dan Indeks Gini. Berikut adalah data makro yang menggambarkan capaian indikator-indikator tersebut:

**2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010 dan (2) atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai PDRB ADHK digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB yang menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan nilai PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya. Berikut adalah data mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Persen)**



Sumber: BPS Kab. Manggarai, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai selama periode 2016-2019 menunjukkan tren yang cukup stabil di kisaran angka 5,07 persen namun terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh penurunan produksi di berbagai sektor, khususnya sektor jasa yang selama ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai, sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Penurunan terbesar terjadi di sektor



penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 32,94 persen dan sektor jasa perusahaan sebesar 30,29 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan tren yang terjadi di tingkat Provinsi NTT maupun Nasional. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang kuat terhadap berbagai sektor khususnya sektor jasa yang selama ini sangat bergantung pada mobilitas masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai juga disebabkan oleh beberapa sebab indikatif lainnya sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Penyebab indikatif tersebut di antaranya penurunan kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial, penurunan realisasi nilai investasi dan belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Berikut adalah data mengenai pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 16. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan (Persen) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	g	Rp	g	Rp	g	Rp	g	Rp	g
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	584.938,20	1,72	598.840,36	2,38	609.332,50	1,75	625.004,32	2,57	630.369,10	0,86
Pertambangan dan Penggalian	86.068,55	5,45	88.681,65	3,04	92.134,29	3,89	92.960,56	0,90	78.169,20	-15,91
Industri Pengolahan	10.824,93	4,27	11.362,66	4,97	11.858,63	4,36	12.885,77	8,66	12.718,00	-1,30
Pengadaan Listrik dan Gas	2.419,79	24,09	2.445,88	1,08	2.756,38	12,69	2.784,87	1,03	3.299,90	18,49
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.609,97	0,77	2.692,99	3,18	2.843,49	5,59	2.999,01	5,47	3.062,50	2,12
Konstruksi	346.113,48	6,54	363.613,11	5,06	387.386,99	6,54	411.243,38	6,16	389.848,50	-5,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	240.774,41	6,85	255.529,75	6,13	271.361,64	6,20	293.742,49	8,25	280.149,50	-4,63
Transportasi dan Pergudangan	90.034,76	5,34	95.241,33	5,78	100.724,34	5,76	105.850,49	5,09	104.290,90	-1,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.484,52	8,16	12.031,17	4,76	12.847,22	6,78	13.643,67	6,20	9.149,70	-32,94
Informasi dan Komunikasi	247.564,29	7,11	265.074,61	7,07	281.854,50	6,33	294.121,35	4,35	312.013,00	6,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	186.534,73	1,81	196.581,92	5,39	204.333,85	3,94	206.539,90	1,08	228.685,20	10,72
Real Estate	65.788,90	2,23	67.336,99	2,35	68.915,19	2,34	69.273,32	0,52	66.622,90	-3,83
Jasa Perusahaan	4.922,81	6,27	5.239,91	6,44	5.579,15	6,47	5.903,62	5,82	4.115,30	-30,29

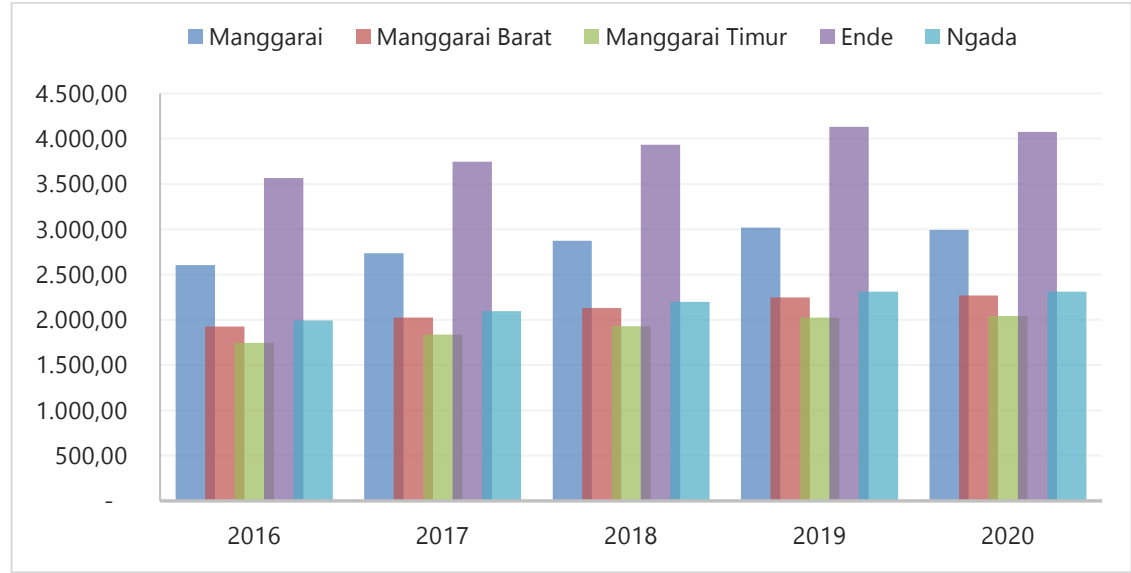
Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	g	Rp	g	Rp	g	Rp	g	Rp	g
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370.208,01	7,56	394.389,14	6,53	422.183,66	7,05	455.469,25	7,88	460.652,80	1,14
Jasa Pendidikan	201.427,28	7,10	218.021,29	8,24	233.174,17	6,95	248.856,74	6,73	248.900,90	0,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.062,59	4,60	51.295,79	4,55	53.613,63	4,52	56.875,04	6,08	56.898,30	0,04
Jasa lainnya	102.056,15	5,86	107.055,44	4,90	112.875,27	5,44	120.648,07	6,89	105.600,70	-12,47
<b>PDRB</b>	2.602.833,37	5,09	2.735.433,99	5,09	2.873.774,90	5,06	3.018.801,86	5,05	2.994.564,40	-0,79

Sumber: BPS Kab. Manggarai, 2021

Pertumbuhan sektoral tertinggi di Kabupaten Manggarai adalah pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,48 persen meskipun cenderung fluktuatif. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang sebelumnya tumbuh tinggi selama tahun 2016-2019 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 6,74 persen pada tahun 2020. Sektor jasa pendidikan serta perdagangan besar dan eceran yang sebelumnya juga mengalami pertumbuhan yang pesat turut mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup besar mencapai 6,71 persen dan 12,88 persen.

Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak sektor perekonomian Kabupaten Manggarai. Tercatat hanya 8 lapangan usaha saja yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020. Dari 8 sektor tersebut, 5 di antaranya tumbuh di bawah 2 persen pada tahun 2020, dimana salah satu diantaranya adalah sektor pertanian yang selama ini mendominasi perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai. COVID-19 memang memberikan pengaruh terhadap sektor pertanian menyebabkan penurunan pertumbuhan sebesar 1,71 persen pada tahun 2020. Namun, sebelum COVID-19 terjadi sektor pertanian memang menunjukkan pertumbuhan yang lambat dan cenderung fluktuatif. Rendahnya produktivitas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, menjadi salah satu penghambat pertumbuhan sektor pertanian.

**Grafik 2. 4. PDRB ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Manggarai dan Daerah Sekitar Tahun 2016-2020**



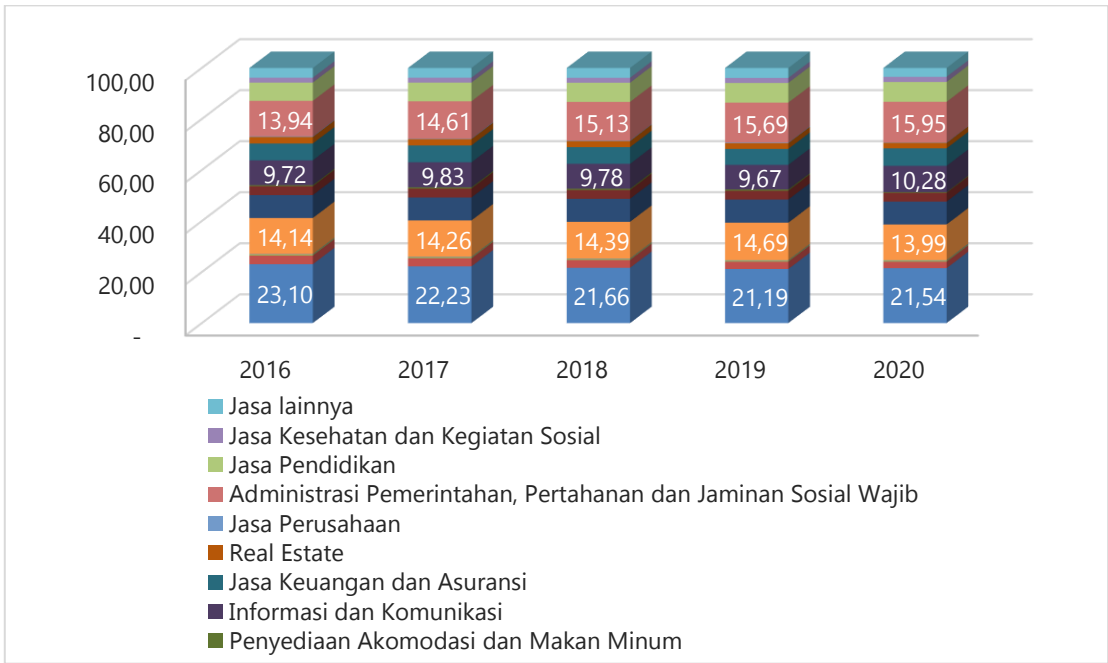
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

PDRB Kabupaten Manggarai tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah di sekitarnya seperti Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Ende. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, Kabupaten Manggarai dengan daerah-daerah tersebut memiliki laju pertumbuhan dengan tren yang relatif sama. Kabupaten Manggarai tercatat berkontribusi terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 4,33 persen pada tahun 2019.

**2.2.1.2. Struktur Perekonomian**

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari kontribusi setiap sektor atau lapangan usaha yang berjalan setiap tahunnya. Perekonomian Kabupaten Manggarai didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata kontribusi mencapai 21,94 persen pada periode 2016-2020. Sektor lain yang turut mendominasi adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dan sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi mencapai 15,06 persen dan 14,29 persen. Sektor informasi dan komunikasi serta perdagangan besar dan eceran juga memiliki rata-rata kontribusi yang cukup tinggi meskipun tidak setinggi ketiga sektor sebelumnya, yaitu mencapai 9,86 persen dan 9,02 persen.

**Grafik 2. 5. Kontribusi PDRB ADHB (%) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kab. Manggarai, 2021

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling mendominasi perekonomian Kabupaten Manggarai tetapi kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan sektor pertanian jika dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor administrasi pemerintahan. Sektor administrasi pemerintahan tercatat terus meningkatkan kontribusinya dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi mencapai 3,58 persen selama tahun 2016-2020. Lapangan usaha konstruksi juga turut mengalami peningkatan kontribusi yang didorong oleh penyelesaian beberapa proyek perbaikan infrastruktur serta meningkatnya proyek pembangunan hotel selama tahun 2015-2019 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020.

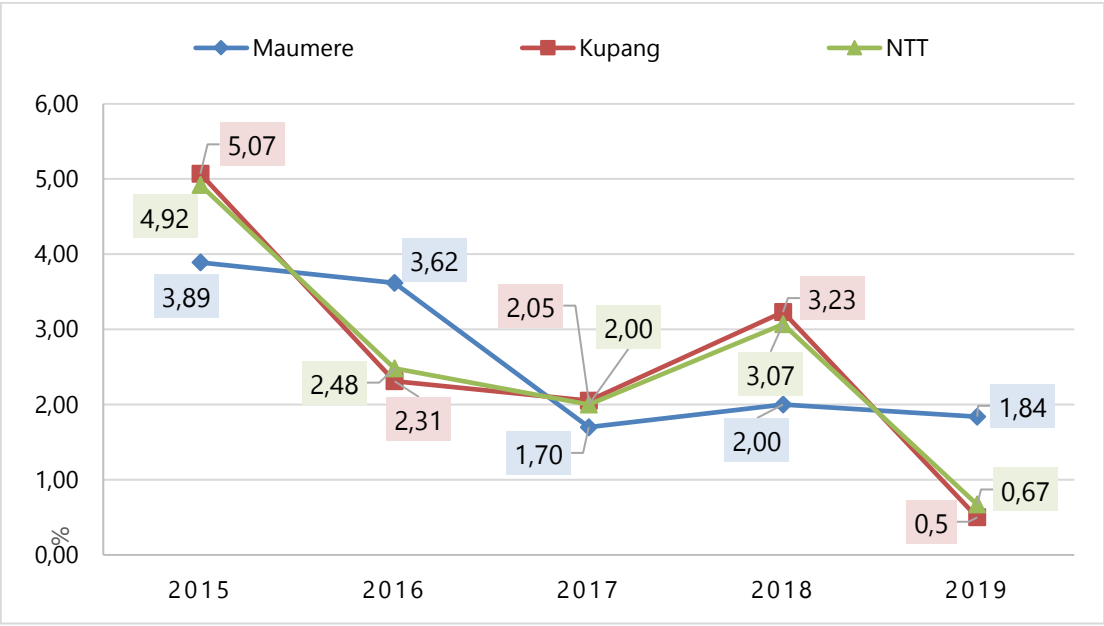
Tingginya tingkat pertumbuhan disertai dengan besarnya kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai menjadikan sektor administrasi pemerintahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan masuk ke dalam kategori sektor maju dan tumbuh cepat. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masuk ke dalam kategori sektor maju tetapi tertekan bersama dengan sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor lain yang patut untuk diperhitungkan adalah sektor pengadaan listrik dan gas serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang tergolong dalam kategori sektor berkembang cepat yang mengindikasikan adanya potensi yang dapat dikembangkan.

#### **2.2.1.3. Laju Inflasi**

Laju inflasi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi dapat dihitung menggunakan indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Laju inflasi Kabupaten Manggarai memakai acuan Kota Maumere karena adanya kesamaan tipe pola konsumsi dan mampu menggambarkan keadaan ekonomi yang tidak terlalu berbeda dengan karakteristik wilayahnya. Pengumpulan data harga konsumen untuk penghitungan IHK Kota Maumere mencakup 318 jenis komoditas barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi

oleh masyarakat. Berikut adalah data mengenai laju inflasi yang dapat dijadikan acuan oleh Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 6. Laju Inflasi Tahunan (%) Kota Maumere, Kota Kupang, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019**



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Laju inflasi tahunan di Kota Maumere mengalami penurunan yang cukup tajam mencapai 2,05 persen dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Inflasi di Kota Maumere didorong oleh peningkatan harga hampir di seluruh jenis komoditas yang memiliki tren cukup fluktuatif namun cenderung menurun terkecuali kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga. Inflasi pada tahun 2019 tercatat pada angka 1,84 persen atau turun 0,16 persen dari tahun sebelumnya. Inflasi tertinggi didorong oleh inflasi di kelompok pengeluaran sandang sebesar 2,79 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,64 persen dan kelompok kesehatan sebesar 2,57 persen.

**2.2.1.4. PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara umum. PDRB per kapita dihitung dengan membagikan jumlah PDRB suatu daerah terhadap jumlah penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, besarnya nilai PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan

nilai dari PDRB yang dihasilkan oleh penduduk di daerah tersebut. Berikut adalah data PDRB Per Kapita di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 17. PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nilai PDRB (Juta Rp)</b>					
- ADHB	3.640.754,80	3.964.645,60	4.335.394,70	4.679.714,90	4.653.217,70
- ADHK	2.602.833,40	2.735.434,00	2.873.774,90	3.018.801,90	2.994.564,40
<b>PDRB per Kapita (Ribu Rp)</b>					
- ADHB	11.236,41	12.043,35	12.983,64	13.827,96	14.873,40
- ADHK	8.033,09	8.309,39	8.606,38	8.920,17	9.571,73
<b>Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (%)</b>	3,66	3,44	3,57	3,64	7,30
<b>Jumlah Penduduk (Orang)</b>	324.014,00	329.198,00	333.912,00	338.424,00	312.855,00

*Sumber: BPS Kab. Manggarai, 2021*

PDRB per kapita Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,32 persen pada periode 2016-2020. PDRB per kapita penduduk di Kabupaten Manggarai secara riil mencapai Rp 9.571.730,00 per bulan dalam setahun pada tahun 2020 atau meningkat sebanyak Rp 1.538.643,00 dibandingkan tahun 2016. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,3 persen yang disebabkan oleh adanya koreksi jumlah penduduk sesuai dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun 2019. Kenaikan PDRB per kapita menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat secara umum mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai yang mengindikasikan kenaikan produksi di berbagai sektor turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai secara umum.

### 2.2.1.5. Koefisien Gini

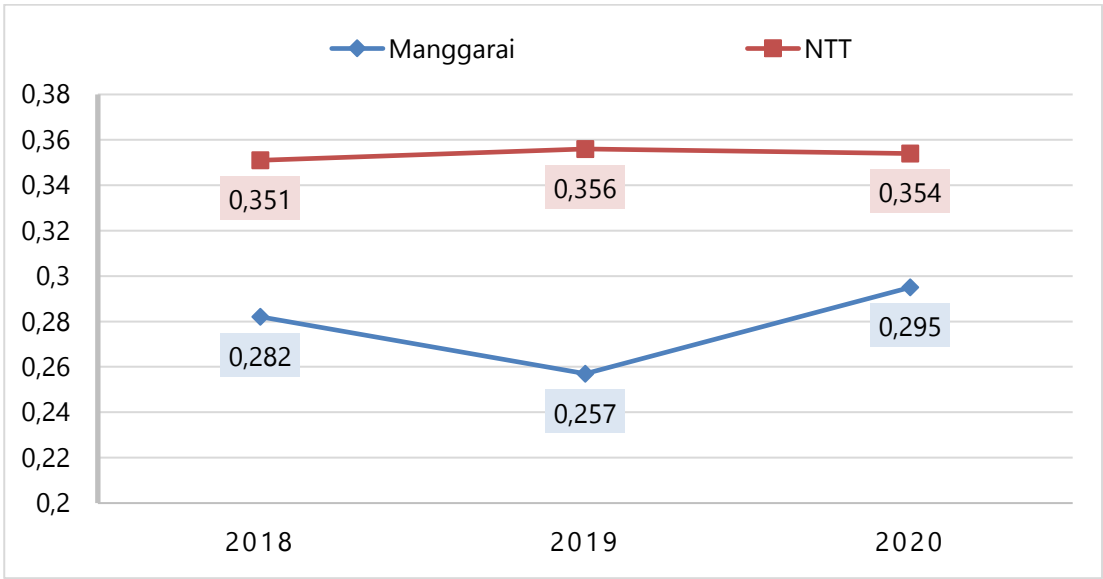
Indikator pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi melainkan juga melalui pemerataan ekonomi. Koefisien



gini merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran dan mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini suatu daerah dapat memberikan gambaran pemerataan ekonomi di daerah tersebut.

Koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1, jika bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan koefisien gini merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Jika koefisien gini mengalami penurunan, maka distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Berikut adalah koefisien gini Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 7. Koefisien Gini (Gini Ratio) Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT Tahun 2018-2020**



Sumber: BPS, 2021

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan jika dilihat dari kenaikan koefisien gini pada tahun 2018-2020. Koefisien gini Kabupaten Manggarai berada di bawah koefisien gini Provinsi NTT dengan rata-rata sebesar 0,278. Namun demikian, peningkatan koefisien gini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Manggarai karena mengindikasikan adanya kesenjangan pendapatan yang semakin besar di antara kelompok masyarakat. Pandemi COVID-19 kembali diduga menjadi penyebab membesarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. Perekonomian yang melemah menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi semakin

miskin sehingga mendorong kesenjangan pendapatan di antara masyarakat Manggarai pada tahun 2020.

2.2.1.6. Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan daerah. Isu ini sangat strategis karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan basic needs approach oleh Badan Pusat Statistik. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Indikator pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik anatara lain Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT (%)
1.	2016	72,65	22,5	22,01
2	2017	71,86	21,91	21,38
3.	2018	69,32	20,83	21,03
4.	2019	69,33	20,55	20,62
5.	2020	69,52	20,34	21,21

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2021

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai menunjukkan penurunan selama periode 2016-2020. Penurunan paling tajam terjadi di tahun 2018, yakni sebesar 1,08 persen di mana penduduk miskin berkurang hingga 254.000 jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskin rupanya menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi NTT, rata-rata persentase penduduk miskin di

Kabupaten Manggarai lebih rendah 0,024 selama tahun 2016-2020. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin tidak lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat disertai penanganan kemiskinan yang belum optimal diduga menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2020

### **2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Fokus kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam aspek kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang berisi tentang analisis indikator makro pembangunan. Konteks Kabupaten Manggarai, fokus kesejahteraan sosial diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mencermati kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indikator ini memiliki beberapa komponen indikator pembentuk, seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, serta pengeluaran per kapita. Berikut adalah data mengenai capaian indikator-indikator makro untuk menganalisa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai:

#### **2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam pengukuran keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk. IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan suatu wilayah. IPM merupakan salah satu data paling strategis bagi Kabupaten Manggarai. Indikator ini dapat mengukur kinerja pemerintah dalam penyediaan akses terhadap hasil pembangunan, khususnya dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan masyarakat.

IPM memiliki tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merupakan harapan jumlah tahun hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah tolok ukur pengetahuan manusia. RLS adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) pendidikan

formal yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas; sedangkan HLS diartikan sebagai harapan lamanya (dalam tahun) anak pada umur tertentu dalam menempuh sekolah formal di masa mendatang. Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Berikut data mengenai IPM di Kabupaten Manggarai dan komponen pembentuknya:

**Tabel 2. 19. Perkembangan IPM di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

Tahun	Umur Harapan Hidup (UHH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp. 000)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2016	65,66	94,14	6,97	7.008	61,67
2017	65,84	94,38	6,98	7.056	62,24
2018	66,23	95,18	7,26	7.175	63,32
2019	66,77	95,77	7,27	7.276	64,15
2020	67,03	95,33	7,37	7.203	64,54

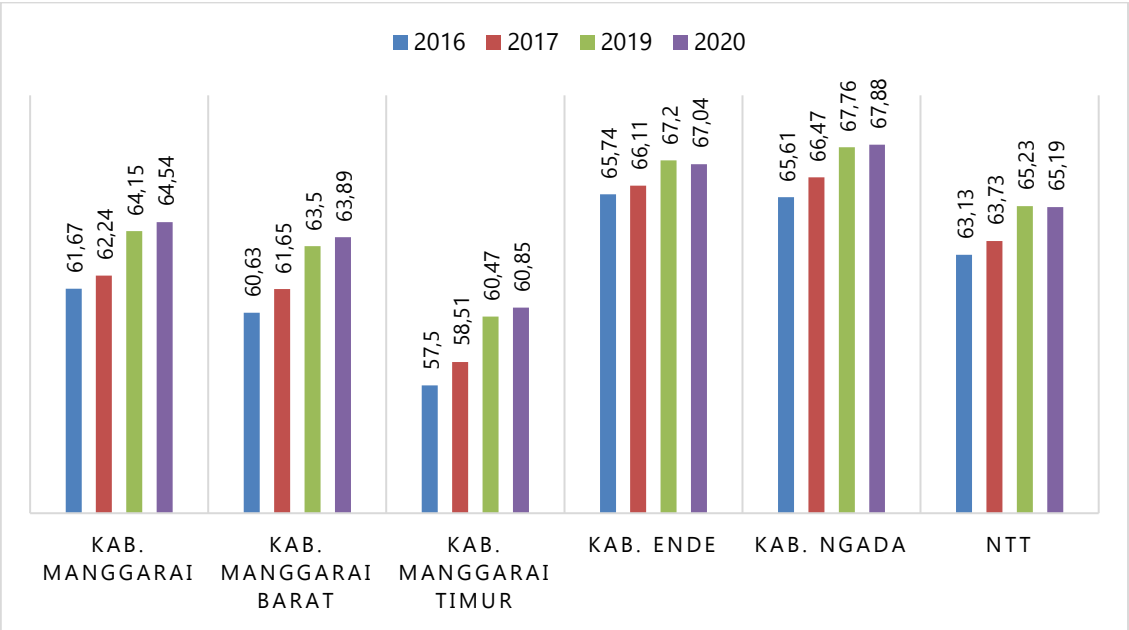
Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2021

Capaian angka IPM Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan sejak 2016 hingga 2020 meskipun belum signifikan. Terhitung sejak lima 2016 hingga 2020, peningkatan IPM hanya sebesar 2,87. Kategori capaian IPM Kabupaten Manggarai termasuk dalam kategori sedang. Berikut adalah penjabaran tiga dimensi dasar IPM berdasarkan data yang diperoleh:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat Kabupaten Manggarai yang digambarkan dalam UHH mencapai 1,37 tahun selama periode 2016-2020.
2. Dimensi pengetahuan yang dapat dilihat dalam AMH serta RLS di Kabupaten Manggarai secara umum mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,19 persen dan 0,85 tahun.
3. Dimensi hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun Kabupaten Manggarai meningkat sebesar Rp. 195.000,-.

IPM Kabupaten Manggarai harus diperbandingkan dengan capaian IPM kabupaten di sekitar Manggarai. Hal ini untuk melihat sejauh mana kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Berikut adalah data mengenai perbandingan IPM Kabupaten Manggarai dengan wilayah/ kabupaten sekitar:

**Grafik 2. 8. Perbandingan IPM Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Lain di Sekitar Manggarai Tahun 2016-2020.**



Sumber : BPS Propinsi NTT 2021

IPM Kabupaten Manggarai yang berada dalam kategori “sedang” mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1.12% per tahun. Kabupaten Manggarai menempati posisi di bawah Kabupaten Ngada dan Ende yang memiliki capaian IPM 65 ke atas. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT tahun 2020, IPM Kabupaten Manggarai masih berada 0,65 poin dibawah IPM Provinsi NTT. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai masih unggul. Peningkatan capaian IPM dapat dijalankan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Manggarai.

**Tabel 2. 20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai dan Beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020**

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Manggarai	22,50	21,91	20,83	20,55	20,34
Manggarai Barat	19,35	18,86	18,14	18,01	17,71

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Manggarai Timur	27,71	26,80	26,50	26,49	26,52
Ende	23,89	23,95	24,20	23,18	23,76
Ngada	12,69	12,77	12,94	12,48	12,51
NTT	22,01	21,38	21,03	20,62	21,21

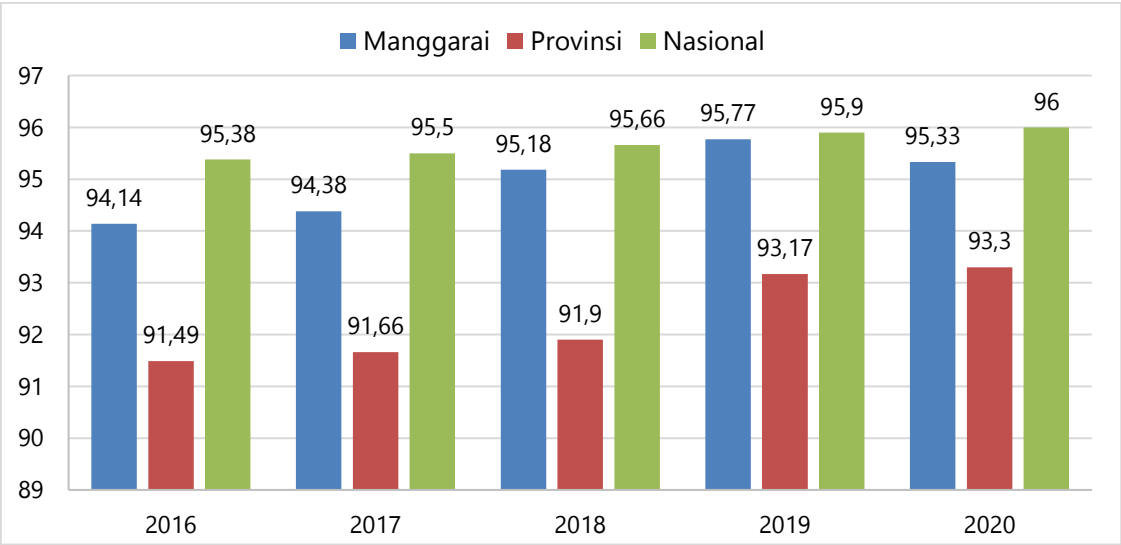
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021

Kabupaten Manggarai memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Ngada. Sedangkan bila dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur dan Ende, Kabupaten Manggarai memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai terus menurun selama periode 2016-2020.

### 2.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah salah satu indikator penentu kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi AMH suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat literasi dan paparan pengetahuan terhadap masyarakat. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf (mampu membaca dan menulis) harus diketahui untuk menentukan AMH. Konteks Kabupaten Manggarai, capaian AMH disajikan dalam grafik berikut:

**Grafik 2. 9. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Manggarai tahun 2015-2019 (Persen)**



Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT, dan Nasional 2021

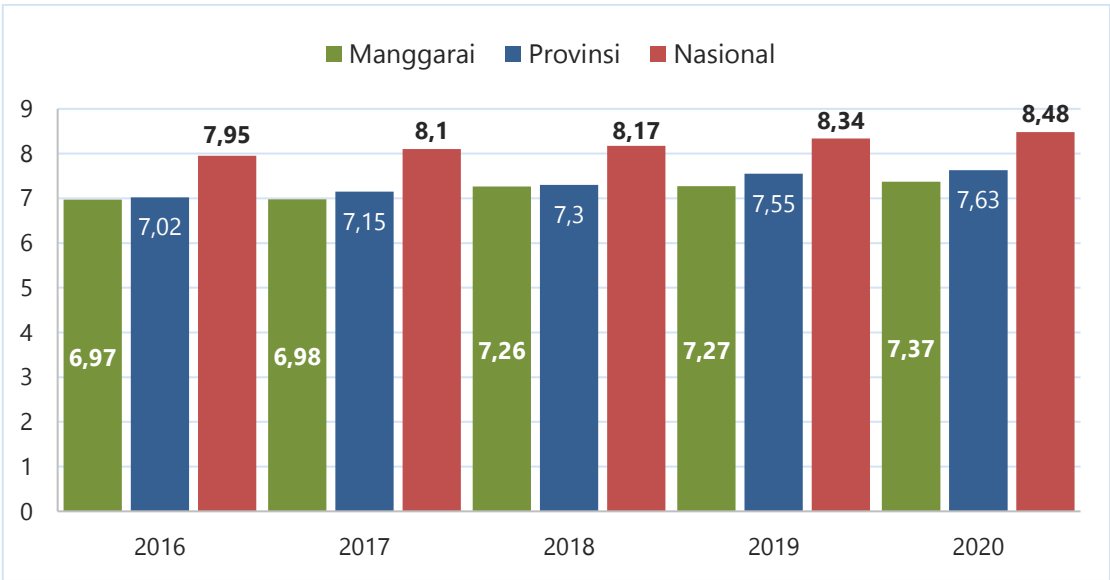
Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, tetapi pada tahun 2020

menurun sebesar 0,44. Meskipun demikian, capaian AMH Kabupaten Manggarai selalu di atas Provinsi NTT tetapi masih dibawah capaian nasional yaitu terpaut sebesar 0,67 pada tahun 2020. Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan perlu dijalankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Manggarai.

2.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS juga dapat dipakai untuk mengukur jangkauan akses layanan pendidikan. Komponen RLS tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah selesai menempuh pendidikan formal. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan yang ditamatkan. Capaian RLS di Kabupaten Manggarai disajikan pada tabel berikut:

Grafik 2. 10. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2021

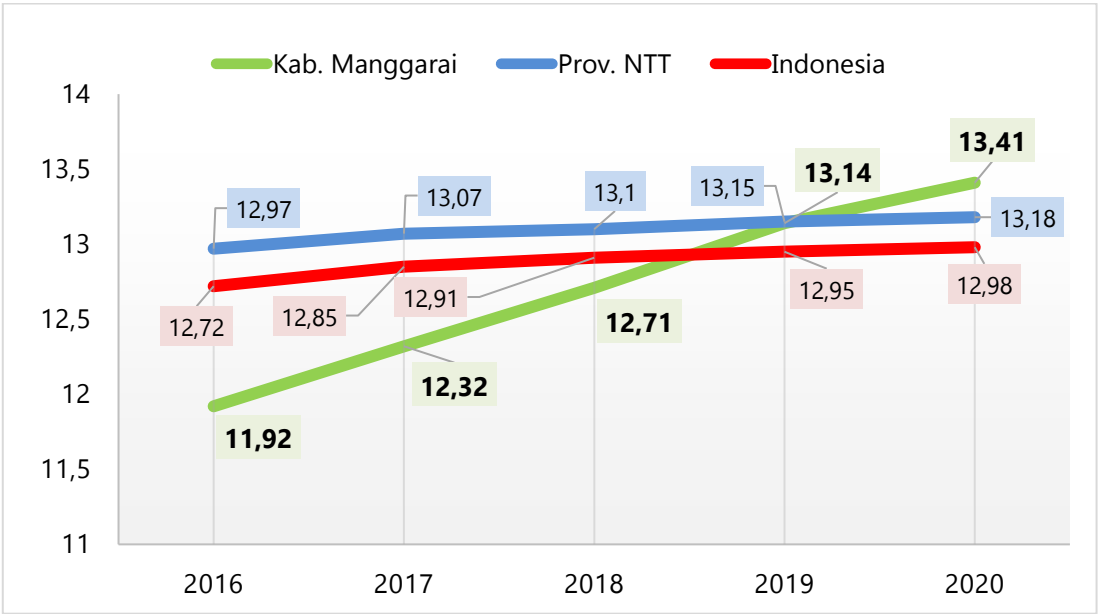
RLS Kabupaten Manggarai selalu meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. RLS sempat mendekati stagnan pada tahun 2017 dan 2019 dengan hanya meningkat 0,1 poin. RLS Kabupaten Manggarai masih berada di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Data tersebut mengindikasikan jenjang pendidikan tertinggi rata-rata masyarakat Kabupaten Manggarai masih berada

di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan belum optimal.

2.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan durasi lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang (BPS, 2020). Kondisi pembangunan serta tatanan sistem pendidikan di berbagai jenjang dapat diketahui dengan melihat HLS suatu daerah. Perbandingan HLS antara Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2. 11. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2021

Capaian HLS Kabupaten Manggarai terus mengalami kenaikan signifikan pada periode 2016-2020. HLS Kabupaten Manggarai bahkan hampir mengungguli HLS Provinsi NTT dengan selisih hanya 0,1 tahun pada tahun 2019 dan sudah berada di atas HLS Nasional dengan selisih 0,19 tahun. HLS Kabupaten Manggarai mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2020 dengan berada di atas Nasional sebesar 0,43 tahun dan NTT sebesar 0,23.

Angka HLS tertinggi Kabupaten Manggarai terdapat pada tahun 2020 sebesar 13,41 tahun. Hal ini berarti rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang bersekolah selama 13,41 tahun, yakni lebih dari 12 tahun. HLS dapat ditingkatkan dengan



cara memperbaiki ketersediaan guru, sarana dan prasarana pendidikan secara merata di setiap kecamatan dengan memperhatikan kondisi geografi.

**2.2.2.5. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS, maka semakin banyak usia sekolah yang bersekolah. Berikut adalah capaian APS Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 21. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI (usia 7 – 12)	89,5	100,43	92	97,32	93,77
2.	SMP/MTs (usia 13 – 15)	60	60,62	71,31	67,93	100

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Data Angka Partisipasi Sekolah pada tabel selama tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan capaian yang cenderung fluktuatif. APS SD/MI pada tahun 2020 sebesar 93.77%, hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti jenjang pendidikan SD/MI. Faktor penentu naik turunnya APS SD, selain dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah penduduk usia 7-12, juga akibat penurunan jumlah siswa yang relevan yaitu usia 7-12 tahun.

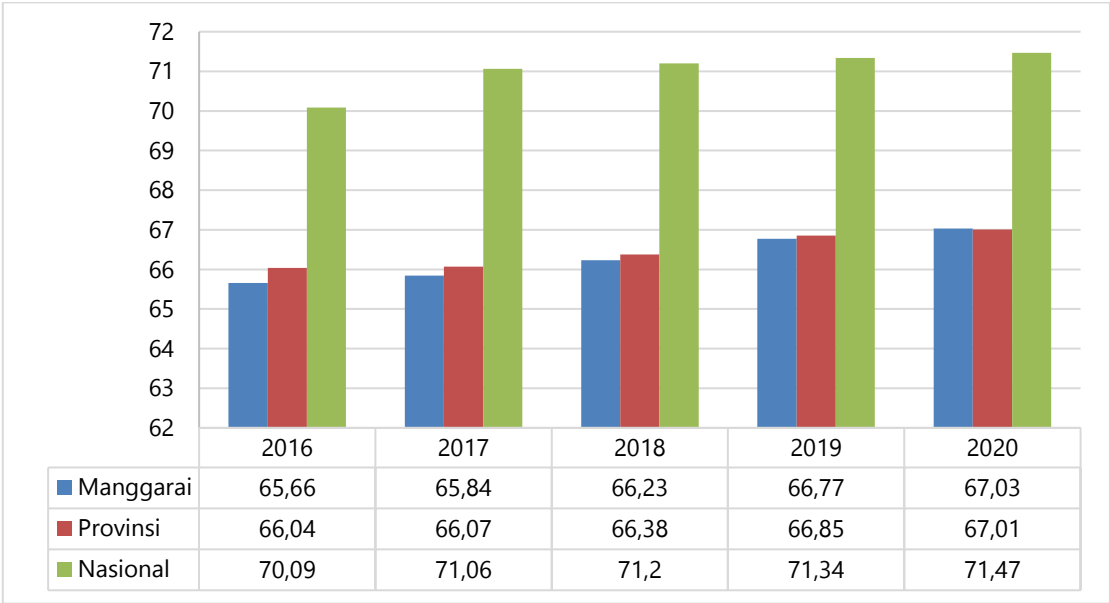
APS SMP/MTs menunjukkan capaian yang fluktuatif pada tahun 2016 sampai tahun 2010 dengan persentase capaian yang terbilang rendah, tetapi pada tahun 2020 menunjukkan capaian yang positif dengan capaian sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Manggarai telah mengikuti jenjang pendidikan sesuai umur yang ditentukan yaitu SMP/MTs pada tahun 2020.

**2.2.2.6. Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya (BPS, 2020). Jika suatu daerah memiliki Usia

Harapan Hidup yang rendah, maka penting untuk digerakkannya program pembangunan kesehatan yang mencakup kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta pemberantasan kemiskinan. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan antara UHH Kabupaten Manggarai dengan Provinsi NTT dan Indonesia:

**Grafik 2. 12. Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2016-2020 (Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2021

Tren UHH Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Namun demikian, UHH Kabupaten Manggarai masih berada di bawah Provinsi NTT dan Indonesia. Peningkatan UHH Kabupaten Manggarai yang tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 0.54 poin. Upaya meningkatkan UHH di Kabupaten Manggarai harus dilakukan dengan cara optimalisasi kualitas kesehatan ibu, bayi, balita, dan masyarakat.

**2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Fokus seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai. Beberapa data yang dianalisis meliputi persentase cagar budaya yang dilestarikan, kegiatan seni budaya yang diselenggarakan, berbagai sarana seni budaya yang tersedia, prestasi olahraga, klub olahraga, dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai:

2.2.3.1. Budaya

Budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Budaya adalah suatu kebiasaan, adat istiadat dan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai kapanpun (jangka panjang). Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik dan menjadi ciri khas dari kelompok yang bersangkutan. Berikut adalah capaian yang berkaitan dengan budaya di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 22. Capaian Urusan yang Berkaitan dengan Budaya di Kabupaten Manggarai

No	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (2020)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Budaya	1. Cakupan Fasilitasi seni	100%	20%	20%	20%	20%	20%
		2. Cakupan Gelar Seni	100%	100%	100%	100%	100%	NA
		3. Misi Kesenian	100%	20%	20%	20%	20%	NA
		4. Cakupan Sumber daya kesenian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Cakupan Tempat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Cakupan organisasi	100%	24%	2%	2%	0	0,70%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Manggarai, 2021

Kabupaten Manggarai memiliki total 6 indikator yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian. Beberapa indikator capaian yang masih perlu ditingkatkan, di antaranya seperti fasilitasi seni kepada masyarakat, misi kesenian untuk mempromosikan dan menjaga seni budaya yang ada di Kabupaten Manggarai, serta cakupan organisasi kesenian sebagai pihak yang turut membantu melestarikan seni budaya dan *event* kebudayaan.

2.2.3.2. Olahraga

Olahraga merupakan salah satu aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda. Pembinaan dibidang olahraga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat diberbagai cabang olahraga serta

menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana dan teknologi. Pembangunan olahraga di Kabupaten Manggarai harus dijalankan secara berkesinambungan dengan mengedepankan strategi yang inovatif.

### **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang. Berikut adalah deskripsi capaian kinerja aspek pelayanan umum di Kabupaten Manggarai:

#### **2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib**

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan. Berikut adalah capaian layanan urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Manggarai:

##### **2.3.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar**

Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi analisis pada capaian urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Layanan urusan ini memiliki standar pelayanan minimal yang harus dijaga dengan baik. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar:

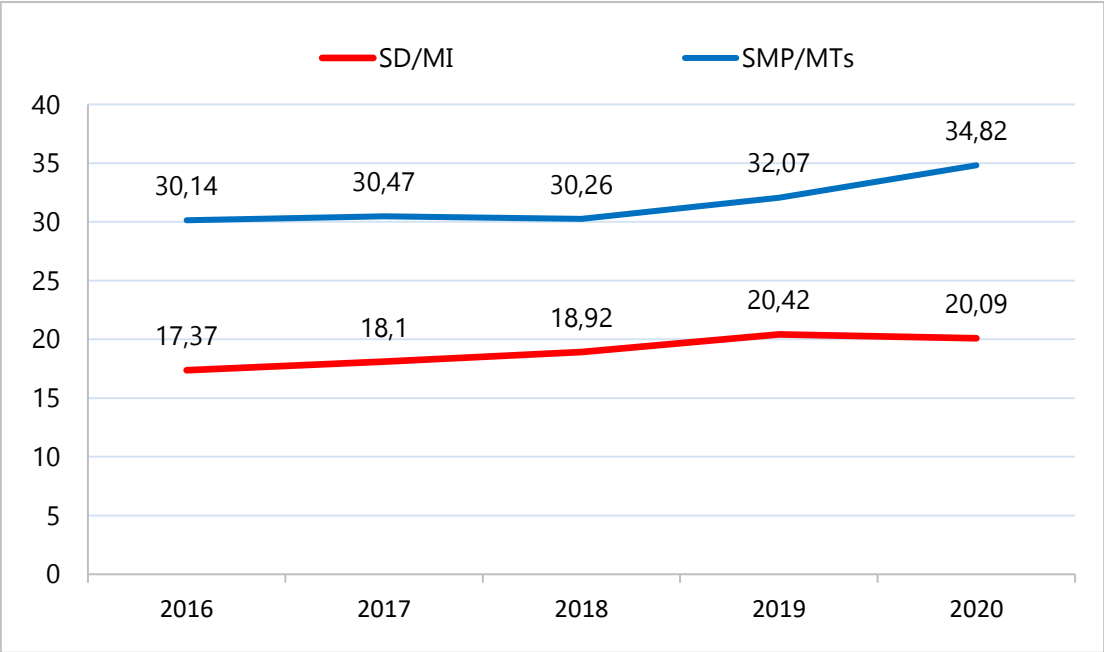
1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Indikator di urusan pendidikan berpengaruh langsung terhadap capaian indikator IPM. Capaian pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan berikut:

a. Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan

Jenjang pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka kualitas penduduk yang semakin baik. Perolehan capaian pendidikan yang ditamatkan merupakan perbandingan jumlah penduduk yang lulus pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah usia jenjang pendidikan tertentu. Berikut adalah data jenjang pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 13. Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Jenjang pendidikan yang ditamatkan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan, kecuali tingkat SD/MI yang mengalami penurunan sebesar 0,33% pada tahun 2020 dan tingkat SMP/MTs yang mengalami penurunan sebesar 0,21% pada tahun 2018. Meskipun cenderung mengalami peningkatan, dan hanya mengalami

penurunan yang kecil, persentase pendidikan yang ditamatkan masih tergolong rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan usia sekolah, baik SD/MI maupun SMP/MTs masih jauh untuk bisa menamatkan pendidikannya secara keseluruhan. Kondisi jenjang pendidikan yang ditamatkan yang rendah dapat dilihat melalui penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki. Berikut adalah tabel yang memuat data tersebut:

**Tabel 2. 23. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang dimiliki Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)**

Jenjang Pendidikan	Tahun											
	2016			2017			2018			2019		
	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T
Tidak Punya Ijazah	24,06	23,71	23,87	22,91	27,01	25,04	18,20	22,08	20,23	23,34	24,56	23,97
SD/MI/ Sederajat	38,40	44,41	41,52	38,45	35,36	36,85	39,15	41,08	40,16	33,90	36,85	35,43
SMP/MTs/ Sederajat	12,64	9,06	10,78	15,86	17,09	16,50	17,86	15,84	16,80	17,02	17,74	17,39
SMA/MA Sederajat	13,67	16,14	14,95	15,93	15,07	15,49	13,86	14,30	14,09	15,38	12,32	13,79
SMK	1,02	0,21	0,60	NA	NA	NA	2,17	0,05	1,06	2,12	1,37	1,73
Diploma I dan II	0,97	0,61	0,79	NA	NA	NA	0,32	0,00	0,15	NA	NA	NA
Diploma III/ Sarmud	1,23	1,83	1,54	1,59	1,17	1,37	0,61	2,14	1,41	NA	NA	NA
Diploma/ S1	8,01	4,03	5,95	5,25	4,30	4,76	7,84	4,51	6,10	8,25	6,59	7,68

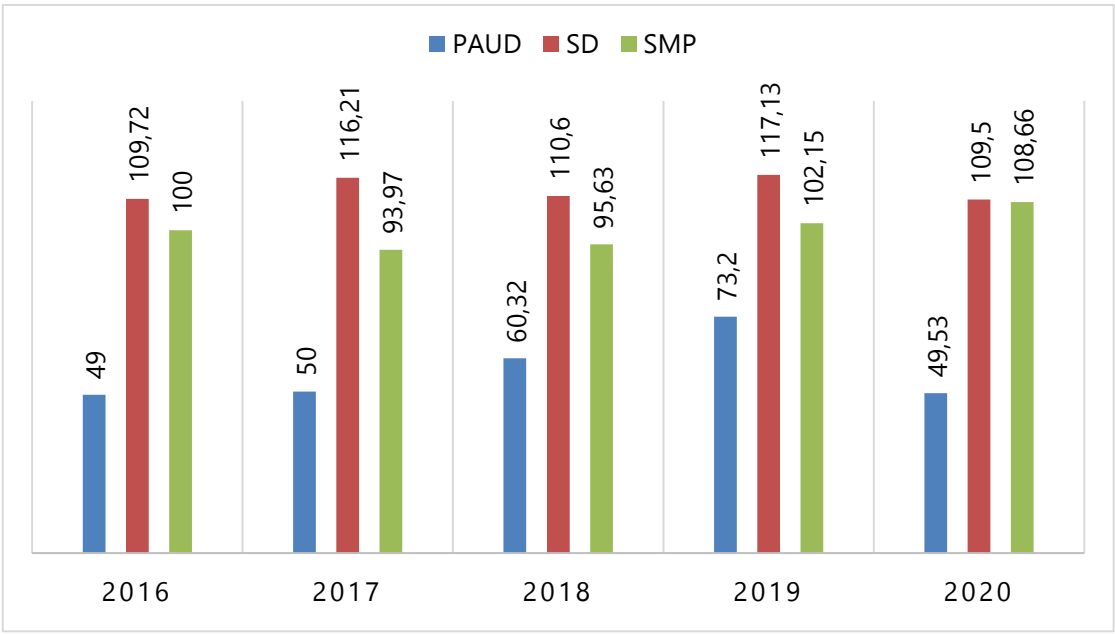
Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2017 – 2020

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Manggarai mayoritas pendidikan tertingginya adalah SD/MI/Sederajat dengan proporsi sebesar 35,43% pada tahun 2019. Penduduk yang tidak punya ijazah selama 2016-2019 proporsinya lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat hingga Diploma IV/S1. Hal tersebut tentunya perlu perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Manggarai.

**b. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK merupakan rasio jumlah siswa (berapapun usianya) pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK, maka partisipasi masyarakat untuk bersekolah juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika APK rendah, maka partisipasi masyarakat untuk bersekolah menjadi semakin rendah. Berikut capaian APK Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020:

**Grafik 2. 14. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Menurut Tingkat Pendidikan 2016 – 2020**



*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Realisasi APK pada jenjang PAUD dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 10,32 dan pada tahun 2019 sebesar 12,88. APK kemudian mengalami penurunan sebesar 23,67 pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia PAUD masih rendah dan cenderung fluktuatif. Belum optimalnya penyelenggaraan PAUD menjadi masalah utama masih rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum meratanya pembangunan unit sekolah baru khusus PAUD, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan PAUD masih rendah, kualitas guru dan pengelola PAUD yang masih terbatas, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi

pendidikan PAUD. Hal tersebut kemudian diintervensi melalui upaya peningkatan partisipasi pendidikan PAUD dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan membuka TK Negeri di setiap kecamatan.

APK SD/MI dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan peningkatan sebesar 6,49 pada tahun 2017 dan 6,53 pada tahun 2019. APK mengalami penurunan sebesar 5,61 pada tahun 2018 dan sebesar 7,63 pada tahun 2020. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasana penunjang pembelajaran menjadi salah satu penyebab belum optimalnya capaian APK SD/MI. Masih banyaknya kondisi ruang kelas dalam kondisi rusak dan terbatasnya ruang kelas baru perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang.

APK SMP meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 6,03 tetapi terus mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Data tersebut menunjukkan terdapat kinerja positif APK SMP pada tahun 2019 dan 2020 dengan angka realisasi yang melampaui angka target yaitu 100. Kinerja pemerintah sangat berpengaruh terhadap realisasi target APK SMP.

APK SD/MI di Kabupaten Manggarai telah mencapai lebih dari 100% pada tahun 2020. Sementara APK yang masih rendah pada tahun 2020 adalah APK PAUD sebesar 49,53% karena mengikuti ukuran peraturan yang ada terbaru dengan penyebut dalam rumusan: Usia PAUD 5-6 tahun bukan 4-6. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan APK telah dilakukan melalui berbagai intervensi program, terutama peningkatan dana BOS dan perluasan unit sekolah baru untuk menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit dan terpencil. Kondisi tersebut masih berlaku secara umum di seluruh Kabupaten Manggarai. Jika dilihat APK menurut kecamatan, maka terlihat adanya kesenjangan atau disparitas tertentu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat jangkauan pemerataan pendidikan pada semua wilayah secara proporsional dan berkeadilan. Di



bawah ini merupakan tabel yang memperlihatkan APK antar kecamatan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 24. Disparitas APK Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Satuan	APK PAUD	APK SD/MI	APK SMP/MTs
1.	Langke Rembong	Persen	62,25	104,35	155,03
2.	Ruteng	Persen	58,04	108,1	115,31
3.	Cibal	Persen	22,14	102,6	112,52
4.	Cibal Barat	Persen	73,25	106,78	73,24
5.	Wae Rii	Persen	21,94	109,22	62,03
6.	Reok Barat	Persen	42,18	102,36	93,54
7.	Reok	Persen	60,45	121,83	133,33
8.	Satar Mese	Persen	48,54	115,61	94,58
9.	Satar Mese Barat	Persen	54,46	106,13	97,51
10.	Rahong Utara	Persen	49,28	120,31	97,89
11.	Lelak	Persen	34,02	120,73	92,82

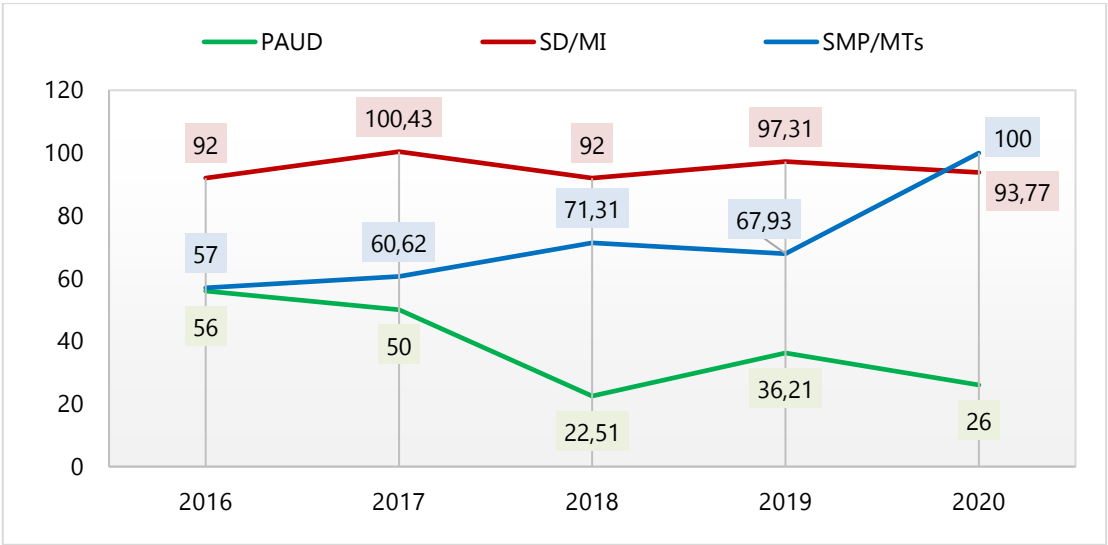
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Disparitas APK, khususnya pada jenjang pendidikan PAUD masih terjadi di Kabupaten Manggarai. APK PAUD terendah berada di Kecamatan Wae Rii (21,94%), Kecamatan Cibal (22,14%), Kecamatan Lelak (34,02%) dan Kecamatan Reok Barat (42,18%). Sementara APK PAUD tertinggi berada di Kecamatan Cibal Barat (73,25%), Langke Rembong (62,25), Reok (60,45%) dan Ruteng (58,04). Jika dilihat dari ketersediaan sekolah PAUD, di Kecamatan Reok, jumlah PAUD adalah 27 unit, sementara di Kecamatan Langke Rembong berjumlah 69 sekolah, Kecamatan Ruteng sebanyak 38 dan Kecamatan Satar Mese Barat berjumlah 33 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah belum menjamin akses terhadap anak usia PAUD. Ada hal lain yang menjadi faktor penyebab minimnya partisipasi penduduk usia 0-6 tahun untuk ikut serta dalam pendidikan PAUD.

**c. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi APM maka semakin baik. Berikut adalah data capaian APM Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 15. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Capaian APM PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs menunjukkan capaian yang fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2020. APM PAUD terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 33,49% dari tahun 2016 hingga tahun 2018, sebelum akhirnya sempat mengalami kenaikan sebesar 13,7% pada tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan sebesar 10,2% pada tahun 2020. Capaian APM PAUD tahun 2020 merupakan capaian terendah dibandingkan capaian pada tahun 2016, 2017 dan 2019. APM PAUD masih sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan APM jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, sehingga perlu diintervensi lebih lanjut agar penduduk usia 0-6 tahun untuk bisa ditingkatkan partisipasinya.

APM SD/MI menunjukkan capaian yang cukup bagus meskipun belum maksimal. Capaian APM SD/MI menunjukkan angka masih fluktuatif. APM SD/MI bahkan mengalami penurunan sebesar 3,54% pada tahun 2020.

APM SMP/MTs terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Indikator ini sempat mengalami penurunan sebesar 3,38% pada tahun 2019. Kemudian APM SMP/MTs kembali meningkat dengan signifikan dengan capaian 100% pada tahun 2020.

APM di Kabupaten Manggarai belum terlalu merata. Data APM per kecamatan memperlihatkan disparitas. Berikut adalah data tentang disparitas APM di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 25. Disparitas APM Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2020**

No.	Kecamatan	APM PAUD	APM SD/MI	APM SMP/MTs
1.	Langke Rembong	41.51	93.14	136.4
2.	Ruteng	27.01	90.6	106.96
3.	Cibal	14.19	87.35	103.63
4.	Cibal Barat	35.23	88.34	66.88
5.	Wae Rii	14.36	92.76	58.61
6.	Reok Barat	19.15	93.42	88.29
7.	Reok	29.37	106.78	125.58
8.	Satar Mese	19.85	98.21	88.55
9.	Satar Mese Barat	20.51	92.61	89.3
10.	Rahong Utara	24.55	95.09	94.63
11.	Lelak	20.51	98.81	88.06

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Pemerataan APM PAUD tergolong sangat rendah pada tahun 2020. Capaian APM SD/MI dan SMP/MTs secara umum di seluruh kecamatan sudah mencapai di atas rata-rata APM nasional, yaitu 74,29% kecuali di Kecamatan Cibal Barat 66,88% (SMP/MTs), dan Kecamatan Wae Rii 58,61% (SMP/MTs).

**d. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk**

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk pada jenjang usia tertentu. Semakin kecil rasionya, maka semakin baik. Berikut adalah rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 26. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016 – 2020**

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	1 : 223	1 : 214	1 : 207	1 : 199	1 : 181
2.	SMP/MTs	1 : 355	1 : 340	1 : 353	1 : 333	1 : 292

Sumber: Dinas Pendidikan kabupaten Manggarai, 2021

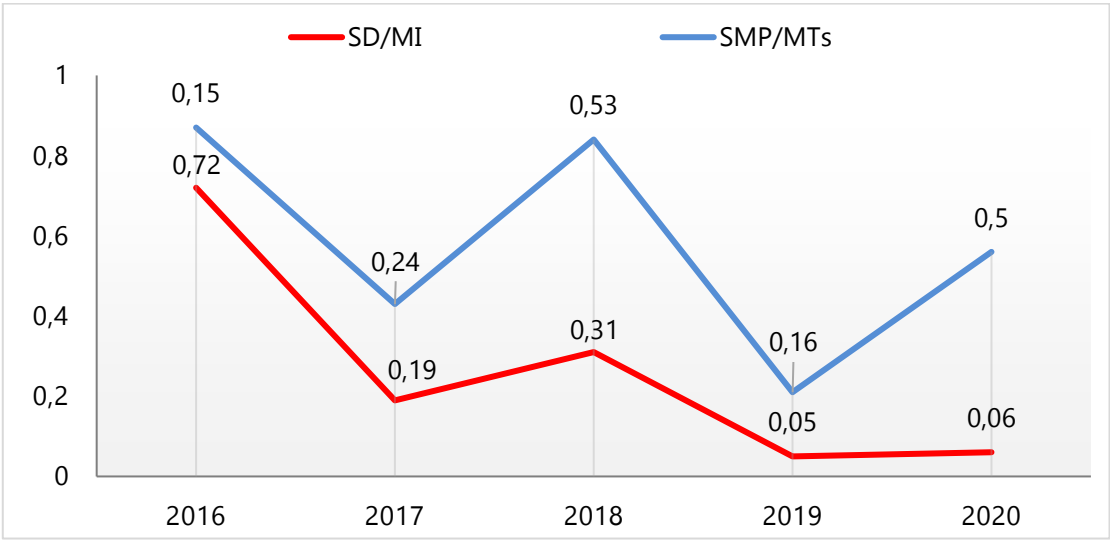
Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk terus mengalami peningkatan capaian positif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi ini mendandakan bahwa ketersediaan sekolah terhadap penduduk terus membaik. Rasio ketersediaan SMP/MTs terus mengalami peningkatan,

kecuali pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah usia penduduk pada jenjang SMP, sehingga angka rasionya meningkat.

**e. Angka Putus Sekolah**

Putus sekolah merupakan suatu keadaan ketika siswa meninggalkan sekolah pada jenjang tertentu sebelum menamatkan pendidikan pada jenjang tersebut. Indikator ini berpengaruh terhadap capaian RLS Kabupaten Manggarai. Berikut adalah angka putus sekolah di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 16. Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)**



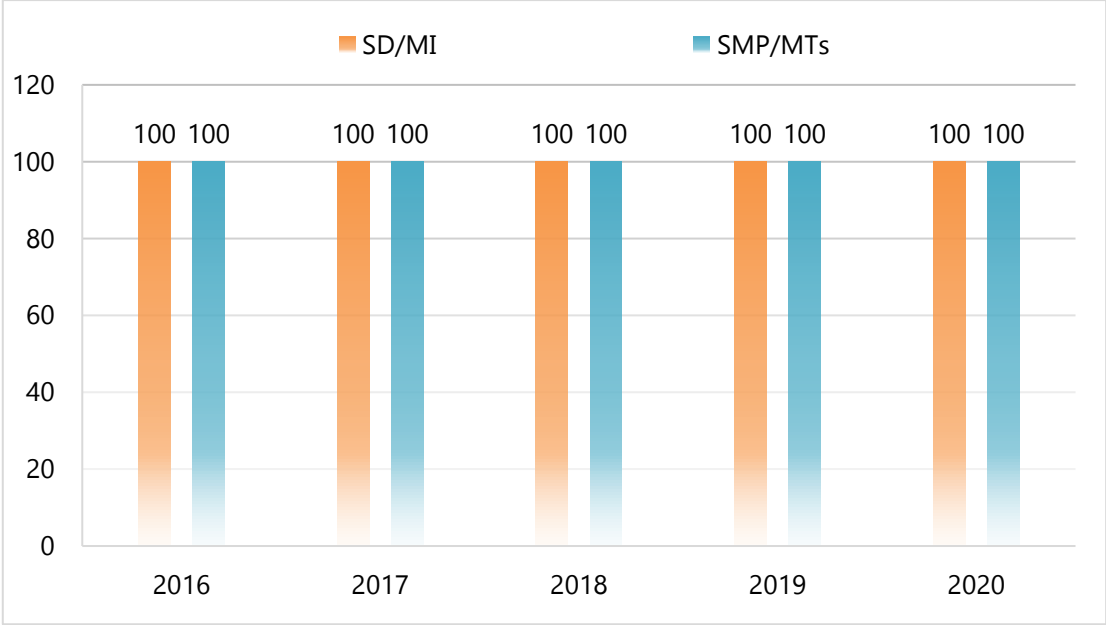
*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Angka Putus Sekolah SD/MI cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Data pada tahun 2020 menunjukkan Angka Putus Sekolah sebesar 0,06% atau setara dengan 32 siswa SD/MI yang putus sekolah dari total 46.066 siswa. Angka Putus Sekolah SMP/MTs cenderung fluktuatif dari tahun 2016 sampai 2020. Terdapat 0,5% atau setara 125 siswa SMP/MTs yang putus sekolah dari total 24.818 siswa pada tahun 2020.

**f. Persentase Lulusan dan Rata-Rata Nilai Ujian**

Persentase kelulusan ujian akhir dan rata-rata nilai ujian dapat menunjukkan kualitas siswa yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Indikator ini berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sebuah daerah. Berikut data mengenai capaian persentase kelulusan ujian akhir dan rata-rata nilai ujian di Kabupaten Manggarai:

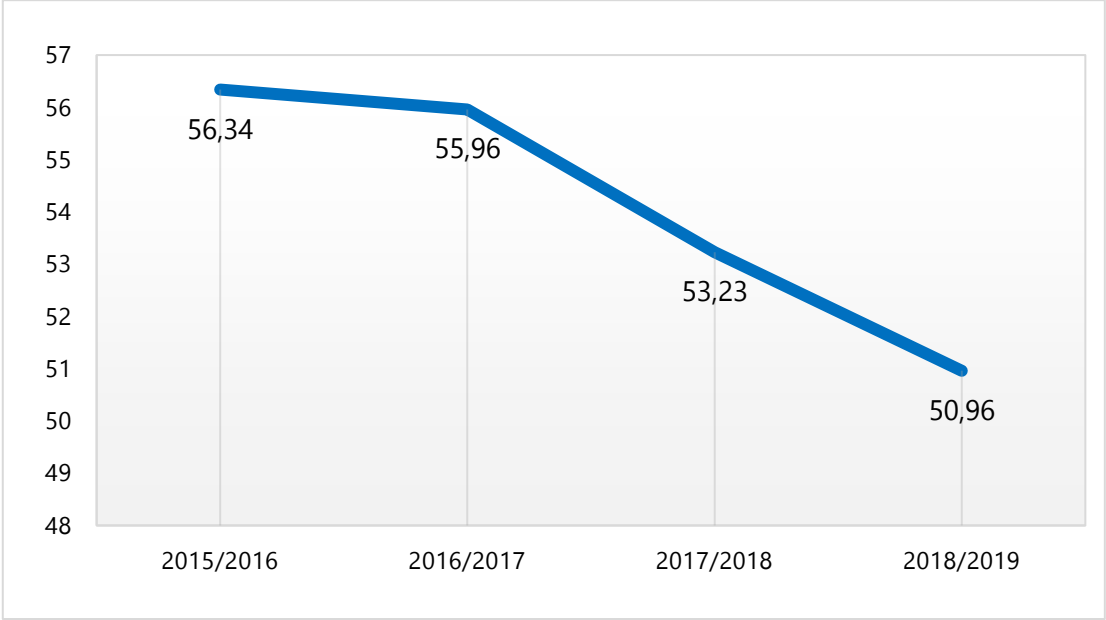
**Grafik 2. 17. Persentase Kelulusan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Hasil kelulusan ujian akhir di setiap jenjang pendidikan menunjukkan capaian yang maksimal dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap siswa di setiap jenjang pendidikan yang mengikuti ujian akhir seluruhnya dinyatakan lulus. Meskipun demikian, berdasarkan rata-rata nilai kelulusan ujian akhir menunjukkan capaian yang belum maksimal. Meskipun seluruh siswa dapat lulus dalam ujian akhir, tetapi nilai yang didapatkan masih tergolong rendah.

**Grafik 2. 18. Rata-Rata Nilai Ujian nasional SMP di Kabupaten Manggarai Tahun 2015/2016 – 2018/2019**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Rata-rata nilai ujian nasional SMP terus mengalami penurunan pada tahun ajaran 2015/2016 sampai tahun 2018/2019. Penurunan terjadi sebesar 5,38 selama 2015 hingga 2018. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas siswa dari tahun 2015 hingga 2018, sehingga perlu diintervensi dengan kebijakan yang lebih baik.

### g. Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Standar Pendidikan Nasional dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi sebagai pendidik professional. Para guru harus berkualifikasi pendidkan S1/D-IV.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian. Hal ini untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional. Keadaan guru menurut kualifikasi jenjang pendidikan dan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 27. Keadaan Guru di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang dan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020**

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	PAUD	388	25	10	10	267	-	-	700
2	SD/MI	160	10	169	27	2403	-	-	2769
3	SMP/MTs	61	20	27	48	1387	5		1548
Jumlah		609	55	206	85	4.057	5	0	5.017

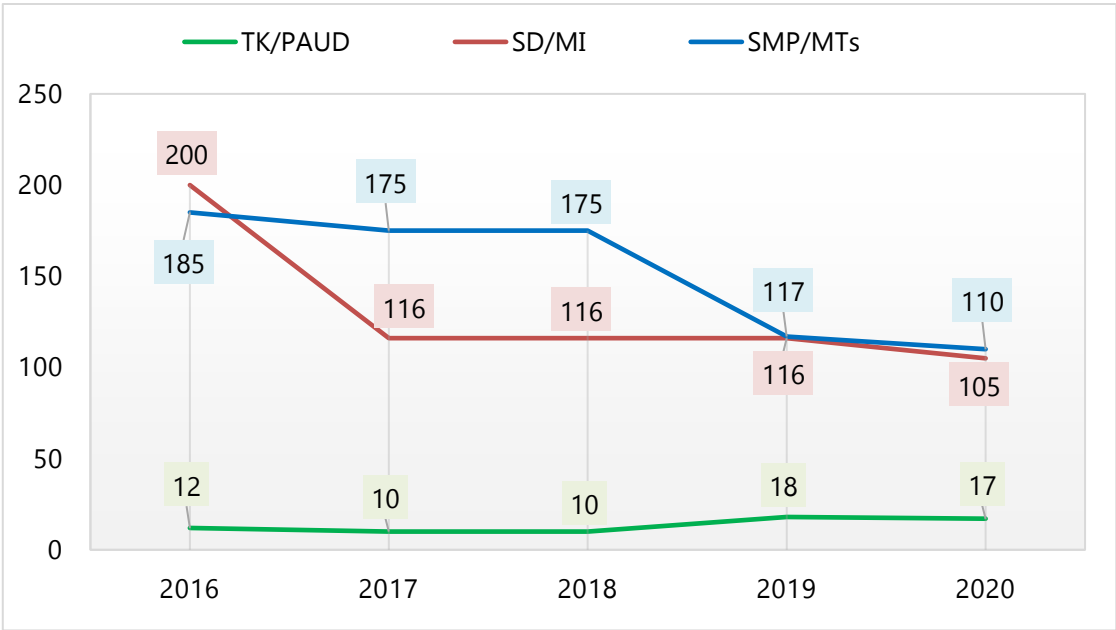
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Kabupaten Manggarai memiliki 4.057 guru (80,87%) guru yang sudah berkualifikasi jenjang pendidikan S1/D-IV. Selain itu, Kabupaten Manggarai juga memiliki 955 guru (19,04%) lainnya yang masih

berkualifikasi pendidikan D-III, D-II dan D-I sederajat. Terdapat 5 guru (0,10%) yang telah menempuh jenjang pendidikan Magister (S-2).

Kualitas guru ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi dan kesesuaian antara bidang keahlian yang dimilikinya dengan mata pelajaran yang diajar di sekolah. Keseuaian tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di setiap sekolah. Berikut adalah data *mismatch* atau ketidaksesuaian mengajar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 19. Jumlah Guru *Mismatch* Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

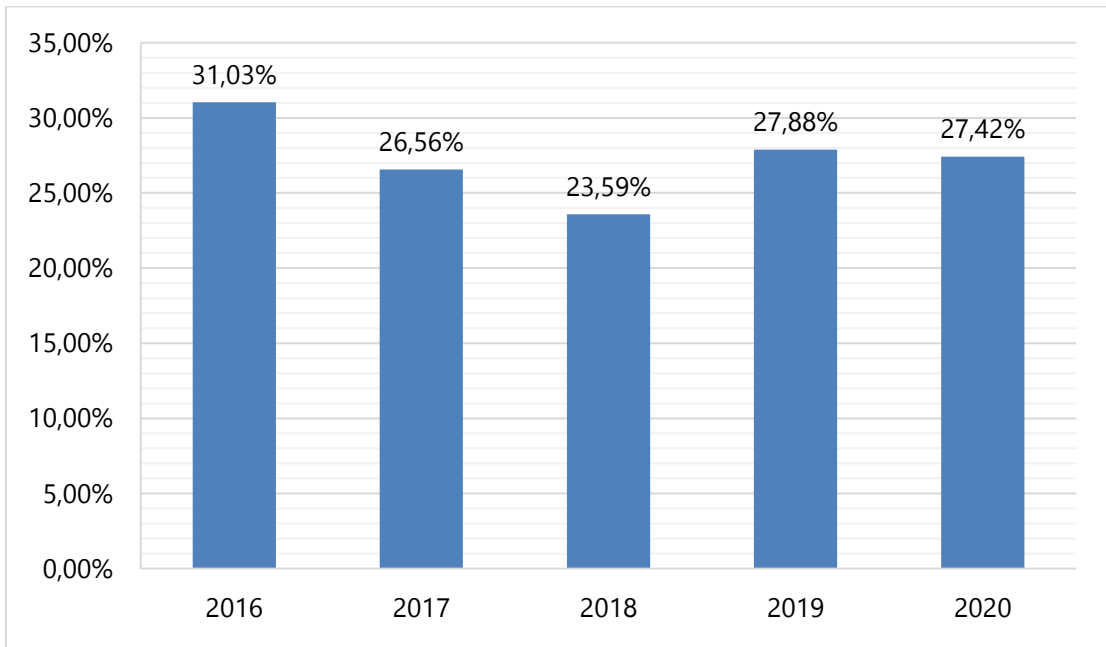


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Kabupaten Manggarai memiliki 232 guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian (4,62% dari total 5017). Guru yang teridentifikasi memiliki keahlian yang tidak sesuai tersebut mengajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Jumlah guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian SD/MI dan SMP/MTs terus berkurang dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian di jenjang pendidikan PAUD jumlahnya fluktuatif dan cenderung meningkat guru pada tahun 2018 hingga 2020. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya memiliki pengaruh yang besar bagi kualitas hasil belajar siswa.

Guru yang bersertifikat pendidik juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan kualitas pengajaran. Sebuah proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik ketika guru sudah memiliki sertifikasi pendidik. Berikut adalah data persentase guru yang bersertifikat pendidik di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 20. Persentase Guru di Seluruh Jenjang Pendidikan yang Bersertifikat Pendidik Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Kabupaten Manggarai masih memiliki sejumlah guru yang belum bersertifikat pendidik. Ada sekitar 72,58% guru di Kabupaten Manggarai yang belum bersertifikat pendidik pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya guru yang tidak lulus mengikuti Ujian Kompetensi Guru. Selain itu, kuota yang diberikan oleh pusat masih terbatas. Kuota yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan riil guru yang harus mengikuti ujian kompetensi.

**h. Rasio Guru dan Murid**

Rasio guru dan murid memperlihatkan kualitas pelayanan dalam pembelajaran. Hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Manggarai memperlihatkan rasio guru dan murid yang mencukupi selama 2016 hingga 2020. Berikut adalah data mengenai rasio guru dan murid di Kabupaten Manggarai:



Tabel 2. 28. Rasio Guru dan Siswa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PAUD/TK	1 : 18	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 20
2.	SD/MI	1 : 19	1 : 20	1 : 17	1 : 19	1 : 18
3.	SMP/MTs	1 : 18	1 : 19	1 : 17	1 : 19	1 : 18
4.	SMA/MA/SMK	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Rasio guru dan murid masih memperlihatkan kondisi yang ideal atau sesuai dengan Standar Proses (Permendiknas No. 41 tahun 2007). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan guru di Kabupaten Manggarai masih memadai. Capaian ini harus tetap dijaga dengan baik untuk mendukung perbaikan akses pendidikan.

i. Akreditasi Sekolah

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicermati melalui status akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah memperlihatkan adanya standarisasi pelayanan minimum pada setiap satuan pendidikan. Berikut adalah data akreditasi sekolah di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

Tabel 2. 29. Jumlah Sekolah yang Sudah Terakreditasi dan Status Akreditasinya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Peringkat Akreditasi	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/SDLB	255	A	2	3	5	6	6
		B	85	95	100	106	94
		C	70	75	80	84	79
		Belum Terakreditasi	40	50	55	66	68
SMP/MTs/SMPLB	85	A	3	3	3	5	7
		B	25	30	35	41	49
		C	6	8	10	13	17
		Belum Terakreditasi	5	10	11	13	16

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Proporsi akreditasi sekolah di seluruh jenjang pendidikan didominasi oleh peringkat B, C dan belum terakreditasi. Peringkat A proporsinya masih yang paling rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah di Kabupaten Manggarai sebagian besar masih memerlukan peningkatan standarisasi dari sisi sarana, prasarana maupun pelayanan pendidikan.

j. **Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek yang menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar. Indikator ini sangat penting sebagai sebuah komponen untuk menilai akses pendidikan. Berikut ini data terakhir kondisi sarana pendidikan di Kabupaten Manggarai tahun 2020:

**Tabel 2. 30. Kondisi Sarana Pendidikan di Kabupaten Manggarai Menurut Jenjang Pendidikan Pada Tahun 2020**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
PAUD	286	423	495	475	16	4
SD/MI	255	2047	2221	1630	391	200
SMP/MTs	85	845	787	418	51	318
Total	626	3315	3503	2523	458	522

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021.

Kondisi ruang kelas PAUD yang dalam kondisi baik sebesar 96% pada tahun 2020, kemudian ruang kelas SD/MI yang berkondisi baik sebesar 73,3%, dan ruang kelas SMP/MTs yang berkondisi baik sebesar 53,11%. Data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan kondisi ruang kelas kategori rusak ringan dan rusak berat, khususnya di jenjang pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs. Perbaikan ini harus dijalankan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar dan mendukung gerakan wajib belajar selama 9 tahun.

Kualitas pendidikan juga dapat ditunjukkan melalui indikator-indikator yang sifatnya pendukung. Indikator ini secara langsung berimplikasi terhadap kualitas pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai kehadiran guru dan cakupan anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 31. Persentase Kehadiran Guru SD dan SMP, dan Cakupan Anak Kebutuhan Khusus yang Terlayani Pendidikan Khusus di Kabupaten Manggarai Pada Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kehadiran Guru SMP	96%	97%	97%	99%	96%
2	Persentase Kehadiran Guru SD	99%	97%	97%	98%	99%
3	Cakupan anak Kebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus	19	25	30	42	19

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase kehadiran guru di jenjang pendidikan SD dan SMP cenderung menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2020. Meskipun demikian, kehadiran guru di Kabupaten Manggarai menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kehadiran guru terendah berada di angka 96% pada tahun 2016 hingga 2020.

Anak kebutuhan khusus yang terlayani pendidikan khusus selama 2016 hingga 2020 jumlahnya cenderung fluktuatif. Angka ini bahkan mengalami penurunan sebanyak 23 anak atau 45,23% pada tahun 2020. Kondisi ini harus diintervensi dengan baik untuk meningkatkan inklusifitas pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Manggarai.

## 2. Kesehatan

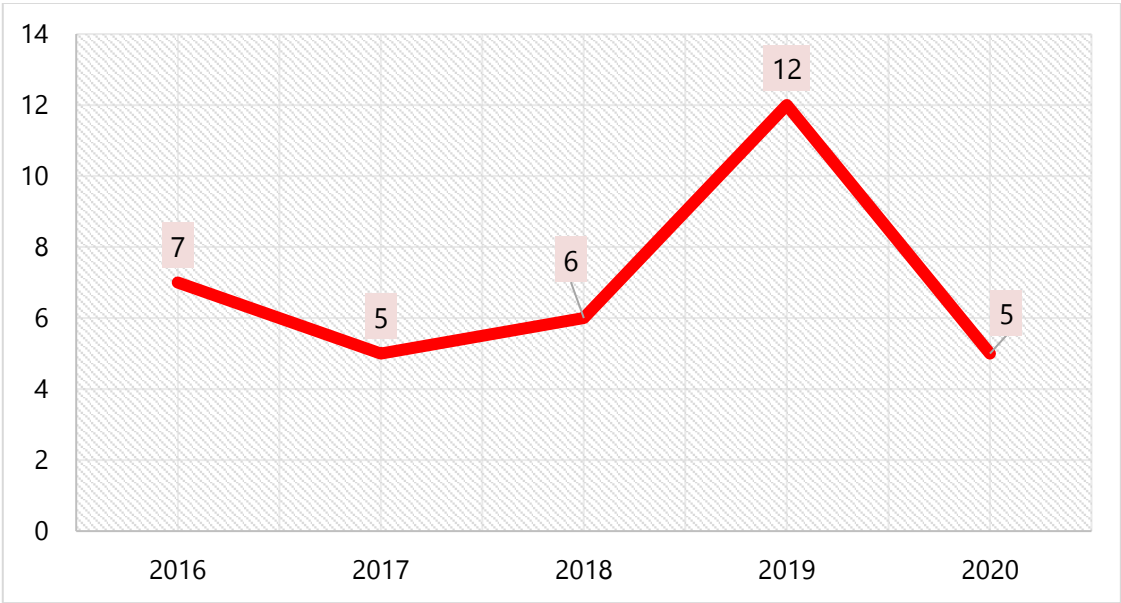
Komitmen Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan selama tahun 2016-2020 sangat nyata melalui pembangunan berbagai pusat pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdes. Disamping itu Pemerintah Daerah juga telah melengkapi berbagai sarana dan prasarana pada Badan Unit Pelayanan Umum (BLUD) RSUD dr. Ben Mboi Ruteng. Terdapat beberapa indikator utama yang menunjukkan kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data capaian urusan kesehatan di Kabupaten Manggarai:

### a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau

pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Berikut adalah data mengenai AKI di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 21. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021.*

AKI di Kabupaten Manggarai menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama tahun 2016-2020. Tahun 2016 terjadi 7 kasus kematian ibu atau sebesar 113,23/ 100.000 KH, turun menjadi 5 kasus atau 81,93/100.000 KH tahun 2017, naik lagi menjadi 6 kasus atau 98,36/100.000 KH tahun 2018 dan tahun 2019 naik 2 kali lipat menjadi 12 kasus atau 202,77/100.000 KH. Pada tahun 2020 menurun menjadi menjadi 5 kasus 79,05/100.000 KH. Kasus kematian ibu terbesar selama 5 tahun ditemukan di kecamatan Reok sebanyak 6 kasus, sedangkan kasus kematian ibu terkecil di Kecamatan Satar Mese Utara, yakni sebanyak 0 kasus atau tidak ada kematian ibu.

Penyebab kematian ibu lazim dipilah berdasarkan penyebab langsung dan tidak langsung. Rata-rata penyebab langsung kematian ibu di Manggarai tahun 2016-2020 adalah pendarahan sebanyak 17 kasus

(48,6%), hipertensi 5 kasus (14,3%), eklamsi 5 kasus (14,3%), kelainan jantung 3 kasus (8,6%), sedangkan 5 kasus lainnya (14,3%) akibat infeksi puerperalis, AFLP (*Acute Fatty Liver of Pregnancy*), ILO (Infeksi Luka Operasi), emboli air ketuban, hipertiroid. Selain itu, AKI bisa disebabkan oleh penyebab tidak langsung akibat penyakit yang diderita sebelum dan selama kehamilan. Penyakit tersebut seperti anemia, malaria, hepatitis, jantung, TB Paru, HIV/AIDS, dan lain-lain.

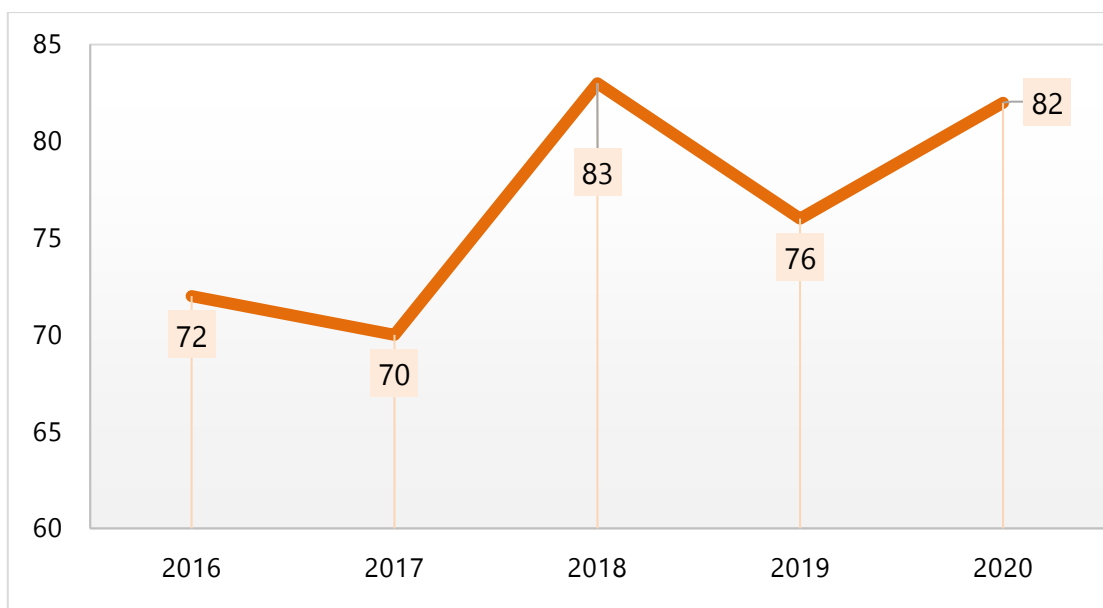
Penyebab kematian ibu tidak langsung lainnya sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil, status kesehatan reproduksi ibu hamil, seperti kehamilan resiko tinggi yang tidak disadari ibu hamil dan tidak terdeteksi oleh tenaga kesehatan, kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat, aksesibilitas ke pusat pelayanan kesehatan, serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu, status ekonomi, pendidikan, kurangnya informasi, tradisi sosial budaya, serta faktor geografis turut pula mempengaruhi kematian ibu.

Beberapa kasus kematian ibu sering juga ditemukan penyebabnya berhubungan dengan "4 Terlalu" (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak) dan "3 Terlambat" yakni terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kegawatdaruratan obstetrik, terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan oleh keadaan geografis dan masalah transportasi, serta terlambat memperoleh penanganan yang adekuat ditempat rujukan, karena kurangnya sumber daya dan fasilitas kesehatan pada pusat rujukan.

#### **b. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi (AKB) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang sekaligus juga mencerminkan umur harapan hidup pada saat lahir. AKB adalah jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 AKB nasional mencapai 24/1.000 KH dengan kematian neonatal 15/1.000 KH. AKB merupakan salah satu indikator dalam RPJMN 2015-2019, Negara diharapkan menekan AKB menjadi 12/1.000 KH, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan AKB menjadi 0 atau tidak mengharapkan adanya Kematian Bayi.

**Grafik 2. 22. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2020*

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Manggarai menunjukkan fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2020. Kasus kematian bayi pada tahun 2016 berjumlah 72 kasus atau 11,97/1000 KH. Kemudian menurun menjadi sebanyak 70 kasus pada tahun 2017 atau 11,47/1000 KH dan pada tahun 2018, jumlah kematian bayi yang dilaporkan kembali meningkat menjadi 83 kasus atau 13,60/1.000 KH. Jumlah kematian bayi kembali mengalami penurunan menjadi 76 kasus atau 12,84/ 1.000 KH pada tahun 2019 dan kembali meningkat ditahun 2020 yaitu 82 kasus atau 13,43/1.000 KH.

Penyebab kematian bayi disebabkan oleh karena Asfiksia sebesar 21,9%, BBLR 14,7%, Cacat bawaan 8,2%, Pneumonia 5,1% dan penyebab lain-lain 50,1% (Penyebab lain-lain seperti, MAS (*Meconium Aspirasi Syndrom*), SNAL (*Syndrom Neonatal Awitan Lanjut*), SIDS (*Sudden Infant Death Syndrome*), Hipoksia, Kejang, Diare, Ikterus dan Masalah Laktasi menjadi penyebab kematian pada bayi). Penyebab terjadinya Asfiksia merupakan keadaan di mana bayi tidak dapat bernapas spontan setelah bayi lahir. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat lahir. Masalah ini berhubungan erat dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama dan sesudah persalinan. BBLR

yaitu berat badan bayi baru lahir kurang dari 2500 gram yang ditimbang segera setelah lahir. Adapun penyebab BBLR antara lain karena kelahiran prematur, faktor ibu seperti umur, paritas, dan gizi selama hamil, komplikasi kehamilan, kehamilan kembar, dan lain sebagainya. Pada umumnya, bayi yang lahir prematur/ kurang dari usia 37 minggu kehamilan memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal.

Kematian bayi dengan BBLR di antaranya karena prematuritas, dan kasus lainnya disebabkan oleh kelahiran kembar, dan kelahiran dari ibu yang juga mengalami Hipertensi Dalam Kehamilan. Pneumonia yaitu kondisi dimana seseorang mengalami infeksi virus, bakteri dan jamur yang menimbulkan peradangan pada kantung udara disalah satu atau kedua sisi paru-paru. Kantung udara bisa berisi cairan atau pus (dahak purulent) yang dapat mengancam jiwa terutama pada bayi dan anak. Kelainan bawaan merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi. Penyebabnya adalah faktor genetik dan mekanik, seperti infeksi kehamilan, konsumsi obat-obatan, radiasi, hormonal. Kelainan bawaan menjadi salah satu penyebab kematian.

Faktor lain penyebab kematian Bayi adalah infeksi pada ibu hamil, tidak melakukan pemeriksaan ANC, penolong persalinan, status gizi ibu hamil yang Kurang Energy Kronis (BUMIL KEK), penanganan persalinan yang kurang baik, cakupan imunisasi bayi yang rendah, masih tingginya penyakit-penyakit infeksi berbasis lingkungan selain ISPA dan diare, seperti TB Paru, Asma, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor seperti sosial ekonomi, pendidikan, higiene, topografi, sarana transportasi, sanitasi lingkungan, kualitas dan kuantitas tenaga yang terbatas, serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bayi yang masih terbatas.

### **c. Status Gizi Balita**

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar *World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan

menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Indonesia adalah 3,8%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 11,4%. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017, yaitu persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan sebesar 3,5% dan persentase gizi kurang sebesar 11,3%. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0-23 bulan tahun 2018 adalah Nusa Tenggara Timur. Berikut data status gizi balita di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 32. Data Status Gizi Balita Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

Kriteria	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Balita Gizi Kurang (BB/U)	251	365	4135	464	2567
Balita Pendek (TB/U) STUNTING	NA	40	1900	7049	5322
Balita Gizi Buruk	25	32	136	207	290

Sumber: Dinas Kesehatan

Kondisi balita gizi kurang, balita pendek/*stunting*, dan balita gizi buruk jumlahnya fluktuatif dan cenderung meningkat dibandingkan kondisi awal yaitu tahun 2016/2017. Balita gizi kurang meningkat 2.316 dibanding tahun awal 2016, balita pendek/*stunting* meningkat 5.282 dibanding tahun awal 2017, dan balita gizi buruk meningkat 265 dibanding tahun awal 2016. Tetapi, peningkatan tersebut diakibatkan oleh masifnya pelaksanaan pelacakan dan *sweeping* kasus gizi buruk, balita gizi kurang, dan balita pendek pada ruang lingkup wilayah pelayanan fasilitas kesehatan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung sasaran meningkatkan status gizi kesehatan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya status gizi masyarakat adalah belum optimalnya pemberian makanan tambahan



(PMT), masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak serta belum optimalnya pelaksanaan program kebun gizi oleh pemerintah daerah.

Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya dalam rangka meningkatkan penerapan gizi seimbang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi, yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan, menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

**d. Cakupan Pelayanan Kesehatan**

Cakupan pelayanan kesehatan dapat dicermati melalui indikator sarana prasarana yang tersedia hingga rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Kedua indikator tersebut berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat, ibu, bayi dan balita. Berikut adalah data terkait cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 33. Rasio dan Cakupan Pelayanan Sarana Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	2,46 %	1,95%	2,37%	20,21%	20,21
2	Rasio Poskesdes Per Satuan Penduduk	1 : 0,02 (85 unit)	1 : 0,02 (85 unit)	1 : 0,02 (85 unit)	1 : 0,02 (85 unit)	1 : 0,02 (85 unit)
3	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk	NA	0,06	0,024	0,25	0,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021

Rasio sarana pelayanan kesehatan menunjukan kinerja yang baik tanpa adanya penurunan rasio selama tahun 2016 hingga 2020. Hal tersebut berarti jumlah penduduk yang ada selalu diimbangi oleh sarana kesehatan yang tersedia. Meskipun demikian, jumlah sarana kesehatan masih perlu ditingkatkan agar seluruh penduduk dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.

Cakupan pelayanan rumah sakit juga salah satu indikator yang mampu merepresentasikan cakupan pelayanan kesehatan. Indikator ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Berikut adalah data mengenai cakupan pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 34. Cakupan Pelayanan BLUD RSUD dr. Ben Mboi**

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BOR (%) (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)	77%	81%	80%	82%	54%
2	ALOS (hari) (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	3 hari	3 hari	4 hari	3 hari	6 hari
3	TOI (hari) (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	3 hari
4	BTO (kali) (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	92 kali	93 kali	77 kali	85 kali	59 kali
5	GDR (0/00) (Gross Death Rate angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar)	35/00	34/00	31/00	37/00	45/00
6	NDR (0/00) (Net Death Rate =angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar)	20/00	19/00	22/00	20/00	26/00
7	Persentase Kunjungan rawat jalan	63,61%	65,16%	68,41%	79,91%	70,01%
8	Persentase Pasien rawat Inap	31,37%	30,05%	27,64%	16,11%	25,22%
10	Tempat tidur dewasa	NA	105	105	105	146
11	Tempat Tidur neo	NA	11	11	11	17

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Tempat Tidur anak	NA	21	21	21	21
13	Rata-rata pemakaian tempat tidur	NA	81	79	83	NA
14	Frekuensi pemakaian tempat tidur	NA	93	77	85	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021

Angka penggunaan tempat tidur di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 menurun 28% dibanding tahun sebelumnya. Penggunaan tempat tidur ini diikuti dengan peningkatan pasien rawat inap sebesar 9,11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada penambahan jumlah tempat tidur di rumah sakit, sehingga ketika ada penambahan persentase pasien yang dirawat inap tidak serta merta membuat angka penggunaan tempat tidur di rumah sakit rasionya menjadi meningkat.

**Tabel 2. 35. Rasio Pelayanan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio dokter per satuan penduduk	5%	4,85%	6,96%	11,11%	10%
2	Rasio tenaga keperawatan per satuan penduduk (1:851)	192,93%	197,06%	50,72%	57,68%	11,9%
3	Rasio tenaga kebidanan per satuan penduduk (1:1.000)	326,95%	169,97%	58,80%	64,50%	59,3%
4	Rasio tenaga nutrisisionis per satuan penduduk (1:4.545	12,78	11,69	20,30%	31,08%	41,6%
5	Rasio tenaga medik per satuan penduduk	5 %	3,99%	5,3%	6,21%	10%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021

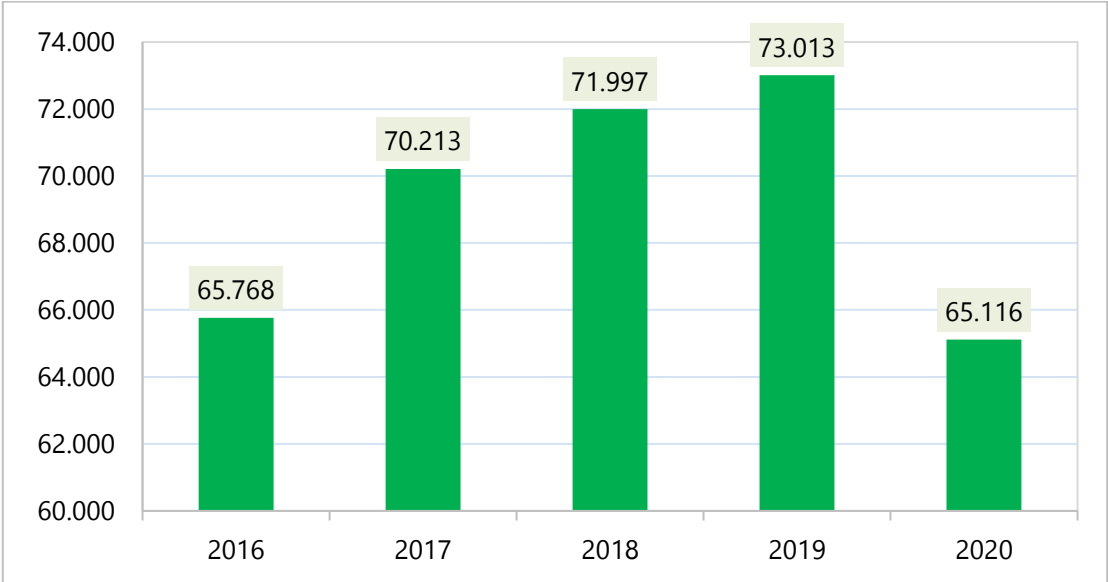
BOR, BTO di BLUD BLUD RSUD dr. Ben Mboi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. TOI juga menunjukkan data capaian yang cukup lama. Hal ini disebabkan sejak Januari 2020 terjadi penambahan jumlah tempat tidur rawat inap di mana sebelumnya sebanyak 137 tempat tidur, bertambah menjadi 184 tempat tidur pada tahun 2020. Di samping itu, sejak bulan Maret 2020 di mana RSUD dr. Ben Mboi ditetapkan

sebagai salah satu rumah sakit *second line* rujukan penanganan Covid-19 dan mulai melayani pasien Covid – 19. Kondisi ini mengakibatkan penurunan cakupan pasien rawat inap selain Covid-19 dan ini berlangsung hingga akhir Desember 2020.

Pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap hanya pasien dengan gejala sakit yang berat. Hal ini bisa dilihat pada data ALOS yang cukup lama pada tahun 2020. Penambahan jumlah tempat tidur pada tahun 2020 tidak diikuti dengan penambahan pelayanan spesialisik, di mana hingga tahun 2020 pelayanan spesialisik yang tersedia di BLUD RSUD dr. Ben Mboi adalah pelayanan spesialisik Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan dan Kandungan, Penyakit Anak, Jantung, dan THT. Kondisi ini masih perlu mendapatkan perhatian karena berimplikasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

Capaian pembangunan urusan kesehatan juga dapat dilihat dari penanggulangan dan pencegahan terhadap penyakit penyakit menular maupun tidak menular. Data ini berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Berikut adalah data terkait capaian kesehatan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit di Kabupaten Manggarai:

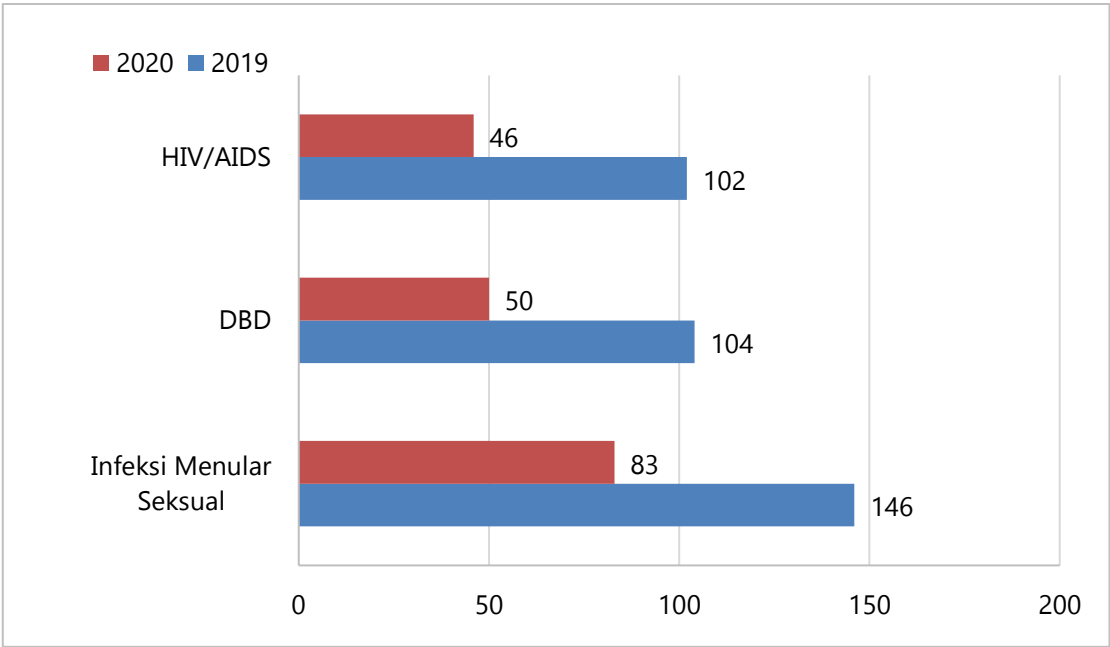
**Grafik 2. 23. Jumlah Bayi yang diimunisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021*

Pemberian imunisasi kepada bayi merupakan langkah penting dalam mencegah penyakit baik menular dan tidak menular yang akan berpengaruh ketika bayi tersebut bertumbuh dan berkembang. Tren bayi yang diimunisasi meningkat dengan jumlah peningkatan sebesar 7.245 dari tahun 2016 hingga 2019. Sedangkan pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah bayi yang diimunisasi sebesar 7.897. Penurunan tersebut jumlahnya lebih besar dibanding jumlah peningkatan dalam 4 tahun terakhir.

**Grafik 2. 24. Jumlah Penderita Penyakit DBD, HIV/AIDS, dan Infeksi Menular Seksual di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 – 2020**



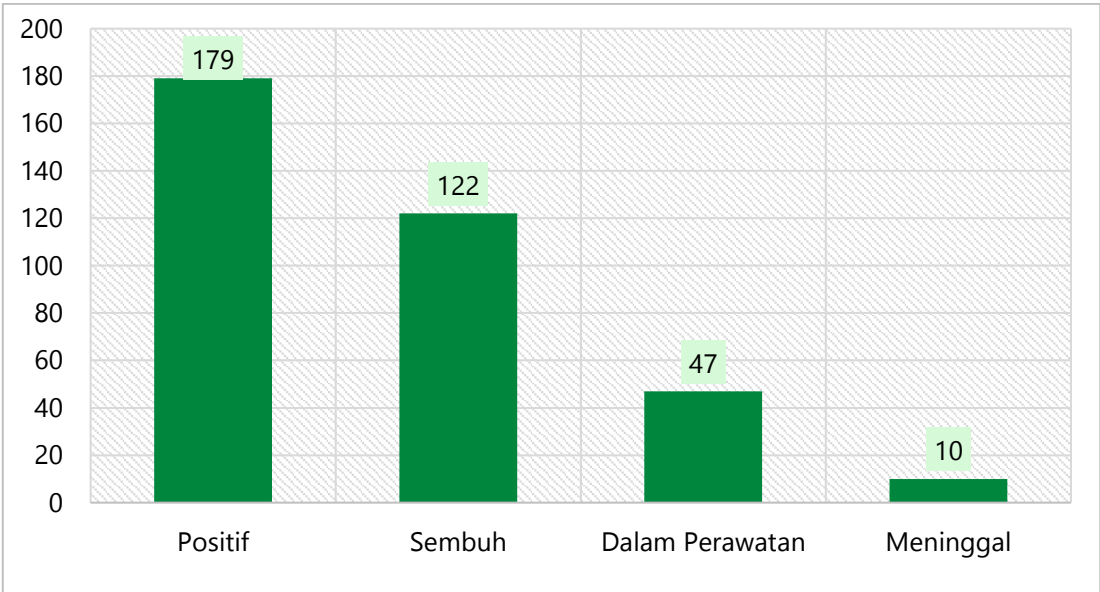
*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah penurunan penderita penyakit HIV/AIDS, DBD, dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kabupaten Manggarai menunjukkan angka penurunan pada tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi antara 45% - 56,8%. Hal tersebut merupakan capaian yang positif, sehingga untuk periode selanjutnya penderita penyakit menular maupun tidak menular jumlahnya bisa lebih ditekan.

Selain penyakit tersebut, kondisi saat ini seluruh level pemerintahan baik itu daerah, pusat, bahkan hingga level internasional dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Pandemi tersebut mengancam kesehatan dan aktivitas sosial-ekonomi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk sama-sama mencegah dan mengatasi penyebarannya.

Berikut adalah perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Manggarai terhitung tanggal 9 Maret 2021:

**Grafik 2. 25. Statistik Covid-19 di Kabupaten Manggarai Per 9 Maret 2021 (Orang)**



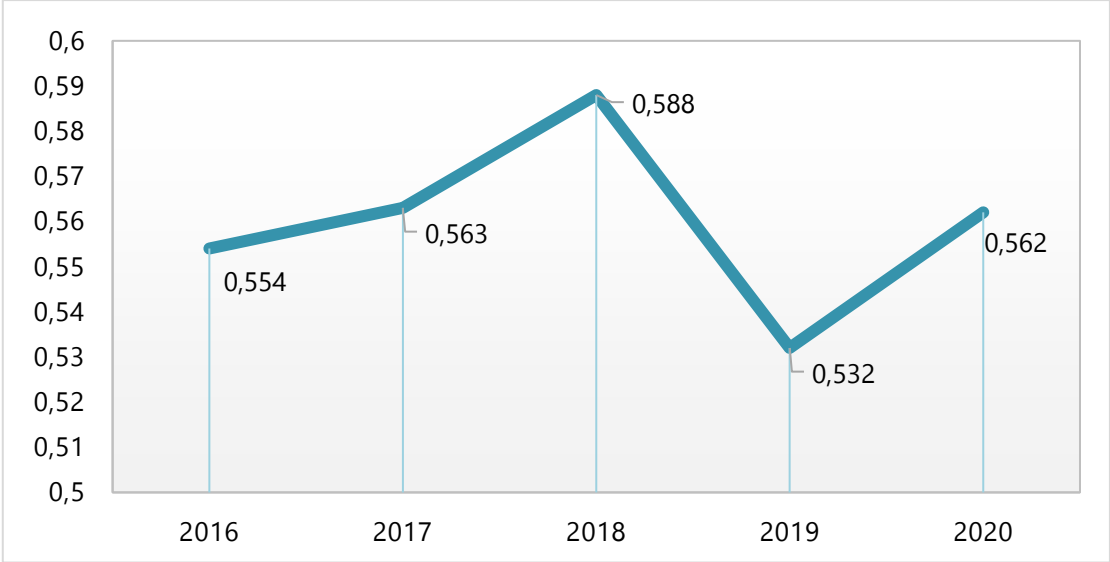
*Sumber: Satgas Covid-19 Provinsi NTT*

Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kabupaten Manggarai sebesar 68,15% per 9 maret 2021. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 86,78%. Sementara persentase pasien Covid-19 di Kabupaten Manggarai yang meninggal adalah 5,58%. Hal tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yaitu sekitar 2,71% dan rata-rata dunia sebesar 2,22%. Hal tersebut tentunya menjadi catatan bagi pemerintah untuk lebih mempercepat proses 3T yaitu *tracing*, *testing*, dan *treatment*, sehingga angka konfirmasi positif dan angka meninggal bisa lebih ditekan. Edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan kewajiban 5 M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas) juga harus terus dijalankan.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat melalui beberapa indikator utama. Uraian mengenai kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan penataan ruang. Berikut adalah gambaran data beberapa indikator tersebut di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 26. Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik terhadap Panjang Jalan Total di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Angka)**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, 2021

Kondisi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai masih terbilang rendah. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut tidak signifikan yaitu 0,034 pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan sebesar 0,056 pada tahun 2019. Penurunan dalam satu tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan selama tiga tahun dari tahun 2016 hingga 2018. Kondisi penurunan proporsi jalan dalam kondisi baik tersebut bisa diakibatkan oleh tingginya laju kerusakan jalan yang tidak diimbangi oleh pemeliharaan jalan dan pengawasan konstruksi jalan yang belum optimal.

**Tabel 2. 36. Data Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Panjang Jalan Seluruh Kabupaten Tahun 2016 – 2020**

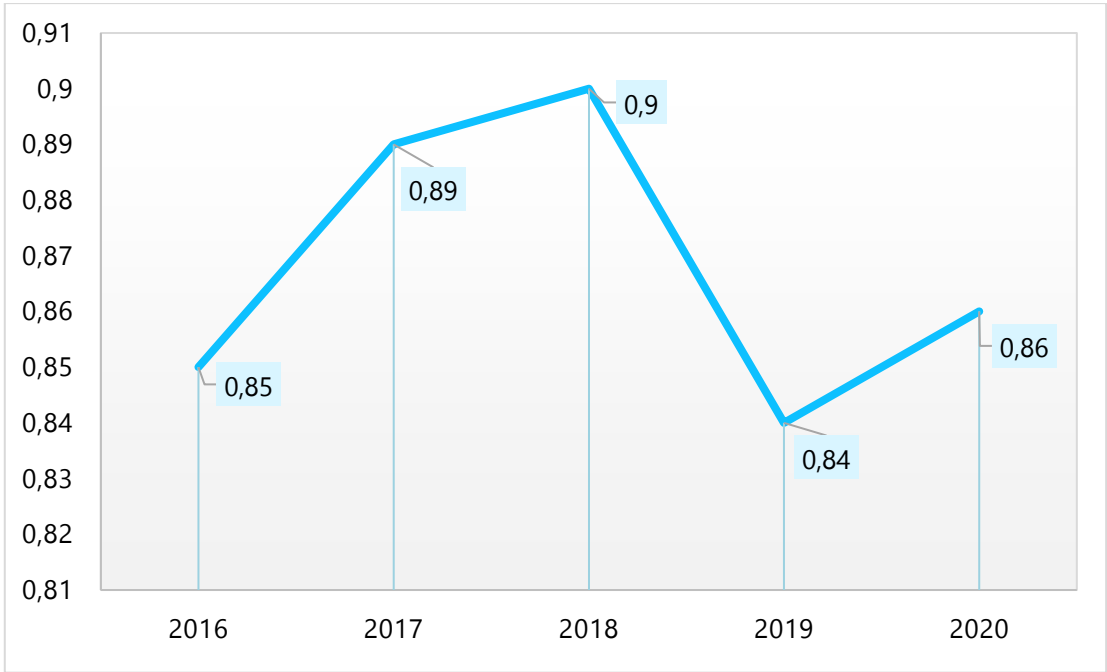
No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	53.17	54.32	56.7	51.06	54.5
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (km)	1700.89	1700.89	1700.89	1904.6	1904.6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, 2021

Panjang jalan kabupaten stagnan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Panjang jalan kabupaten meningkat pada tahun 2019. Total pertumbuhan jalan kabupaten hingga tahun 2020 sebesar 203,71 Km.

Persentase panjang jalan kabupaten dalam Kondisi baik adalah panjang jalan dengan kondisi baik dari total panjang jalan seluruhnya. Kondisi akhir 2020 persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 54,50% (1038km) dari targer 67,55%, dengan tingkat capaian 80,68%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan indikator yang sama, di mana target sebesar 64,32%, realisasi sebesar 51,06%, maka tingkat capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,44%.

**Grafik 2. 27 Rasio Panjang Jalan dilalui Roda Empat terhadap Total Panjang Jalan (km)**

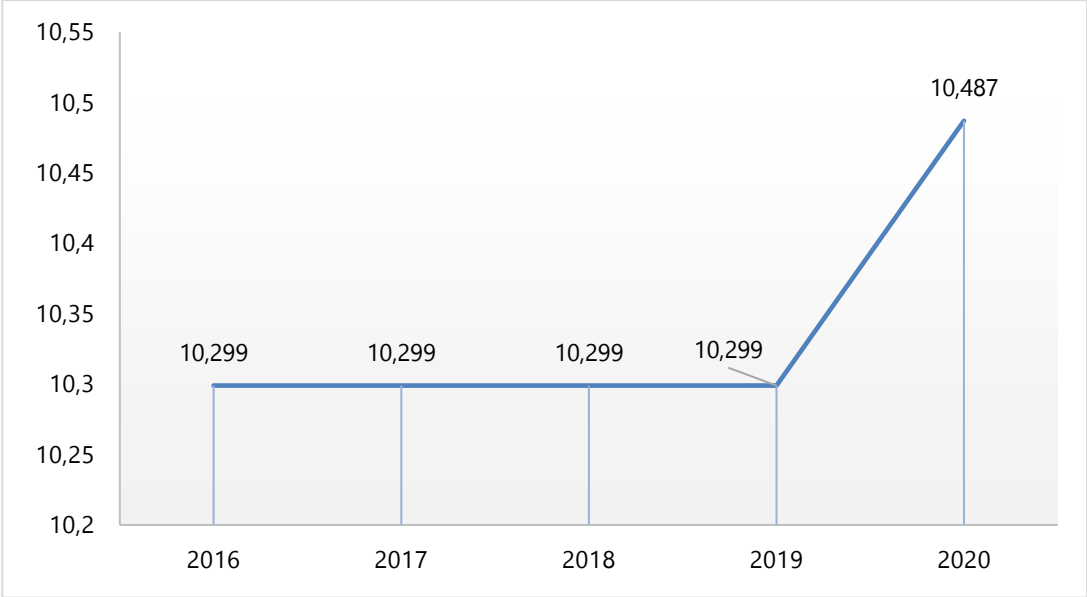


*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, 2020*

Panjang jalan dilalui roda 4 adalah perbandingan panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 terhadap panjang jalan seluruhnya. Realisasi panjang jaringan jalan yang dapat dilalui roda 4 adalah 1629,50km dari total panjang jalan seluruhnya 1904,60km atau dengan rasio sebesar 0,86 pada tahun 2020. Jalan yang dapat dilalui roda empat sepanjang 1629,50km Sampai akhir 2020. Jalan ini terdiri dari hotmix sepanjang 231,58 km, aspal sepanjang 1073,74km dan kerikil 324,18km.



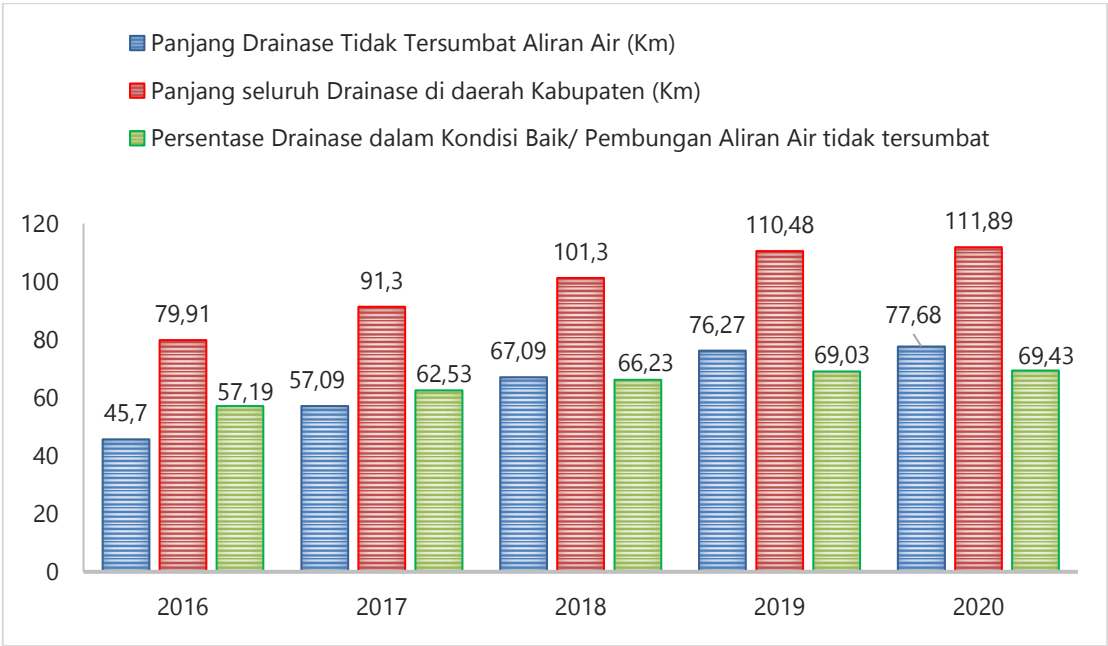
**Grafik 2. 28. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 (meter)**



Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, 2020

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 dilakukan realisasi pembangunan drainase sepanjang 188 sehingga total panjang jalan yang memiliki trotar dan drainase adalah sepanjang 10.487 meter. Berikut adalah data mengenai drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 29. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Tidak Tersumbat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

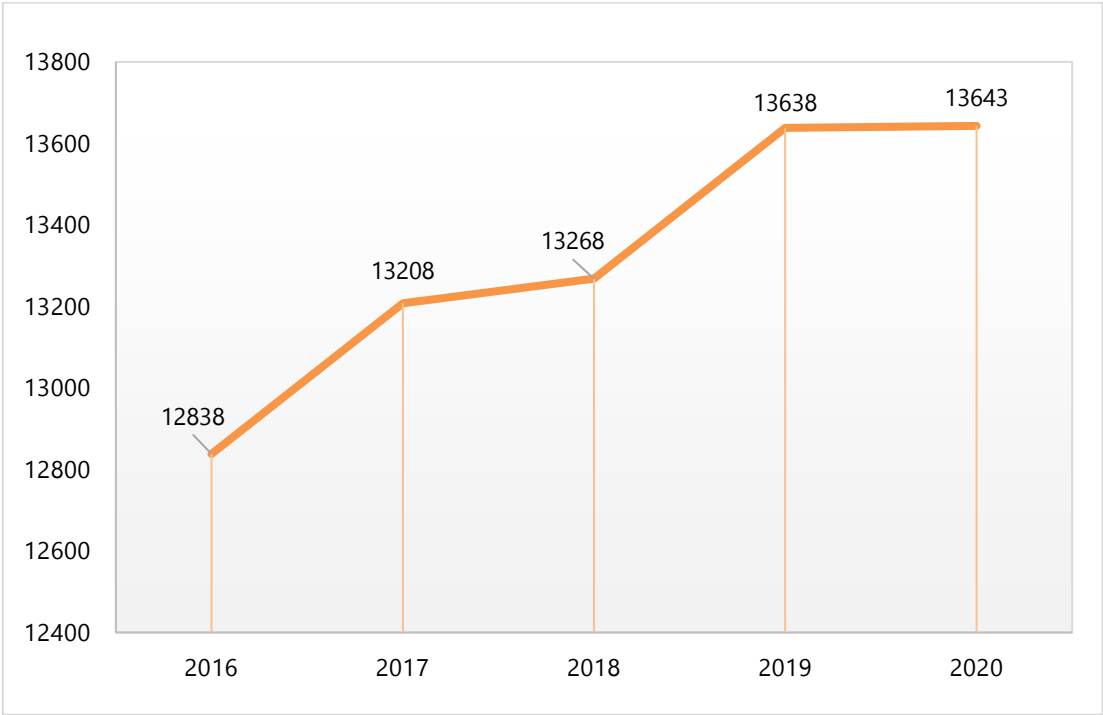


Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, 2020

Seluruh indikator drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat di Kabupaten Manggarai menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Total peningkatan panjang drainase tidak tersumbat aliran air sebesar 31,98 Km pada tahun 2016 hingga 2020. Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten bertambah sepanjang 191,8 Km pada periode yang sama. Persentase drainase dalam kondisi baik mengalami total peningkatan sebesar 12,24% pada tahun 2016 hingga 2020.

Irigasi dalam kondisi baik juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja urusan PUPR. Indikator ini dapat mendukung capaian indikator di rumpun urusan ekonomi. Berikut adalah data mengenai luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 30. Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik (Ha) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Manggarai 2021*

Indikator luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2020. Rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 161 ha. Namun hanya terjadi peningkatan 5 ha pada tahun 2019 hingga 2020. Persoalan ini perlu diintervensi melalui percepatan laju rehabilitasi jaringan irigasi terhadap kebocoran irigasi yang ada.

**Tabel 2. 37. Presentase Ketersediaan Jaringan Irigasi (%) dan Panjang Jaringan Irigasi Primer (km) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Ketersediaan Jaringan Irigasi	20,10%	21,94%	22,18%	22,81%	21,80%
2	Panjang Jaringan Irigasi (Primer)	88,67 Km	99,77 Km	10,87 Km	11,23 Km	98,75 Km

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, 2021

Rasio jaringan irigasi mengalami peningkatan sebesar 2,71% dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Data ini mengalami penurunan 1,01% pada tahun 2020. Sedangkan pada jaringan irigasi primer mengalami penurunan yang signifikan yaitu sepanjang 88,9 km pada tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan signifikan sebesar 87,52 km pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi belum berjalan optimal.

**Tabel 2. 38. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Daya Tampung TPS	87.735 M <sup>3</sup>	87.735 M <sup>3</sup>	87.735 M <sup>3</sup>	87.735 M <sup>3</sup>	87.735 M <sup>3</sup>
2	Jumlah penduduk	324.016	329.198	359.071	329.724	349.090
3	TPS terhadap jumlah penduduk	0,27	0,27	0,24	0,27	0,25

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, 2021

Rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk. Rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,02% pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena jumlah penduduk terus bertambah tetapi jumlah daya tampung sampah tidak ada peningkatan selama 2016 hingga 2020. Daya tampung yang semakin berkurang atau stagnan tersebut dikarenakan tidak adanya pengolahan lebih lanjut terhadap sampah

di TPA. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dan belum adanya proses 3R dalam pengelolaan sampah serta penanganan sampah berbasis komunitas seperti bank sampah menjadikan pengelolaan persampahan belum optimal.

**Tabel 2. 39. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kabupaten Manggarai Tahun 2019**

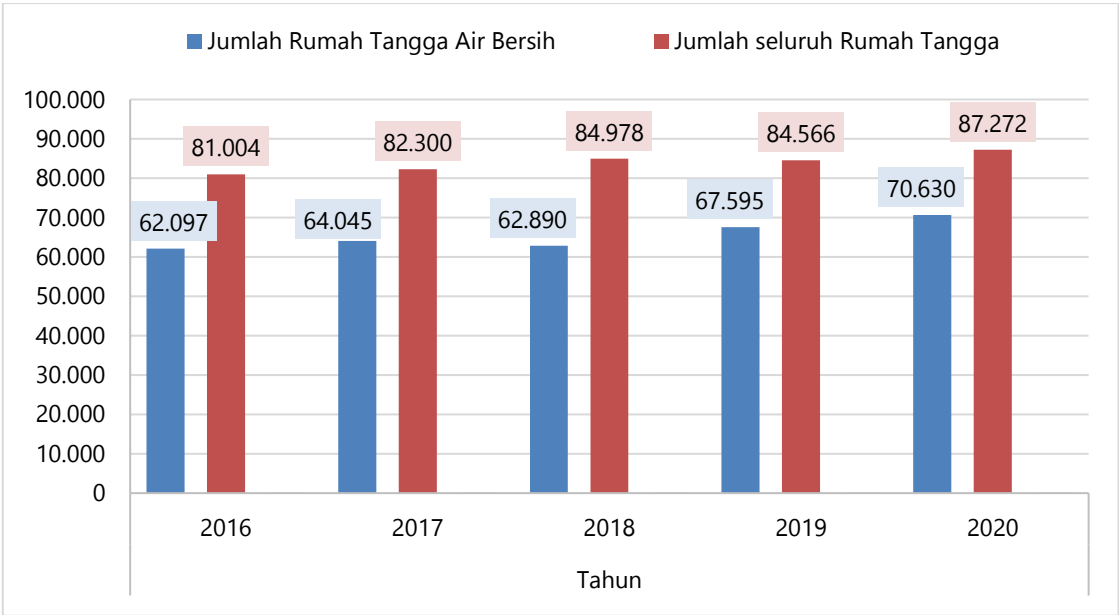
No	Indikator	2019
1	Jumlah warga yang memperoleh air minum sehari-hari	79,93%
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	83,04%

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, 2021*

Penyediaan kebutuhan pokok air minum merupakan amanat Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan. Target jumlah warga yang memperoleh air minum sehari-hari adalah 100%, sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 79,93%. Dengan demikian, masih ada 20,7% atau ada sekitar 67.652 penduduk yang belum memperoleh layanan air minum pada tahun 2019.

Capaian SPM jumlah tangga rumah tangga yang terlayani air minum bersih di Kabupaten Manggarai menunjukan angka 83,04% hingga tahun 2019. Nilai capaian ini menggambarkan capaian jumlah rumah tangga yang terlayani air minum bersih adalah sebanyak 54.075 rumah tangga dari total 65.118 rumah tangga. Target jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah 94,80% pada tahun 2019. Namun, capaian yang berhasil direalisasikan sebesar 87,59%. Artinya, angka tersebut kurang 7,21% dari target dan kurang 12,1% dari total keseluruhan rumah tangga.

**Grafik 2. 31. Perbandingan Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih dengan Jumlah Seluruh Rumah Tangga**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai, 2021

Persentase rumah tangga menggunakan air bersih hanya mengalami penurunan sebesar 1.155 unit rumah tangga atau sekitar 3,81% pada tahun 2018. Indikator ini kembali meningkat dengan total peningkatan sebesar 3.035 rumah tangga atau 6,89% pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan pada tahun 2018 terjadi karena ada lonjakan jumlah rumah tangga dan tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan air bersih bagi rumah tangga, sehingga terjadi penurunan persentase layanan. Tetapi pada tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah rumah tangga yang cenderung sama pada tahun 2018, bahkan meningkat pada tahun 2020, pelayanan air bersih bagi rumah tangga dapat kembali ditingkatkan. Diperlukan optimalisasi pengelolaan sumber daya air, sehingga air baku di Kabupaten Manggarai dapat berjalan optimal. Selain itu, adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sempadan sungai, danau, dan mata air merupakan akar masalah yang dapat berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas sumber daya air, misalnya saja sempadan sungai yang dijadikan lahan terbangun tentu akan mengurangi area resapan air.

Di bidang penataan ruang, salah satu indikator untuk melihat capaian kinerja tata ruang adalah bangunan ber IMB. Indikator ini menjadi proxy untuk menilai kesesuaian penataan ruang di Kabupaten Manggarai.

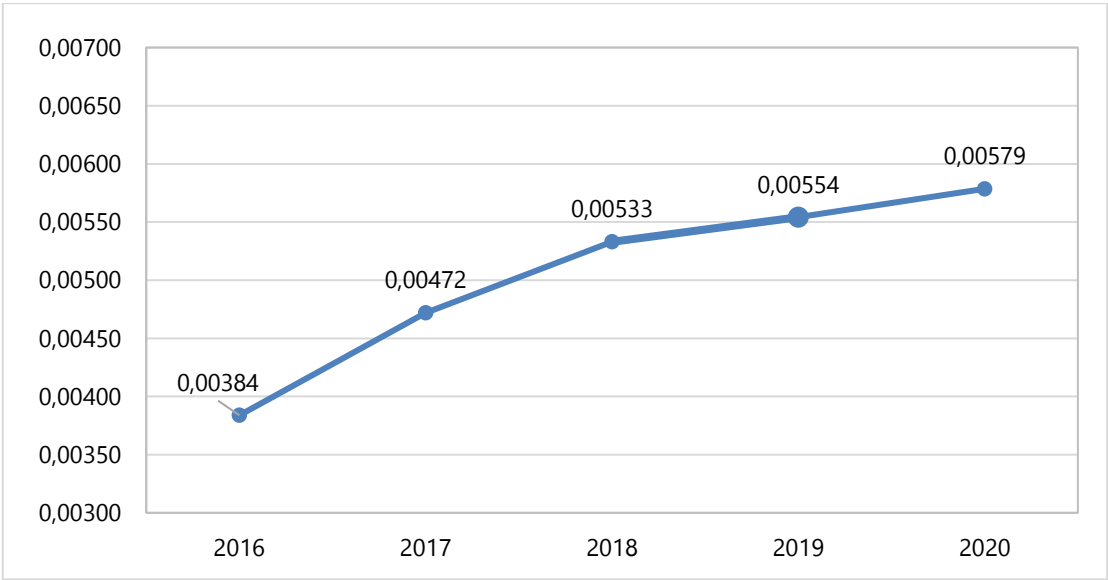
**Tabel 2. 40. Tabel Jumlah Banunan ber IMB dan Jumlah Total Bangunan di Kabupaten Manggarai (unit rumah)**

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bangunan ber IMB	unit	252	316	358	393	445
Jumlah bangunan	unit	65653	66970	67170	70918	76918

Sumber: Dinas PUPR, 2021

Rasio bangunan berIMB merupakan perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan total jumlah bangunan. Berdasarkan Tabel 2.39 didapatkan bahwa jumlah unit bangunan ber-IMB dari tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami kenaikan, yang diikuti pula oleh penambahan unit bangunan di Kabupaten Manggarai. Selain itu, jumlah bangunan ber-IMB dari tahun 2016 hingga 2020 sangat kecil dibandingkan jumlah total bangunan. Berikut adalah data capaian mengenai indikator rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 32. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai, 2020

Rasio bangunan ber IMB terhadap total seluruh bangunan di kabupaten Manggarai menunjukan capaian yang terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih terbilang rendah. Data terakhir menunjukan hanya terdapat 52 bangunan yang ber IMB atau dapat dikatakan hanya memiliki nilai rasio sebesar 0,00579 pada tahun 2020. Rendahnya capaian disebabkan oleh belum optimalnya tingkat

kepatuhan terhadap penataan ruang. Belum tersedianya dokumen RDTR dan perencanaan Perda Tata Ruang yang belum optimal menyebabkan penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum berjalan optimal. Sosialisasi aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang di kabupaten masih perlu dilakukan, sehingga meminimalkan terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan fungsi ruang dan terjadinya alih fungsi lahan.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya berkaitan dengan upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Sebuah rumah dikatakan layak huni jika memenuhi empat kriteria, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum, dan akses sanitasi layak. Berikut ini merupakan capaian penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 41. Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

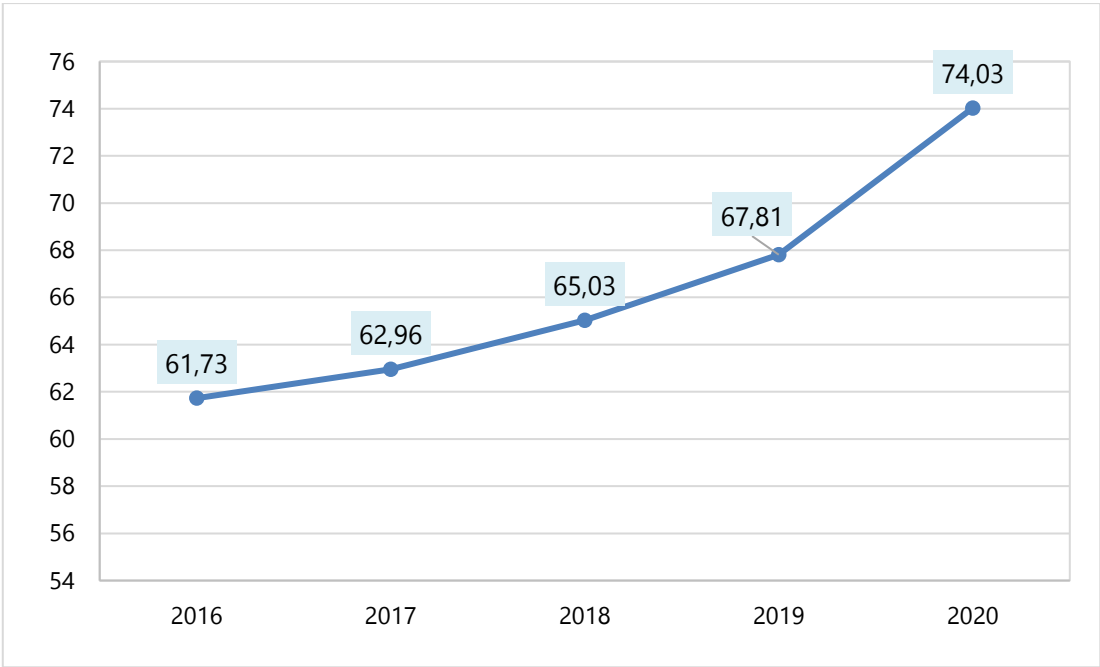
	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	74,94	78,96	83,86	88,14	88,75

*Sumber: Dinas Perumahan Kabupaten Manggarai, 2021*

Cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 13,81% dari tahun 2016 hingga 2020. Dari data terakhir tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih harus menyelesaikan 11,25% kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, seluruh masyarakat diharapkan sudah memiliki rumah yang layak huni pada tahun 2025. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Salah satu indikator atau kriteria rumah layak huni adalah rumah yang memiliki sanitasi. Indikator ini juga terkait dengan urusan lingkungan hidup. Berikut adalah data rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 33. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi terhadap Total Seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (%)**



*Sumber: Dinas Perumahan Kabupaten Manggarai, 2020*

Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 2,46% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Meskipun demikian, data menunjukkan masih ada 25,97% rumah tangga yang belum memiliki sanitasi pada tahun 2020. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap capaian indikator rumah layak huni serta kesehatan masyarakat secara umum. Data terkait prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dan perumahan yang tersedia adalah data sanitasi, belum tersedia data terkait PSU lainnya (drainase lingkungan, akses air bersih, ketersediaan saluran air limbah) menunjukkan bahwa database PSU masih sangat terbatas, sehingga kondisi kelayakan PSU di kawasan permukiman belum dapat terpetakan dengan jelas.

Selain penyediaan rumah layak huni, penanganan terhadap kawasan kumuh juga menjadi salah satu hal yang harus ditangani. Kawasan permukiman kumuh menjadi sebuah indikator yang berpengaruh terhadap kelayakhunian dan indikator kemiskinan multi-dimensional. Berikut adalah data penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 – 2020:



**Tabel 2. 42. Capaian Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh dan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Realisasi Pencapaian Target (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	-	49,59	49,59	49,59	150,10	120,38
2	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100%	NA	13,99	13,99	2,71	0.00

*Sumber: Dinas Perumahan Kabupaten Manggarai, 2020*

Luas kawasan kumuh mengalami peningkatan seluas 100,51 Ha dan menurun 29,72 Ha pada tahun 2020. Total luas kawasan kumuh bertambah 70,79 Ha dari tahun 2016 hingga 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan luas kawasan kumuh, padahal luas wilayah permukiman tidak bertambah selama 2016 hingga 2020. Artinya, luas kawasan kumuh tersebut terjadi karena kurangnya intervensi pemerintah dalam mengatasi luas cakupan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Manggarai.

Target pencapaian untuk mengatasi luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, hanya teratasi sekitar 30,69% selama 2016 hingga 2020. Hal ini berarti masih ada 69,31% kawasan kumuh yang belum tertangani. Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya realisasi pencapaian target untuk mengurangi luasan kawasan kumuh adalah kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku/pola hidup sehat masih rendah. Belum optimalnya pembinaan dan sosialisai rumah layak huni kepada masyarakat dan pengembangan kawasan permukiman terpadu menyebabkan masih rendahnya penyediaan rumah layak huni (RLH). Kondisi ini dapat mempengaruhi keberlanjutan status kawasan kumuh yang sudah tertangani. Kemudian pendataan yang belum mencakup seluruh luasan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menunjukkan kinerja yang sudah cukup baik. Misalnya capaian persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3, *response time rate*, dan penegakan Perda sudah mencapai 100%. Meskipun demikian, masih ada beberapa capaian yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah data lebih lanjut capaian urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 43. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SAT POLPP	5	84	60	56	12
2	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	5	84	60	56	12
3	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, 2020

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Manggarai sudah sangat baik. Dari jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP pada tahun 2016 hingga tahun 2020, seluruhnya bisa diselesaikan melalui tindakan pembinaan dan pernyataan dari oknum yang melakukan pelanggaran. Namun demikian, perlu kinerja lebih lanjut dengan menekan angka jumlah pelanggaran K3, sehingga ke depan diharapkan jumlah pelanggaran K3 dapat terus berkurang.

Penurunan jumlah pelanggaran K3 salah satunya dapat ditopang oleh cakupan petugas perlindungan masyarakat. Cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Manggarai masih perlu ditingkatkan. Berikut adalah data mengenai cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 44. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	100 orang petugas Limas dikabupaten/kota daerah pemekaran baru	NA	1,71	25,56	25,56	25,56
2	1 wilayah kerja kabupaten/kota	818	818	818	818	818
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	NA	0,209	3,125	3,125	3,125

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2020

Cakupan petugas perlindungan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 2,916 atau meningkat sekitar 16 anggota Linmas yang ditempatkan di setiap desa/kelurahan pada tahun 2018. Tetapi dua tahun kemudian cakupannya stagnan, tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian lebih untuk meningkatkan rasa aman dan kondusivitas sosial masyarakat.

Pelanggaran dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu indikator capaian urusan untuk melihat kinerja dinas terkait dalam menegakan sebuah Perda. Berikut adalah data mengenai penegakan Perda di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 45. Jumlah Pelanggaran dan Penegakan Perda di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	143	114	116	47	721
2	Jumlah Pelanggaran Perda	143	114	116	47	721
3	Presentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2020

Jumlah pelanggaran Perda mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 674 kasus. Perda yang paling banyak dilanggar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum dengan pelaku pelanggaran merupakan pedagang kaki lima (PKL), pelajar, dan juga

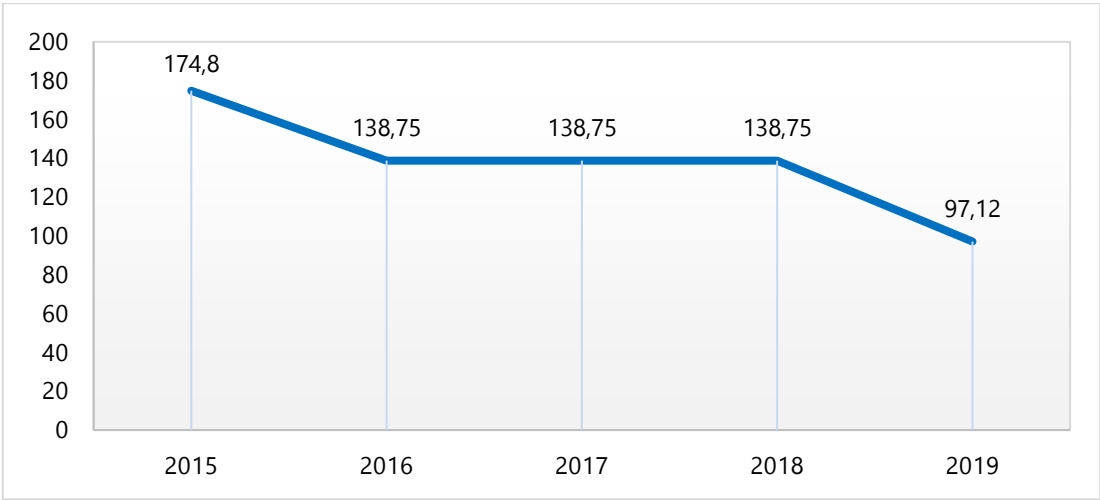
pekerja seks komersil. Perda lain yang juga sering dilanggar, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan, pemasukan, dan pengeluaran hewan dan bahan asal hewan di Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai nomor 55 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Manggarai, serta peningkatan signifikan tahun 2020 yang dilanggar yaitu Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus disease 2019 di Kabupaten Manggarai.

Namun demikian, seluruh pelanggaran Perda yang terjadi bisa diselesaikan oleh pihak terkait, sehingga capaian penegakan Perda selalu pada angka 100%. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Manggarai masih mempunyai tantangan untuk menekan angka pelanggaran Perda pada tahun-tahun selanjutnya dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Manggarai yang lebih tertib.

- Indeks Resiko Bencana dan Pelayanan Kebakaran**

Indikator lain yang menunjukkan kinerja pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah terkait kebencanaan. Indikator ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Berikut adalah data-data terkait kebencanaan di Kabupaten Manggarai tahun 2016 – 2020:

**Grafik 2. 34. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020*

Indeks Resiko Bencana merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk melihat seberapa rawan suatu daerah terhadap berbagai jenis bencana. Semakin turun nilai Indeks Resiko Bencana, maka semakin baik kondisi sebuah kabupaten. Indeks Resiko Bencana sempat mengalami penurunan sebesar 36,05. Setelah itu, nilai Indeks Resiko Bencana cenderung stagnan hingga tahun 2018, sebelum akhirnya kembali mengalami penurunan sebesar 41,63 pada tahun 2019. Jika di rata-ratakan per tahun, maka rata-rata total penurunan adalah sebesar 15,53.

**Tabel 2. 46. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas wilayah kabupaten/kota	NA	1.669,42	1.669,42	1.669,42	1.669,42
2	Prosentase cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	NA	3.63	3.63	3.63	3.63

*Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2021*

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota mengalami stagnansi pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Indikator ini tidak mengalami peningkatan, dengan jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebesar 60,54%. Luas wilayah manajemen kebakaran diambil dari luas wilayah kecamatan Langke Rembong yang bisa terjangkau oleh sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada pada saat ini. Dengan demikian, masih ada 39,46% wilayah di Kabupaten Manggarai yang belum terlayani pelayanan bencana kebakaran. Salah satu penyebab indikatifnya, yaitu minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan SDM pemadam kebakaran terlatih.

Khusus penanganan kebakaran, mengacu pada Permendagri No 114 tahun 2018, yaitu SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran berupa layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Tingkat waktu tanggap bencana merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Berikut adalah tingkat waktu tanggap kebakaran di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 47. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) dalam Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertanganidalam waktu maksimal 15 Menit	NA	4	7	11	3
2	Jumlah kasus kebakaran dalamjangkauan WMK	NA	4	7	11	3
3	Prosentase tingkat waktu tanggap daerah layanan Wialayah Manajemen Kebakaran (WMK)	NA	100%	100%	100%	100%

*Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Manggarai, 2020*

Pelayanan kebakaran di Kabupaten Manggarai sudah menunjukkan kinerja yang baik. Seluruh total kasus kebakaran dapat direspon oleh petugas dengan waktu tanggap tidak lebih dari 15 menit. Waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan yang dimulai saat menerima laporan atau informasi dari warga/penduduk sampai dengan tiba di lokasi tempat kejadian dan langsung melakukan tindakan penanganan.

**6. Sosial**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar sating warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar, yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terbagi dalam 26 Jenis PMKS dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial) terbagi dalam 12 Jenis PSKS. Dalam hal ini tidak semua jenis PMKS dan PSKS diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, karena adanya penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada di masyarakat Kabupaten Manggarai saat ini.

Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki 2 (dua) indikator utama yang menjadi prioritas dan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, yaitu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa Penanganan terhadap PMKS dan PSKS. Berikut adalah data mengenai capaian di bidang sosial Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 48. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>PMKS YANG DITANGANI</b>	16278	16217	16981	19295	16543
1	Lanjut Usia / Lansia	40	300	153	200	100
2	Disabilitas	20	400	565	525	0
3	Wanita Rawan Sosial Dan Ekonomi (Warsosek)	65	100	0	66	50
4	Bencana Alam / Tanggap Darurat	16.153	15.391	16.206	18.464	16.326
5	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	0	57	20	47
6	ODHA/OHIDA/HIV	0	26	0	20	20

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah PMKS yang menerima bantuan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.752 PMKS. Penurunan tersebut salah satunya diakibatkan oleh tidak adanya pemberian bantuan kepada disabilitas pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 disabilitas yang menerima bantuan sebesar 525 orang.

Capaian lain terkait pengentasan permasalahan sosial adalah penanganan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Semakin baik penanganan PSKS, maka semakin menurun permasalahan sosial di

masyarakat. Berikut adalah data terkait penanganan PSKS di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 49. Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2018 (Kelompok)**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	PSKS YANG DITANGANI	77	62	51	58	52
1	Karang Taruna	46	30	19	26	20
2	Panti	6	7	7	7	7
3	Tagana	25	25	25	25	25

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2021

Jumlah dan jenis PSKS yang ada di Kabupaten Manggarai dari tahun 2016 hingga 2020 yang ditangani terus mengalami penurunan. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh pada penanganan PMKS yang dilakukan oleh pihak non pemerintah sehingga kedepannya pemberdayaan PSKS perlu lebih ditingkatkan.

Selain itu, sarana dan prasarana sosial juga berperan penting dalam penanganan PMKS. Berikut adalah data mengenai sarana sosial di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 50. Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Unit)**

No	Jenis Fasilitas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panti Asuhan	9	9	9	9	9
2	Panti Wreda/Jompo	-	-	-	-	-
3	Panti Cacat	2	2	2	2	2
4	Panti Bina Remaja	-	-	-	-	-
5	Panti Rehabilitasi Anak	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, 2021

Ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Manggarai terbilang masih rendah. Jenis fasilitas yang ada hanya panti asuhan dan panti cacat dengan jumlah yang stagnan dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini akan mempengaruhi kinerja dalam penanganan PMKS karena jumlahnya cenderung bertambah.



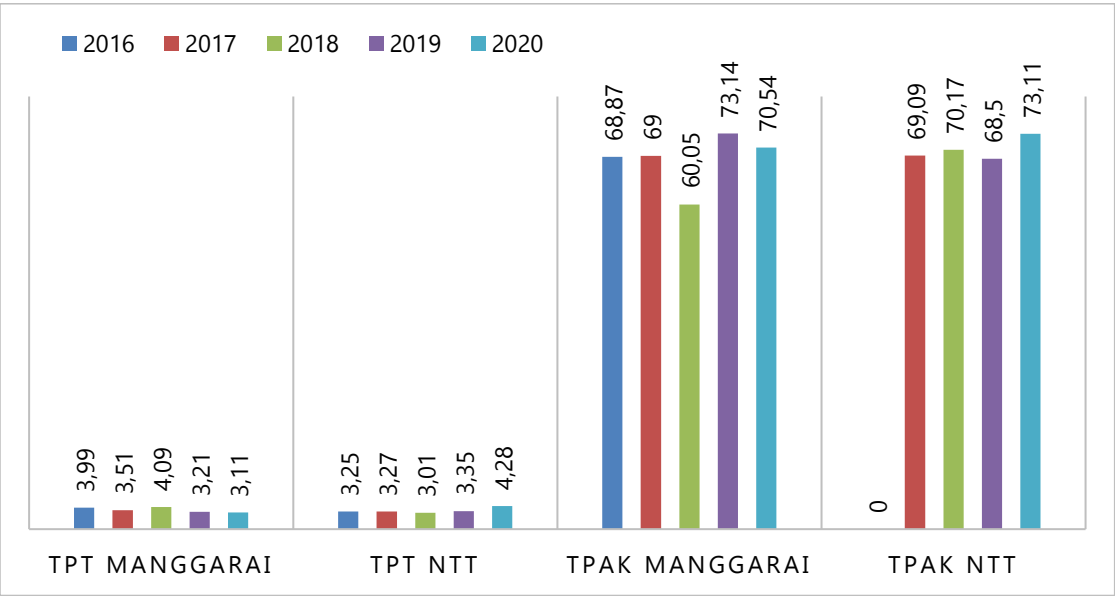
2.3.1.2.      **Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar**

Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar:

**1. Tenaga Kerja**

Urusan wajib non-pelayanan dasar bidang tenaga kerja mencakup beberapa indikator capaian di antaranya tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka perselisihan/sengketa hubungan industrial dan pencari kerja yang ditempatkan. Berikut data capaian indikator tersebut beserta data pendukung bidang tenaga kerja lainnya di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 35. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai, 2021

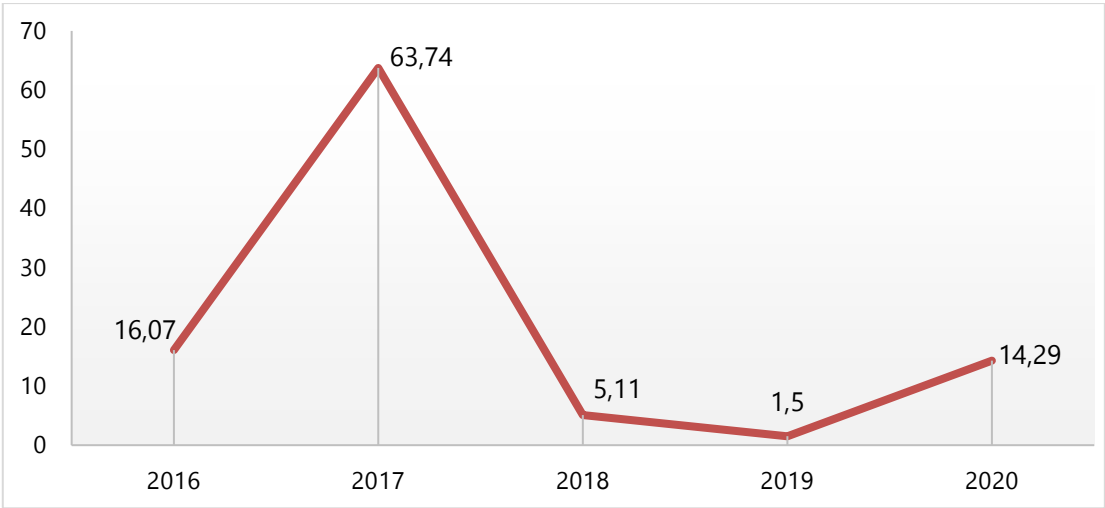
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai sempat meningkat pada tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2019 dan 2020. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi NTT, rata-rata TPT Kabupaten Manggarai sudah berada 0,15 di atas rata-rata TPT Provinsi NTT, meskipun pada tahun 2020 TPT Provinsi NTT berada 1,17 di atas TPT Kabupaten Manggarai. Jumlah pengangguran terbuka masih didominasi oleh usia 15 – 29 tahun, sementara usia di atas 60 tahun tidak ditemukan karena berkaitan dengan produktifitas kerja yang sudah menurun di usia tersebut. Hal yang menghambat Kabupaten Manggarai untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah masih rendahnya keterampilan serta tingkat pendidikan yang belum memadai.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai sangat terkait dengan dua penyebab masalah, yaitu: tingkat kesempatan kerja masih kurang dan konflik/ kasus hubungan industrial masih tinggi. Kesempatan kerja di Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih rendah dan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang belum ada. Konflik hubungan industrial sering terjadi karena kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial masih kurang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan capaian yang fluktuatif pada periode yang sama. Data terakhir menunjukkan bahwa masih ada 29,46% penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan TPAK dan menurunkan TPT pada periode selanjutnya.

Capaian pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan lainnya dapat dicermati melalui persentase pencari kerja yang di tempatkan. Hal tersebut menggambarkan komitmen pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui urusan tenaga kerja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang mendaftar dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Berikut adalah data capaiannya pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020:

Grafik 2. 36. Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020

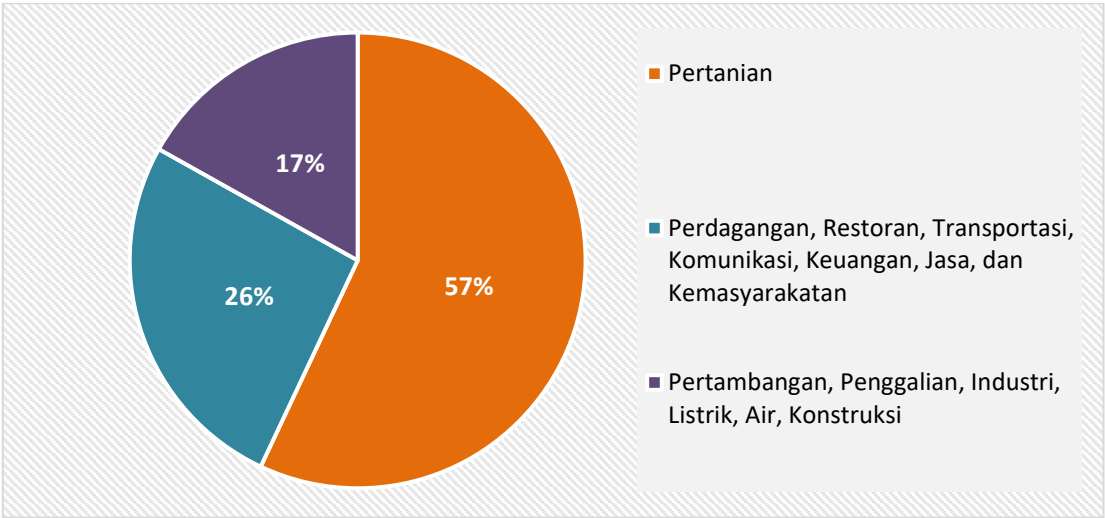


Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai, 2021

Capaian pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Manggarai sangat fluktuatif dengan penurunan yang tinggi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah peningkatan/ penurunan jumlah pencari kerja yang mendaftar setiap tahunnya dan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang mendaftar.

Kondisi tenaga kerja di Kabupaten Manggarai pada saat ini masih didominasi oleh pekerja pada sektor pertanian. Data terakhir menunjukkan bahwa 57% atau 86.708 pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Berikut adalah data mengenai proporsi tenaga kerja berdasarkan sektor pekerjaan di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 37. Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2021

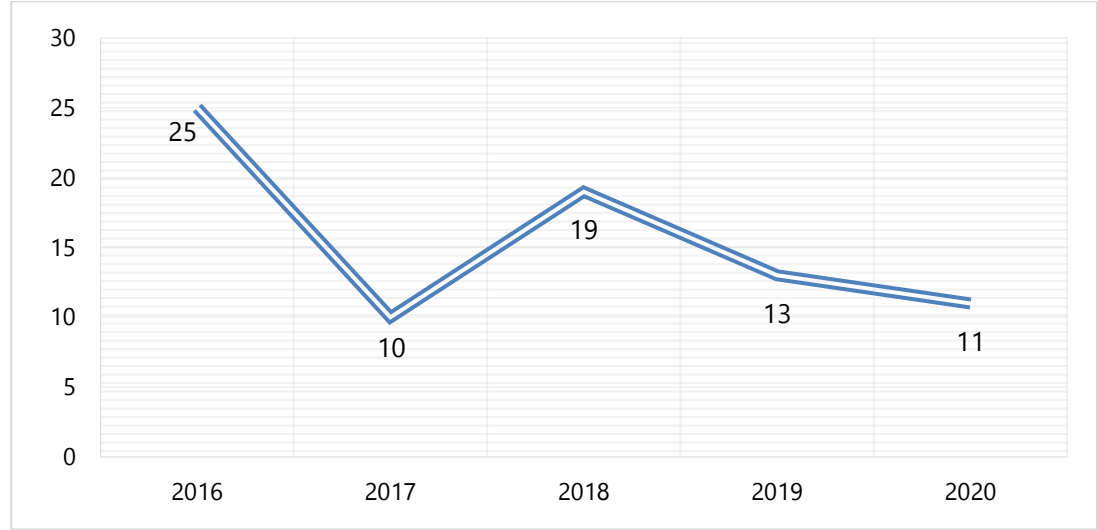


Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai, 2021

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Manggarai terus didominasi oleh sektor pertanian dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Data terakhir menunjukkan 57% atau 86.708 bekerja di sektor primer, yaitu pertanian. Sebanyak 26% atau 39.743 bekerja pada sektor tersier, yaitu perdagangan, restoran, transportasi, komunikasi, keuangan, jasa, dan kemasyarakatan, dan sebanyak 17% atau 25.671 bekerja di sektor sekunder, yaitu pertambangan, penggalian, industri, listrik, air, dan konstruksi.

Keberadaan tenaga kerja yang kemudian terserap oleh perusahaan sering memunculkan permasalahan hubungan industrial di antara keduanya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang didapatkan. Berikut adalah angka perselisihan hubungan industrial/sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020:

**Grafik 2. 38. Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai, 2021*

Jumlah sengketa pengusaha-pekerja sempat mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Data tersebut kemudian kembali menurun pada tahun 2018 dan tahun 2020. Masih adanya sengketa pengusaha-pekerja bisa disebabkan oleh pengusaha yang tidak memberikan hak yang sesuai bagi para pekerjanya, pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan pemerintah yang belum tegas menerapkan sanksi dan disiplin bagi perusahaan yang tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam arah pembangunan pemberdayaan perempuan. Namun, hal ini bergantung pada peran politik terhadap peningkatan dan pemanfaatan SDM perempuan dilembaga pemerintah. Peran politik yang dimaksudkan di sini adalah regulasi yang mengatur tentang penerimaan tenaga kerja di bidang pemerintah. Hal tersebut dapat dicermati melalui data persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah berikut ini.

Tabel 2. 51. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perempuan yang menempati eselon II	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perempuan yang menempati eselon III	21	25	25	33	53
3	Jumlah Perempuan yang menempati eselon IV	175	206	204	203	201
4	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	2.366	2.236	2.162	2.155	2.155
5	Persentase pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	43,03	45,25	46,96	46,81	43.02
6	Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	5,71	5,71	5,71	11,43	11,43

Sumber: Dinas PP-KB-PPA Kab. Manggarai, Renstra 2021

Jumlah perempuan yang menempati eselon III dan eselon IV menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016-2020. Perempuan yang menempati eselon III meningkat hingga dua kali lipat dari angka awal sebanyak 21 orang menjadi 53 orang di tahun 2020, sedangkan perempuan yang menempati eselon IV meningkat 26 orang dari 2016-2020 meskipun dengan tren yang cukup fluktuatif. Hal serupa terjadi pada peningkatan persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 5,72% dari tahun 2016-2020. Angka penurunan hanya ditemukan pada persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah secara keseluruhan, yaitu sebesar 0,01% selama tahun 2016-2020 meskipun telah mengalami kenaikan pada tahun 2017-2019. Menurunnya persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada

tahun 2020 dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah lulusan CPNSD dan penerimaan tenaga non-PNS di lembaga pemerintah.

Partisipasi perempuan dalam sektor ketenagakerjaan dapat dinilai tidak hanya di sektor pemerintahan, melainkan juga melalui partisipasi perempuan di lembaga swasta. Partisipasi perempuan di lembaga swasta sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam bidang penggunaan teknologi karena sistem kerja yang dioperasikan di lembaga swasta cenderung berbasis teknologi. Data partisipasi perempuan di lembaga swasta Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 dapat dicermati melalui data berikut:

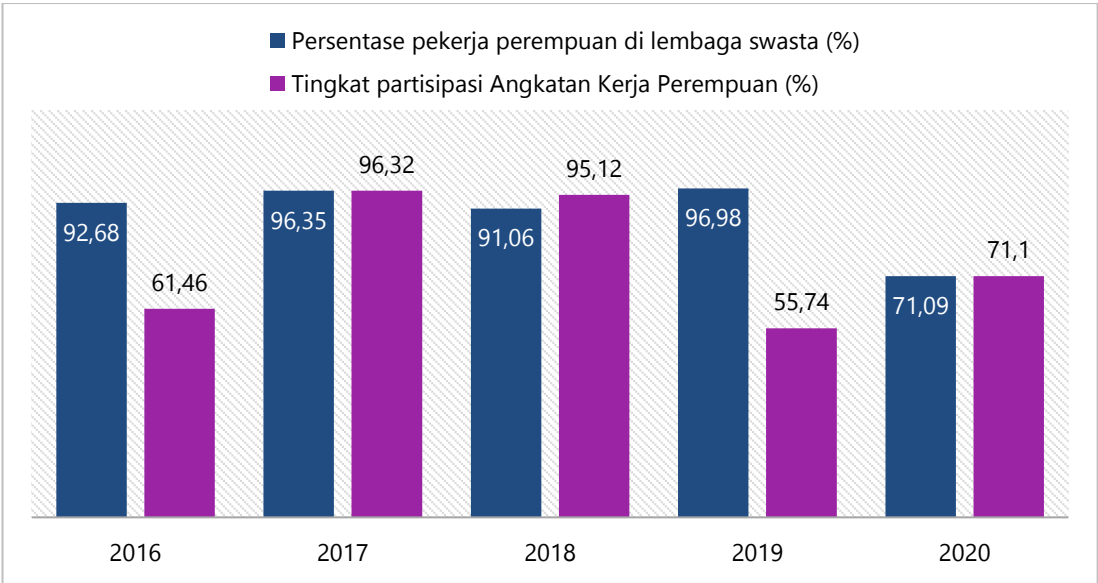
**Tabel 2. 52. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perempuan yang bekerja di lembaga swasta	58.869	58.949	48.500	71.255	50.662
2	Jumlah Pekerja perempuan	63.520	61.185	53.261	69.100	71.255

*Sumber: Dinas PP-KB-PPA Kab. Manggarai, 2021*

Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta mengalami penurunan sebanyak 8.207 selama tahun 2016-2020 dengan tren yang fluktuatif. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2018 lalu meningkat sebesar 22.755 orang pada tahun 2019. Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta kembali menurun tajam pada tahun 2020 sebanyak 20.593 orang karena berbagai faktor yang berhubungan dengan pandemic Covid-19. Secara keseluruhan, jumlah perempuan yang bekerja mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2020, meskipun mengalami tren menurun selama tahun 2016-2018. Partisipasi perempuan di lembaga swasta harus tetap dijaga untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif.

**Grafik 2. 39. Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**



Sumber: Dinas PP-KB-PPA Kab. Manggarai, Renstra 2021

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan memiliki tren yang cenderung fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Indikator tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 15,36%. Pada indikator persentase pekerja perempuan di lembaga swasta, terjadi penurunan sebesar 21,59% dari tahun 2016-2020 dengan tren yang cenderung fluktuatif. Penurunan signifikan hingga mencapai 25,89% terjadi dari tahun 2019-2020.

Hal tersebut disebabkan jumlah pekerja perempuan yang terus meningkat dari tahun 2016-2020, sedangkan daya serap lembaga swasta terhadap pekerja perempuan menurun drastis mencapai 20.563 dari tahun 2019-2020. Selain karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan swasta di Kabupaten Manggarai untuk menyerap tenaga kerja perempuan, kondisi SDM perempuan juga dinilai kurang kompeten di bidang teknologi, sehingga kualitas SDM perempuan juga menyebabkan rendahnya persentase pekerja perempuan di lembaga swasta.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per 1.000 rumah tangga. Data KDRT memiliki hubungan erat dengan kondisi perekonomian rumah tangga. Semakin tingginya tuntutan kebutuhan dalam rumah tangga, maka peluang terjadinya KDRT turut meningkat. Data rasio KDRT Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 53. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	13	3	9	89	55
2	Jumlah Rumah Tangga	81.151	89.361	94.582	94.582	36.690
3	Target Rasio KDRT	1,50	1,40	1,30	1,20	1
4	Realisasi Rasio KDRT	0,16	0,034	0,10	0,94	0,14

Sumber: Dinas PP-KB-PPA Kab. Manggarai, Renstra 2021

KDRT meningkat sebanyak 42 kasus dari tahun 2016-2020. Puncak kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 89 kasus, meskipun kembali menurun sebesar 34 kasus pada tahun 2020. Peningkatan jumlah KDRT juga dapat dilihat melalui realisasi rasio KDRT yang meningkat tajam pada tahun 2019. Berkurangnya kasus KDRT pada tahun 2020 dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman masyarakat tentang upaya penghapusan KDRT.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Termasuk di dalamnya mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur. Dalam rangka mendukung hak terhadap perlindungan anak yang dipekerjakan dengan usia di bawah umur, berikut merupakan data persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur Kabupaten Manggarai 2016-2020:

**Tabel 2. 54. Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja anak usia 5-14	6	3	65	57	67
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	134.102	131.363	120.338	121.880	149.572

Sumber: Dinas PP-KB-PPA Kab. Manggarai, Renstra 2021

Jumlah pekerja anak usia 5 – 14 tahun meningkat sebesar 61 pekerja anak selama 2016-2020. Hal ini disebabkan rendahnya intensitas rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) bersama



Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam memberikan arahan di lapangan. Arahan tersebut disampaikan kepada orang tua agar anak yang masih di bawah umur tidak dijadikan sebagai tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal. Berikut merupakan grafik perbandingan antara target Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dengan realisasi persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur yang tercapai di tahun 2016-2020.

Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu didukung oleh berbagai uraian indikator. Hal tersebut dibutuhkan untuk dapat mengetahui secara lebih dalam pengawalan dan capaian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Data capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk indeks pembangunan gender (IPG) dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 55. Capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020 (Persen)**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	62	91	84	93	55
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	53	46	66	62	39
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	2	N/A	N/A	N/A

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	62	91	84	93	55
6	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian	N/A	38.986	36.418	29.583	33.282
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	87,38	87,70	88,16	N/A
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	N/A	65,52	65,85	65,61	N/A
9	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	81,11	100	96,51	48,39	1,15

Sumber: Dinas PP-KB-PPA Kab. Manggarai, Renstra 2021

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, layanan kesehatan, dan layanan bantuan hukum mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Penurunan signifikan sebesar hampir 50% terjadi pada tahun 2020. Berkurangnya penyelesaian pengaduan tahun 2020 disebabkan oleh terbatasnya alokasi dana. Selain itu, salah satu penyebab indikator rendahnya penyelesaian pengaduan juga disebabkan oleh belum optimalnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Manggarai. Akibatnya, fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan tidak berjalan maksimal. Hal tersebut juga diikuti oleh menurunnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019.

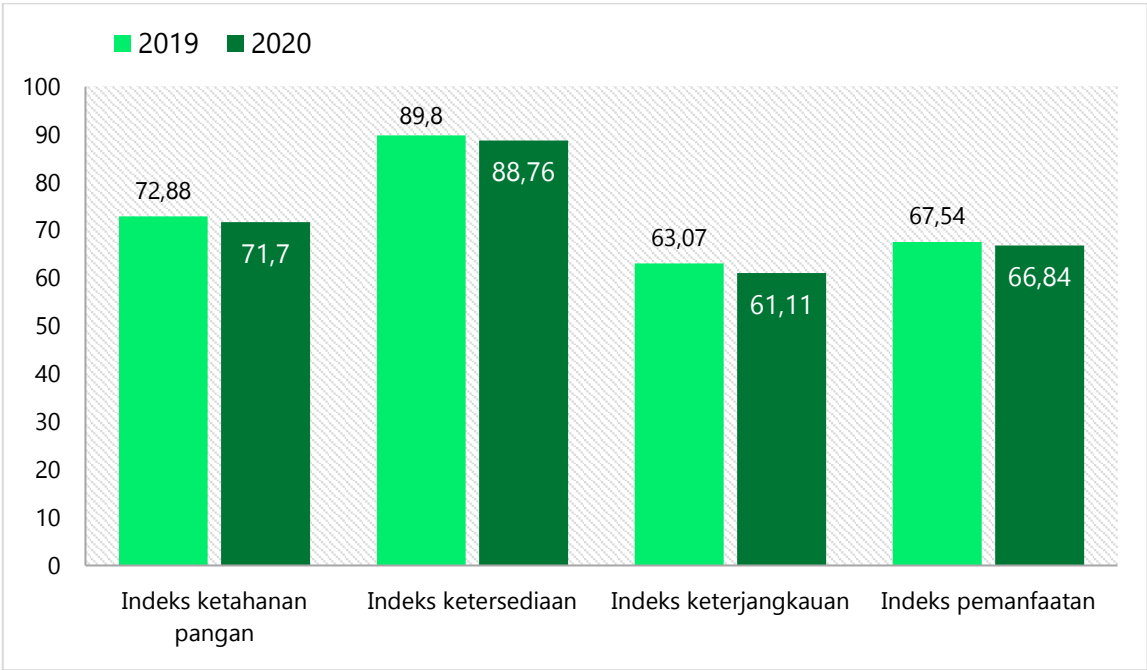
Indeks pemberdayaan gender (IDG) juga mengalami tren penurunan sebesar 0,09 dari tahun 2017-2020, sedangkan indeks pembangunan gender (IPG) justru mengalami peningkatan sebesar 0,78 dari tahun 2017-2020. Indikator IPG mengukur pencapaian dalam dimensi yang mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan indikator IDG menunjukkan seberapa jauh perempuan mampu memainkan peranan aktif

dalam kehidupan ekonomi dan politik. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan cenderung menurun, sedangkan dalam hal partisipasi di bidang ekonomi dan politik, peran perempuan cenderung menurun dari tahun 2017-2020.

### 3. Pangan

Data makro mengenai pangan dapat dicermati melalui indikator indeks ketahanan pangan. Indikator tersebut dapat dipecah menjadi indikator yang lebih mikro, yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Ketiga indeks ini baru dirumuskan oleh Kementerian Pertanian RI pada tahun 2019. Berikut adalah data mengenai ketahanan pangan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2018 hingga 2020.

**Grafik 2. 40. Indeks Ketahanan Pangan dan Komponennya di Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020**



Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2021

Indeks ketahanan pangan di Kabupaten Manggarai mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya ketersediaan pangan sebesar 1,04 poin. Penurunan ketersediaan pangan disebabkan oleh belum optimalnya stok cadangan pangan. Keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Manggarai juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,96 poin dan 0,7 poin. Penurunan keterjangkauan pangan disebabkan oleh belum optimalnya fungsi lumbung pangan. Penurunan pemanfaatan pangan disebabkan oleh belum optimalnya

diversifikasi pangan lokal dan belum optimalnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Pangan merupakan salah satu sektor utama penunjang keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga ketersediaan pangan perlu untuk dijamin. Ketersediaan pangan utama menunjukkan hubungan dengan ketersediaan atau suplai pangan pokok masyarakat melalui standar kebutuhan masyarakat, hasil produksi, dan luas panen. Berikut merupakan data ketersediaan pangan utama Kabupaten Manggarai pada tahun 2016-2020.

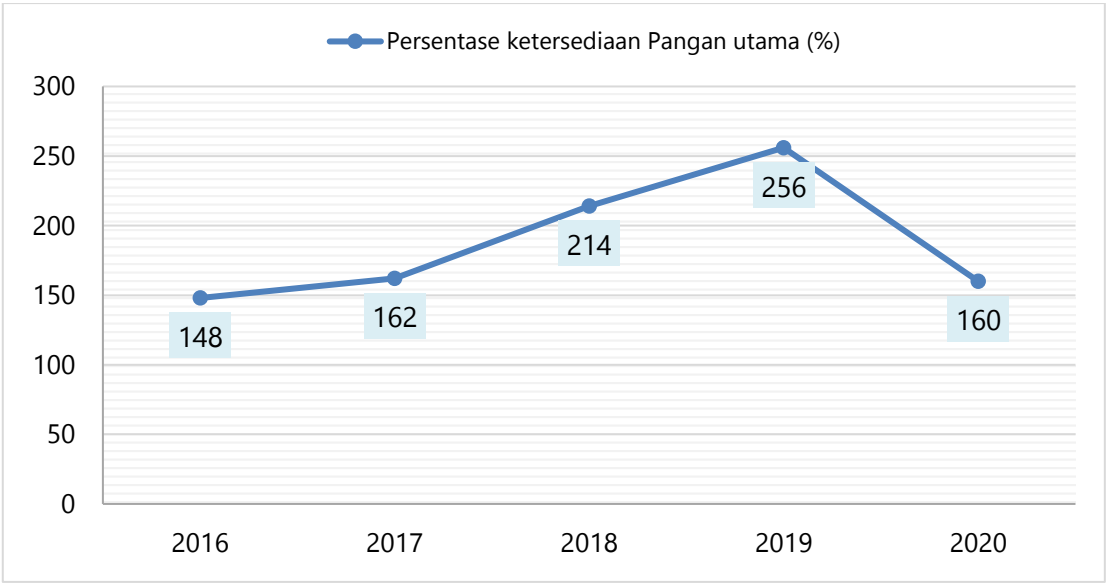
**Tabel 2. 56. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun(ton)	75.366	82.902,6	113.937	136.699	176.185
2	Jumlah Penduduk	324.014	329.198	333.912	338.426	349.090

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai, 2021*

Peningkatan jumlah penduduk sebesar 25.076 dari tahun 2016-2020 berkorelasi positif terhadap peningkatan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan meningkat rata-rata sebesar 56.505 ton. Persentase ketersediaan pangan pertahun di Kabupaten Manggarai juga cenderung mengalami peningkatan secara fluktuatif tahun 2016-2020. Ketersediaan pangan tertinggi berada pada tahun 2019 dan menurun drastis pada tahun 2020 akibat beberapa faktor yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.

Grafik 2. 41. Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Tahun 2021

Ketersediaan energi dan protein per kapita juga menjadi variabel penentu bagi ketersediaan pangan. Data ini sangat penting untuk menunjang konsumsi pangan yang berkualitas. Semakin tinggi ketersediaan energi dan protein, maka peningkatan kasus penyakit kekurangan gizi di masyarakat semakin menurun. Data ketersediaan energi dan protein perkapita dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2. 57. Ketersediaan Energi dan Protein perkapita di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Energi Perkapita	3.039 kkal/kapita / hari	3.511 kkal/kapita / hari	3.027 kkal/Kapita/hari	3.537 kkal/Kapita/hari	3.650 kkal/Kapita/hari
2	Ketersediaan Protein Perkapita	98,32 gram/hari	88 gram/hari	83 gram/hari	93,46 gram/hari	95 gram/hari

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai 2020.

Ketersediaan energi perkapita mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 611 Kkal/kapita/hari meskipun menunjukkan tren fluktuatif pada tahun 2016-2020. Ketersediaan protein perkapita menunjukkan tren yang menurun sebesar 3,32 gram/hari selama tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan konsumsi makanan sumber karbohidrat lebih dominan dikonsumsi oleh

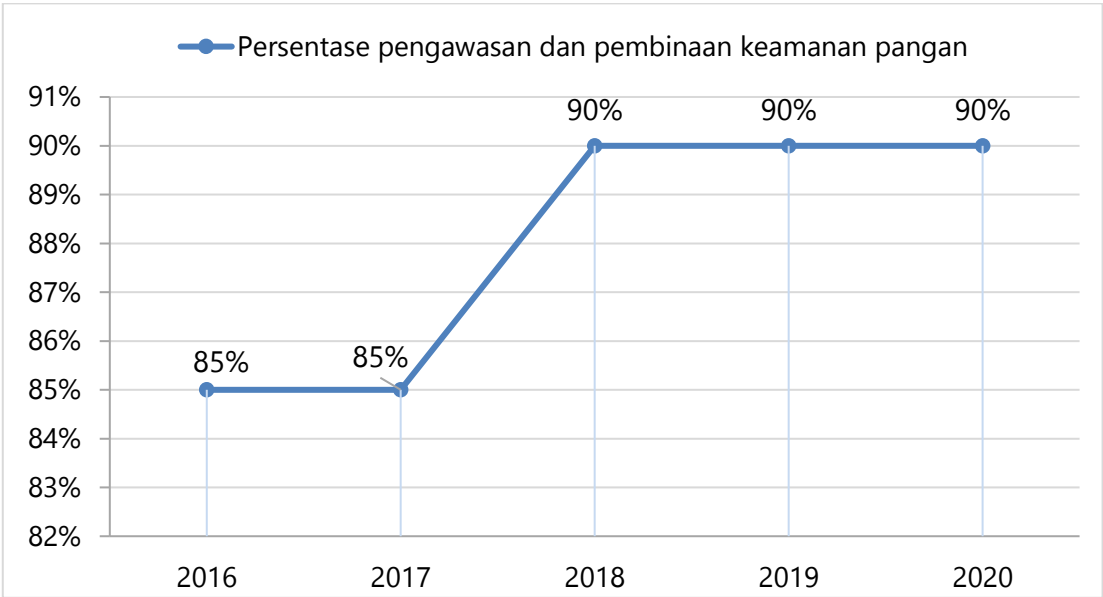
masyarakat dibandingkan dengan makanan sumber protein. Pengawasan dan pembinaan konsumsi pangan perlu ditingkatkan untuk menjamin kebutuhan pangan seimbang terpenuhi. Data terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat dicermati dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 58. Pangawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi yang diperdagangkan pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku	120	143	150	162	175
2	Jumlah sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	523	613	654	715	728

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Manggarai 2021

**Grafik 2. 42. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Manggarai 2021

Data sampel pangan aman konsumsi terhadap total jumlah sampel makanan yang dijual di Kabupaten Manggarai menunjukkan tren yang meningkat selama tahun 2016-2020. Hal tersebut didukung oleh data persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang meningkat

hingga 5% selama tahun 2016-2020. Semakin meningkatnya persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Manggarai menunjukkan kualitas pangan yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat semakin baik pada tahun 2016-2020.

**4. Pertanian**

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembagian oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten, dan penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah. Data capaian Kabupaten Manggarai dalam urusan pertanian dilihat dari sertifikat tanah yang dikeluarkan. Berikut adalah data terkait hal tersebut.

**Tabel 2. 59. Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020**

No	Hak Atas Tanah	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Hak Milik	44.278	44.934	53.499	58.499
2	Hak Guna Bangunan	148	168	174	178
3	Hak Guna Usaha	-	-	-	-
4	Hak Pakai	359	367	385	395
	<b>Jumlah</b>	<b>44.785</b>	<b>45.469</b>	<b>54.058</b>	<b>59.072</b>

*Sumber: Kabupaten Manggarai Dalam Angka, 2020*

Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal tersebut menunjukan bahwa hak penggunaan tanah yang diberikan pada masyarakat terus meningkat jumlahnya. Sertifikasi tanah harus terus dijalankan untuk menghindari konflik pertanian.

Tabel 2. 60. Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (M2)	10.130.930	9.936.537	6.901.167	9.290.253	2.430.647
2	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	0,99936	1,00006	0,99920	0,99979	1,00001

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai, 2021

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Manggarai tergolong rendah. Hanya terdapat 1% lahan atau 2.430.647 meter persegi yang bersertifikat dari total keseluruhan luas yang ada. Oleh karena itu, masih terdapat sekitar 99% luas lahan yang belum bersertifikat. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian lebih khususnya dalam perencanaan periode selanjutnya.

5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup sebuah daerah dapat dinilai dengan indikator makro indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator ini memiliki tiga komponen, yaitu: indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Skala IKLH Kabupaten Manggarai berada pada kategori baik. Berikut merupakan data mengenai komponen pembentuk IKLH di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016 hingga 2020:

Tabel 2. 61. Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Air	NA	NA	60	70	70
2	Indeks Kualitas Udara	NA	91,24	89,71	87,20	87,87
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	NA	NA	80,36	78,76	85,32

Sumber: DLH Kab. Manggarai, 2021

Indeks kualitas air mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 10 poin namun mengalami stagnasi pada tahun 2019 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya pencemaran limbah domestik (rumah tangga)

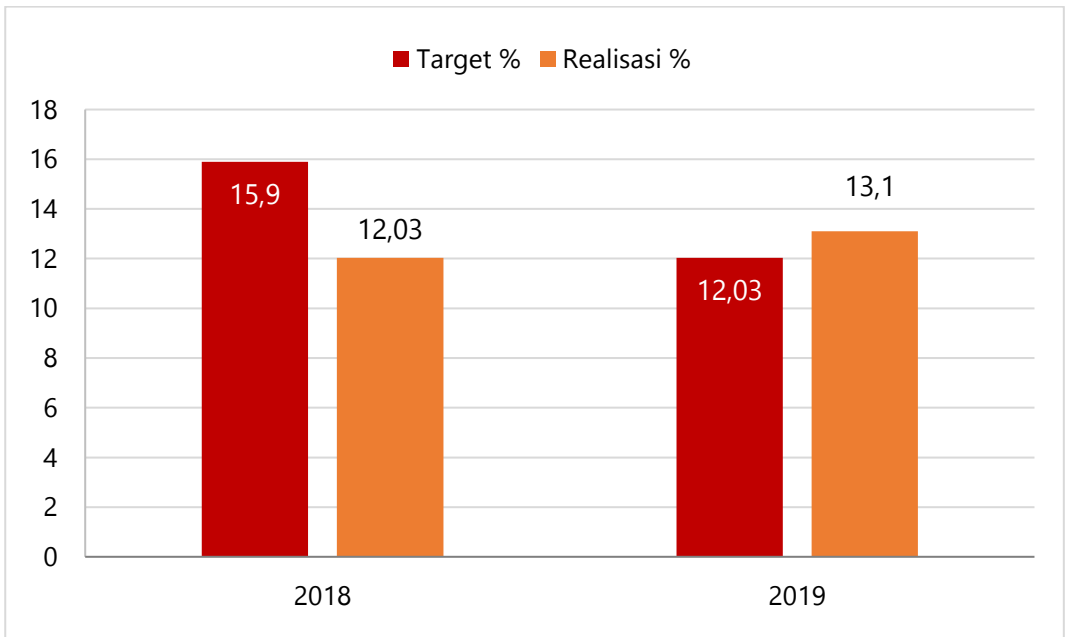


serta tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian. Selain itu, masih minimnya pengelolaan limbah pelaku usaha atau kegiatan, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah, konservasi mata air belum optimal dan minimnya peralatan laboratorium lingkungan.

Indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 1,84 dari tahun 2018 hingga 2020. Menurunnya kualitas udara disebabkan oleh peningkatan gas emisi kendaraan dan belum adanya alat ukur kualitas udara. Kualitas tutupan lahan menunjukkan peningkatan sebesar 4,96 dengan tren yang fluktuatif. Persoalan ini disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan, belum adanya regulasi terkait pelanggaran lingkungan hidup dan terbatasnya ketersediaan RTH publik perkotaan.

Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kualitas lingkungan hidup adalah volume persampahan. Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan limbah organik dan anorganik semakin meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan persentase target dan realisasi penanganan sampah di Kabupaten Manggarai pada tahun 2018-2019.

**Grafik 2. 43. Persentase Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Manggarai Tahun 2018 - 2019**



*Sumber: LAKIP DLH Kab. Manggarai 2020*

Capaian indikator sasaran persentase penanganan sampah tercatat sebesar 74,9% dengan realisasi sebesar 1,03% melebihi target pada tahun 2019. Operasi penanganan sampah pada tahun 2019 mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun 2018. Meningkatnya capaian program pada tahun 2019 disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu penurunan jumlah penduduk. Kondisi ini turut menurunkan volume produksi sampah sebesar 73,69 m3/hari dari 2018 hingga 2019.

### 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkaitan dengan tertib administrasi masyarakat. Indikator paling penting untuk mengukur kinerja pelaksanaan urusan ini berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, dan juga akta kelahiran. Data-data urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016-2020 dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 62. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian setiap tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk memiliki kartu keluarga	0,695	0,81	0,57	0,668	0,717
2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,65	0,69	0,73	0,867	0,867
3	Rasio pasangan berakte Nikah	0,04	0,075	0,09	0,131	0,234
4	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	249,42	289,42	289,42	251,91	296,87
5	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: *DISPENDUKCAPIL Kab. Manggarai, 2021*

Rasio penduduk yang memiliki kartu keluarga, KTP, akte nikah, dan akta kelahiran di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2016-2020. Artinya, cakupan pelayanan administrasi kependudukan sudah cukup maksimal, meskipun rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami penurunan pada tahun 2019, rasio tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 44,96 pada tahun 2020.

Pelaksanaan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai yang berkaitan dengan ketersediaan database kependudukan secara keseluruhan sudah tersedia dan sudah didukung pula dengan penerapan KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2016-2020. Kondisi tersebut masih perlu untuk ditingkatkan. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai disebabkan oleh beberapa faktor seperti, belum optimalnya pelayanan dokumen, masih terbatasnya jangkauan akses pelayanan di tengah masyarakat serta kesadaran masyarakat terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang masih terbatas. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan kapasitas SDM pengelola menjadi hal lain yang juga perlu mendapatkan intervensi.

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemerintah daerah bersama pemerintah di tingkat kecamatan dan pemerintah desa saling berbagi peran dalam upaya mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Adanya dana desa memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah di tingkat desa untuk mensejahterakan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasana bagi pemerintah desa yang baik merupakan awal pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah data mengenai sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang berkondisi baik di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 63. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Berkondisi Baik Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	145	145	145	145	145

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa	145	145	145	145	145
3.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Manggarai, 2021

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa di Kabupaten Manggarai sudah berada pada kondisi optimal dan tidak ada kerusakan sejak tahun 2016 hingga 2020. Hal ini menjadi modal pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal, termasuk untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk menjamin kualitas pelayanan perkantoran desa.

Urusan pemberdayaan masyarakat desa mencakup pelaksanaan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan dan juga tugas pembantuan yang dilaksanakan di desa. Salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk menilai keberdayaan masyarakat desa adalah indeks desa membangun. Berikut adalah data mengenai indeks desa membangun di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 64. Status Kemandirian Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Desa)**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa sangat tertinggal	11	16	20	16	5
2	Jumlah desa tertinggal	127	102	100	97	93
3	Jumlah desa berkembang	7	26	24	31	47
4	Jumlah desa maju	0	1	1	1	
5	Jumlah desa mandiri	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Manggarai, 2021

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang kemudian diturunkan menjadi 22 variabel dan 52 indikator. Kondisi desa sesuai nilai IDM di Kabupaten Manggarai mayoritas berada pada kondisi desa rentan. Kondisi desa rentan dimulai dari status desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang. Dikatakan rentan karena jika ada salah satu faktor yang

menyebabkan indikator bergeser, misalnya guncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial, maka desa tersebut dengan mudah bergeser status ke IDM yang lebih rendah.

Jika dikomparasikan, kondisi desa sangat tertinggal di Kabupaten Manggarai lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur yang berjumlah 58 desa pada tahun 2018. Namun, Kabupaten Manggarai Timur mengalami perbaikan cepat di tahun hingga menyisakan 7 desa di tahun 2019. 51 desa di Kabupaten Manggarai Timur sudah beralih ke status desa tertinggal di tahun 2019. Penyebab indikatif persoalan ini yaitu belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa dan rendahnya kapasitas pengelolaan potensi desa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama pihak terkait untuk meningkatkan status desa di Kabupaten Manggarai menjadi desa maju atau desa mandiri.

Tabel 2. 65. Kondisi Lembaga Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

No	Urusan	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>PKK</b>					
	Jumlah PKK aktif	184	184	184	184	184
	Jumlah PKK	184	184	184	184	184
	Jumlah kelompok binaan PKK	758	758	758	760	760
	Persentase jumlah aktif	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Posyandu</b>					
	Jumlah Posyandu aktif		2	240	234	
	Total Posyandu		5	577	577	
	Persentase Posyandu aktif		4%	42%	40,5%	
3	<b>Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)</b>					
	Jumlah LPM Berprestasi	4	4	4	3	3
	Jumlah LPM	167	167	167	167	167
	Jumlah kelompok binaan LPM	3419	3419	3509	3678	3974
	Prosentase Jumlah LPM Berprestasi	2.4	2.4	2.4	1.8	1.8
4	<b>Jumlah lembaga adat</b>	0	0	0	11	17

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Manggarai, 2021

PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan lembaga adat merupakan agen penting untuk memajukan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan IDM. Akan tetapi, dari keempat lembaga tersebut hanya PKK yang sudah berhasil aktif 100%, sementara keaktifan

Posyandu belum optimal. Begitu pula dengan LPM yang persentase LPM berprestasinya masih rendah. Mengoptimalkan lembaga PKK, Posyandu, dan LPM dapat memaksimalkan fungsi kelompok binaan yang ada di masyarakat. Memaksimalkan peran lembaga adat juga dapat meningkatkan peluang pemberdayaan masyarakat desa.

**Tabel 2. 66. Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Urusan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDES)	20	69	135	140	140

*Sumber: Dinas PMD Kabupaten Manggarai, 2021*

Peningkatan jumlah Bumdes yang cukup signifikan sejumlah 120 badan dari tahun 2016-2019 menjadi penanda bahwa perekonomian desa mulai menjadi perhatian dan akan mendapat perhatian yang serius oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai. Angka tersebut meningkat sebanyak 5 badan dari tahun 2018 ke 2019 dan konstan pada tahun 2020. Keberadaan Bumdes yang sudah ditetapkan sebagai badan hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 117 membuka peluang agar perekonomian masyarakat desa lebih berdaya.

Jumlah BUMDes di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 masih lebih tinggi jika dibanding Kabupaten Manggarai Timur yang memiliki Bumdes 44 badan. Walaupun jumlah BUMDes semakin meningkat, namun kapasitas dan peran BUMDes belum bisa maksimal.

**Tabel 2. 67. Jumlah Rumah yang dibangun dari dana Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah yang dibangun dari dana Desa	1,873	1,449	2,184	2,323	1,818

*Sumber: Dinas PMD Kabupaten Manggarai, 2021*

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan membangun rumah bagi warga yang membutuhkan. Jumlah rumah yang dibangun dari dana desa mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019. Jumlah rumah yang dibangun dari dana desa menurun drastis sejumlah 515 rumah pada

tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena realokasi prioritas penggunaan dana desa ke bantuan langsung tunai dana desa.

**Tabel 2. 68. Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun dari Dana Desa**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan yang dibangun dari Dana Desa (km)	99,757	151,931	118,593	113,791	36,481

*Sumber: Dinas PMD Kabupaten Manggarai, 2021*

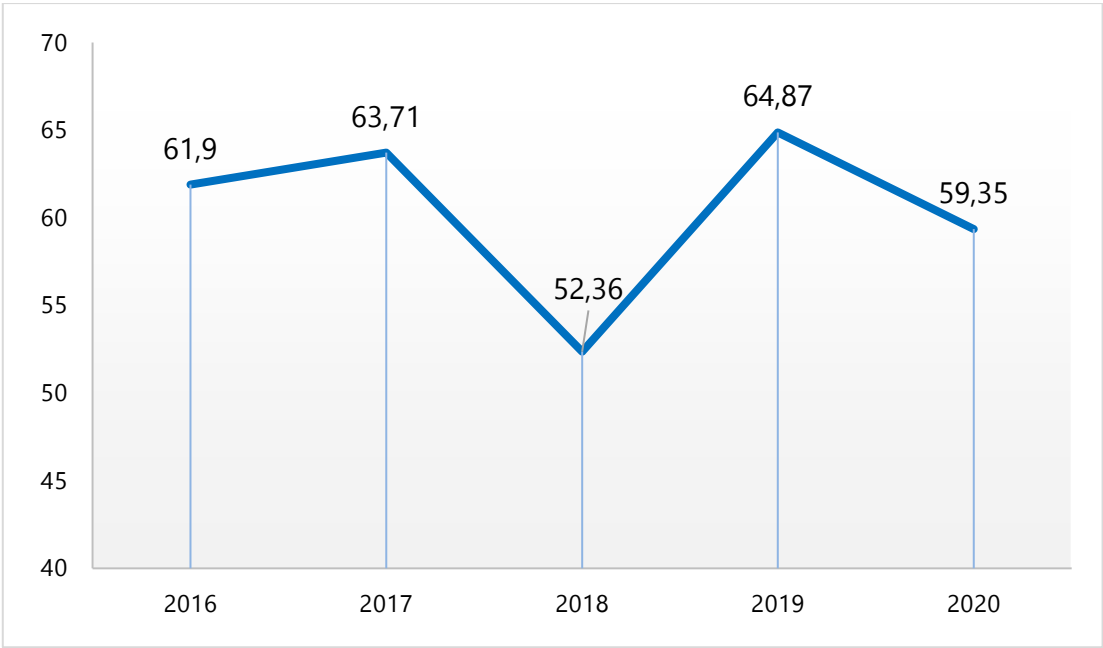
Pembangunan jalan desa adalah salah satu stimulus untuk meningkatkan perekonomian desa. Jalan ini dibangun menggunakan dana desa. Panjang jalan desa yang dibangun dari dana desa mengalami penurunan drastis sebesar 77,310 km pada tahun 2019 hingga 2020. Hal itu terjadi karena realokasi prioritas penggunaan dana desa ke bantuan langsung tunai dana desa.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk adalah usaha untuk mengarahkan pola perkembangbiakan manusia menuju arah pertumbuhan penduduk yang diinginkan dalam kebijakan kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Data laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Manggarai mencapai 1,35% pada periode 2018-2019 (BPS Kabupaten Manggarai, 2020).

Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB) yang merupakan program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program KB di Kabupaten Manggarai adalah cakupan peserta KB aktif, target dan realisasi akseptor baru beserta alat kontrasepsi yang digunakan penduduk, serta jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB). Berikut adalah data mengenai cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

Grafik 2. 44. Persentase Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2021

Tingkat peserta pengguna KB aktif di Kabupaten Manggarai tidak pernah di bawah 50% sepanjang periode 2016-2020. Namun demikian, persentase ini perlu ditingkatkan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta demi terwujudnya keluarga kecil berkualitas. Salah satu indikator keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dapat dicermati dari jumlah penggunaan alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS). PUS di Indonesia lebih memilih alat kontrasepsi hormonal seperti suntik, pil, dan implan; sedangkan program KB pemerintah mengarahkan kepada kontrasepsi non-hormonal seperti *intra uterine device* (IUD), Metode Operasi Wanita (MOW), dan Metode Operasi Pria (MOP). Berikut adalah data mengenai jumlah PUS, target dan realisasi peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Kabupaten Manggarai:



Tabel 2. 69. Jumlah PUS, Target, dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2019

No	Kecamatan	PUS	Target	Realisasi Peserta KB Aktif/Mix Kontrasepsi							
				IUD	MOW	MOP	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah
1	Satar Mese	5.640	4.142	355	176	-	622	1.513	785	16	3.467
2	Satar Mese Barat	2.701	1.721	234	103	-	58	742	530	-	1.667
3	Satar Mese Utara	2.430	1.792	242	72	-	125	833	468	-	1.740
4	Langke Rembong	9.293	6.659	1.611	789	-	292	2.299	1.241	39	6.271
5	Ruteng	6.037	4.405	3.025	281	-	145	456	142	4	4.053
6	Wae Rii	4.573	3.416	514	262	-	1.049	1.276	203	8	3.312
7	Lelak	2.391	1.736	828	82	-	190	721	214	3	2.038
8	Rahong Utara	3.679	2.712	544	89	-	681	1.412	37	1	2.764
9	Cibal	4.193	3.266	200	135	-	124	1 736	129	-	2.324
10	Cibal Barat	2.009	1.518	75	50	-	212	1 179	5	-	1.521
11	Reok	3.021	2.240	176	65	-	363	962	405	2	1.973
12	Reok Barat	2.377	1.854	336	33	-	310	1 028	187	-	1.894
Jumlah		48.344	35.461	8.140	2.137	-	4.171	14.157	4.346	73	33.024

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2021

Partisipasi peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai belum memenuhi target meski beberapa kecamatan sudah mendekati target tersebut. Kecamatan dengan cakupan peserta KB aktif tertinggi ada di Kecamatan Langke Rembong dan yang terendah ada di Kecamatan Cibal Barat. Data ini menunjukkan belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan KB. Selain itu, belum optimalnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan pemerintah juga menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program KB. Kondom merupakan yang paling sedikit digunakan dari seluruh alat kontrasepsi, sedangkan metode suntik menjadi yang paling banyak diminati. Kabupaten Manggarai telah memiliki klinik KB di setiap kecamatan sebagai sarana pendukung KB. Sebaran klinik KB di Kabupaten Manggarai dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2. 70. Klinik KB di Kabupaten Manggarai Menurut Kecamatan Tahun 2019**

Kecamatan	Klinik KB
Satar Mese	2
Satar Mese Barat	2
Satar Mese Utara	2
Langke Rembong	3
Ruteng	2
Wae Rii	3
Lelak	1
Rahong Utara	2
Cibal	2
Cibal Barat	1
Reok	1
Reok Barat	2
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai 2020*

Seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai telah memiliki fasilitas klinik KB meski sebarannya belum terlalu merata. Kecamatan dengan klinik KB terbanyak adalah Langke Rembong dan Wae Rii dengan 3 klinik. Kecamatan Lelak, Cibal Barat, dan Reok masing-masing hanya memiliki 1 klinik. Ketersediaan klinik harus ditambah secara berkesinambungan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata.

9. Perhubungan

Panjang jalan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan. Termasuk didalamnya jumlah jembatan, dermaga perhubungan yang digunakan oleh masyarakat, dan kendaraan dan barang dalam rangka mobilitas perekonomian masyarakat. Berikut adalah tabel rasio panjang jalan, jumlah orang dan barang yang terangkut dan jumlah orang yang melalui dermaga dari tahun 2017-2020.

**Tabel 2. 71. Rasio Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan, dan Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2020**

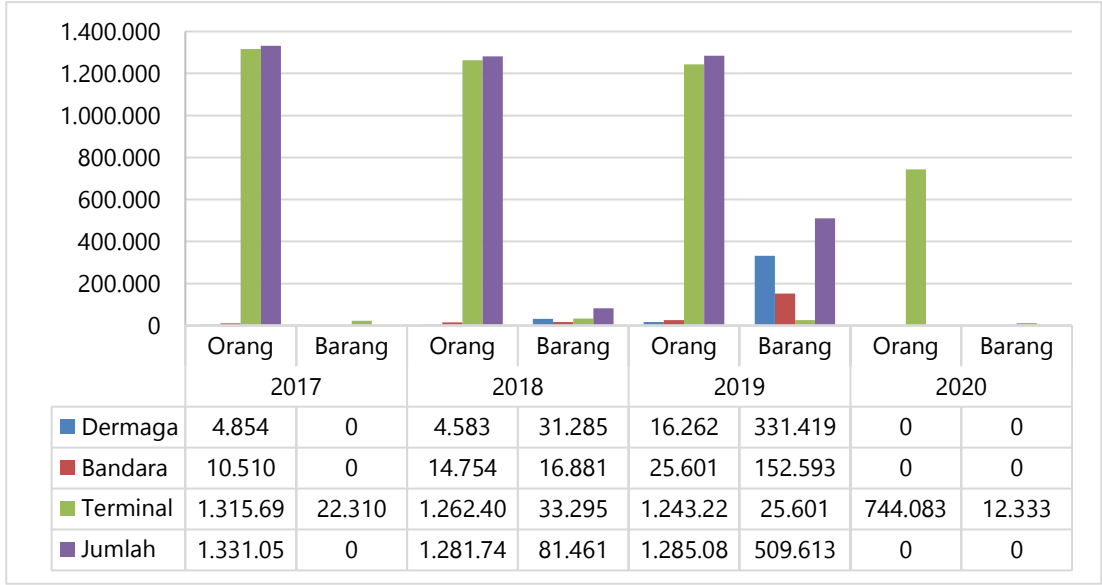
No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan (km) (Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan)	1700,89	1700,89	1904,60	1904,60
2	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (%)	48 %	50 %	55 %	57 %
3	Panjang jalan yang dilalui kendaraan perjumlah kendaraan (%)	0,72 %	0,73 %	0,75 %	0,76 %
4	Jumlah orang yang Terangkut Angkutan Umum	1.650.971	1.608.650	1.200.000	NA
5	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum	30.859	80.432	20.259	NA

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kab. Manggarai, 2020

Panjang jalan yang digunakan oleh kendaraan mengalami peningkatan sepanjang 203,71 km dari tahun 2017 hingga 2020. Hal yang sama terjadi dengan jumlah kendaraan angkutan umum dan panjang jalan yang dilalui kendaraan mengalami peningkatan pada tahun 2017-2020. Seiring dengan kenaikan tersebut, jumlah orang yang terangkut angkutan umum dan jumlah barang yang terangkut angkutan umum mengalami tren penurunan selama 2017-2019. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum menurun hingga 450.200 orang selama tiga tahun, sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum menurun hingga 10.600 barang.

Meningkatnya persentase kendaraan dan panjang jalan yang diiringi penurunan jumlah orang dan barang yang terangkut ini disebabkan oleh menurunnya daya tampung kendaraan umum terhadap orang dan barang di Kabupaten Manggarai pada tahun 2017-2019. Intensitas penggunaan infrastruktur di Kabupaten Manggarai juga dapat dilihat melalui data mobilitas masyarakat yang disampaikan dalam jumlah orang/barang yang melalui dermaga, bandara, dan terminal tahun 2017-2019 berikut.

**Grafik 2. 45. Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2019**



Sumber: BPS, Manggarai dalam angka, 2020

Jumlah orang dan barang yang melalui dermaga dan bandara memiliki tren yang meningkat selama tahun 2017-2019. Jumlah orang yang melalui terminal menurun tajam sebanyak 571.612 ribu dari tahun 2017-2020. Tren jumlah barang yang melalui terminal, cenderung fluktuatif dari tahun 2017-2020. Secara keseluruhan, jumlah orang yang melalui dermaga dan bandara mengalami peningkatan, sedangkan orang yang melalui terminal cenderung mengalami penurunan pada tahun 2017-2020. Jumlah terbesar penggunaan angkutan umum orang/barang terjadi melalui terminal dengan dominasi terbesar pada mobilitas masyarakat, sedangkan pada dermaga dan bandara, mobilitas barang lebih besar daripada mobilitas masyarakat pada tahun 2018-2019.

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika sangat penting bagi pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan akses masyarakat terhadap informasi publik. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memiliki peran vital dalam memudahkan komunikasi dan memberi informasi serta pengetahuan terkait situasi di berbagai belahan dunia. Dengan adanya internet, manusia dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan mitra Pemerintah Daerah dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi terkait pembangunan kepada masyarakat. Berikut ini adalah tabel cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 72. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan

No	Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KIM	NA	2	2	2	NA
2	Jumlah Kecamatan yang ada dalam kabupaten/Kota	12	12	12	12	12
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	NA	16.66	16.66	16.66	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Infromatika Kab. Manggarai, 2021

Kegiatan Pengembangan dan Pemberdyaan KIM dilakukan sejak tahun 2017. Jumlah KIM yang sudah terbentuk adalah 6 kelompok hingga tahun 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sudah memiliki anggaran untuk membentuk 2 kelompok yang baru pada tahun 2020, namun dana tersebut di-realokasikan untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Manggarai. Tabel di bawah ini adalah capaian kinerja pelayanan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 73. Capaian Kinerja Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika

No	Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.66	0.69	0.69	0.69	0.73
2	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	3811	N/A	3808	4079	N/A
3	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Internet	2185	2266	402	2266	NA
4	Jumlah kantor pemerintah memiliki akses internet	29	29	29	29	29
5	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi perangkat e-government	0	9,76	9,76	9,76	9,76
6	Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik	N/A	44.13	46.41	48.6	N/A
7	Indeks SPBE	N/A	N/A	1.81	1.91	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai, 2021

Capaian kinerja pelayanan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Manggarai cukup fluktuatif selama periode 2016-2020. Cakupan layanan telekomunikasi Kabupaten Manggarai bergerak lamban dengan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin pada tahun 2017; bahkan sempat stagnan di tahun 2017 hingga 2019. Indikator ini kemudian naik sebesar 0.04 poin.

Persoalan ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana, masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi, dan belum optimalnya pengembangan jaringan telekomunikasi di kecamatan merupakan beberapa tantangan yang dihadapi. Begitu pula dengan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon serta jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet, keduanya fluktuatif selama periode 2016-2020. Sedangkan jumlah kantor pemerintah yang memiliki akses internet serta persentase perangkat daerah yang terfasilitasi perangkat *e-government* stagnan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Peningkatan hanya terjadi pada persentase realisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik; di mana terjadi kenaikan sebesar 2,28% di tahun

2018 dan 2,19% di tahun 2019. Hal ini manandakan bahwa cakupan pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai di sektor komunikasi belum optimal dan diperlukan adanya peningkatan kualitas penataan kelembagaan serta peningkatan peran KIM.

**11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Koperasi dan UMKM menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Koperasi dan UMKM memiliki berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan dan diakses oleh seluruh kalangan masyarakat guna menggerakkan perekonomian daerah. Pengembangan koperasi dan UMKM juga tercantum dalam arah kebijakan RPJMN 2020-2024, sehingga pengembangannya harus didorong di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel mengenai koperasi yang meningkat SHU-nya di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020:

**Tabel 2. 74. Persentase Koperasi yang Meningkat SHU-nya dan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020 (Persen)**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi yang meningkat SHU-nya	93.80	94.07	93.57	89.44	89.51
2	Persentase koperasi sehat	93.80	94.07	93.57	89.44	89.51

*Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai tahun 2021*

Koperasi yang meningkat SHU-nya di Kabupaten Manggarai menunjukan tren yang fluktuatif serta cenderung menurun jika dibandingkan data dari tahun awal 2016 hingga 2020 dengan penurunan sebesar 4,29. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,13. Penurunan SHU koperasi ini disebabkan oleh kualitas manajerial koperasi yang semakin menurun dan beberapa faktor eksternal yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sejalan dengan penurunan SHU koperasi, persentase koperasi sehat di Kabupaten Manggarai juga mengalami penurunan dibandingkan tahun awal 2016. Kualitas manajemen koperasi menjadi faktor internal yang perlu diperhitungkan atas terjadinya persoalan ini. Kualitas manajemen koperasi sering dinilai

menggunakan proxy koperasi aktif. Berikut adalah tabel tentang koperasi aktif di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 75. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif	121	127	131	127	129
2	Jumlah Koperasi	129	135	140	142	144
3	Persentase Koperasi Aktif	93.79%	94,07%	93.57%	89,44%	89,58%

*Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai tahun 2021*

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Manggarai selama 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan cenderung menurun. Penurunan terjadi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 0,14%. Capaian tersebut merupakan suatu kemunduran jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sempat mencapai 94,07%. Rata-rata penurunan persentase koperasi aktif mencapai 1,5 persen selama periode 2016-2020. Rendahnya kapasitas manajerial koperasi menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan koperasi aktif.

Kualitas manajerial koperasi di kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas SDM pengurus koperasi dan belum optimalnya pengawasan koperasi. Diperlukan pendampingan koperasi secara berkesinambungan untuk memperbaiki persoalan tersebut. Komitmen anggota koperasi juga perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kapasitas SDM pengurus atau pengelola koperasi.

Usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Manggarai. Kinerja usaha mikro dan kecil memiliki keterkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah data mengenai persentase peningkatan kelas usaha kecil ke menengah dan peningkatan omzet usaha kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020:



**Tabel 2. 76. Omzet UMKM di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Omzet UMKM	0	0	94.054.320.002	120.744.820.002	120.744.820.012

*Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai tahun 2021*

Omzet UKM mengalami tren yang terus meningkat pada tahun 2018 hingga 2019. Tren peningkatan ini berhenti pada tahun 2020 karena guncangan ekonomi akibat pandemic Covid-19. Penurunan kapasitas pemasaran dan produksi usaha kecil menjadi salah satu faktor indikatif penyebab stagnasi omzet UKM di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020. Diperlukan program yang tepat dengan dukungan intervensi multi-aktor untuk menyelesaikan persoalan ini.

Persentase usaha mikro dan kecil adalah salah satu indikator umum yang digunakan oleh beberapa daerah untuk menilai kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Semakin kecil pertumbuhan usaha kecil, berarti kesehatan ekonomi di sebuah daerah di tingkat mikro sedang terganggu. Berikut adalah data mengenai persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020:

**Tabel 2. 77. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	2.052	2.252	2.230	1.802	2.127
Jumlah seluruh UMKM	2.352	2.512	2.512	2.625	2.775
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	87,24	89,65	88,77	68,65	76,65

*Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai tahun 2021*

Pertumbuhan usaha mikro dan kecil tercatat cukup fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 2.7 persen dari tahun 2016 hingga 2020. Proporsi jumlah UMK terhadap total UMKM juga mengalami fluktuasi dengan tren yang cenderung menurun. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kelas usaha dari kecil ke menengah. Namun, ketersediaan data terkait peningkatan kelas usaha tidak tersedia, sehingga asumsi ini belum dapat dipastikan.

12. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Urusan ini berhubungan dengan beberapa indikator makro seperti realisasi investasi dan jumlah investor. Berikut adalah data mengenai penanaman modal di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 78. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	13	17	24	45	23
2	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	-	40,5	14,7	73,1	21
3	Jumlah tenaga kerja		689	353		564

Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai tahun 2021

Jumlah investor berskala nasional, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, angka jumlah investor tersebut turun drastis sebanyak 22 investor dari tahun 2019 ke tahun 2020. Meskipun jumlah investor menurun, hal ini tidak diikuti oleh penurunan jumlah investasi berskala nasional.

Grafik 2. 46. Jumlah Nilai investasi Berskala Nasional (Rp) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas PMKUT Kabupaten Manggarai tahun 2021

Investasi berskala nasional justru meningkat tajam sebesar Rp 127.353.091.003 dari tahun 2019 ke tahun 2020. Bidang usaha dari investor pada tahun 2019 tercatat dari sektor penjualan suku cadang kendaraan roda dua, penjualan eceran barang campuran, penjualan kendaraan roda dua, bahan bangunan, obat-obatan, bengkel mobil, perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor, perdagangan eceran pupuk dan lain-lain. Perdagangan masih mendominasi data investasi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2019.

Dominasi investasi ini berbeda dengan Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai perbandingan, catatan realisasi PMDN di Manggarai Barat tahun 2017 terpusat di sektor pariwisata. Dari 68 PMDN yang masuk tahun ini, 61 investor (89,7 persen) menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Hanya 10 persen investor yang menanamkan modal mereka di sektor konstruksi, pertambangan, dan real estate (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Manggarai Barat, 2017). Kedekatan wilayah Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Manggarai Barat, apabila dikelola dengan optimal tentu membuka peluang pariwisata yang besar dan dapat menarik investor lebih maksimal.

Nilai investasi yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2020 sayangnya tidak diikuti dengan naiknya rasio penyerapan tenaga kerja. Nilai investasi di Kabupaten Manggarai yang mencapai nominal tertinggi di tahun 2020, justru rasio serapan tenaga kerjanya turun sebesar 52,1% dibanding tahun 2019.

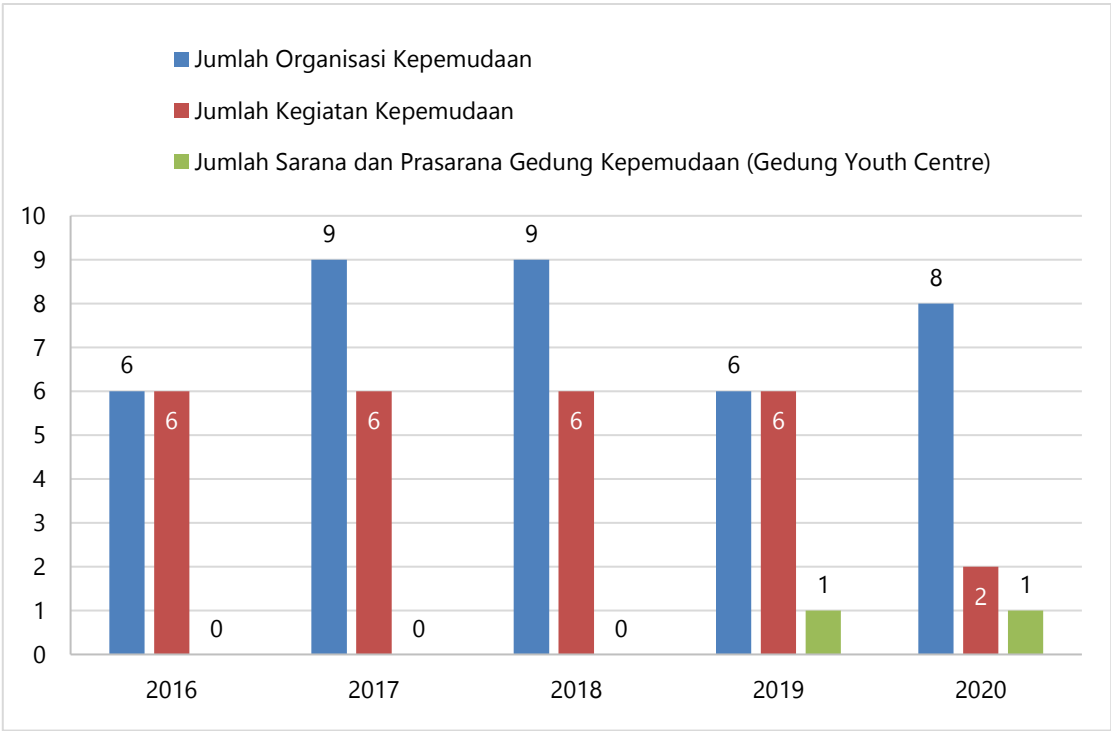
Belum optimalnya realisasi nilai investasi perlu diperbaiki dengan memperhatikan minat investor dan kualitas perizinan investasi. Minat investor sangat terkait dengan optimalisasi identifikasi potensi investasi, promosi potensi investasi dan kondusivitas iklim investasi. Kualitas perizinan berhubungan dengan kapasitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana prasarana perizinan.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan

kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta aktualisasi diri dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga, yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Berikut adalah data terkait kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Manggarai:

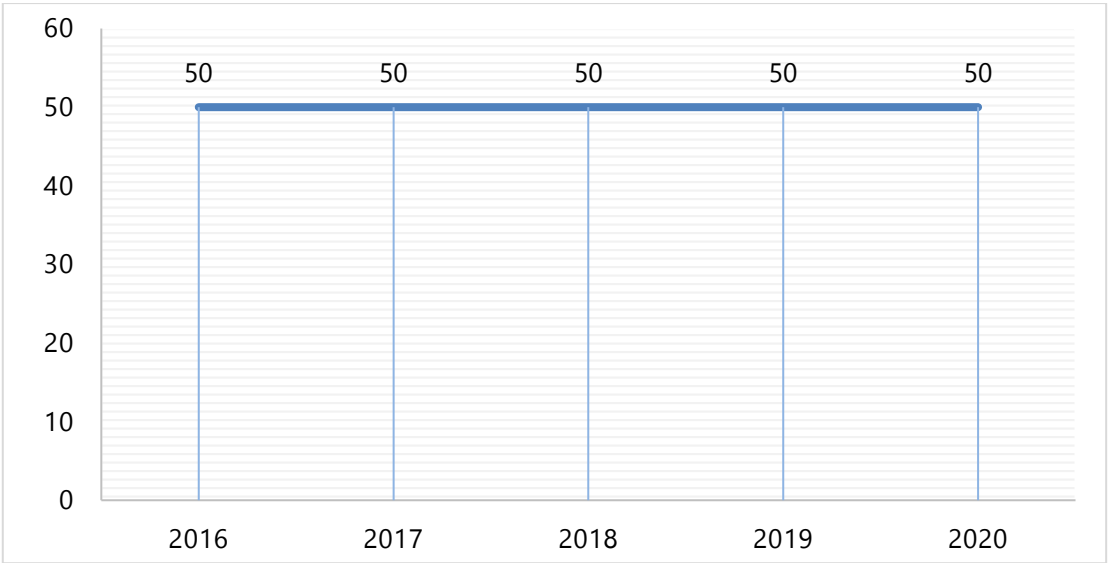
**Grafik 2. 47. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2017**



*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021*

Organisasi kepemudaan jumlahnya fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Sedangkan kegiatan kepemudaan jumlahnya stagnan dan menurun 4 kegiatan pada tahun 2020. Padahal pada tahun yang sama jumlah organisasi kepemudaan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh organisasi secara rutin melakukan kegiatan kepemudaan. Adanya penurunan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Manggarai salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi kepemudaan, masih terbatasnya jumlah kegiatan sosialisasi menjadi salah satu faktor pendukungnya.

**Grafik 2. 48. Persentase Kelompok Pemuda Aktif dalam Pembangunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Persentase kelompok pemuda aktif dalam pembangunan angkanya stagnan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan peran pemuda khususnya dalam pembangunan khususnya melalui kegiatan ekonomi mandiri pemuda. Kondisi ini harus segera diatasi karena pemberdayaan pemuda dapat menciptakan berbagai hal positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang olahraga, kegiatan olahraga rekreasi, kesehatan, pendidikan, dan juga prestasi menjadi salah satu urusan pemerintah daerah. Kegiatan berbagai jenis olahraga tersebut bisa dilakukan dengan baik jika ada organisasi cabang olahraga yang memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan, serta pengaturan. Berikut adalah cabang olahraga dan induk organisasi yang ada di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 79. Cabang Olahraga dan Nama Induk Organisasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Cabang Olah Raga	Nama Induk Organisasi	Keterangan
1	Atletik	PASI	aktif
2	Bola Kaki	PERSIM	aktif
3	Bola Volley	PBVS	aktif
4	Tenis Meja	PTMS	aktif
5	Tenis Lantai	PELTI	aktif

No	Cabang Olah Raga	Nama Induk Organisasi	Keterangan
6	Bulu Tangkis	PBSI	aktif
7	Kempo	PERKEMI	aktif
8	Karate	FORKI	aktif
9	Taekwondo	TAEKWONDO	aktif
10	Pencaksilat	IPSI	aktif
11	Sepak Takraw	PSTI	aktif
12	Tinju	PERTINA	aktif

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, 2021

Seluruh cabang olahraga dan organisasinya di Kabupaten Manggarai masih berstatus aktif. Hal itu menunjukkan adanya minat yang tinggi dari masyarakat terhadap berbagai jenis olahraga yang berbeda, sehingga setiap cabang olahraga yang ada beserta organisasinya tetap bisa melakukan kegiatan rekreasi maupun kompetisi. Kondisi ini akan lebih baik jika didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga, pelatih yang memiliki sertifikasi dan kompetensi serta manajemen pengelolaan olahraga yang baik. Hal ini akan sangat mendukung untuk menciptakan bibit atlet dan memwadahi minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu.

### 14. Statistik

Statistik merupakan komponen krusial yang menjadi sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Data yang berkualitas serta informasi yang terpercaya dan mudah diakses adalah kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Statistik menjadi sumber informasi mengenai kondisi khusus di suatu wilayah yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait, sehingga dapat membantu proses perumusan masalah, penentuan kebijakan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam urusan statistik. Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Jenis statistik dalam konteks Kabupaten Manggarai adalah statistik dasar dan statistik sektoral, yakni pengolahan data yang dilakukan oleh BPS sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997.

Dokumen yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Manggarai adalah Buku Statistik Kabupaten Manggarai Dalam Angka yang

merupakan hasil data olahan dari berbagai Perangkat Daerah dengan BPS selama periode tahun 2016-2020 dalam bentuk soft copy, sedangkan publikasi dalam bentuk hard copy, dilakukan oleh Pemkab manggarai melalui dinas kominfo atas izin BPS kabupaten Manggarai. Kendala dalam pengumpulan data yang dihadapi selama ini adalah lambatnya pengumpulan data di setiap kecamatan. Solusi untuk permasalahan ini adalah peningkatan koordinasi dengan kecamatan dalam penyusunan data statistik. Selain itu, penambahan variasi jenis dokumen perlu dilakukan untuk menambah jumlah publikasi.

15. Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan persandian merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. Terwujudnya pengelolaan persandian dan informasi daerah serta meningkatkan pengumpulan, pengelolaan analisis data statistik daerah merupakan salah satu sasaran strategis Kabupaten Manggarai. Urusan persandian telah diselenggarakan di Kabupaten Manggarai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Data berikut menunjukkan jumlah informasi daerah yang telah diamankan dengan persandian dan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam di Kabupaten Manggarai pada tahun 2016-2020.

Grafik 2. 49. Informasi Daerah yang Diamankan Persandian dan Jumlah Perangkat yang Menggunakan Sandi Dalam di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Infomrasi Daerah yang diamankan dengan persandian	0	0	100	311	440
2	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan persandian	41	41	41	41	41

Sumber: Dinas Komunikasi dan Infromatika Kab. Manggarai, 2021

Jumlah informasi daerah yang diamankan dengan persandian telah melampaui target persandian dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 440% pada tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan persentase capaian terbesar di Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020, sedangkan jumlah

perangkat daerah yang telah menggunakan sandi berjumlah tetap selama 2016-2020.

Layanan persandian sudah dapat mencukupi semua kebutuhan. Kondisi ini diindikasikan dari indikator tersedianya fasilitas layanan persandian, namun, masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurang memadainya kapasitas SDM di bidang persandian. Hal tersebut menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan tentang persandian bagi ASN pengelola persandian, sehingga dapat meningkatkan penggunaan persandian di Kabupaten Manggarai.

16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan di Kabupaten Manggarai mencakup pelestarian dan konservasi budaya benda dan bukan benda. Kabupaten Manggarai memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yang sebagian dapat dilestarikan dengan bekerjasama dengan sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian budaya di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 80. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020

No	Pagelaran seni	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pagelaran Caci	1	1	1	1	-
2.	Festival Musik	-	-	-	-	-
3.	Festival Tari	-	-	-	-	-
4.	Lomba Lukis	-	-	-	-	-
5.	Festival Florata	1	1	1	1	-
6.	Pagelaran Seni Budaya Lainnya	1	1	1	3	1
7.	Ritus Adat	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai, 2021

Intensitas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya menurun pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 di Kabupaten Manggarai. Festival seni dan budaya akan dapat diselenggarakan kembali setelah pandemi mereda dengan protokol kesehatan yang ketat atau media daring sehingga tidak menimbulkan kerumunan.



Kabupaten Manggarai memiliki kekayaan budaya berupa benda cagar budaya dan situs sejarah. Keduanya sangat berpengaruh terhadap pembangunan kebudayaan di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah tabel mengenai benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 81. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Benda Cagar Budaya	87	37	48	63	63
2	Situs Sejarah Purbakala	35	17	13	4	4
3	Revitaliisasi Cagar Budaya	N/A	4	13	7	7

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai, 2021*

Jumlah benda cagar budaya mengalami penurunan setiap tahun sejak 2016 hingga 2020. Hal yang sama juga terjadi pada situs sejarah purbakala. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya intensitas kegiatan revitalisasi cagar budaya di Kabupaten Manggarai. Pelestarian budaya harus tetap dijalankan seiring dengan penelitian, perencanaan, pelestarian, perlindungan, pemanfaatan dan pengawasan budaya benda secara berkesinambungan.

Budaya bukan benda seperti bahasa dan tari-tarian asli Kabupaten Manggarai juga menjadi fokus utama yang harus tetap dikembangkan dan dilestarikan secara berkesinambungan. Berikut adalah data mengenai kelompok kebudayaan, bahasa daerah, dan tari-tarian di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Tabel 2. 82. Jumlah kelompok kebudayaan, bahasa daerah, tari-tarian dan budaya yang dikembangkan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 -2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kebudayaan	31	34	37	37	38
2	Jumlah bahasa daerah	1	1	1	1	1
3	Jumlah tari-tarian	2	2	2	2	2
4	Jumlah budaya daerah yang dikembangkan	1	1	1	1	1
5	Jumlah budaya daerah yang belum dikembangkan	0	0	0	0	0

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Manggarai, 2021*

Jumlah kelompok budaya mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020, namun kondisi ini berbeda dengan bahasa daerah dan tari-tarian. Tari dan bahasa akan cenderung stagnan karena keduanya bukanlah sesuatu yang bisa bertambah dalam hitungan periode jangka menengah. Kelompok kebudayaan yang semakin banyak harus terus dibina agar eksistensi dan fungsinya sebagai pelestari budaya tetap terjaga dengan baik.

### 17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan bisa menjadi penunjang bagi urusan pendidikan. Berikut adalah data capaian perpustakaan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 83. Perkembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	9	9	9	9	9
2	Ratio Perpustakaan persatuan penduduk	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	11.118	10.709	7.966	794	2.227
4	Jumlah koleksi bukuperpustakaan	14.110	14.294	14.294	14.294	14.294

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai, 2021*

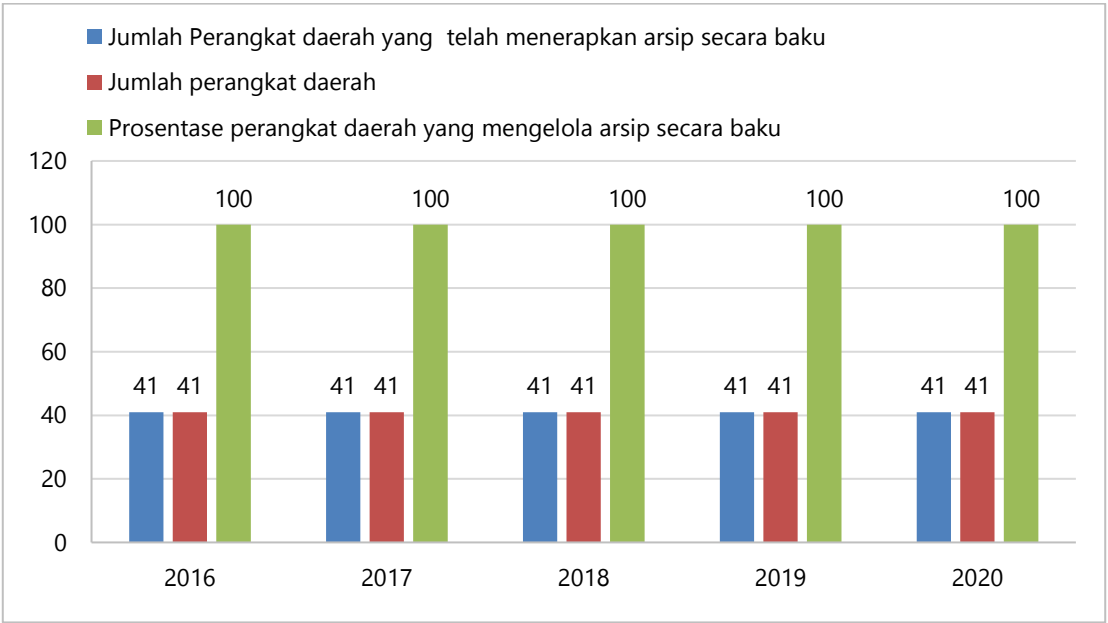
Capaian pelayanan perpustakaan di Kabupaten Manggarai pada aspek rasio perpustakaan mengalami penurunan. Begitupun dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang berkurang drastis dibandingkan tahun 2016 hingga 2018. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan diakibatkan oleh minat masyarakat terhadap perpustakaan yang turun, dan sistem pendataan pengunjung perpustakaan yang kurang optimal. Selain itu, kurangnya koleksi buku bacaan yang sesuai kebutuhan dan masih terbatasnya fungsi perpustakaan menjadi penyebab lain menurunnya angka kunjungan perpustakaan. Meskipun demikian, indikator terkait pelayanan perpustakaan tersebut baru sebatas pada ukuran output. Perlu indikator atau ukuran lain ke

depan misalnya dengan menghitung Indeks Minat Baca/Indeks literasi Masyarakat untuk melihat bagaimana perpustakaan dapat berperan terhadap perkembangan literasi di Kabupaten manggarai.

### 18. Kearsipan

Capaian urusan kearsipan di Kabupaten Manggarai dapat dilihat dari persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola arsip secara baku. Data ini mendukung kualitas tata kelola masing-masing perangkat daerah. Berikut adalah data mengenai perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 50. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai, 2021*

Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2020. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang baik dan perlu untuk dipertahankan pada periode selanjutnya. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan terkait urusan kearsipan, di antaranya adalah sistem pengelolaan arsip daerah. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna menunjang terlaksananya pengelolaan arsip daerah yang optimal adalah optimalisasi depot arsip daerah, penyusunan SOP terkait penghapusan arsip daerah dan optimalisasi pembinaan terhadap pengelola arsip di perangkat daerah.

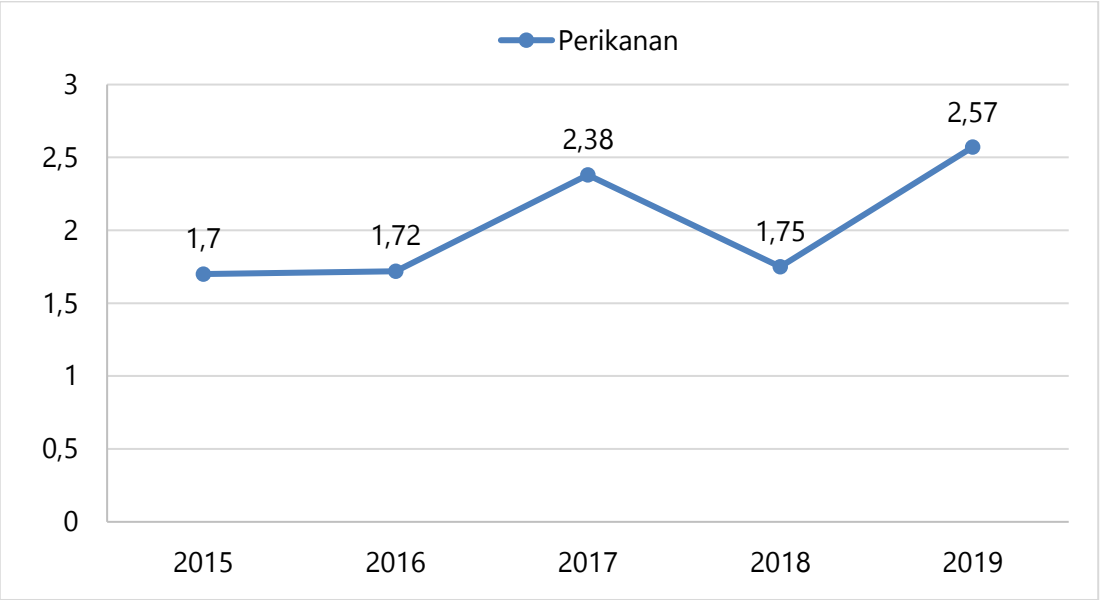
**2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**

Fokus layanan urusan pemerintah pilihan meliputi analisis capaian kinerja pada urusan kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, dan berbagai sektor potensial lainnya yang berpengaruh terhadap berbagai indikator makro daerah. Berikut ini merupakan capaian beberapa sektor yang termasuk dalam urusan pilihan di Kabupaten Manggarai:

**2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan**

Kinerja urusan perikanan dapat dinilai dengan indikator makro kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB. Indikator ini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai.

**Grafik 2. 51. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Tahun 2015 – 2019 (Persen)**



*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2021*

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mengalami tren yang fluktuatif dengan pertumbuhan sektor sebesar 0,87 selama tahun 2015 hingga 2019. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya yang disertai oleh masih rendahnya kualitas produk perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Manggarai.

Kabupaten Manggarai memiliki dua daerah yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga optimalisasi potensi perikanan laut dan pemberdayaan nelayan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Sasaran

pembangunan dalam urusan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi perikanan dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi, serta melakukan bina kelompok nelayan di Kabupaten Manggarai. Berikut merupakan data jumlah produksi dan konsumsi perikanan, serta kelompok bina nelayan di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

**Tabel 2. 84. Jumlah Produksi Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

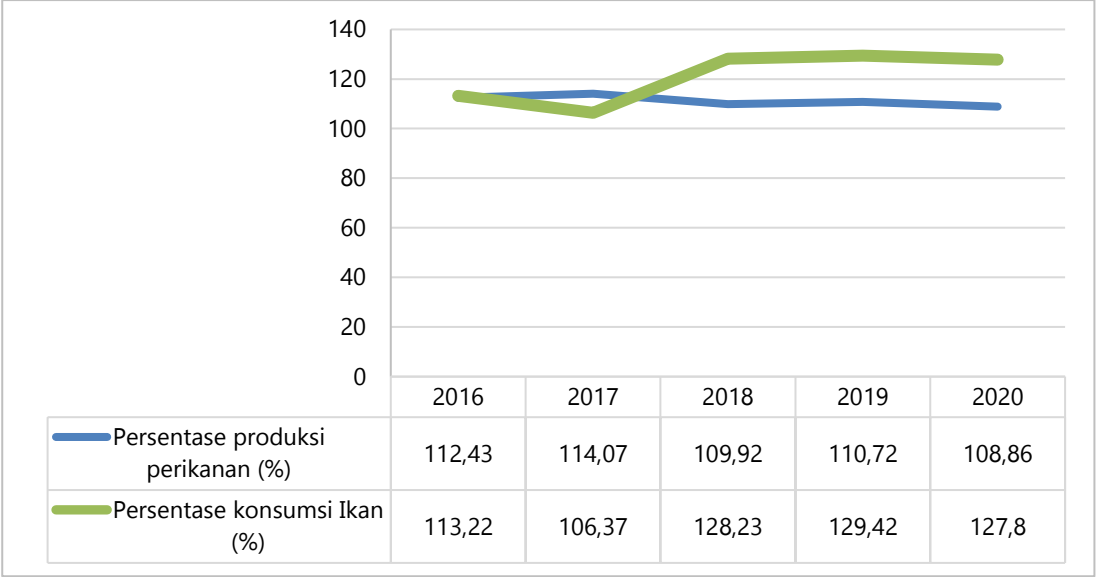
No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi Ikan (ton)	6.874,89	7.121,67	7.138,38	7.195,86	7.216,80
2	Target jumlah produksi ikan daerah (ton)	6.115	6.243	6.494	6.499	6.629,59
3	Jumlah konsumsi Ikan (kg)	20,38	20,37	24,94	25,56	25,56
4	Target jumlah konsumsi ikan daerah (kg)	18	19,15	19,45	19,75	20

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Manggarai, 2021*

Produksi perikanan di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan karena bertambahnya armada penangkapan ikan sehingga produksi perikanan di Kabupaten Manggarai meningkat, meskipun demikian, persentase produksi perikanan cenderung mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan target produksi perikanan Pemerintah Daerah yang terus meningkat.

Penurunan persentase produksi perikanan ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia penangkap dan pembudiaya ikan serta kurangnya sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya ikan. Diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan produksi perikanan.

Grafik 2. 52. Persentase Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020



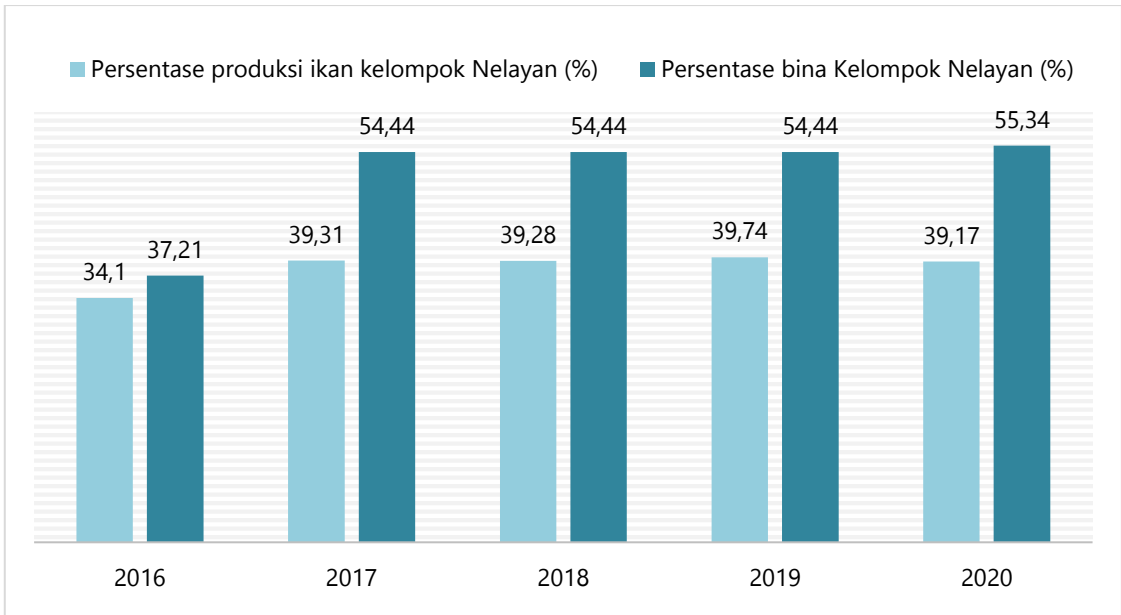
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Manggarai, 2021

Jumlah konsumsi ikan meningkat melebihi target dari Pemerintah Daerah dan mengalami peningkatan sebesar 5,18 kg dari tahun 2016-2020, namun meskipun persentase konsumsi ikan juga turut meningkat tahun 2016-2020, terjadi tren penurunan persentase konsumsi ikan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya kemampuan masyarakat dalam membeli ikan, sementara target konsumsi ikan daerah meningkat. Secara keseluruhan, persentase konsumsi ikan cenderung meningkat, sedangkan persentase produksi ikan cenderung stabil dengan sedikit tren penurunan dari tahun 2016-2020.

Kualitas produk perikanan juga menjadi perhatian utama untuk meningkatkan konsumsi ikan. Kualitas / mutu produk perikanan di Kabupaten Manggarai masih belum memadai hingga saat ini. Persoalan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya standarisasi produk perikanan (syarat teknis, sanitasi dan higienis).

Peningkatan produksi dan konsumsi ikan dapat dicapai jika pembinaan kelompok nelayan dapat berjalan dengan baik. Nelayan sebagai pelaku utama dalam pertumbuhan sektor perikanan membutuhkan bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Berikut merupakan data persentase bina kelompok nelayan dan produksi ikan yang dihasilkan kelompok nelayan di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

**Grafik 2. 53. Persentase Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Ikan yang Dihasilkan Kelompok Nelayan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Manggarai, 2021

Persentase produksi ikan kelompok nelayan secara umum mengalami tren peningkatan sebesar 5,07% dari tahun 2016-2020 dengan puncak persentase terbesar pada tahun 2019 dan menurun sebesar 0,57% pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya produktivitas nelayan akibat adanya pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, kapasitas SDM dan sarana parasarana penangkapan ikan juga menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap penurunan produksi perikanan tangkap.

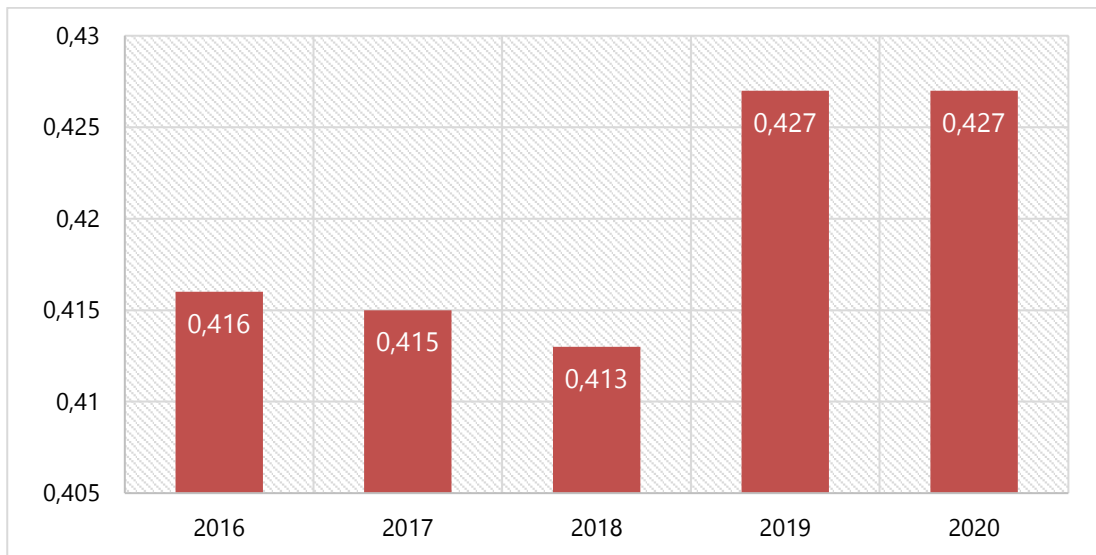
Jika dibandingkan dengan persentase persentase produksi ikan kelompok nelayan, persentase bina kelompok nelayan cenderung memiliki peningkatan cukup signifikan sebesar 18,13% dari tahun 2016-2020, meskipun menurun sebesar 0,1% pada tahun 2020. Peningkatan persentase bina kelompok nelayan disebabkan oleh meningkatnya intensitas program pemberdayaan nelayan yang dapat meningkatkan produksi ikan kelompok nelayan secara berkala untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### 2.3.2.2. Perindustrian

Urusan perindustrian dalam lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Indikator makro untuk menilai kinerja sektor perindustrian di Kabupaten Manggarai adalah kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Berikut

adalah uraian data mengenai kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai.

**Grafik 2. 54. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)**



*Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai, 2021*

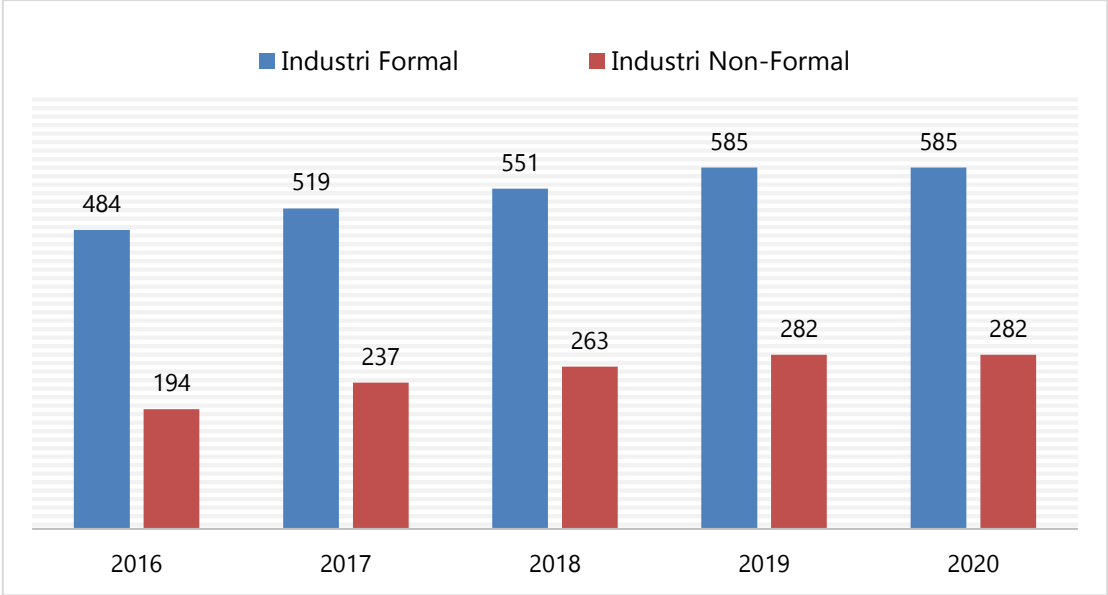
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar 0,011 dari tahun 2016-2020, meskipun sempat terdapat tren penurunan pada tahun 2017 dan 2019. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai kembali meningkat pada tahun 2019 bertahan dengan angka 0,427 hingga tahun 2020. Kontribusi industri terhadap PDRB yang meningkat tersebut terdiri di antaranya dari sektor industri kecil.

Kontribusi sektor industri terhadap PDBR di Kabupaten Manggarai tergolong sangat kecil karena berada di bawah satu persen. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya nilai produksi IKM dan mutu produk industri tenun dan mebel belum memadai. Nilai produksi IKM terkait dengan berbagai faktor seperti kapasitas SDM, bantuan permodalan, teknologi dan bahan baku produksi. Kualitas produk IKM dipengaruhi oleh teknologi dan kapasitas SDM dalam penjaminan mutu yang belum memadai.

Indikator lain yang sering digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja sektor industri, selain nilai produksi IKM adalah pertumbuhan industri IKM. Pertumbuhan industri kecil sektor formal maupun non-formal di Kabupaten Manggarai dapat disimak pada data berikut.



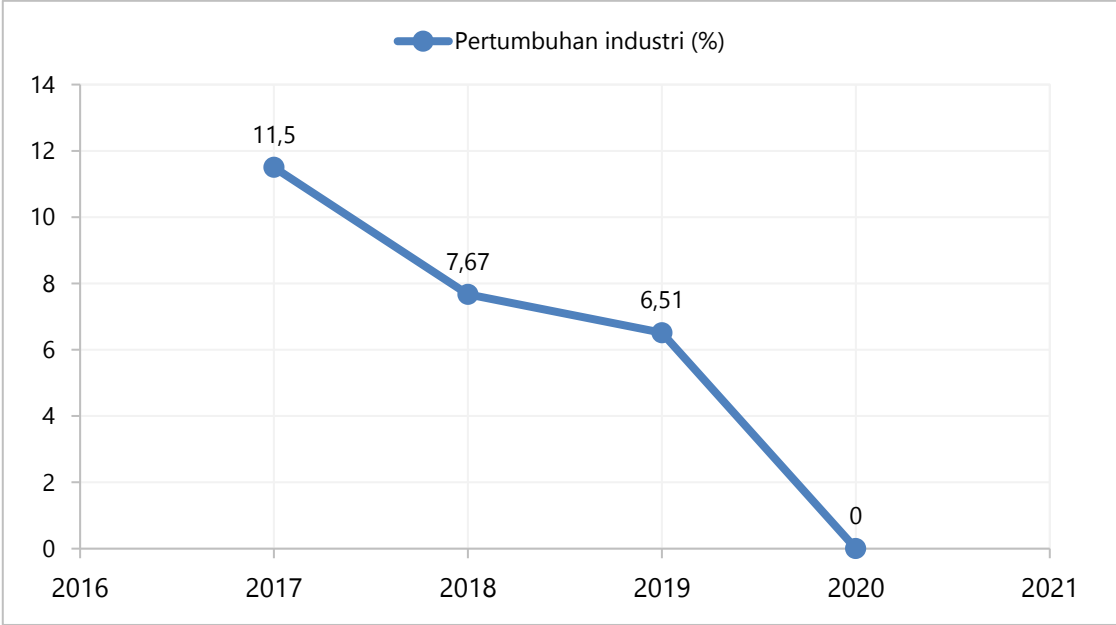
**Grafik 2. 55. Pertumbuhan Industri Kecil Sektor Formal dan Non-Formal Kabupaten Manggarai 2016 - 2020**



Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Manggarai, 2021

Pertumbuhan industri kecil sektor formal maupun non-formal di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan yang stabil selama tahun 2016-2020. Sektor industri formal meningkat mencapai 101 industri, sedangkan sektor industri non-formal meningkat sejumlah 88 industri. Pertumbuhan industri kecil tersebut diikuti oleh penurunan persentase pertumbuhan industri. Berikut merupakan grafik persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

**Grafik 2. 56. Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**



Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Manggarai, 2021

Laju pertumbuhan industri di Kabupaten Manggarai mengalami tren yang menurun sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Penurunan tertinggi terjadi dari tahun 2017 menuju 2018, yaitu dengan penurunan mencapai 3,83%. Kondisi tersebut disebabkan melambatnya proses ekspor impor dan melemahnya kualitas pengelolaan industri.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Manggarai diarahkan pada peningkatan bina kelompok pengrajin serta pertumbuhan industri kecil di sektor formal maupun non-formal. Berikut merupakan data cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

**Tabel 2. 85. Cakupan Bina kelompok Pengrajin Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah kelompok pengerajin yang mendapatkan bantuan pemerintah	24	41	39	19	19
2	Jumlah kelompok pengerajin	194	237	263	282	282
3	Persentase cakupan bina kelompok kelompok pengerajin (%)	12,37	17,29	14,82	7	7

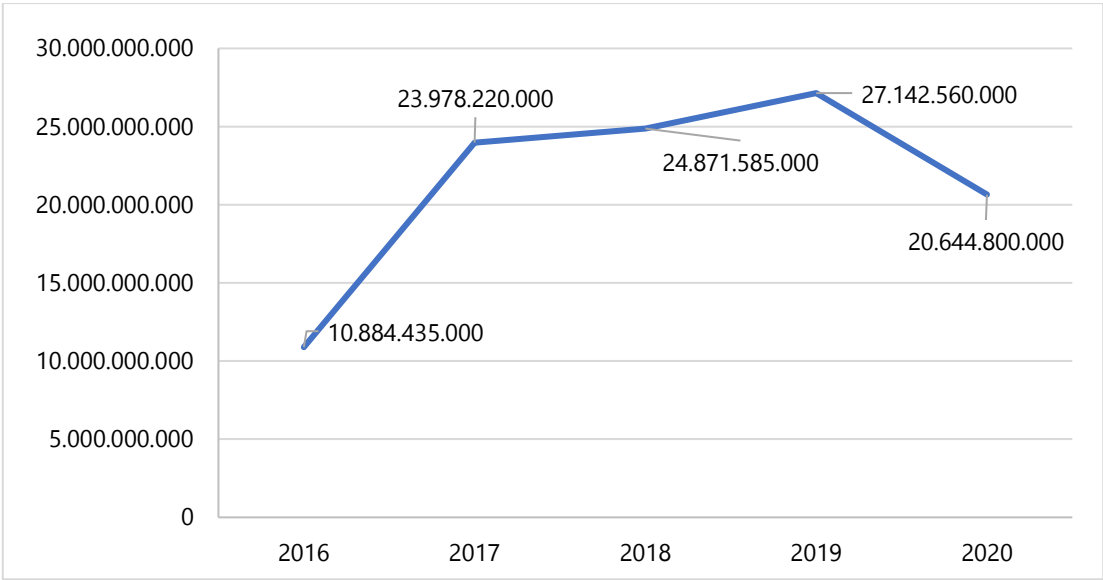
*Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Manggarai, 2021*

Jumlah kelompok pengrajin yang terus meningkat di Kabupaten Manggarai tidak diiringi dengan peningkatan bantuan pemerintah pada kelompok pengrajin pada tahun 2016-2020. Hal tersebut dapat dilihat melalui berkurangnya jumlah kelompok pengerajin yang mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2019 dan 2020, sehingga persentase cakupan bina kelompok pengerajin hanya meningkat hingga tahun 2017 dan menurun secara signifikan terutama sebesar 5,37% pada tahun 2019 dan 2020.

### 2.3.2.3. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi potensial bagi Kabupaten Manggarai. Jika dikelola dengan baik, sektor ini mampu memberikan *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan sektor lainnya. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020:

**Grafik 2. 57. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Rupiah)**



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, 2021

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020. Menurunnya kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh langsung terhadap penurunan PDRB sektor pariwisata pada tahun 2020. Penurunan sebesar Rp. 6.497.760.000 terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020. Berikut adalah data mengenai kunjungan wisatawan dan rata-rata belanja wisatawan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 86. Kunjungan Wisata Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja Kunjungan Wisata	12.345	21.602	21.249	22.330	8.096
2	Jumlah kunjungan Wisata yang direncanakan	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
3	Persentase Kunjungan wisata	88,17%	146,95%	137,66%	137,77%	47,57%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai, 2021

Terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 14.234 wisatawan. Hal tersebut terjadi akibat dari dampak pembatasan aktivitas saat pandemi Covid-19 sehingga kinerja kunjungan

wisatawan turun drastis pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 2. 87. Kunjungan Wisata di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama tinggal (hari)	3	3	3	3	3
2	Rata-rata belanja wisatawan per Hari (Rp)	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.725.000	1.275.000
3	Total Uang beredar (Rp)	47.254.050.000	82.627.650.000	81.277.425.000	85.412.250.000	30.967.200.000

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai, 2021*

Terdapat peningkatan tajam sebesar Rp450.000 rata-rata belanja wisatawan per hari antara tahun 2018 ke tahun 2019. Rata-rata belanja tersebut menurun secara signifikan sebesar Rp450.000 di tahun 2019 ke 2020. Penurunan ini sejalan dengan penurunan total uang beredar di tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp54.445.050.000. Pengembangan ekonomi kreatif, terutama kerajinan harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk meningkatkan rata-rata belanja wisatawan per hari.

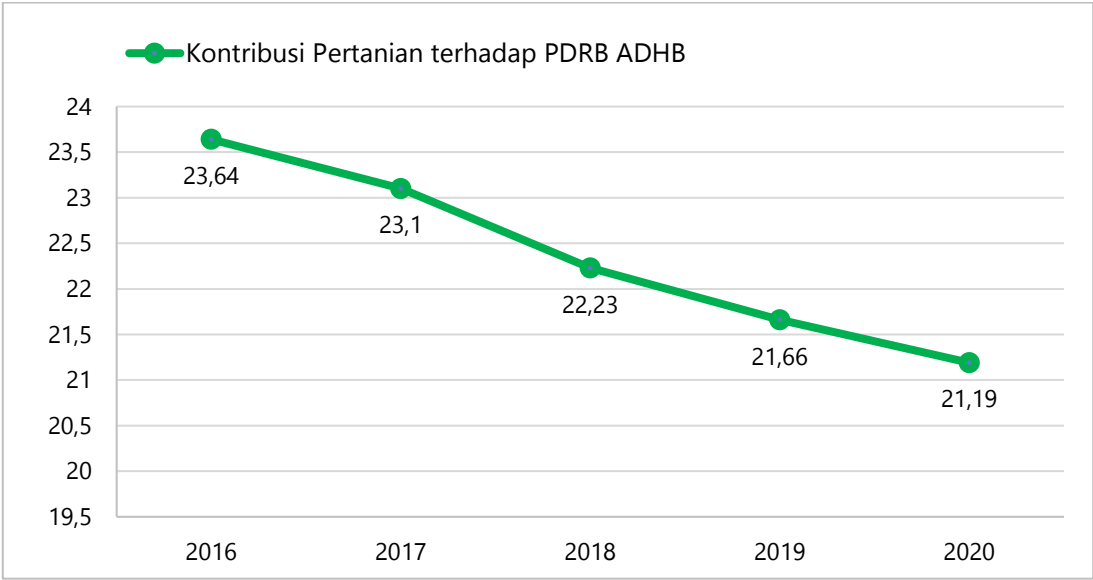
Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Manggarai memiliki posisi yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo sebagai Kawasan destinasi pariwisata super prioritas. Kabupaten Manggarai memiliki beberapa destinasi wisata unggulan seperti Todo dan Wae Rebo. Kedua destinasi tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Manggarai juga diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo secara berkesinambungan.

**2.3.2.4. Pertanian**

Kinerja sektor pertanian dinilai menggunakan indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi pertanian, maka semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB dibagi dalam dua kondisi, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Berikut adalah data tentang kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai tahun 2016 hingga 2020 menurut atas dasar harga berlaku (ADHB).

**Grafik 2. 58. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Manggarai 2016 – 2020 (Persen)**



*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2021*

Persentase sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB atas harga berlaku mengalami penurunan 2,45% pada tahun 2016-2020. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, belum optimalnya kualitas produk pertanian, dan menurunnya populasi tumbuhan pertanian/perkebunan menjadi penyebab bagi pertumbuhan sektor pertanian yang fluktuatif dan cenderung lambat.

Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub sektor, masing-masing sub-sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Masing-masing sub-sektor memiliki indikator tingkat menengah. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pertanian tanaman pangan, yaitu produksi pangan utama, cakupan bina dan jumlah kelompok tani. Berikut adalah data terkait produksi tanaman pangan dan luas lahan tanaman pangan di Kabupaten Manggarai.

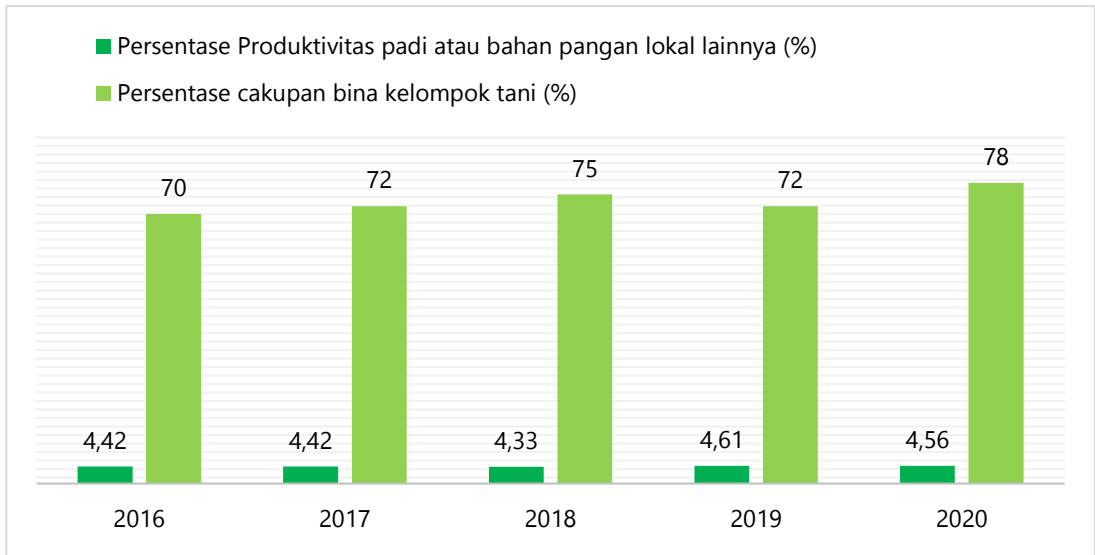
**Tabel 2. 88. Produksi (Ton) dan Luas areal Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Hektar) di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

No	Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	128.168	148.599	147.100	143.614	144.164
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	29.010	33.620	33.997	31.148	31.641

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2021

Produksi tanaman padi dan bahan pangan utama lokal lainnya mengalami peningkatan sebesar 15.996 ton selama 2016-2020 meskipun dengan tren yang cukup fluktuatif, yaitu produksi tertinggi sebesar 148.599 ton terjadi pada tahun 2017. Hal serupa juga terjadi pada luas areal tanaman bahan pangan dan persentase produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya dengan penurunan yang rata-rata terjadi pada 2018 dan 2019. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kapasitas SDM petani, generasi muda kurang berminat menggeluti pertanian, terbatasnya benih unggul bersubsidi, terbatasnya pupuk bersubsidi, tingginya serangan hama penyakit/ Organisme Pengganggu Tanaman, masih kurangnya alat dan mesin pertanian, masih terbatasnya jaringan irigasi usaha tani, dan masih adanya lahan tidur yang belum dimanfaatkan.

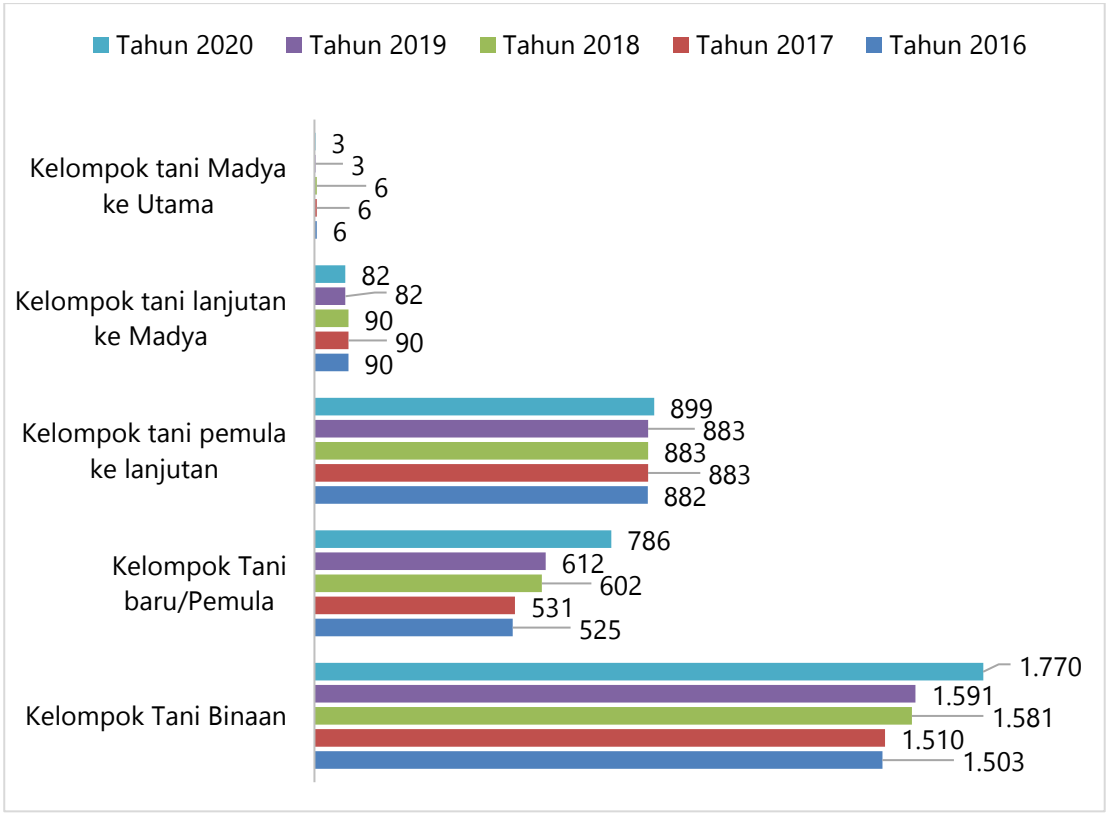
**Grafik 2. 59. Persentase Produktivitas Padi/Bahan Pangan Lokal dan Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2021

Terdapat peningkatan jumlah kelompok tani di Kabupaten Manggarai yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah selama tahun 2016-2020, sehingga hal tersebut sekaligus mempengaruhi persentase cakupan bina kelompok tani sebesar 8% dari tahun 2016-2020. Semakin banyak jumlah kelompok tani binaan, maka produktivitas pertanian akan semakin meningkat, yaitu sebesar 0,14% pada tahun 2016-2020. Secara lebih jauh, kelompok tani binaan terbagi dalam berbagai jenis-jenis sebagai berikut.

Grafik 2. 60. Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2021

Jumlah total kelompok tani binaan yang semakin meningkat dari tahun 2016-2020 didominasi oleh kelompok tani pemula ke lanjutan dengan persentase mencapai 50,8% dari total kelompok tani binaan pada tahun 2020. Posisi kedua terbanyak adalah kelompok tani pemula sebesar 44,4% dan sisanya diisi oleh kelompok tani lanjutan ke Madya dan kelompok tani Madya ke Utama dengan total hanya sebesar 4,8% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah kelompok tani binaan terus meningkat, namun kompetensi sebagian besar kelompok tani masih cenderung rendah karena masih di tahap pemula. Hal tersebut dapat berdampak pada produksi hasil perkebunan di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 sebagai berikut.

**Tabel 2. 89. Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton BB)	2.795	3.308	12.291,51	25.003,29	578.550
2	Jumlah Produksi komunitas Perkebunan (Ton)	6.682	6.941	7.142,91	7.089,05	7.084,06
3	Jumlah Produksi Ubi Kayu	5.004	7.632	7.211	8.343	1.386
4	Jumlah Produksi Ubi Jalar	1.208	1.590	839	1.399	537
5	Jumlah Produksi Padi	106.450	118.362	124.872	123.667	129.415
6	Jumlah Produksi Kacang Tanah	273	56	265	217	187
7	Jumlah Produksi Kacang Kedelai	846	820	2.912	1.128	1.052
8	Jumlah Produksi Kacang Hijau	184	184	407	217	10
9	Jumlah Produksi Jagung	14.238	19.955	12.362	8.787	11.469
10	Jumlah Produksi Sayur (Ton BB)	2.795	3.308	12.292	25.003	578.550
11	Jumlah Produksi Kelapa (Ton)	546	578	581,83	581,83	582,83
12	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	557	563	599,25	599,25	602,12
13	Jumlah Produksi Kopi (Ton)	2.277	2.702	2.560	2.551	2.553
14	Jumlah Produksi Cengkeh (Ton)	382	379	415,47	402,55	408,08

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, 2021*

Produksi ubi kayu mengalami kenaikan dari tahun 2016–2019, karena minat masyarakat untuk menanam ubi kayu sangat besar serta adanya intervensi pemerintah pusat, sedangkan untuk tahun 2020 produksi ubi kayu mengalami penurunan. Petani ubi kayu tidak melakukan pemanenan karena kebutuhan pasar menurun karena pandemi Covid-19. Produksi ubi jalar dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan karena permintaan pasar meningkat, sedangkan untuk tahun 2018-2019 mengalami penurunan, karena lahan untuk menanam ubi jalar beralih fungsi untuk menanam hortikultura dan permintaan pasar yang berkurang karena ubi jalar yang tidak lagi dijadikan pakan ternak setelah sebagian ternak babi diserang virus.



Produksi padi dari tahun 2016–2018 mangalami peningkatan selain karena adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga karena anomali iklim yang baik, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan kerena adanya kekeringan dan perbaikan irigasi Wae Mantar II. Produksi kacang tanah menunjukkan peningkatan dengan tren fluktuatif dari tahun ke tahun, sebaliknya, produksi kacang hijau dan jagung mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016-2020. Jumlah produksi sayur, kelapa, kakao, kopi, dan cengkeh mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 meskipun dengan tren fluktuatif.

Peternakan adalah salah satu sub-sektor pertanian. Peternakan di Kabupaten Manggarai memiliki potensi yang sangat besar, khususnya ternak babi dan sapi yang menunjukan hasil yang semakin baik dari tahun 2016 ke 2020. Berbagai jenis populasi hewan ternak besar dan kecil di Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 90. Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil (Ekor) menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Hewan Ternak Besar			Hewan Ternak Kecil		
	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Domba
2016	24.384	7.551	173	36.973	10.674	0
2017	24.832	7.685	182	38.182	10.980	0
2018	25.307	7.822	184	39.431	11.295	0
2019	25.800	7.961	187	40.720	11.619	0
2020	26.303	8.103	189	42.052	11.952	0
<b>Jumlah</b>	<b>126.626</b>	<b>39.122</b>	<b>915</b>	<b>197.358</b>	<b>56.520</b>	<b>0</b>

*Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, 2021*

Jumlah populasi hewan ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Manggarai selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2016-2020. Peningkatan jumlah populasi terbesar terdapat pada hewan ternak kecil, yaitu babi yang memiliki peningkatan hingga mencapai 5.079 ekor pada tahun 2016-2020. Pada populasi ternak besar, sapi merupakan jumlah terbesar kedua setelah populasi babi, dengan jumlah peningkatan sebesar 1.919 ekor. Jumlah

populasi kambing dan kerbau masing-masing berada pada posisi ketiga dan keempat, sedangkan jumlah popuasi kuda di posisi terakhir dengan jumlah peningkatan paling kecil sebesar 16 ekor.

Peningkatan jumlah populasi yang beragam dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat kelahiran, tingkat kematian ternak dan serangan penyakit ternak. Jumlah populasi hewan ternak lainnya terdiri dari ternak hewan unggas. Berikut adalah data mengenai hewan ternak unggas di Kabupaten Manggarai.

**Tabel 2. 91. Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Hewan Ternak Unggas		
	Ayam Kampung	Ayam Ras	Ayam Petelur
2016	192.148	18.554	N/A
2017	194.262	33.000	N/A
2018	196.399	547.500	13.410
2019	198.559	200.000	19.810
2020	200.743	74.000	8.400
Jumlah	982.111	873.054	N/A

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, 2021

Populasi ternak unggas terbesar di Kabupaten Manggarai terdapat pada komoditas ayam kampung dengan tren yang terus meningkat pada tahun 2016 hingga 2020. Jumlah populasi terbesar kedua, terdapat pada ayam ras dengan tren yang meningkat, namun cenderung fluktuatif dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2018 dan menurun secara signifikan pada tahun 2020. Jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Manggarai secara keseluruhan memengaruhi produksi hasil ternak. Berikut merupakan data produksi hasil ternak hewan ternak besar, kecil, maupun unggas pada tahun 2016-2020.

**Tabel 2. 92. Data Produksi Hasil Ternak (Kg) Kabupaten Manggarai 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Daging Sapi (Kg)	140.616	151.956	200.772	193.536	175.824
2	Daging Kerbau (Kg)	13.625	12.150	8.235	8.100	6.615
3	Daging Kambing (Kg)	6.400	6.400	10.440	7.760	5.560

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Daging Babi (Kg)	308.644	359.606	378.000	405.675	376.987,50
5	Daging Ayam Bukan Ras (Kg)	N/A	834.592	191.134	193.237	195.361,73
6	Daging Ayam Ras (Kg)	N/A	189.059	350.306	378.586	46.620
7	Telur (Butir)	N/A	411.133	2.220,400	8.042,451	7.593,522

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Manggarai, 2021

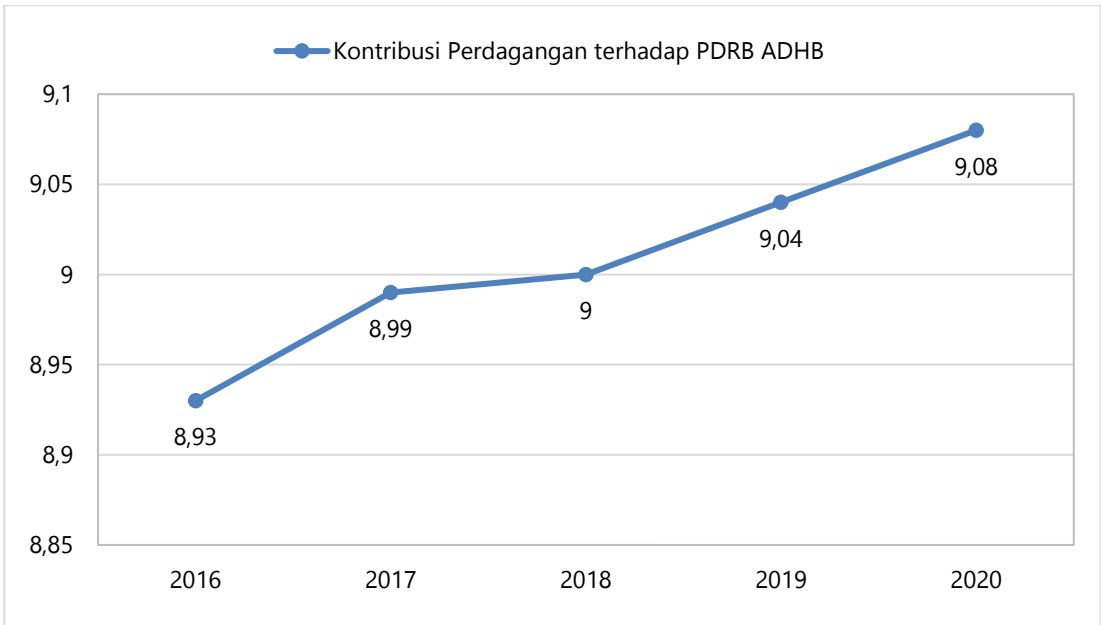
Produksi hasil ternak di Kabupaten Manggarai cukup bervariasi dari tahun 2016-2020. Produksi daging terbesar terdapat pada daging babi dengan tren yang meningkat pada tahun 2016-2019 dan sedikit menurun pada tahun 2020. Penurunan jumlah produksi daging dan telur dari hewan ternak terjadi pada seluruh hasil ternak pada tahun 2020, kecuali pada daging ayam bukan ras yang justru meningkat 2.124,73 kg dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Penurunan hasil produksi ternak secara signifikan pada tahun 2020 disebabkan oleh hadirnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan segala aktivitas serba terbatas. Faktor lain yang berpengaruh terhadap penurunan produksi hasil ternak adalah rendahnya kapasitas SDM peternak, belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan, metode budidaya masih konvensional, akses terhadap bantuan permodalan belum memadai, serta bibit unggul masih berasal dari luar daerah, dan pakan ternak masih berasal dari luar daerah.

### 2.3.2.5. Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu daerah. Aktivitas perdagangan yang masif dapat berkontribusi mengubah kondisi ekonomi di Kabupaten Manggarai. Besaran indikator tersebut didapat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Berikut merupakan grafik kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Manggarai.

**Grafik 2. 61. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020 (Persen)**



*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2021*

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,15% selama tahun 2016-2020. Peningkatan tersebut terjadi akibat adanya peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang/produk yang beredar terutama perdagangan besar. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terus terjadi hingga tahun 2020 meskipun berkurangnya aktivitas jual beli selama pandemi Covid-19.

Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan belum optimal, revitalisasi pasar tradisional belum optimal dan kurangnya kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting. Kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan belum optimal karena penerapan metode marketing-mix belum optimal, jaringan pemasaran belum optimal dan masih adanya kasus sengketa perdagangan. Revitalisasi pasar tradisional belum optimal karena persoalan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta bantuan permodalan yang masih belum memadai. Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting di Kabupaten Manggarai sangat terkait dengan stabilitas ketersediaan dan harga barang.

Pedagang adalah subjek utama pelaku aktivitas perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan sangat terkait dengan faktor tersebut. Berikut adalah data

mengenai jumlah pedagang berdasarkan jenisnya di Kabupaten Manggarai tahun 2017 hingga 2019:

**Tabel 2. 93. Jumlah Pedagang (Orang) Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 - 2019**

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Pedagang Kecil	2.373	1.621	1.761
2	Pedagang Mikro	170	528	669
3	Pedagang Menengah	3.135	2.168	2.449

*Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Manggarai, 2021*

Jumlah pedagang kecil dan menengah di Kabupaten Manggarai menurun dari tahun 2017-2019. Kedua jenis pedagang tersebut mengalami penurunan terbesar pada tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019. Pedagang mikro merupakan satu-satunya jenis pedagang yang mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Peningkatannya sebesar empat kali lipat dari jumlah awal pada tahun 2016. Hal ini disebabkan meningkatnya program-program pendampingan dan bantuan modal pada usaha mikro di Kabupaten Manggarai selama tahun 2016-2020.

**2.3.3. Penunjang Urusan**

Penunjang urusan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di suatu daerah. Gambaran mengenai kondisi penunjang urusan dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; pengawasan; penelitian dan pengembangan; sekretariat dewan; dan pemerintahan umum/sekretariat daerah. Secara rinci, ketujuh urusan penunjang dapat dilihat dalam deskripsi berikut:

**2.3.3.1. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Urusan ini memiliki fungsi mendukung keberhasilan pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan. Keberhasilan urusan ini dapat diukur dari ketersediaan dokumen perencanaan maupun dokumen pendukungnya serta keterpaduan

antar dokumen perencanaan. Berikut ini adalah hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 94. Ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen pendukungnya di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Na	Na	Na	Na	Na
6	Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Dokumen evaluasi pembangunan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Manggarai Tahun 2021

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai sudah tersedia sesuai ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja. Selain itu, dokumen pendukung lainnya juga sudah tersedia, seperti RTRW. Dokumen-dokumen yang ada ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Salah satu faktor yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan di Kabupaten Manggarai adalah penerapan aplikasi perencanaan, seperti *e-planning* dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Selain dilihat dari sisi ketersediaan dokumen perencanaan, perlu juga untuk melihat kualitas dari dokumen tersebut. Kualitas dokumen perencanaan dapat dilihat dari tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan dan tingkat realisasi target RPJMD. Berikut ini adalah tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan daerah dan tingkat realisasi target RPJMD di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 95. Tingkat keterpaduan dokumen perencanaan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Persen)**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase realisasi target RPJMD	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase keterpaduan RKPD dengan RPJMD	43,72	51,4	48,44	46,74	49,3
3	Persentase keterpaduan Renstra dengan RPJMD	43,72	51,4	48,44	46,74	49,3
4	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100
5	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Manggarai Tahun 2021

Penjabaran konsistinsi program RKPD ke dalam APBD telah mencapai 100 persen dari tahun 2016 hingga 2020. Sementara itu, tingkat keterpaduan dokumen perencanaan, baik antar RKPD dengan RPJMD maupun Renstra dengan RPJMD hanya sebesar 49,3 persen pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan daerah masih belum optimal. Penyebab persoalan ini adalah belum optimalnya pelaksanaan regulasi perencanaan, belum optimalnya kapasitas SDM perencanaan, dan belum optimalnya penerapan TIK dalam perencanaan daerah. Selain dari sisi perencanaan, penyebab lain juga berkaitan dengan kualitas pengendalian dan evaluasi. Hal ini dapat dilihat dari belum terbangunnya sistem yang baik dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

**2.3.3.2. Keuangan**

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum urusan keuangan berfokus pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah. Kedua indikator ini menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan ini.

**Tabel 2. 96. Opini BPK Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2019**

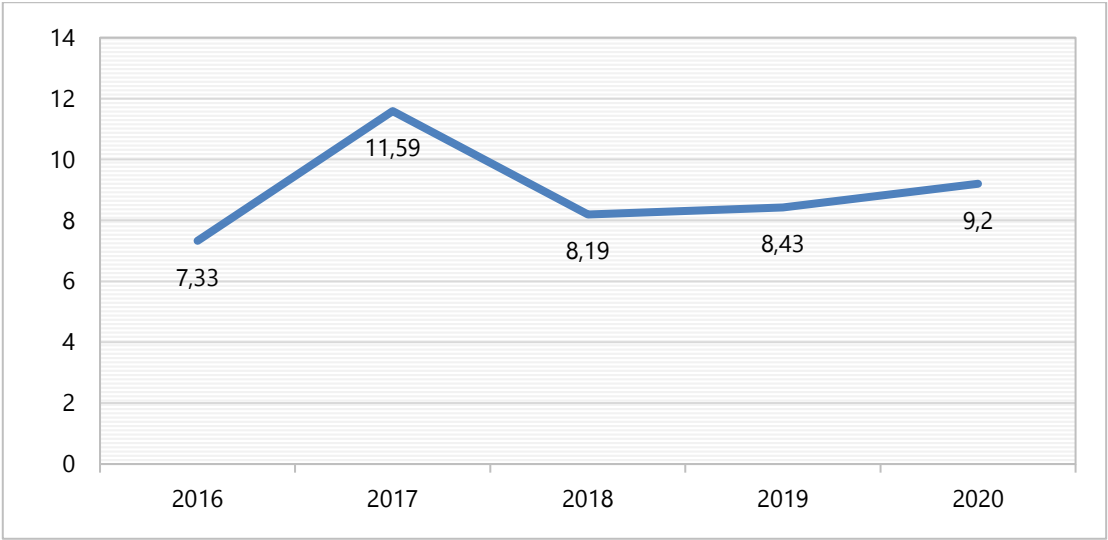
Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Akuntabilitas keuangan daerah dapat diukur dari predikat opini BPK yang diperoleh. Opini BPK Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dari predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan baik. Meskipun demikian, perlu adanya peningkatan pengelolaan keuangan berbasis TIK dan peningkatan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Adapun hasil perhitungan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 2. 62. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Persen)**



*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Manggarai*

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan ini sudah berjalan cukup baik, apalagi terjadi pada masa Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, angka tersebut masih dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Permasalahan yang terjadi pada tingkat kemandirian keuangan tersebut disebabkan oleh penerimaan PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Komponen PAD yang belum optimal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan TIK dalam mendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya



pendataan potensi retribusi daerah, dan belum optimalnya pemutakhiran zona nilai tanah.

2.3.3.3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung kualitas manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian yang berkualitas akan mendorong tingkat profesionalitas ASN. Berikut ini adalah kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian di Kabupaten Manggarai:

Tabel 2. 97. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Orang)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN	5340	4941	4677	4786	4709

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Tahun 2021

Jumlah ASN Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan jumlah ASN, yaitu sebesar – 3,20 persen pada tahun 2016 hingga 2020. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya pegawai yang pensiun. Selain itu, urusan kepegawaian juga dapat dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan jabatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 98. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

No	Uraian/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang ada pada instansi pemerintah	33	33	33	33	33
2	Jumlah jabatan adminitrator dan pengawas yang ada pada instansi pemerintah	902	795	795	799	799
3	Jumlah jabatan Fungsional tertentu yang ada pada instansi pemerintah	3446	2541	2409	2576	2552

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Tahun 2021

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tidak mengalami perubahan. Sementara itu, jumlah Jabatan Administrator (JA) dan

Jabatan Pengawas (JP) mengalami penurunan dan cenderung stagnan. Hal yang sama juga terjadi di Jabatan Fungsional (JF) yang mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari jumlah pegawai tersebut, kemudian digunakan untuk melihat tingkat profesionalitas ASN. Adapun tingkat profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 99. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai Tahun 2020**

No	Dimensi	Nilai (%)
1	Kualifikasi	11,61
2	Kompetensi	8,57
3	Kinerja	22,41
4	Disiplin	5
<b>Tingkat Profesionalitas ASN</b>		<b>47,59</b>

*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Tahun 2021*

Tingkat profesionalitas ASN di Kabupaten Manggarai, yaitu sebesar 47,59 persen pada tahun 2020. Angka ini masih dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN masih rendah. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

**Tabel 2. 100. Rekapitulasi ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020 (Orang)**

No.	Tahun	Jumlah
1	2016	0
2	2017	37
3	2018	23
4	2019	8
5	2020	5
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>

*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Tahun 2021*

Hasil rekapitulasi PNS yang mendapatkan hukuman disiplin mengalami penurunan setiap tahun. Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin paling banyak terjadi pada tahun 2017, sementara paling sedikit terjadi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS sudah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, kondisi tersebut perlu ditingkatkan supaya disiplin pegawai dapat dikendalikan

secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi instrumen pengendalian disiplin berupa *fingerprint* dan jurnal kerja.

**2.3.3.4 Pendidikan dan Pelatihan**

Urusan pendidikan dan pelatihan berfungsi untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingginya kompetensi pegawai, maka keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan semakin tinggi, dan sebaliknya. Tolak ukur kompetensi pegawai adalah sejauhmana ASN telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut ini adalah persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 2. 101. Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Persen)**

No	Uraian/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0.918	1.68	0.66	0.23	0.23
2	Presentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan	0.643	0.724	0.241	n/a	n/a

*Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Tahun 2021*

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berjalan fluktuatif dan cenderung menurun. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan paling tinggi berada pada tahun 2017, sedangkan paling rendah pada tahun 2019 dan 2020. Hal yang sama juga terjadi pada persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tren pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai masih belum baik di Kabupaten Manggarai.

**2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang pemerintahan. Urusan ini berfungsi sebagai pendorong inovasi daerah melalui peningkatan kualitas penelitian. Salah satu tolak ukur menilai kinerja urusan ini adalah sejauhmana hasil penelitian yang ditindaklanjuti. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 102. Hasil penelitian yang ditindaklanjuti di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Manggarai Tahun 2021

Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100 persen dari tahun 2016 hingga 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan ini sudah berjalan optimal. Namun demikian, hal tersebut harus dicermati lebih mendalam mengenai kuantitas dan kualitas hasil penelitian melalui pemenuhan tenaga fungsional peneliti, peningkatan komitmen pegawai dalam urusan Litbang, dan peningkatan regulasi tentang pemanfaatan hasil litbang. Selain memanfaatkan, penerapan inovasi daerah juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan kelembagaan inovasi berupa fasilitasi pengembangan inovasi daerah dan *database* inovasi daerah.

**2.3.3.5. Pengawasan**

Urusan pengawasan mempunyai fungsi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka tingkat keberhasilan pembangunan daerah semakin tinggi. Salah satu tolak ukur kinerja urusan ini adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), baik dari internal maupun eksternal, sebagai berikut.

**Tabel 2. 103. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI periode 2016 - 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi NTT	100%	100%	100%	100%	76,47%
2	Presentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTT	65	63	60	67	64
3	Presentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI	59.59%	53,51%	28,46%	43,21%	55,56%

TLHP inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT, yaitu menurun sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya menjadi 64 persen. Sementara itu, TLHP Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) dan BPK RI mengalami kenaikan pada tahun 2020, yaitu sebesar 12,35 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan daerah belum berjalan optimal. Penyebab dari persoalan ini adalah jumlah audito dan P2UPD yang masih terbatas, sistem pengendalian masih bergantung kepada perorangan, rendahnya komitmen OPD dalam menjalankan tindak lanjut hasil pemeriksaan, OPD mengalami kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, belum optimalnya pendampingan dari APIP, dan belum ada perangkat daerah yang menjalankan zona integritas.

**2.3.3.6. Sekretariat Dewan**

Urusan Sekretariat DPRD merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan. Secara umum, fungsi urusan ini adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dalam mendukung kinerja anggota DPRD, seperti fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Adapun kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 104. Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Propinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pengawasan, Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Terintegrasinya Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Naskah Akademik	3	2	3	4	2
5	Draf rancangan Perda	11	12	12	8	7

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, Tahun 2021

Dokumen yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selalu tersedia selama tahun 2016 hingga 2020. Dokumen pendukung tersebut terdiri dari alat-alat kelengkapan DPRD, RKPD, Naskah Akademik, Draft Rancangan Perda, dokumen terkait fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dengan demikian, kinerja Sekretariat DPRD dilihat dari sisi ketersediaan dokumen sudah memadai.

**Tabel 2. 105. Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti pada alat kelengkapan dewan**

No	Media tindak lanjut Aspirasi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Daftar Usulan Pokir	-	-	-	-	-
2.	Dimasukan dalam rekomendasi LKPI Kepala Daerah melalui paripurna internal	55	60	50	65	75
3.	Usulan kepada Bupati untuk masuk dalam program kerja Perangkat Daerah	75	80	80	85	75
4.	Usulan kepada Bupati untuk menganalisis kasus atau melakukan pengecekan lapangan	90	95	95	90	90
5.	Koordinasi langsung dengan perangkat daerah terkait	100	100	100	100	100
6.	Rapat dengar pendapat, setelah disetujui dalam paripurna internal	3	2	2	3	4
7.	Pembentukan Pansus DPRD	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai, Tahun 2021.

Aspirasi masyarakat baik yang berkaitan dengan usulan pembangunan maupun evaluasi atas hasil pembangunan berjalan fluktuatif. Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, seperti OPD sangatlah penting dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi dari masyarakat disampaikan secara langsung kepada para anggota DPRD pada saat kegiatan reses dan juga kunjungan atau pertemuan pribadi. Seluruh aspirasi yang diterima akan langsung diberikan penjelasan oleh anggota DPRD, sementara aspirasi yang tidak dapat dijelaskan, maka akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kepala Daerah melalui perangkat daerah terkait. Meskipun demikian, dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap DPRD.

#### **2.3.3.7. Sekretariat Daerah**

Urusan Sekretariat Daerah merupakan salah satu urusan dalam unsur pendukung urusan pemerintahan. Secara umum, urusan ini menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Manggarai. Adapun kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dari keberhasilan dalam meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Kabupaten Manggarai memiliki nilai IRB sebesar 53,68 pada tahun 2019. Angka ini masih dalam kategori "CC" atau cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di unit kerja lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti tingkat pelayanan publik, tingkat akuntabilitas, dan sebagainya.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Manggarai mengalami penurunan sebesar 0,47 persen pada tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 79,77 persen. Hal ini terjadi karena tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan publik belum berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) masih terbatas pada perangkat daerah

yang khusus dalam memberikan pelayanan langsung, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PTSP, dan lain sebagainya.

Selain dari sisi penyelenggaraan pelayanan publik, IRB juga dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas daerah. Tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari nilai SAKIP. Hasil Evaluasi dari Kementerian PAN-RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 106. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2020**

No.	Tahun	Nilai SAKIP	Kategori	Predikat	Keterangan
1.	2015	55,39	CC	CUKUP BAIK	Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2014
2.	2016	58,59	CC	CUKUP BAIK	Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2015
3.	2017	60,57	B	BAIK	Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2016
4.	2018	60,65	B	BAIK	Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2017 Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2017
5.	2019	61,06	B	BAIK	Penilaian terhadap penerapan SAKIP tahun 2018
6.	2020	-	-	-	Hasil evaluasi terhadap penerapan SAKIP 2019 belum diterima dari Kementerian PANRB

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, Tahun 2021*

Nilai SAKIP Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2020. Selain nilai SAKIP, predikat SAKIP juga mengalami peningkatan dari “Cukup Baik” menjadi “Baik”. Rata-rata peningkatan nilai SAKIP, yaitu sebesar 2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja daerah sudah berjalan cukup baik, namun nilainya belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pendampingan terhadap OPD dalam penerapan SAKIP dan Indikator belum berorientasi kepada *outcome*.



**Tabel 2. 107. Nilai dan Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2017**

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Nilai LPPD	2.9325	2.7618	2.7951
2	Peringkat EKPPD	227	259	n/a

*Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, Tahun 2021*

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dengan kategori tinggi. Kondisi yang berbeda terjadi pada peringkat EKPPD yang mengalami penurunan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum berjalan optimal. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penyelesaian persoalan pengelolaan sumber daya alam belum tuntas, target pengesahan regulasi tiap tahun belum memenuhi target, laporan belanja langsung tidak tepat waktu pelaksanaan APBD, belum ada punishment bagi OPD yang tidak taat pelaporan serapan anggaran, adanya keterlembatan proses pengadaan barang dan jasa, belum adanya jabatan fungsional PBJ, dan masih perlunya validasi data kemiskinan dan penerima bansos.

**2.3.3.8. Kewilayahan**

Urusan kewilayahan merupakan salah satu urusan yang dimasukkan dalam Permendagri 90 tahun 2019. Urusan ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, seperti koordinasi, fasilitasi, sinergitas, sinkronisasi, dan pembinaan. Tugas dan fungsi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan lain dalam lingkup kewenangan kecamatan, seperti pemerintahan umum, pemberdayaan, pelayanan publik, dan pembinaan terhadap desa. Namun demikian, peran kecamatan belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelayanan kecamatan dan belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan. Penyebab persoalan tersebut adalah belum berjalannya survei kepuasan masyarakat, belum optimalnya pemenuhan syarat SDM dan sarpras pelayanan, belum ada kejelasan pelimpahan wewenang dari bupati, dan terbatasnya SDM kecamatan, dan terdapat aparatur kecamatan yang menjadi penjabat di desa. Sedangkan penyebab belum optimalnya fungsi

fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan disebabkan oleh Fasilitas pembangunan desa masih sekedar administrasi, belum substansi, belum adanya pembagian wewenang yang jelas dan sinergis antara kecamatan dengan OPD terkait, dan belum optimalnya fungsi pemberdayaan BUMDesa.

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing merupakan aspek penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim, dan fokus sumber daya manusia. Berikut adalah deskripsi aspek daya saing Kabupaten Manggarai:

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengukuran kemampuan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan dikategorikan menjadi pengeluaran rumah tangga per kapita menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan ekonomi setiap rumah tangga per kapita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap bulan. Penggunaan indikator pengeluaran per kapita harus disikapi dengan hati-hati karena dalam penghitungannya tidak membedakan kelompok pendapatan masyarakat, sehingga angka yang didapat merupakan rata-rata pengeluaran dari seluruh kelompok pendapatan masyarakat. Berikut ini pengeluaran per kapita baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan Kabupaten Manggarai:

**Tabel 2. 108. Pengeluaran per Kapita (Rupiah) Kabupaten Manggarai Tahun 2017-2020**

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pangan	391.177	409.221	479.347	464 .993
2	Bukan Pangan	229.952	278.213	308.103	322.676
3	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>621.129</b>	<b>687.434</b>	<b>787.440</b>	<b>787.670</b>

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional*

Pengeluaran rumah tangga per kapita di Kabupaten Manggarai terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Rata-rata pertumbuhan total pengeluaran sebesar 8,41 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 14,54 persen atau naik hingga Rp100.000,00 jika dibanding tahun sebelumnya. Data pengeluaran rumah tangga per kapita menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat lebih banyak digunakan untuk konsumsi pangan dengan rata-rata proporsi sebesar 61,06 persen, sedangkan konsumsi bukan pangan sebesar 38,68 persen. Pengeluaran untuk konsumsi pangan maupun bukan pangan terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,25 persen dan 12,15 persen.

Kelompok pengeluaran pangan didominasi oleh pengeluaran untuk kelompok komoditas padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta sayur-sayuran. Sedangkan kelompok pengeluaran bukan pangan didominasi oleh pengeluaran untuk kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, serta sandang. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi bukan pangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi pangan mengindikasikan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat secara umum, sehingga masyarakat memiliki alokasi anggaran untuk meningkatkan konsumsi komoditas bukan pangan.

#### **2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Aspek daya saing daerah pada fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur diarahkan untuk meninjau indikator-indikator yang menunjukkan kondisi fasilitas maupun infrastruktur yang tersedia di sebuah daerah. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa guna mendorong kegiatan perekonomian. Berikut adalah data mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur di Kabupaten Manggarai:

##### **2.4.2.1. Perhubungan**

Keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan salah satunya adalah kemajuan dalam infrastuktur jalan, jembatan maupun dermaga perhubungan yang digunakan oleh orang, kendaraan dan barang dalam rangka

mobilitas perekonomian masyarakat. Perhubungan juga menjadi faktor utama yang mendukung pergerakan barang dan jasa antar wilayah. Berikut adalah capaian bidang perhubungan dan infrastruktur pendukungnya:

**Tabel 2. 109. Capaian Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2020**

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan (Km)	1700,89	1700,89	1904,60	1904,60
2	Panjang jalan yang dilalui kendaraan perjumlah kendaraan	0,72 %	0,73 %	0,75 %	0,76 %

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, 2020

Seluruh aspek/ indikator perhubungan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Panjang jalan yang terlayani oleh kendaraan umum meningkat 203,71 Km. Begitupun dengan persentase jalan yang dilalui kendaraan per tahun 2020 sudah meningkat 0,04% sejak tahun 2017. Meskipun menunjukkan tren kinerja yang positif tetapi hal tersebut masih harus ditingkatkan untuk memastikan terlayannya arus barang dan arus orang.

**Tabel 2. 110. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga, Bandara, dan Terminal Bus di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang /barang melalui :					
	- Dermaga	11.057	10.484	16.348	17.619	12.095
	- Bandara	33.197	22.310	33.295	25.601	12.333
	- Terminal Bus	1.442.273	1.282.865	1.212.761	1.200.000	719.655

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, 2021.

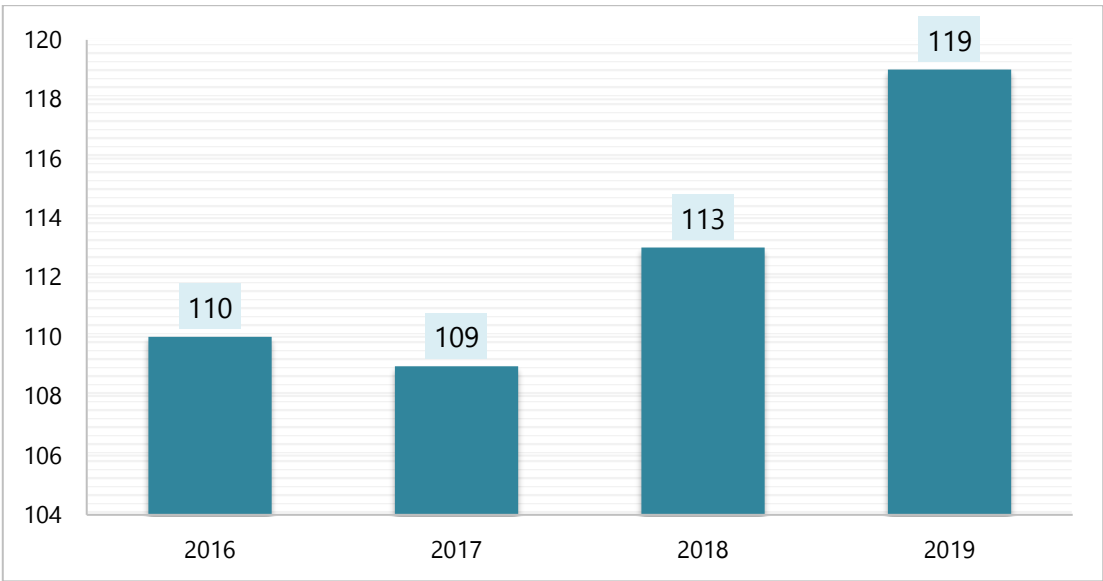
Orang dan barang yang menggunakan dermaga, bandara, maupun terminal bus jumlahnya fluktuatif pada tahun 2016 hingga 2020. Namun pada tahun 2020, jumlahnya menurun sangat drastis. Jumlah orang/barang yang melalui dermaga berkurang 68,64% dibanding tahun sebelumnya, melalui bandara berkurang 48,17, dan melalui terminal bus berkurang 59,97%

dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dapat terjadi karena selama tahun 2020 terjadi pengetatan dan pencegahan arus barang dan orang akibat pandemi Covid-19. Terlebih pada 6 bulan pertama tahun 2020, arus orang sangat terbatas karena ditutupnya akses udara, laut maupun darat untuk mencegah penularan virus Covid-19.

**2.4.2.2. Sarana Perekonomian**

Infrastruktur kewilayahan lain yang menjadi fokus pembangunan adalah terkait sarana perekonomian. Infrastruktur penunjang perekonomian perlu menjadi perhatian guna dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Manggarai. Beberapa sarana perekonomian yang dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Manggarai adalah rumah makan dan restoran. Berikut adalah jumlah rumah makan dan restoran yang ada di Kabupaten Manggarai:

**Grafik 2. 63. Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2019**



*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Tahun 2020*

Jumlah restoran di Kabupaten Manggarai terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 120 rumah makan/restoran di Kabupaten Manggarai, bertambah 7 rumah makan/restoran dibandingkan tahun sebelumnya. Restoran yang ada di Kabupaten Manggarai tersebar di berbagai kecamatan, terutama yang berada di wilayah pusat perkotaan seperti terminal dan di lokasi objek wisata.

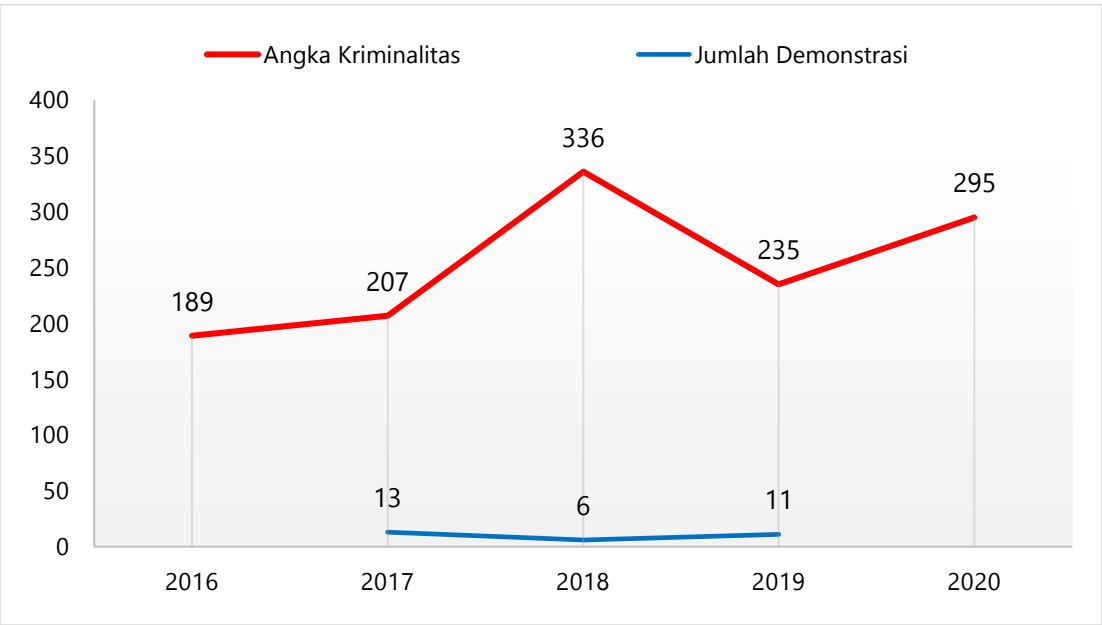
2.4.2.3. Jaringan Listrik

Kondisi pembangunan jaringan listrik di perkotaan dan perdesaan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan (BPS, 2020). Terjadi penambahan pelanggan listrik sebanyak kurang lebih 9.523 dengan total pelanggan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 66.528 pelanggan. Penerangan jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Manggarai telah dibangun cukup memadai. Namun masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten Manggarai. Sinkronisasi peraturan baik pusat maupun daerah terkait investasi, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi masih perlu untuk terus ditingkatkan guna mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif. Berikut ini beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan berinvestasi di Kabupaten Manggarai:

Grafik 2. 64. Angka Kriminalitas dan Demonstrasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020



Sumber: LAKIP dan Manggarai dalam Angka 2020

Jumlah kriminalitas menunjukkan kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 16,82 persen pada tahun 2016 hingga 2020. Kenaikan kasus kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 62,31 persen atau meningkat sebanyak 129 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 101 kasus atau turun 30,06 persen. Angka tersebut kembali naik hingga 25,53 persen pada tahun 2020. Kondisi yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh jumlah demonstrasi. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Manggarai tercatat berfluktuasi pada tahun 2017-2019. Kondisi tersebut menandakan adanya risiko gangguan ketentraman dan ketertiban yang perlu diwaspadai. Pelaksanaan demonstrasi dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran jalannya usaha di Kabupaten Manggarai.

Tingginya tingkat kriminalitas dan fluktuasi jumlah demonstrasi dikhawatirkan dapat mengganggu minat investasi karena adanya risiko keamanan dan gangguan ketertiban yang cukup tinggi. Investor pasti akan mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban sebagai salah satu faktor penentu investasi. Oleh karena itu, peningkatan angka kriminalitas beserta fluktuasi jumlah demonstrasi yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2020 harus ditindaklanjuti dengan tepat agar kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Manggarai dapat terjamin, sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor.

**Tabel 2. 111. Indikator Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Jenis Data	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama Proses Perizinan (per jenis izin) (hari)	14	14	14	14	14
2	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha	5	5	5	5	5
3	Jumlah Produk Hukum yang mendukung investasi	-	-	-	-	-

*Sumber: LAKIP dan Manggarai dalam Angka 2020*

Indikator lain yang perlu menjadi perhatian adalah lama proses perizinan dan jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha maupun produk hukum lain yang mendukung investasi. Lama proses perizinan dan jumlah

Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha selama tahun 2016 hingga 2020 tidak mengalami perubahan. Produk hukum yang mendukung investasi hingga saat ini juga masih belum tersedia. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Manggarai. Pemerintah Daerah perlu mengkaji kembali pelayanan perizinan dan penanaman modal dan meningkatkan kinerjanya agar dapat mendorong pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Manggarai.

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing daerah pada fokus sumber daya manusia dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan, maka semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut ini merupakan rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai tahun 2017 -2019:

**Tabel 2. 112. Rasio Ketergantungan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 – 2020**

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk Usia <15 Tahun Kebawah	37,11	36,20	36,64	25,66
2	Persentase Penduduk Usia <15 Tahun Keatas	3,89	3,47	3,89	74,34
3	Persentase Penduduk Usia tidak produktif (1) & (2)	41,00	39,67	40,53	-
4	Ratio ketergantungan	69,49	65,76	68,17	68,00

*Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2020*

Rasio ketergantungan jumlahnya fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Data tahun 2020 menunjukan rasio ketergantungan adalah 68,00. Angka itu menunjukan setiap dari 100 orang produktif mempunyai tanggungan



sebanyak 68 orang. Beban ketergantungan didominasi oleh penduduk usia tidak produktif (orang tua) pada setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 penduduk usia <15 tahun keatas merupakan kategori yang paling besar beban ketergantungannya yaitu sebesar 74,34.

## **2.5. Hasil Evaluasi Capaian RPJMD 2016 – 2021**

Hasil evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021 memuat capaian indikator kinerja program. Hasil evaluasi ini menjadi dasar fondasi untuk menelaah permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Berikut adalah hasil evaluasi capaian RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021:

Tabel 2. 113. Hasil evaluasi capaian RPJMD 2016-2021

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini					Dinas Pendidikan
	Meningkatnya APK SD/MI/Paket A	47,09	74	49,53	67	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
	Meningkatnya APK SMP/MTS/Paket A	112,33	100	109,5	109	
	Terwujudnya peningkatan pendidikan non formal untuk menurunkan angka putus sekolah SD dari 0,74 tahun 2015 menjadi 0 pada tahun 2020, SMP dari 1,3 tahun 2015 menjadi 0,1 di tahun 2020	0,74	0,01	0,06	-400	
	Terwujudnya peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	3682	4484	4.057	90	
	Terwujunya Peningkatan Peran serta Kepemudaan	7	12	12	100	
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
3	Program jaminan kesehatan nasional					Dinas Kesehatan

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Angka Kematian Ibu	130,25	110,25	79,05	72%	
	Angka Kematian Bayi	16,93	12,93	13,44	104%	
4	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>					
	% balita gizi buruk yang tertangani	100	100	100	100%	
5	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>					
	% penderita penyakit tidak menular yang tertangani	13,33%	17,97	7,64	43%	
	% penderita penyakit menular yang tertangani	8,32%	48,23	64,70	134%	
6	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>					
	Cakupan Desa Siaga Aktif	32,70%	60	94,74	158%	
	Jumlah Kader yang aktif	2945	2945	2885	98%	
	Cakupan Rumah Tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat	61,02%	65	52,32	80%	
7	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	8%	50	100	200%	
	Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi standar kesehatan	45%	58	85,08	147%	
	Meningkatnya TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat kesehatan	8%	32	83,33	260%	
	Prosentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	79%	85	82,04	97%	
8	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan RS</b>					BLUD
	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	100	81%	81%	
	BOR	78%	85	54%	64%	
	BTO	94 kali	50	59%	118%	
	ALOS	3 hari	3	100%	100%	
	TOI	1 hari	1	100%	100%	
	NDR	22/1000 ps keluar	12	26%	98%	
	GDR	32/1000 ps keluar	22	45%	21%	
	% capaian pelayanan Sesuai SPM	80%	100	64%	64%	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Jumlah Kematian Ibu Bersalin	6	1	-11,9		
	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
	% capaian Jumlah dan mutu SDM sesuai SPM	70%	100	75	75	
9	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit paru</b>					
	% capaian Ketersediaan Obat, Alkes dan Perbekalan	70%	1	84	84	
	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
	Jumlah jenis layanan Spesialistik	6	7	114	16,3	
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
10	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>					Dinas PUPR
	Meningkatnya cakupan jalan HRS Kabupaten	127,37	148,85	98,56	66,21	
	Meningkatnya cakupan jalan Lapen Kabupaten	932,86	770,70	305,07	39,58	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Meningkatnya cakupan jalan Telford Kabupaten	326,97	404,01	75,82	18,77	
	Meningkatnya cakupan jembatan	214	65	59,00	90,77	
11	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>					
	Meningkatnya kecamatan yang memiliki RDTR	3	13			
12	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>					
	Panjang saluran drainase yg terbangun (km)	49,29	119,93	53,53	44,63	
13	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>					
	Meningkatnya kapasitas aparat dan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai peraturan yang berlaku		13			
14	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Cakupan Jalan kondisi baik (km)	962,04	304.92	99,54	10	
	Cakupan Jembatan kondisi baik (km)	214	60	31,00	51,67	
15	<b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</b>					
	Optimalisasi fungsi jalan melalui pemantauan (kali)		120			
	Optimalisasi fungsi jembatan melalui pemantauan (kali)		120			
16	<b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</b>					
	Tersedianya informasi/data jalan (dokumen)		2	1,00	50,00	
	Tersedianya informasi/data jembatan (dokumen)		2	1,00	50,00	
17	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>					
	Jumlah alat berat layak pakai yg tersedia (unit)	17	13	4,0	30,77	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium layak pakai yg tersedia (unit)		28	14,00	50,00	
	Penyediaan gedung workshop (unit)	1	5	1,00	20,00	
	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan laboratorium (unit)	0	126			
18	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>					
	Meningkatnya Prosentase penduduk yang terlayani oleh air minum bersih	74.04	100	309,38	30,94	
	Panjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ternormalisasi (meter)	0	2000	1470,00	73,50	
	Bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi (ha)	9393	25.871	6573	25,41	



No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Tersedianya informasi/data base jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya (dokumen)		3	1	33,33	
19	<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>					
	Pendamping desa dan replikasi (desa)		15	15,00	100,00	
20	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya</b>					
	Meningkatnya cakupan embung dan bangunan penampung air lainnya yang terbangun (unit)		10			
	Cakupan embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik (unit)		8			
21	<b>Pembinaan Jasa Konstruksi</b>					
	Pembinaan Jasa konstruksi (perusahaan)	525	525	509,00	96,95	
22	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Meningkatnya cakupan pelayanan Infrastruktur Perdesaan yg layak untuk Lopen	0,63	1,5	3,58	238,67	
	Meningkatnya cakupan pelayanan Infrastruktur Perdesaan yg layak untuk Telford	12,76	75,2	36,76	48,88	
	Meningkatnya cakupan pelayanan Infrastruktur Perdesaan yg layak untuk Rabat/paving	4,95	18,1	22,21	448,65	
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman						
23	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu					Dinas PUPR
	Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu			1838 unit	100%	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
24	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					Satpol PP

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
25	<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>					
	Jumlah Produk Hukum yang ditegakkan	1 thn	15	10	66,67	
	<b>BPBD</b>					
26	<b>Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana</b>					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	80	1200	360	30	
27	<b>Penanganan Darurat Bencana</b>					
	Terwujudnya Penanganan Darurat Bencana	12	60	24	40	
28	<b>Rehabilitasi &amp; rekonstruksi pasca bencana</b>					
	Terwujudnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10	65	22	34	
29	<b>Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bagi Korban Bencana</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang ancaman, dampak dan risiko bencana	80 orang	1440 orang	1440 org	100	
	Jumlah lokasi rawan bencana yang terpasang rambu peringatan dini bencana	10 buah	120 buah	83 bh	69,16	
30	<b>Identifikasi Data Korban Bencana</b>					
	Persentase jumlah lokasi bencana yang teridentifikasi	12 kec	12 kec	12 kec	100	
	Persentase jumlah lokasi bencana yang terdistribusi bantuan	12 kec	12 kec	12 kec	100	
31	<b>Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum</b>					
	Jumlah lokasi yang tertangani akibat bencana	10 lokasi	53 lokasi	53 lok	55,78	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>						
32	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pmks Lainnya</b>					Dinas Sosial
	Persentase Penanganan PMKS	62,70%	100%	0%	3%	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
33	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
	Persentase Penanganan PMKS	62,70%	100%	120%	164%	
34	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma					
	Persentase PMKS yang dibina	62,70%	100%	0%	127%	
35	Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo					
	Persentase Penanganan PMKS	62,70%	100%	8%	13%	
36	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)					
	Persentase PMKS yang dibina	62,70%	100%	11%	24%	
37	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					
	Persentase PMKS yang dibina	62,70%	100%	0%	14%	
Urusan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan						
38	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					Dinas Penanaman Modal, Koperasi,

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
		93,33	100,00	362	362,38	UKM, dan Tenaga Kerja
39	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					
		2.186	3.200	10.312	322,25	
40	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
		109	2.000	914	45,70	
41	Peningkatan Kesempatan Kerja					
		20,56	45,56	268	588,06	
42	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan					
		5,30	3,00	105	3.515,00	
43	Peningkatan Pelayanan dan Kepesertaan JAMSOSTEK					
		18,86	25,00	148	592,68	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
44	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB (PLKB/PKB)	1 : 3,1	1 : 2	0,00	0,00	
45	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>					
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	3,78	6	46,81	780,1666667	
	Ratio perempuan korban kekerasan per 1000 perempuan	1,38	1	0,26	26	
	Ratio anak korban kekerasan per 1000 anak	0,7	0,2	0,21	105	
	Ratio Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) per 1000 rumah Tangga	1,62	1	0,95	95	
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di bawah umur	0,048	0,038	0	0	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	96,31	98	55,74	56,87755102	
	Jumlah Organisasi Perempuan dan Anak	17	28	0	0	
	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	18	0	0	
46	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>					
	Ratio perempuan korban kekerasan per 1000 perempuan	1,38	1	0,26	26	
	Ratio anak korban kekerasan per 1000 anak	0,7	0,2	0,21	105	
	Ratio Anak yang memerlukan Perlindungan khusus per 1000 anak	10,63	11	0	0	
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di bawah umur	0,048	0,038	0	0	
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	96,31	98	55,74	56,87755102	



No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Jumlah Organisasi Perempuan dan Anak	17	28	0	0	
	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	18	0	0	
47	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>					
	Persentase Perempuan di Lembaga Swasta	95,95	97,75	0	0	
	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	65,83	100	86	86	
	Ratio perempuan korban kekerasan per 1000 perempuan	1,38	1	0,26	26	
	Ratio Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) per 1000 Rumah Tangga	1,62	1	0,95	95	
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	87,32	100	100	100	
	Jumlah Organisasi Perempuan dan Anak	17	28	0	0	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	18	0	0	
48	<b>Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan</b>					
	Persentase IPG (Indekx Pembangunan Gender)	65,83	100	86,00	86,00	
49	<b>Program Keluarga Berencana</b>					
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,69	1,56	1,82	116,6666667	
	Total Fertility Rate (TFR)	3,38	3,21	2,07	64,48598131	
	Persentase Unmet Need	16,42	14	11,38	81,28571429	
	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	66,54	72	72,72	101	
	Rasio Akseptor KB	66,54	72	72,72	101	
	Persentase cakupan anggota BKB yang Ber KB	85,26	100	68,76	68,76	
	Persentase penyediaan Data mikro di Desa/Kelurahan	100	100	0	0	
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	1 : 1	1 : 1	0	0	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Persentase cakupan anggota UPPKS yang Ber KB	79,88	100	0	0	
50	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>					
	Persentase PUS yang Istri di bawah 20 Tahun	5,13	2,13	3,80	178,40	
51	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>					
	Total Fertility Rate (TFR)	3,38	3,21	2,07	64,49	
	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	66,54	72	72,72	101,00	
52	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri</b>					
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,69	1,56	1,82	116,67	
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera 2 dan KS 3	80,35	76,41	28,62	37,46	
	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1	19,65	23,59	69,42	294,28	
53	<b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65	1,56	1,82	116,67	
54	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR</b>					
	Persentase PUS yang Istri di bawah 20 Tahun	79,88	100	3,80	3,80	
55	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>					
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65	1,56	1,82	116,67	
56	<b>Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU</b>					
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65	1,56	1,82	116,67	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>						
57	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)</b>					Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	98%	100%	100%	100,00	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
58	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
	Terwujudnya Promosi Hasil-hasil Pertanian Unggulan Daerah	100%	100%	100%	100,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
59	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanian
	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin		1711 unit	3775 unit	221%	
60	Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)					
	Terfasilitasinya Percepatan Kota Tanpa Kumuh		20 Kel.	17 Kel.	85%	
61	Monitoring, evaluasi dan pelaporan					
	Tersedianya Data dan Informasi		93 kali	12 Kec.	13%	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
62	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat					
	Tersedianya Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung PSU		0	1142	#DIV/0!	
63	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					
	Tersedianya data dan informasi		0	12 KEC.	#DIV/0!	
64	Survey dan Pemetaan Prasarana, Sarana dan Utilitas					
	Tersedianya Data Pemetaan Prasarana, Sarana dan Utilitas		0	12 KEC.	#DIV/0!	
65	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					
	Tingkat penyelesaian sengketa tanah garapan	3 Kasus	5 kasus	20 Kasus	4 Kasus	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
66	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					Dinas Lingkungan Hidup
	Penghargaan Adipura	Tidak Ada	Ada	-	-	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
67	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>					
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tidak Ada	Ada	Ada	100	
	Tersedianya Dokumen SLHD	1	5	5	100	
68	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>					
	Menurunnya luas lahan kritis	23.153,77	55,4	35,00	63,18	
69	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>					
	Indeks Kualitas Air	Tidak Ada	64	70	109,38	
	Indeks Kualitas Udara	Tidak Ada	82	88	107,16	
	Indeks Tutupan Lahan	Tidak Ada	65	85	131,26	
	Tersedianya Dokumen RPPLH	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	-	
70	<b>Program Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>					
	Jumlah perusahaan/LSM yang berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup (CSR)	0	5	2	40,00	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Jumlah pnerima penghargaan lingkungan hidup	0	13	4	30,77	
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
71	Program Penataan Administrasi Kependudukan					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,67	1	0,867	86,70	
	Rasio Pasangan berakte nikah	0,03	0,096	0,234	243,75	
	Rasio Penduduk memiliki Kartu Keluarga	0,67	1	0,717	71,70	
	Rasio Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	235,7	309,67	296,87	95,87	
	Ketersediaan data base kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
72	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina	4 jenis	710039005	667.553.515	94,02	



No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
73	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat dalam membangun desa					
	Jumlah Lembaga Desa yang difasilitasi	18 LPD	590593650	582.524.150	98,63	
74	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa					
	Persentase Desa yang mengelola administrasinya secara baik	6 jenis	6791601100	6.011.325.196	88,51	
75	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					
	Tersedianya aparatur desa yang berkompeten	4 jenis	4205628490	4.071.554.336	96,81	
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
76	Program Keluarga Berencana					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,69	1,56	1,82	116,66667	
	Total Fertility Rate (TFR)	3,38	3,21	2,07	64,485981	
	Persentase Unmet Need	16,42	14	11,38	81,285714	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	66,54	72	72,72	101	
	Rasio Akseptor KB	66,54	72	72,72	101	
	Persentase cakupan anggota BKB yang Ber KB	85,26	100	68,76	68,76	
	Persentase penyediaan Data mikro di Desa/Kelurahan	100	100	0	0	
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	0,042361111	0,042361111	0	0	
	Persentase cakupan anggota UPPKS yang Ber KB	79,88	100	0	0	
77	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>					
	Persentase PUS yang Istri di bawah 20 Tahun	5,13	2,13	3,80	178,40	
78	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>					
	Total Fertility Rate (TFR)	3,38	3,21	2,07	64,49	
	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	66,54	72	72,72	101,00	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
79	<b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri</b>					
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,69	1,56	1,82	116,67	
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera 2 dan KS 3	80,35	76,41	28,62	37,46	
	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1	19,65	23,59	69,42	294,28	
80	<b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</b>					
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65	1,56	1,82	116,67	
81	<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR</b>					
	Persentase PUS yang Istri di bawah 20 Tahun	79,88	100	3,80	3,80	
82	<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65	1,56	1,82	116,67	
83	<b>Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU</b>					
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65	1,56	1,82	116,67	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
84	<b>Program Penikatan Kapasitas Sumber Daya Apratur</b>					Dinas Perhubungan
	jumlah tenaga teknis terlatih dan bersertifikat di bidang transortasi	8		20	66,66	
	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	66		50	75,75	
	Tersedianya Sumber daya manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan Parkir pada kabupaten/kota	40		2	12,5	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	98,11		20,5	50,67	
85	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>					
86	<b>Program Reabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ</b>					
87	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>					
	Persentase Terminal Angkutan Penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100		100	100	
	Jumlah penumpang yang naik dan turun di terminal	1626573		1100000	62,78	
	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat di terminal	30255		40567	123,88	
	Jumlah penumpang yang naik dan turun di pelabuhan	3349		142133	3925,34	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2203437		2200000	84,57	
	Jumlah arus barang yang bongkar dan muat dipelabuhan	131314		220081	154,84	
	Jumlah penumpang yang naik dan turun di bandara frans sales lega	19248		16987	81,54	
	Jumlah Arus Barang yang Bongkar dan Muat di Bandara Frans Sales Lega	64690		25000	35,70	
88	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
89	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					
	Angkutan Darat	0,5		1,20	160,00	
	Rasio Izin Trayek	0,00269		0,00	44,94	
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2300		1306,00	32,65	
	Pemasangan Rambu-rambu	66,88		0	0,00	
Urusan pemerintahan Bidang komunikasi dan informatika						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
90	<b>1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa. 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi. 3. Program kerjasama Informasi dan Media Masa</b>					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Media Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Daerah	NA	4	350	8.750	
91	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.</b>					
	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi di Kabupaten Manggarai	NA	66,67%	400	400	
92	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi</b>					
	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan website milik daerah	NA	100%	100	100,00	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
93	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi					
	Persentase PD yang memiliki aplikasi e-Government	NA	29,17	1	4,82	
94	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan komunikasi					
	Jumlah Aplikasi e-government yang terintegrasi	NA	4	233	5.833,33	
	Jumlah Informasi daerah yang diamankan dengan persandian	NA	100,00	316	316,40	
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
95	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
		93,33	100,00	362	362,38	
96	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					
		2.186	3.200	10.312	322,25	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						



No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
97	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
	Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMDN)	33.000.000.000	165.000.000.000	710.435.180.526	430,57	
98	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
		87,28	89,70	368	410,66	
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga						
						Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
99	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah dokumen data informasi statistik daerah yang dihasilkan	NA	100,00	201	201,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
						Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
100	<b>Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya		1.577.570.000		23%	
101	<b>Pengelolaan Keragaman Budaya</b>					
	Meningkatnya Cakupan Sanggar Seni Yang Terbina		1.758.250.000		11%	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>						
102	<b>Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar</b>					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Tersedianya Pelayanan Perpustakaan	660.000.000	383.377	350.000	91	
103	<b>Pengembangan Minat dan Budaya Baca</b>					
	Tersedianya Pelayanan Perpustakaan melalui MPK	369.380.000	75.424	225.000	298	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Tersedianya Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	NA	40	42	105	
104	<b>Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah</b>					
	Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	NA	4.300	200	5	
105	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>					
	Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	NA	100	50	50	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>						
106	<b>Pengklasifikasian data</b>					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Terwujudnya Peningkatan Pengklasifikasian data	57.600.000	8			
107	<b>Pembinaan dan Penataan Arsip</b>					
	Tersedianya Pembinaan dan Penataan Arsip		24.574.000			

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
108	<b>Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah</b>					
	Tersedianya Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah	NA	58	5	8,62	
109	<b>Penelusuran Arsip Statis daerah</b>					
	Penelusuran Arsip Statis daerah	NA	8 kecamatan	8 kecamatan	100	
110	<b>Penduplikasian dokumen /arsip daerah dalam bentuk informatika</b>					
	Tersedianya Penduplikasian dokumen /arsip daerah dalam bentuk informatika	NA	8 SKPD	8 SKPD	100	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan						
111	<b>Pengembangan Perikanan Tangkap</b>					Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
	Produksi Perikanan Tangkap	5.103,39 Ton	6.494,59 Ton	7.067,11 Ton	108,82	
112	<b>Pengembangan Budidaya Perikanan</b>					
	Produksi Perikanan Air Tawar	110 ton	140 ton	134,10 Ton	95,79	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
113	<b>Pengembangan Kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>					
	Produksi Perikanan Air Payau	20 ton	45 ton	15,59 Ton	34,64	
114	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir</b>					
	Meningkatnya cakupan kelompok Pesisir binaan Nelayan	80 Kelompok	125 Kelompok	157 Kelompok	125,60	
115	<b>Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</b>					
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perikanan Budidaya	60 Kelompok	105 Kelompok	180 Kelompok	171,43	
116	<b>Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya kelautan</b>					
	Peningkatan cakupan Kelompok Binaan Pengawas Pantai (POKMASWAS)	4 Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok	100,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
117	<b>Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Terlaksananya peyebarluasan obyek-obyek wisata				26%	
118	<b>Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>					
	Terwujudnya Optimalisasi Obyek Wisata				62%	
119	<b>Pengembangan Kemitraan</b>					
	Penguatan kelembagaan Forum Tata Kelola Pariwisata				188%	
120	<b>Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>					
	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya				23%	
121	<b>Pengelolaan Keragaman Budaya</b>					
	Meningkatnya Cakupan Sanggar Seni Yang Terbina				11%	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
122	<b>Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis</b>					Dinas Pertanian

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Magang Petani Hortikultura		90	1276,28	14,18	
123	<b>Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis</b>					
	Penyuluhan Pendampingan Hortikultura	NA	25	441,86	17,67	
124	<b>Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani</b>					
	Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani	NA		7322,00		
125	<b>Pekan Nasional (PENAS) dan Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Manggarai</b>					
	Promosi Produk Pertanian Unggulan Lokal	NA	25	66,00	2,64	
126	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>					
	Data dan Informasi	NA	60	281,60	4,69	
127	<b>Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil pertanian</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Mesin Rontok Padi (Power Thresher)	35 unit	170	31,00	0,18	
128	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>					
	Data dan Informasi	NA	865	1115,38	1,29	
	Pengembangan Hortikultura					
129	<b>Bibit Unggul tanaman hortikultura</b>			468,60	#DIV/0!	
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana/prasarana SDA Wilayah Irigasi					
130	<b>Pelatihan GP3A</b>	NA	20	4,00	0,20	
	Sistem Pertanian Integrasi (SIMANTRI)					
131	<b>Tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung SIMANTRI</b>	NA	51	435,84	8,55	
	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik					
132	<b>Tersedianya Jalan Usaha Tani</b>					
	Permbangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi	13,28 Km	37	426,50	11,60	



No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
133	<b>Benih Padi sawah, Kedelai, dan Kacang Hijau (3 Jenis), Revitalisasi lahan BBU (1,5 Ha) dan tersedianya sarana Produksi Perkebunan Kopi</b>	NA	1	469,32	469,32	
	Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan					
134	<b>Bibit cengkeh, Kako, Vanilli, Kopi dan Jambu Mete</b>	NA	1	642,54	642,54	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					
	<b>Tersedianya Dam Parit</b>					
136	Pembangaunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	NA	144	527,90	3,67	
	<b>Tersedianya Jaringan Irigasi</b>		144	319,54	2,22	
	Pengadaan embung Untuk Pertanian	NA	144	319,54	2,22	Dinas Peternakan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat guna					
	Jumlah Kelompok tani ternak binaan	180 Kelmpok	749	627	83,7	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
137	<b>Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>					
	Jumkah Populasi Ternak	272.239 ekor	294.017	294.256	100,1	
	- Ternak Besar	31.465 Ekor	34.585	34.595	100,0	
	- Ternak Kecil	46.178 Ekor	54.004	54.004	100,0	
	- Unggas	194.596 Ekor	205.428	205.657	100,1	
138	<b>Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan</b>					
	Jumlah produksi daging	674.79 Ton/Thn	2.042	826	40,5	
139	<b>Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>					
	Menurunnya kasus kematian ternak akibat penyakit ternak	37 kasus	25	0,0	<b>0,0</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>						
140	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>					Dinas Perdagangan
	Meningkatnya Jumlah pelaku usaha formal/pedagang pada pasar pada pasar yang dibangun pemerintah	46%	10	11	110	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Menambah Jumlah Gudang Gudang	0	2	0	0	
	Transparasi Harga Komoditi	0	5	5	100	
141	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknonogi Pasca Panen</b>					
	Meningkatnya Kapasitas Kelompok melalui penerapan Teknologi Pasca Panen	NA	80	60	75	
142	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>					
	Meningkatnya efisiensi perdagangan dengan transparansi harga dan pemetaan jaringan pemasaran	0 dok	5	3	60	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>						
143	<b>Program pengembangan Industri kecil dan menengah</b>					Dinas Perdagangan
	Menambah Jumlah kelompok pemasaran hasil pertanian/perkebunan	0	21	0	0	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
144	<b>Program pengembangan Industri kecil dan menengah</b>					
	Presentase Bina Kelompok Pengrajin	8,60%	115	50	43,48	
145	<b>Program pengembangan Industri kecil dan menengah</b>					
	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tenun ATBM	0 klpk	10	0	0	
146	<b>Penataan Struktur Industri</b>					
	Meningkatnya Cakupan modal dan peralatan yang difasilitasi pemerintah	0%	100	109	109	
	Meningkatnya cakupan saraba hasil Produksi (unit showroom)	0 Unit	6	0	0	
147	<b>Program Peningkatan kemampuan teknologi Industri</b>					
	Meningkatnya kemampuan pengrajin souvenir melalui pelatihan/magang souvenir	0 klpk	10	32	320	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
<b>Sekretariat Daerah</b>						
<b>148</b>	<b>Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>					Bagian Organisasi
	Persentase PD yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>149</b>	<b>Progran Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>					
	Hasil penilaian SAKIP Kabupaten	55,39 (CC)	89 (A)	61,60	69,21	
<b>150</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Publik</b>					
	Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan Publik Yang Disurvey Ikm	3	6	6	100,00	
<b>151</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	NA	5	1	87	
<b>15 2</b>	<b>Pengembangan Komunikasi dan Informasi</b>					
	Tersedianya Informasi Kegiatan Pemerintahan	NA	5	1	20	
153	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>					Bagian Administrasi Pemerintahan
	Terdatanya nama rupa bumi	NA	100,00	4,39	4,39	
154	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>					
	Terwujudnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil Kepala Daerah	NA	100	23,81	23,81	
155	<b>Program Perencanaan Pembangunan</b>					
	Terlaksananya penyusunan LKPj dan LPPD Kab. Manggarai	NA	100	70,84	70,84	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
156	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang optimal	NA	100	63,88	63,88	
157	<b>Program Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan</b>					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat	NA	100	33,09	33,09	
158	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD</b>					Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	5 Lap	5	5	100	
	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan					Bagian Hukum
	Peningkatan Produk Hukum sesuai Peraturan Perundangundangan	100,00	75,00	66,67	88,89	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Persentase Bantuan Hukum yang tertangani	100%	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah Desa Sadar Hukum	1	5 Desa	4 Desa	80,00	
	Terlaksananya LPSE	4	4	4	100	
Sekretariat DPRD						
159	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					Sekretariat DPRD
	Meningkatnya jumlah peraturan daerah untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah	15 bh	15	15,00	100,00	
	Tersedianya berbagai informasi dan pemahaman sama untuk setiap persoalan / masalah dalam masyarakat	1 kali	15	12,00	80,00	
	Tersedianya keputusan / laporan hasil rapat alat kelengkapan DPRD	56 kali	56	52,00	92,86	
	Tersedianya dokumen hasil rapat paripurna DPRD	46 kali	47	46,00	97,87	



No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Terakomodirnya berbagai informasi dan aspirasi dari masyarakat	3 kali	3	3,00	100,00	
	Terakomodirnya berbagai informasi dan aspirasi dari masyarakat	71 org	71	70,00	98,59	
	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka bimbingan teknis musrenbang, koordinasi, konsultasi, stuba, dan ADKASI	35 org	35	35,00	100,00	
	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	35	12,00	34,29	
Perencanaan						
160	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia					BAPPELITBANGDA
	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur	49	1.763	674	38,23	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
161	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>					
	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2737	14.813	17.115	115,54	
162	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>					
	Terwujudnya Pendidikan Kedinasan yang berkualitas	4	64	10	15,63	
Keuangan						
163	<b>Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>					Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP	WTP	100%	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 kali	10,97%	9,20%	84%	
164	<b>Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>					

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan regulasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah	NA	100%	100%	100,00	
Kepegawaian						
165	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur	49	1.763	674	38,23	
166	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
	Terwujudnyanya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2737	14.813	17.115	115,54	
167	Program Pendidikan Kedinasan					
	Terwujudnya Pendidikan Kedinasan yang berkualitas	4	64	10	15,63	
Inspektorat						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
168	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>					Inspektorat Daerah
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	70,48	70,48%	9,20%	13,05	
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	40,35	40,35%	100%	247,83	
169	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan</b>					
	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100	
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100	
Kecamatan						
170	<b>Penyelesaian Konflik Masyarakat</b>					Kecamatan
	Persentase kasus yang tertangani	NA	100	86,59	86,59	
171	<b>Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa/Kelurahan</b>					
	Persentase Desa/Kelurahan Diseminasi Informasi	NA	100	92,39	92,39	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
172	Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Kelurahan					
	Terbinanya Kelompok Masyarakat	NA	100	88,64	88,64	
173	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					
	Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Kelurahan	NA	100	84,96	84,96	
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah						
174	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Thn	6	1	16,67	
175	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					
	Terwujudnya Situasi daerah yang kondusif	1 Thn	6	5	83,33	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	OPD Penanggung
176	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>					
	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 thn	6	5	83,33	
177	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>					
	Terwujudnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1 thn	6	1	16,67	

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Manggarai, 2021

Hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2016-2021 memperlihatkan bahwa masih ada beberapa indikator program yang harus ditingkatkan pada periode perencanaan mendatang. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pemetaan masalah dan perumusan isu strategis di Bab IV. Pemetaan masalah tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah.

## BAB III

# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan analisis gambaran keuangan daerah Kabupaten Manggarai untuk 1 (satu) periode ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, hal pertama yang dianalisis untuk mendapatkan gambaran kapasitas keuangan daerah adalah kinerja pengelolaan keuangan daerah masa lalu. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kerangka pendanaan yang di dalamnya terdapat kapasitas riil keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah ke depan. Data yang digunakan dalam analisis keuangan daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca keuangan minimal 5 (lima) tahun sebelumnya.

### **3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu**

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proposi komponen APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta pertumbuhan dan rasio neraca daerah. Di samping itu, pendekatan analisis terhadap rasio keuangan daerah menggunakan pendekatan kapasitas fiskal. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap kinerja keuangan daerah masa lalu.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai dapat dilihat berdasarkan masing-masing komponennya, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kinerja ketiga komponen APBD tersebut dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhannya. Berikut ini adalah kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.



**Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

URAIAN		Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Rata-rata Pertumbuhan
<b>PENDAPATAN</b>		<b>1.068.340.708.429,33</b>	<b>1.111.538.011.520,66</b>	<b>1.097.948.217.140,78</b>	<b>1.229.400.675.074,51</b>	<b>1.167.399.757.930,08</b>	<b>2,44%</b>
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.284.065.871,33	128.829.520.073,07	89.904.635.200,78	103.585.928.126,51	107.389.680.764,67	13,31%
	PENDAPATAN TRANSFER	985.320.072.408,00	956.784.587.889,59	956.555.834.690,00	1.057.995.476.037,00	818.179.913.522,41	-3,75%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.736.570.150,00	25.923.903.558,00	51.487.747.250,00	67.819.270.911,00	241.830.163.643,00	208,56%
<b>BELANJA</b>		<b>960.706.835.952,00</b>	<b>877.971.049.259,00</b>	<b>909.069.031.010,00</b>	<b>1.187.342.937.347,00</b>	<b>1.142.513.416.801,13</b>	<b>5,44%</b>
	BELANJA OPERASI	668.503.588.001,00	648.210.421.539,00	638.275.541.136,00	925.333.510.983,00	911.836.106.973,00	9,74%
	BELANJA MODAL	290.465.286.278,00	228.268.283.670,00	270.097.299.924,00	260.133.775.217,00	207.794.276.812,00	-6,72%
	BELANJA TAK TERDUGA	1.737.961.673,00	1.492.344.050,00	696.189.950,00	1.875.651.147,00	20.348.859.454,13	271,71%
<b>TRANSFER</b>		<b>153.879.572.453,00</b>	<b>179.317.740.236,00</b>	<b>188.485.758.158,00</b>	<b>0</b>	<b>2.534.173.562,00</b>	<b>-</b>
	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>153.879.572.453,00</b>	<b>179.317.740.236,00</b>	<b>188.485.758.158,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>		<b>55.785.405.402,85</b>	<b>-1.367.420.789,32</b>	<b>29.029.488.206,34</b>	<b>19.238.734.054,12</b>	<b>38.297.819.993,63</b>	<b>-565,01%</b>
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.784.405.402,85	7.831.579.210,68	50.009.488.206,34	28.988.734.054,12	51.005.258.946,63	121,39%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.999.000.000,00	9.199.000.000,00	20.980.000.000,00	9.750.000.000,00	12.707.438.953,00	58,73%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, 2016-2020*

Pendapatan daerah Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,44 persen per tahun selama periode 2016-2020. Belanja daerah juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 5,44 persen per tahun. Pendapatan daerah yang lebih tinggi dibanding belanja daerah menyebabkan terjadinya surplus anggaran pada tahun 2017-2020.

#### **3.1.1.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut ini adalah kondisi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai.

Tabel 3. 2. Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

URAIAN			REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-Rata Pertumbu-han (%)
<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.127.125.467.633,33</b>	<b>1.111.538.011.520,66</b>	<b>1.097.948.217.140,78</b>	<b>1.229.400.675.074,51</b>	1.167.399.757.930	2,44%
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>78.666.667.133,33</b>	<b>128.829.520.073,07</b>	<b>89.904.635.200,78</b>	<b>103.585.928.126,51</b>	107.389.680.764,67	10,63%
	Pendapatan Pajak Daerah		21.015.233.246,52	19.713.195.578,00	14.431.629.500	19,159,709,110.00	14.431.629.499,92	-8,34%
	Pendapatan Retribusi Daerah		4.968.400.156,00	5.691.771.878,00	5.460.946.523	6,316,974,749.00	5.460.946.523,00	3,10%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.012.577.839,00	5.492.341.878,00	6.584.648.088	6,028,773,598.90	6.584.648.088,25	-0,56%
	Lain-lain PAD Yang Sah		45.670.455.891,81	97.932.210.739,07	80.912.456.654	72,080,470,668.61	70.639.274.959,50	23,86%
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>1.043.722.230.350,00</b>	<b>956.784.587.889,59</b>	<b>956.555.834.690,00</b>	<b>818.179.913.522</b>	<b>818,179,913,522.41</b>	<b>-5,10%</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		818.676.743.696,00	815.008.601.474,00	791.615.772.467	807,048,799,228.00	791.615.772.467,00	
		Bagi Hasil Pajak	13.801.374.064,00	9.241.896.011	8,056,284,586.00	6.029.106.320,00	9.237.946.811	-3,18%
		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	673.965.295,00	1.640.010.489	1,825,202,156.00	1.915.278.773,00	1.643.959.689,00	35,71%
		Dana Alokasi Umum (DAU)	575.280.999.000,00	553.097.333.000	572,870,496,000.00	606.097.107.000,00	553.097.333.000,00	-0,84%
		Dana Alokasi Khusus (DAK)	228.920.405.337,00	227.636.532.967	224,296,816,486.00	265.966.354.417,00	227.636.532.967,00	0,54%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		205.372.257.427,00	116.291.529.000,00	125.785.322.000,00	149.132.954.000,00	-	-
	Dana Penyesuaian		113.819.738.427,00	-	-	149.132.954.000,00	-	-

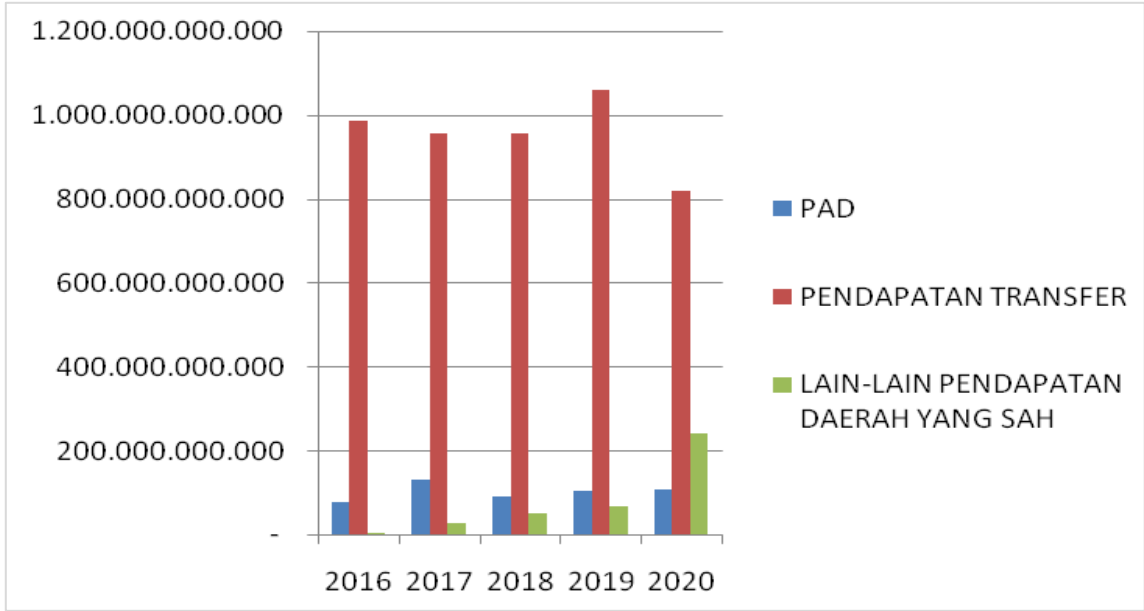
URAIAN				REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Rata-Rata Pertumbu-han (%)
			Dana Desa	91.552.519.000,00	116.291.529.000,00	125.785.322.000,00	-	-	17,92%
			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	19.430.229.227,00	25.484.457.415,59	23.721.713.462,00	28.854.675.527,00	26.564.141.055,41	9,49%
			Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.430.229.227,00	25.484.457.415,59	23.721.713.462,00	28.854.675.527,00	26.564.141.055	9,49%
			Bantuan Keuangan	243.000.000,00	-	-	-	-	-
			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	243.000.000,00	-	-	-	-	-
			<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.736.570.150,00</b>	<b>25.923.903.558,00</b>	<b>51.487.747.250,00</b>	<b>67.819.270.911,00</b>	241.830.163.643	208,56%
			Pendapatan Hibah	4.736.570.150,00	25.923.903.558,00	51.487.747.250,00	67,819,270,911.00	59.806.730.643	141.46%
			Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	182.023.433.000	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

Setiap komponen pendapatan daerah secara umum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Pada tahun 2016 hingga 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 13,31 persen per tahun. Komponen PAD yang memiliki kontribusi terhadap PAD paling tinggi berasal dari lain-lain PAD yang sah, diikuti oleh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah. Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -3,57 persen. Komponen pendapatan transfer yang memiliki kontribusi paling tinggi berasal dari DAU diikuti DAK dan Bagi Hasil Pajak dan non pajak. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah tumbuh dengan rata-rata sebesar 208,56 persen. Kontribusi komponen lain-lain PAD yang sah sebagian besar berasal dari pendapatan hibah.

Kinerja pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya dilihat dari perspektif rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan daerah tetapi juga dapat dilihat dari perspektif kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah. Besaran kontribusi tiap komponen dapat menunjukkan sumber pendapatan terbesar yang selama ini menopang kebutuhan pendanaan daerah. Berikut ini adalah kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah Kabupaten Manggarai.

**Grafik 3. 1. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai, 2016-2020

Kontribusi komponen pendapatan daerah yang paling tinggi berasal dari pendapatan transfer terutama pendapatan transfer pemerintah pusat, diikuti oleh PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Manggarai masih bergantung pada pendapatan transfer. Kondisi ini perlu diantisipasi karena pendapatan transfer dari pemerintah pusat sangat bergantung pada kondisi APBN. Saat ini, kondisi APBN masih difokuskan pada penanganan pandemi Covid 19.

Persoalan belum optimalnya mobilisasi pendapatan asli daerah terutama terkait dengan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, belum optimalnya aktualisasi potensi pendapatan asli daerah pada beberapa objek pajak dan retribusi daerah. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Ketiga, belum optimalnya pemutahiran secara *realtime* potensi database sumber-sumber penerimaan asli daerah serta kurang optimalnya peran dan kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD.

#### **3.1.1.2. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berikut ini adalah gambaran kinerja belanja daerah Kabupaten Manggarai.

Tabel 3. 3. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

URAIAN		Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
BELANJA		960.706.835.952,00	877.971.049.259,00	909.069.031.010,00	1.187.342.937.347,00	1.142.513.416.803,20	5,44%
BELANJA OPERASI		668.503.588.001,00	648.210.421.539,00	638.275.541.136,00	925.333.510.988,13	911.836.106.975,33	9,74%
	Belanja Pegawai	390.900.970.956,00	361.254.176.941,00	366.486.030.948,00	445.345.668.863,00	466.435.764.708,00	5,03%
	Belanja Barang dan Jasa	270.898.439.457,00	281.559.164.598,00	264.539.642.994,00	253.641.991.847,00	204.605.040.944,00	-6,39%
	Belanja Hibah	6.006.677.588,00	4.672.080.000,00	6.594.367.194,00	8.388.682.580,00	35.920.440.901,00	93,58%
	Belanja Bantuan Sosial	697.500.000,00	725.000.000,00	655.500.000,00	3.725.000.000,00	732.500.000,00	95,57%
	Belanja Bantuan Keuangan				214.232.167.693,00	204.142.360.420,00	
BELANJA MODAL		290.465.286.278,00	228.268.283.670,00	270.097.299.924,00	260.133.775.216,42	207.794.276.811,73	-6,72%
	Belanja Modal Tanah	640.445.800,00	753.092.180,00	506.741.000,00	188.430.000,00		-25,98%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.452.949.852,00	42.652.454.364,00	35.939.346.247,00	46.654.146.067,00	50.471.724.050,00	0,89%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.596.637.084,00	51.810.630.821,00	79.078.996.580,00	61.580.198.159,00	63.704.359.626,00	5,98%
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.608.959.442,00	129.302.545.630,00	154.439.216.097,00	149.900.860.221,00	92.654.992.173,00	-12,32%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.166.294.100,00	3.749.560.675,00	133.000.000,00	1.810.140.770,00	963.200.963,00	334,82%
BELANJA TAK TERDUGA		1.737.961.673,00	1.492.344.050,00	696.189.950,00	1.875.651.147,00	20.348.859.454,13	271,71%
	Belanja Tak Terduga	1.737.961.673,00	1.492.344.050,00	696.189.950,00	1.875.651.147,00	20.348.859.454,13	271,71%
TRANSFER		153.879.572.453,00	179.317.740.236,00	188.485.758.158,00	-	2.534.173.562,00	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		153.879.572.453,00	179.317.740.236,00	188.485.758.158,00	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	153.212.301.373,00	178.716.949.476,00	187.884.967.398,00	-	-	-

URAIAN			Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	667.271.080,00	600.790.760,00	600.790.760,00	-	-	-
		Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	-	-	-	-	-	-
		Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	1.555.394.496,00	-
		Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	978.779.066,00	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020



Anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Meskipun demikian, pertumbuhan belanja daerah mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, terutama pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena beberapa komponen belanja daerah mengalami penurunan, seperti belanja operasi dan belanja modal. Sementara itu, belanja tidak terduga dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena adanya dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Manggarai dan juga di seluruh wilayah Indonesia.

#### **3.1.1.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Berikut ini adalah gambaran kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai.

Tabel 3. 4. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

URAIAN			Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Rata-rata pertumbuhan
PEMBIAYAAN								
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			59.784.405.402,85	7.831.579.209,81	50.009.488.211,75	28.988.734.053,70	51.005.258.947,39	121,39%
		Penggunaan SiLPA	59.722.422.022,85	7.794.116.210,68	49.987.986.652,34	28.980.434.804,12	51.002.945.946,63	122,09%
		Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	61.983.380,00	37.463.000,00	21.501.554,00	8.299.250,00	2.313.000,00	-53,92%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			3.999.000.000,00	9.199.000.000,00	20.980.000.000,00	9.750.000.000,00	12.707.438.953,00	58,73%
		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
		Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.999.000.000,00	9.199.000.000,00	20.980.000.000,00	9.750.000.000,00	12.707.438.953,000	58,73%
PEMBIAYAAN NETTO			55.785.405.402,85	-1.367.420.790,19	29.029.488.211,75	19.238.734.053,70	38.297.819.994,39	-565,01%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			9.539.705.427,18	52.881.801.236,34	52.881.801.236,34	61.296.471.781,63	63.184.161.122,58	118,33%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

Pembiayaan daerah mengalami tren fluktuatif dan cenderung naik dari tahun 2016 hingga 2020. Dari sisi penerimaan pembiayaan juga menunjukkan peningkatan pada akhir tahun dan sebagian besar bersumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu, dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah mengalami peningkatan yang digunakan untuk penyertaan modal daerah.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib disajikan oleh setiap pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan ekuitas suatu pemerintah daerah.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Manggarai pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp1,51 triliun yang kemudian naik sebesar 11,19 persen menjadi Rp 1,68 triliun pada tahun 2016. Pada tahun 2017, nilai total aset kembali meningkat sebesar 18,45 persen menjadi Rp1,99 triliun, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,10 persen menjadi Rp1,85 triliun dan tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 8,47 persen menjadi Rp2,01 triliun. Terakhir pada tahun 2020 nilai total aset daerah sebesar Rp1,81 triliun.

Nilai aset daerah mengalami fluktuasi karena beberapa faktor. Dari sisi aset lancar, naik turunnya kas disebabkan oleh penyerapan anggaran pada Perangkat Daerah sebagai akibat dari peluncuran dana dari pusat pada akhir periode tahun berjalan dan terjadi surplus. Dari sisi piutang, mengalami fluktuasi disebabkan oleh tingkat kemampuan pengurus jasa, baik wajib pajak

maupun retribusi, yang tidak stabil karena kondisi usaha dan juga karena adanya penundaan transfer dana bagi hasil. Dari sisi investasi jangka panjang, mengalami fluktuasi disebabkan oleh tingkat penyertaan modal pada BUMD disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dari sisi aset tetap, mengalami fluktuasi karena disesuaikan dengan tingkat transfer pusat seperti Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3. 5. Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2020 (Rupiah)

URAIAN		TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>ASET</b>							
	<b>ASET LANCAR</b>						
	Kas	58.491.902.528,35	8.749.286.747,68	52.040.503.647,34	28.562.556.410,12	50.250.589.284,63	110,14
	Kas di Kas Daerah	54.846.751.855,35	400.070.102,68	36.009.490.637,34	8.609.814.859,12	22.176.183.926,63	
	Kas di Bendahara Penerimaan	900,00	-	-	-		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	275.177.818,00	300.727.981,00	694.043.640,00	116.604.448,00	3.829.069,00	
	Kas di BLUD	1.441.554.346,00	2.829.018.028,00	8.725.490.797,00	11.607.521.202,00	21.696.290.238,00	
	Kas di FKTP	1.928.417.609,00	5.219.470.636,00	6.611.478.573,00	8.228.615.901,00	6.374.286.051,00	
	Kas Bos	-	2.264.417.750,00	841.417.589,00	860.359.769,00	11.046.882.497,00	
	Piutang	18.441.824.632,62	19.130.919.730,87	20.106.312.872,74	15.930.684.611,90	16.452.889.555,46	(2,16)
	Piutang Pendapatan	24.444.786.089,78	26.115.812.535,70	28.367.135.357,85	26.187.290.935,64	26.679.567.495,84	
	Piutang Lainnya			105.875.500,00	392.450.666,00	1.091.869.621,00	
	Penyisihan Piutang	(6.002.961.457,16)	(6.984.892.804,83)	(8.366.697.985,11)	(10.649.056.989,74)	(11.318.547.561,38)	
	Persediaan	10.653.502.803,00	8.746.022.849,10	14.331.392.411,50	13.762.854.301,80	14.027.158.247,61	10,98
	Persediaan	10.653.502.803,00	8.746.022.849,10	14.331.392.411,50	13.762.854.301,80	14.027.158.247,61	
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>87.587.229.963,97</b>	<b>38.890.647.077,65</b>	<b>87.319.626.520,58</b>	<b>59.116.455.092,82</b>	<b>91.777.519.584,70</b>	<b>22,97</b>
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
	Dana Bergulir	3.429.096.633,00	3.390.093.253,00	3.352.630.253,00	3.331.128.699,00	3.322.829.449,00	

URAIAN				TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
				2015	2016	2017	2018	2019	
			Penyisihan Investasi	(3.360.756.383,00)	(3.390.093.253,00)	(3.352.630.253,00)	(3.331.128.699,00)	(3.322.829.449,00)	
			Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	68.340.250,00	-	-	-	-	
			Investasi Jangka Panjang Permanen						
			Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	57.501.889.617,77	61.795.188.385,30	71.391.193.479,33	93.024.345.344,03	104.394.234.783,13	
			Investasi Permanen Lainnya						
			Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	57.501.889.617,77	61.795.188.385,30	71.391.193.479,33	93.024.345.344,03	104.394.234.783,13	
			<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>57.570.229.867,77</b>	<b>61.795.188.385,36</b>	<b>71.391.193.479,47</b>	<b>93.024.345.344,33</b>	<b>104.394.234.783,25</b>	<b>16,35</b>
			<b>ASET TETAP</b>						
			Tanah	178.383.538.052,00	192.121.196.956,00	301.858.919.467,67	280.714.711.377,67	282.110.208.107,67	
			Peralatan dan Mesin	162.479.056.476,63	220.418.441.625,00	250.133.969.462,00	271.451.269.641,00	303.160.516.838,00	
			Gedung dan Bangunan	379.645.913.917,31	436.745.612.156,79	452.929.036.352,15	661.971.956.021,15	709.452.951.925,15	
			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.015.036.345.625,10	1.258.740.982.885,95	1.386.238.038.642,33	1.548.915.805.906,73	1.652.662.022.171,99	
			Aset Tetap Lainnya	14.132.562.614,00	17.879.742.937,00	21.150.010.066,00	25.971.393.661,00	36.785.940.234,00	
			Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.744.308.145,04	24.955.574.022,34	34.814.824.695,66	38.729.176.730,26	46.101.954.258,00	

URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Akumulasi Penyusutan	(483.745.747.583,00)	(594.882.745.934,88)	(662.523.886.732,88)	(1.130.663.692.483,12)	(1.220.854.087.347,87)	
		<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.339.675.977.247,08</b>	<b>1.555.978.804.648,20</b>	<b>1.784.600.911.952,93</b>	<b>1.697.090.620.854,69</b>	<b>1.809.419.506.186,94</b>	<b>8,14</b>
		DANA CADANGAN						
		Dana Cadangan	1.741.971,00					
		<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>1.741.971,00</b>	-	-	-	-	-
		ASET LAINNYA						
		Tagihan Jangka Panjang	559.448.442,00	559.448.442,00	-	-	-	
		Aset Tidak Berwujud	-		-	738.808.000,00	992.738.428,00	
		Aset Lain-lain	32.663.325.290,75	30.694.856.488,75	56.084.740.413,25	7.551.855.370,51	8.320.105.639,63	
		<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>33.222.773.732,75</b>	<b>31.254.304.930,75</b>	<b>56.084.740.413,25</b>	<b>8.290.663.370,51</b>	<b>9.312.844.067,63</b>	<b>0,16</b>
		<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.518.057.952.782,57</b>	<b>1.687.918.945.041,90</b>	<b>1.999.396.472.366,09</b>	<b>1.857.522.084.662,05</b>	<b>2.014.904.104.622,40</b>	<b>7,75</b>
		<b>KEWAJIBAN</b>						
		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
		Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.006.181,00	1.473.999.070,50	120.000,00	-	1.000.000,00	
		Pendapatan Diterima Dimuka	-	1.291.512.569,00		-		
		Utang Beban	3.560.304.224,00	679.726.940,25	55.793.171,25	55.793.171,25	55.793.171,25	
		Utang Jangka Pendek Lainnya	679.872.864,25	11.007.927.152,00	1.065.300.316,00	84.955.701,00	93.449.383,00	
		<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>4.243.183.269,25</b>	<b>14.453.165.731,75</b>	<b>1.121.213.487,25</b>	<b>140.748.872,25</b>	<b>150.242.554,25</b>	<b>16,92</b>
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

URAIAN			TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
		Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
		<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>4.243.183.269,25</b>	<b>14.453.165.731,75</b>	<b>1.121.213.487,25</b>	<b>140.748.872,25</b>	<b>150.242.554,25</b>	<b>16,92</b>
		<b>EKUITAS</b>						
		EKUITAS	1.513.814.769.513,32	<b>1.673.465.779.310,15</b>	1.998.275.258.878,84	1.857.381.335.789,80	2.014.753.862.068,15	<b>7,84</b>
		<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.518.057.952.782,57</b>	<b>1.687.918.945.041,90</b>	<b>1.999.396.472.366,09</b>	<b>1.857.522.084.662,05</b>	<b>2.014.904.104.622,40</b>	<b>7,75</b>

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2019



### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu Kabupaten Manggarai. Analisis ini berfokus pada realisasi kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk pembangunan daerah ke depan.

#### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi penggunaan anggaran bertujuan untuk menyajikan data analisis mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, dan analisis pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran pada periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Manggarai.

##### 3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran (target), yang kemudian diperoleh tingkat realisasi belanja. Berikut ini adalah gambaran kinerja pelaksanaan belanja daerah.

**Tabel 3. 6. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016-2020**

URAIAN			2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
BELANJA			90,73%	93,02%	95,55%	95,41%	94,88%	94%
BELANJA OPERASI			90,34%	93,94%	95,28%	95,95%	94,50%	94%
		Belanja Pegawai	94,78%	95,80%	96,52%	96,28%	97,42%	96%
		Belanja Barang dan Jasa	84,57%	91,69%	93,51%	92,10%	83,69%	89%
		Belanja Hibah	93,99%	91,75%	99,64%	99,36%	97,92%	97%
		Belanja Bantuan Sosial	82,54%	100,00%	93,64%	99,46%	97,67%	95%

URAIAN			2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
		Belanja Bantuan Keuangan				100,00%	99,99%	40%
<b>BELANJA MODAL</b>			91,61%	90,49%	96,48%	93,63%	102,02%	95%
		Belanja Modal Tanah	99,28%	56,02%	100,00%	99,98%		89%
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,43%	87,00%	92,27%	86,00%	124,38%	96%
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90,68%	87,01%	95,48%	98,96%	96,77%	94%
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	93,69%	93,31%	98,04%	94,47%	96,22%	95%
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27,39%	99,64%	98,52%	72,61%	100,00%	80%
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			93,22%	93,27%	46,41%	84,87%	61,42%	76%
		Belanja Tak Terduga	93,22%	93,27%	46,41%	84,87%	61,42%	76%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

Secara umum proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Manggarai sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata penyerapan belanja sebesar 94 persen selama periode tahun 2016-2020. Kondisi ini terjadi karena adanya penyerapan yang tinggi di belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak terduga masih belum optimal karena hanya terserap sebesar 76 persen.

### 3.2.1.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan overhead cost bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah overhead cost pemerintah berada di berbagai pos belanja. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7. Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016-2020 (Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	317.347.939.509	294.513.437.983	295.434.830.211	308.986.724.178	309.009.858.162
2	Belanja Tambahan Penghasilan	5.295.128.000	5.358.731.706	4.956.677.500	9.292.737.500	18.856.295.800
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.273.900.000	3.784.000.000	3.875.000.000	4.972.375.000	4.933.875.000
4	Belanja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	909.191.302	922.013.678	1.008.986.522	1.060.555.958	628.459.397
5	Belanja Honorarium PNS	13.106.072.440	12.173.879.100	9.440.588.000	6.812.981.900	4.361.878.750
6	Belanja Uang Lembur	205.915.220	127.680.000	-	-	-
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	756.360.000	1.325.440.000	1.335.440.000	6.812.981.900	370.000.000
8	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	2.185.539.900	1.761.674.560	722.457.548	19.994.970	2.343.926.000
9	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai tertentu	13.146.262.795	10.819.146.420	9.878.301.100	11.525.938.867	7.736.752.025
10	Belanja pakaian Dinas dan Atributnya	742.378.990	462.592.500	499.767.000	369.145.355	558.658.497
11	Belanja Pakaian Kerja	620.722.100	574.274.000	52.325.000	91.650.000	6.000.000
12	Belanja Perjalanan Dinas	53.787.983.128	53.851.366.083	49.501.433.608	53.694.804.234	32.193.851.105
13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mebelair, Peralatan, dan Perlengkapan, dll)	52.452.949.852	42.652.454.364	35.939.346.247	46.654.146.067	50.450.607.268
	JUMLAH	462.830.343.236	428.326.690.394	412.645.152.736	450.294.035.929	431.450.162.004

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020

Secara umum realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami tren yang fluktuatif. Komponen pemenuhan kebutuhan aparatur masih didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur secara akumulasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 8. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manggarai, Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (A/B x100%)
		A	B	C
1	2016	462.830.343.236	964.705.835.952,00	47,98%
2	2017	428.326.690.394	887.170.049.259,00	48,28%
3	2018	412.645.152.736	930.049.031.010,00	44,37%
4	2019	450.294.035.929	1.197.092.937.347,00	37,62%
5	2020	431.450.162.004	1.155.220.855.754,13	37,35%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020*

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proporsi belanja aparatur yang paling tinggi berada pada tahun 2017, sementara paling rendah berada pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penghematan belanja aparatur sehingga belanja untuk pembangunan dan masyarakat mengalami peningkatan.

**3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Analisis pembiayaan digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan analisis sisa lebih pembayaran anggaran tahun berkenaan.

### **3.2.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil**

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan APBD ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis sumber penutup defisit riil Kabupaten Manggarai.

**Tabel 3. 9. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Pendapatan Daerah	1,068,340,708,429.33	1,111,538,011,520.66	1,097,948,217,140.78	1,229,400,675,074.51	1,167,399,757,930.08
	Dikurangi					
2	Belanja Daerah	960,706,835,952.00	877,971,049,259.00	909,069,031,010.00	1,187,342,937,347.00	1,142,513,416,801.13
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,999,000,000.00	9,199,000,000.00	20,980,000,000.00	9,750,000,000.00	12,707,438,953.00
<b>A</b>	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>103,634,872,477.33</b>	<b>224,367,962,261.66</b>	<b>167,899,186,130.78</b>	<b>32,307,737,727.51</b>	<b>12,178,902,175.95</b>
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	59,722,422,022.85	7,794,116,210.68	49,987,986,652.34	28,980,434,804.12	51,002,945,946.63
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	49,010,965.00	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	6,837,841,392.21	5,890,540,507.00	-
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>59,722,422,022.85</b>	<b>7,794,116,210.68</b>	<b>56,874,839,009.55</b>	<b>34,870,975,311.12</b>	<b>51,002,945,946.63</b>
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	163,357,294,500.18	232,162,078,472.34	224,774,025,140.33	67,178,713,038.63	63,181,848,122.58

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020*

Hasil perhitungan terhadap pembiayaan daerah menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Manggarai tidak mengalami defisit, melainkan surplus setiap tahun. Surplus yang terjadi dalam APBD mengalami penurunan setiap tahun. Surplus APBD tersebut perlu dianalisis lebih jauh mengenai penyebabnya, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penyusunan APBD periode akan datang.

### 3.2.2.2. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah tabel sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

**Tabel 3. 10. Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo kas neraca daerah	58,491,902,528.35	8,749,286,747.74	52,040,503,739.74	28,562,556,408.86	50,250,589,286.11
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	3,006,181.00	1,473,999,070.50	120,000.00	-	1,000,000.00
3	Kegiatan lanjutan					
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	58,488,896,347.35	7,275,287,677.24	52,040,383,739.74	28,562,556,408.86	50,249,589,286.11

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020*

Dalam konteks penyusunan APBD, angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Namun, pada realisasinya daerah sering kali mengalami sisa lebih pembiayaan karena penyerapan anggaran yang kurang optimal atau perencanaan yang kurang akurat. Hasil analisis terhadap sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan Kabupaten Manggarai menunjukkan tren fluktuatif, namun meningkat pada tahun 2020. Hal ini Disebabkan Karena Apbd Kabupaten Manggarai Mengalami Surplus.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan terdiri dari proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta perhitungan kerangka pendanaan. Kedua hal ini menjadi dasar bagi penentuan pagu indikatif untuk masing-masing program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Berikut adalah gambaran mengenai kedua hal tersebut:

#### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2022-2026 dilakukan dengan metode proyeksi gabungan terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan menggunakan justifikasi tim ahli secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Pendapatan daerah Kabupaten Manggarai diproyeksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,86 persen pada tahun 2022-2026. Pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah maupun nasional hingga tahun 2022. Kondisi tersebut akan berdampak pada potensi pendapatan daerah baik yang berasal dari Kabupaten Manggarai, yaitu berupa PAD, maupun yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu berupa dana transfer. Secara umum, sumber pendapatan terbesar Kabupaten Manggarai berasal dari PAD dengan rata-rata proporsi mencapai 3,40 persen, diikuti pendapatan transfer sebesar 2,95, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu sebesar -0,40 persen selama periode 2022-2026.

Peningkatan PAD yang lebih tinggi dari komponen pendapatan daerah lain terjadi karena adanya intervensi yang signifikan dari pemerintah daerah kabupaten manggarai. Intervensi tersebut melalui adanya kebijakan pembentukan PD yang mengurus PAD sendiri, yaitu melalui Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya masih satu dengan Badan Pengelola Keuangan



Daerah. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat mendorong kinerja daerah dalam menggali, menemukan dan menginventarisir potensi pendapatan daerah yang sebelumnya belum teridentifikasi. Program pengelolaan pendapatan daerah akan didorong untuk meningkatkan PAD baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Efektifitas penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah akan terus ditingkatkan guna mempermudah proses pelayanan dan menarik masyarakat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Manggarai didasarkan pada kondisi pendapatan daerah yang dilihat dari pertumbuhan pendapatan daerah serta prioritas belanja daerah. Belanja daerah diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar -0,88 persen. Pertumbuhan terjadi karena adanya penurunan alokasi anggaran dalam belanja modal terutama pada tahun 2024 hingga 2026. Meskipun demikian, pada tahun 2022 hingga 2023, pertumbuhan belanja modal mengalami peningkatan sangat signifikan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kebijakan umum daerah dalam pengelolaan keuangan selama tahun 2022 dan 2023 dilakukan secara ekspansif atau kebijakan ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur. Selain itu, pada tahun 2022 hingga 2023 juga adanya fokus untuk mengantisipasi masalah Covid-19.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Manggarai dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 11. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026

Kode Akun	Uraian	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2022	2023	2024	2025	2026	
4	PENDAPATAN	1.215.380.078.426	1.251.562.372.345	1.293.030.822.035	1.329.997.589.796	1.365.064.409.017	5,17
4.1	Pendapatan Asli Daerah	117.352.566.220	121.016.129.177	129.796.313.819	133.902.577.193	138.433.590.476	4,23
4.1.01	Pajak daerah	29.765.735.647	30.411.457.693	36.173.801.424	37.262.223.887	38.775.396.259	7,05
4.1.02	Retribusi daerah	13.828.636.356	14.246.477.267	14.664.318.178	15.082.159.089	15.500.000.000	2,89
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.600.000.000	12.200.000.000	14.800.000.000	17.400.000.000	20.000.000.000	20,23
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	64.158.194.217	64.158.194.217	64.158.194.217	64.158.194.217	64.158.194.217	-
4.2	Pendapatan Transfer	1.043.216.112.206	1.075.734.843.168	1.108.423.108.216	1.141.283.612.603	1.171.819.418.541	2,95
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.018.718.969.349	1.050.747.757.454	1.082.936.280.788	1.115.287.048.626	1.147.802.611.818	3,03
4.2.01.01	Dana Perimbangan	852.762.501.969	881.472.160.727	910.275.172.127	939.172.717.791	968.165.994.366	3,22
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	10.583.259.046	10.765.291.101	10.950.454.108	11.138.801.919	11.330.389.312	1,72
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	577.418.809.275	584.636.544.390	591.944.501.195	599.343.807.460	606.835.605.054	1,25
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus	264.760.433.648	286.070.325.236	307.380.216.824	328.690.108.412	350.000.000.000	7,23
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	15.439.209.600	15.747.993.792	16.062.953.667	16.384.212.741	16.711.896.996	2,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	
4.2.01.05	Dana Desa	150.517.257.780	153.527.602.935	156.598.154.994	159.730.118.094	162.924.720.456	2,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	24.497.142.857	24.987.085.714	25.486.827.428	25.996.563.977	24.016.806.723	-0,40
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	54.811.400.000	54.811.400.000	54.811.400.000	54.811.400.000	54.811.400.000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	54.811.400.000	54.811.400.000	54.811.400.000	54.811.400.000	54.811.400.000	-
5	BELANJA DAERAH	1.345.390.078.426	1.381.572.372.345	1.283.040.822.035	1.290.007.589.796	1.295.074.409.017	-0,88
5.1	Belanja operasi	782.161.894.796	791.842.260.351	791.544.046.877	806.815.696.002	818.645.916.388	1,15
5.1.01	Belanja Pegawai	426.868.373.194	432.036.362.926	435.411.817.462	443.031.524.268	449.676.997.132	1,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.257.978.560	291.199.998.953	292.450.271.958	293.425.275.702	311.633.152.719	2,00

Kode Akun	Uraian	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2022	2023	2024	2025	2026	
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	9.595.119.000	9.595.119.000	-
5.1.04	Belanja Hibah	57.035.543.042	58.605.898.472	58.681.957.457	58.763.777.032	45.740.647.537	-4,78
5.1.05	Belanja Sosial	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-0,88
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>327.632.537.491</b>	<b>349.607.674.882</b>	<b>255.752.810.228</b>	<b>245.951.694.576</b>	<b>240.102.414.110</b>	-6,59
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	-30,00
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>225.595.646.139</b>	<b>230.122.437.111</b>	<b>230.743.964.930</b>	<b>232.240.199.219</b>	<b>234.826.078.519</b>	1,01
	Defisit/Surplus	(130.010.000.000)	(130.010.000.000)	9.990.000.000	39.990.000.000	69.990.000.000	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>130.010.000.000</b>	<b>130.010.000.000</b>	<b>(9.990.000.000)</b>	<b>(39.990.000.000)</b>	<b>(69.990.000.000)</b>	
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	150.010.000.000	150.010.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
6.1.01	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	-	-	-	
6.1.02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
6.1.03	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	-	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	40.000.000.000	70.000.000.000	
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	-	-	-	30.000.000.000	60.000.000.000	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	130.010.000.000	130.010.000.000	(9.990.000.000)	(39.990.000.000)	(69.990.000.000)	
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	-	-	-	-	-	

Sumber: Hasil Proyeksi Pemerintah Kabupaten Manggarai, 2021

APBD Kabupaten Manggarai diproyeksikan akan mengalami defisit pada tahun 2022 dan 2023, sementara pada tahun 2024 hingga 2026 mengalami surplus. Defisit ini terjadi karena adanya kebijakan ekspensif untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit ini kemudian rencananya akan ditutup oleh sumber keuangan yang berasal dari SiLPA dan Penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan surplus anggaran yang terjadi nantinya digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kepada perusahaan milik daerah sebagai bentuk penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat mendatangkan tambahan penerimaan di masa datang. Penyertaan modal tersebut terdiri dari penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank NTT sebesar Rp 10 milyar setiap tahunnya pada tahun 2022-2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai juga melakukan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp 10 milyar setiap tahunnya hingga tahun 2026.

### **3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja periodik wajib mengikat dan prioritas utama serta program pembangunan jangka menengah daerah. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan proyeksi pendapatan daerah, pencairan dana cadangan jika ada, dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran sehingga didapatkan total penerimaan riil. Selanjutnya, total penerimaan tersebut dikurangi dengan belanja operasi yang bersifat mengikat dan pengeluaran pembiayaan sehingga didapatkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3. 12. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	1.215.380.078.426	1.251.562.372.345	1.293.030.822.035	1.329.997.589.796	1.365.064.409.017
2	Penerimaan Pembiayaan	150.010.000.000	150.010.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>1.365.390.078.426</b>	<b>1.401.572.372.345</b>	<b>1.293.040.822.035</b>	<b>1.330.007.589.796</b>	<b>1.365.074.409.017</b>
	Dikurangi					
3	Jumlah Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	764.847.596,741	778.279.951.112	758.386.244.720	766.178.269.028	777.263.410.675
	<b>Kapasitas rill kemampuan keuangan daerah</b>	<b>600.542.481.685</b>	<b>623.292.421.233</b>	<b>534.654.577.315</b>	<b>563.829.320.768</b>	<b>587.810.998.342</b>

Sumber: Hasil Proyeksi Pemerintah Kabupaten Manggarai, 2021

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menyebabkan adanya perubahan format pendapatan dan belanja pada APBD sehingga perhitungan kapasitas riil keuangan daerah tidak lagi berdasarkan hasil pengurangan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai menggunakan belanja pegawai, belanja operasional rutin, belanja transfer, dan belanja bunga sebagai pengurang total penerimaan karena belanja-belanja tersebut sifatnya mengikat dan wajib untuk dikeluarkan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tabel 3.12 menggambarkan jumlah anggaran yang tersedia yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja program pembangunan daerah di luar belanja wajib dan mengikat seperti belanja pemenuhan pelayanan dasar, visi misi Kepala Daerah dan urusan penunjang lainnya.

**Tabel 3. 13. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026 (Juta Rupiah)**

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	1.365.390.078.426	1.401.572.372.345	1.293.040.822.035	1.330.007.589.796	1.365.074.409.017
Prioritas I	764.847.596,741	778.279.951.112	758.386.244.720	766.178.269.028	777.263.410.675
Prioritas II dan III	600.542.481.685	623.292.421.233	534.654.577.315	563.829.320.768	587.810.998.342

Kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Manggarai pada tabel 3.13 merupakan total penerimaan daerah yang dapat didistribusikan untuk mendanai seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah. penggunaan kapasitas riil keuangan tersebut dialokasikan ke dalam tiga prioritas, yaitu:

- 1) Prioritas I, dialokasikan untuk membiaya belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.
- 2) Prioritas II dan III, dialokasikan untuk belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar, pemenuhan visi misi Kepala Daerah, dan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

## BAB IV

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Penyusunan Bab IV dilakukan dengan menganalisis Bab II yang memuat gambaran umum kondisi daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara target yang ditentukan dalam perencanaan dengan realisasi di lapangan. Adanya masalah pembangunan daerah kemudian dielaborasi dengan mempertimbangkan berbagai lingkungan strategis lainnya. Beberapa lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain adalah isu internasional, nasional, provinsi dan daerah sekitar Kabupaten Manggarai. Penjabaran permasalahan di setiap urusan pembangunan dengan lingkungan strategis menjadi dasar bagi perumusan isu strategis Kabupaten Manggarai yang kemudian harus diintervensi pada periode pembangunan 2021-2026. Pada tahapan selanjutnya, perumusan isu strategis ini akan menjadi dasar perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026.

### 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan yang terjadi antara realisasi dengan target yang direncanakan. Sebagaimana penjabaran yang dimuat dalam Bab II, kinerja pembangunan Kabupaten Manggarai sudah cukup baik, ditandai dengan tercapainya beberapa target indikator. Namun demikian, masih terdapat beberapa capaian yang masih belum memenuhi target. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang kemudian dirumuskan dalam sebuah pemetaan masalah yang disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini,

permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level permasalahan yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pada tahap selanjutnya, klasifikasi permasalahan ini akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

**4.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar**

Perumusan isu strategis mempertimbangkan aspek capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar sebagai basis utama dalam analisisnya. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Berikut merupakan gambaran permasalahan pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar.

**4.1.1.1. Pendidikan**

Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai masih menjadi masalah pokok pada urusan pendidikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa masalah seperti belum optimalnya penyelenggaraan PAUD, belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, serta masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa permasalahan tersebut berimplikasi terhadap kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai. Berikut adalah rincian masalah dan akar masalah pada urusan pendidikan:

**Tabel 4. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Belum optimalnya penyelenggaraan PAUD	Belum meratanya pembangunan unit sekolah baru khusus PAUD Formal
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pendidikan PAUD
		Masih terbatasnya kualitas guru dan pengelola PAUD



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum memadainya sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP	Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD
		Terbatasnya ruang kelas baru (RKB)
		Masih terbatasnya sarana pendukung pembelajaran
	Masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Masih banyaknya ruang kelas dalam kondisi rusak
		Belum optimalnya pengembangan keprofesian guru
		Masih rendahnya ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi standar
		Masih rendahnya guru yang tersertifikasi
		Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan
	Masih rendahnya daya saing siswa	Masih rendahnya kompetensi siswa
	Belum optimalnya tata kelola pendidikan	Belum optimalnya sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendidikan
		Belum optimalnya monitoring pengelolaan sistem pendidikan
		Masih banyaknya sekolah yang belum terakreditasi

#### 4.1.1.2. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan di Kabupaten Manggarai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti masih tingginya angka kematian ibu yang disebabkan kasus pendarahan sebagai penyebab utama dengan persentase mencapai 48,6% dari total jumlah kematian ibu, angka kematian bayi yang disebabkan oleh kasus asfiksia sebagai penyebab utama dengan persentase mencapai 21,9%, kondisi gizi masyarakat yang masih kurang, serta pelayanan kesehatan yang lainnya. Selain itu, isu pengentasan stunting yang saat ini menjadi program nasional turut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Angka stunting di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020 masih mencapai 5322 kasus. Kondisi tersebut masih tergolong tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan kesehatan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 4. 2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB)	Masih tingginya kondisi ibu hamil dengan status gizi kurang energi kronis (KEK) (Eclampsia, infeksi)
		Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan
		Belum optimalnya penanganan pada ibu hamil
		Masih tingginya BBLR
	Masih rendahnya status gizi masyarakat	Belum optimalnya pelaksanaan PMT
		Belum optimalnya kebun gizi
		Masih rendahnya pemahaman terhadap pemenuhan gizi
	Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular di masyarakat	Rendahnya pemenuhan gizi
		Rendahnya daya tahan tubuh
		Masih rendahnya perilaku hidup bersih masyarakat, terutama dalam menjalankan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang Berkesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (STBM GESI)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya penanganan ODGJ	Belum optimalnya SDM yang menangani ODGJ
		Belum optimalnya sarana pendukung pelayanan
	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas kesehatan	Masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan
		Belum optimalnya fasilitas kesehatan
	Belum optimalnya pengawasan obat dan makanan	belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan layak higienitas
		Masih rendahnya restoran bersertifikat higienis
	Masih banyak ditemukan makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa	Masih rendahnya pengawasan ke warung/kios/distributor
	Belum optimalnya pelaksanaan program JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	belum optimalnya peran pengelola JKN di FKTP

#### 4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai merupakan salah satu masalah pokok dalam kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Kualitas infrastruktur dasar yang belum optimal menunjukkan masih perlunya intervensi dalam meningkatkan kualitas jaringan jalan, jaringan irigasi, dan drainase. Data tahun 2020 menyebutkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 54,50% (1038 km). Pencapaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 67,55%, dengan tingkat capaian sebesar 80,68%. Di sisi lain, kondisi jalan rusak ringan yakni 8,97% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 33,28%. Masalah pokok lainnya yaitu belum optimalnya pengelolaan sumber daya air, masalah pokok terkait tata ruang, dan manajemen kebencanaan. Berikut

merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

**Tabel 4. 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas infrastruktur daerah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan utilitasnya
		Belum meratanya pembangunan jalan
		Pengawasan konstruksi jalan dan jembatan belum optimal
		Ketersediaan jembatan masih minim
		Rendahnya rehabilitasi jalan dan jembatan
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase	belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase
		Masih kurangnya ketersediaan jaringan drainase
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan drainase
	Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung pertanian yang belum optimal	Belum optimalnya pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer
		Belum optimalnya pembangunan jaringan irigasi primer
	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas jaringan air minum	Masih terbatasnya jaringan perpipaan air bersih
		Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan perpipaan air bersih
		Masih rendahnya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
	Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan IPAL
		Belum optimalnya pembangunan sanitasi yang menjamin akses dan partisipasi semua kelompok/ Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)
	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan,	Perencanaan Perda Tata Ruang belum optimal.
		Belum tersedianya dokumen RDTR

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Masih kurangnya pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kabupaten
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda tata ruang belum optimal
		Penyusunan program sektoral belum mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan
	Belum memadainya ketersediaan bangunan pengendali bencana	Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penahan erosi, abrasi, banjir

#### 4.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Manggarai menghadapi masalah pokok terkait belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni. Data rasio rumah layak huni tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan adanya peningkatan dari 74,49% (2016) menjadi 88,75% (2020). Belum optimalnya pendataan jumlah rumah layak huni dan ketersediaan data prasarana dan sarana utilitas umum menjadikan salah satu akar masalah dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Berikut ini merupakan tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

**Tabel 4. 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni	Masih rendahnya akses RLH	Belum optimalnya pendataan RTLH
		Kurangnya pembinaan dan sosialisasi rumah layak huni kepada masyarakat
		Belum optimalnya fasilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (pembangunan)
		Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman terpadu
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh
		Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
		Kurangnya pemberian rekomendasi pengembangan perumahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya ketersediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dan perumahan	Masih terbatasnya ketersediaan data PSU di kawasan kumuh
		Masih kurangnya ketersediaan sanitasi layak
		Belum optimalnya kualitas jalan lingkungan di kawasan permukiman
		Belum optimalnya ketersediaan jaringan drainase lingkungan
		Masih rendahnya rumah tangga yang teraliri listrik
		Kurangnya unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum
		Rendahnya pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman

#### 4.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), masih adanya gangguan terhadap kohesivitas sosial, dan masih tingginya resiko bencana merupakan tiga masalah pokok yang dihadapi urusan keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Manggarai. Jumlah tertinggi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP dalam kurun waktu 2016-2020 terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 84 kasus. Persoalan ini berdampak pada pembangunan daerah. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

**Tabel 4. 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Minimnya penegakan Perda	Belum optimalnya sosialisasi Perda
		Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Perda
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan Perda
		Belum optimalnya kapasitas anggota Satpol-PP

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya penanganan kebakaran	Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait
		Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebakaran
		Rendahnya waktu tanggap penanganan kebakaran
		Belum optimalnya kapasitas pemadam kebakaran
Masih adanya gangguan terhadap kohesivitas sosial	Masih adanya potensi konflik sosial	Belum optimalnya kemampuan deteksi dini konflik sosial
		Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan
		Rendahnya peran lembaga adat dan desa
		Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan
		Tingginya penyakit masyarakat
	Belum optimalnya pembinaan terhadap ormas dan orpol	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat
Masih tingginya resiko bencana	Belum optimalnya upaya Mitigasi Bencana	Belum optimalnya keberadaan Desa Tangguh Bencana
		Kurangnya penyebarluasan informasi tentang ancaman, potensi dan dampak bencana
		Kurangnya gladi/simulasi dalam upaya pengurangan risiko bencana
		Belum memadainya kapasitas SDM penanggulangan bencana baik petugas maupun kelompok masyarakat
		Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana
		Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Peringatan Dini di daerah Rawan Bencana
		Kurangnya pembentukan relawan tangguh bencana
		Belum optimalnya upaya penanganan pasca bencana

4.1.1.6. Sosial

Urusan sosial adalah salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Masih rendahnya kesejahteraan sosial menjadi masalah pokok urusan sosial di Kabupaten Manggarai. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2018 sebesar 69%. Persentase tersebut sempat naik menjadi 77% pada tahun 2019, namun kembali turun menjadi 69% pada tahun 2020. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan sosial.

Tabel 4. 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kesejahteraan sosial	Belum optimalnya penanganan PMKS terutama fakir miskin	Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data PMKS
		Belum optimalnya pelayanan sosial dasar
		Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan sosial
		Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan
		Belum optimalnya keberdayaan sosial
	Belum optimalnya kualitas pelayanan sosial	Rendahnya kualitas pekerja sosial
		Rendahnya cakupan pelayanan PMKS

4.1.2. Layanan Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-pelayanan dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, dan perpustakaan. Berikut adalah rincian permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai di bidang urusan wajib non-pelayanan dasar.



4.1.2.1. Tenaga Kerja

Tingginya pengangguran merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor tenaga kerja. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor tenaga kerja:

Tabel 4. 7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya pengangguran	Tingkat kesempatan kerja masih kurang	Kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih rendah
		Informasi tentang kebutuhan tenaga kerja belum ada
	Konflik/ kasus hubungan industrial masih tinggi	Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial masih kurang

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak merupakan masalah pokok urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Manggarai menunjukkan kenaikan dari 87,38 pada tahun 2017 menjadi 88,16 pada tahun 2019. Namun demikian, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak justru mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2017 menjadi 48,39% pada tahun 2019. Persoalan ini berdampak pada keberdayaan masyarakat. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 4. 8. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak	Belum optimalnya peran perempuan dalam politik	Rendahnya kapasitas SDM perempuan
		Rendahnya minat perempuan dalam politik
		Belum optimalnya pengarusutamaan gender
		Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya fasilitas pendampingan terhadap perempuan dan anak
		Belum optimalnya peran lembaga perlindungan perempuan dan anak
		Belum optimalnya pelaksanaan desa layak anak

#### 4.1.2.3. Pangan

Ketahanan pangan yang belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pangan. Persoalan ini berdampak pada laju inflasi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pangan:

**Tabel 4. 9. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pangan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketahanan pangan belum optimal	Ketersediaan pangan belum optimal	Belum otimalnya stok cadangan pangan
	Belum optimalnya keterjangkauan pangan	Belum optimalnya fungsi lumbung pangan
	Belum optimalnya pemanfaatan pangan	Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal
		Konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan belum optimal

#### 4.1.2.4. Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Manggarai masih menghadapi permasalahan pokok yaitu konflik terhadap kepemilikan lahan. Permasalahan tersebut disebabkan karena belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan dan regulasi tanah ulayat, ketersediaan data yang valid terkait kepemilikan lahan masyarakat, dan belum adanya penetapan tanah ulayat. Menurut data Kabupaten Manggarai dalam Angka (2020), jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan tahun 2016 yaitu 44.785; tahun 2017 dengan jumlah 45.469; tahun 2018 sebanyak 54.058; dan tahun 2019 sebanyak 59.072. Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya konflik terhadap kepemilikan lahan	Rendahnya proses penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	Belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan
		Belum adanya data terkait kepemilikan lahan masyarakat yang belum tersertifikat dan bersertifikat
	Masih adanya perselisihan tanah atas dasar hak ulayat	Belum adanya penetapan tanah ulayat
		Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penetapan tanah ulayat

**4.1.2.5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai yaitu belum optimalnya kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup tersebut terdiri dari parameter kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Data indeks kualitas air yang tersedia yakni di tahun 2018 sebesar 60 kemudian meningkat menjadi 70 di tahun 2020. Berbeda dengan kualitas udara yang justru turun dari 89,71 di tahun 2018 menjadi 87,87 pada tahun 2020. Indeks tutupan lahan mengalami fluktuatif dalam tiga tahun terakhir yaitu 80,36 tahun 2018, turun menjadi 78,76 di tahun 2019, kemudian naik menjadi 85,32 pada tahun 2020. Secara umum berdasarkan data pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai perlu ditingkatkan. Selain itu terdapat permasalahan mengenai belum optimalnya pengelolaan persampahan. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan lingkungan hidup.

**Tabel 4. 11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Kualitas air belum optimal	Masih adanya pencemaran limbah domestik (rumah tangga)
		Tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih minimnya pengelolaan limbah pelaku usaha atau kegiatan
		Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
		Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah
		Konservasi mata air belum optimal
		Minimnya peralatan laboratorium lingkungan
	Menurunnya kualitas udara	Peningkatan gas emisi kendaraan
		Belum adanya alat ukur kualitas udara
	Kualitas tutupan lahan belum optimal	Tingginya alih fungsi lahan
		Belum adanya regulasi terkait pelanggaran lingkungan hidup
		Terbatasnya ketersediaan RTH publik perkotaan
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA
		Keterbatasan lahan untuk pengadaan TPA baru
		Kurangnya ketersediaan sarana pengangkut sampah
		Belum adanya TPS
		Belum adanya proses 3R dalam pengelolaan sampah
		Belum adanya penanganan sampah berbasis komunitas (bank sampah)
		Peningkatan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

#### 4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang terkait dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan untuk menentukan arah pembangunan di suatu daerah. Belum optimalnya kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai menjadi masalah pokok yang

harus diselesaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, masih terbatasnya akses jangkauan masyarakat terhadap pelayanan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang masih terbatas. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 4. 12. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan dokumen	Belum memadainya sarana dan prasarana
		Belum berjalannya SOP pelayanan
		masih rendahnya kualitas SDM
	Masih terbatasnya jangkauan akses pelayanan di tengah masyarakat	Belum adanya operator SIAK di kecamatan
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat	belum optimalnya sosialisasi terkait pentingnya dokumen pelayanan

**4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Masih rendahnya tingkat kemandirian desa merupakan masalah pokok yang dihadapi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Manggarai. Desa di Kabupaten Manggarai hingga tahun 2020 belum ada yang masuk kategori Desa Mandiri. Sebagian besar Desa masih berstatus Desa Tertinggal dan Desa Berkembang. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Tabel 4. 13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya tingkat kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya peranan aparatur pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa
		Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan pelaporan desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa
		Belum optimalnya peran pendamping desa
		Belum optimalnya kualitas pelayanan pemerintahan desa
	Belum optimalnya pengelolaan potensi desa	Belum optimalnya pengelolaan potensi BUMDesa
		Belum optimalnya partisipasi pembangunan desa
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna
		Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan
		Belum optimalnya peran PKK

#### 4.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, mengendalikan kelahiran anak, dan menekan angka kematian ibu. Masalah pokok yang dihadapi terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah belum optimalnya penyelenggaraan program KB. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cakupan pelayanan yang masih terbatas serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB. Berikut adalah rumusan permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB):

**Tabel 4. 14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan program KB	Masih rendahnya cakupan layanan KB	Masih rendahnya kompetensi dan ketersediaan PKB dan PLKB dalam melaksanakan pendampingan kepada sasaran KB
		Kebutuhan pelayanan kontrasepsi yang tidak terpenuhi
		Belum optimalnya cakupan peserta KB aktif
		Belum optimalnya KIE

4.1.2.9. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Manggarai dihadapkan pada masalah pokok terkait belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan perhubungan adalah pengelolaan parkir, pelayanan angkutan umum, kualitas pelayanan perhubungan darat, dan pelayanan kelaikan angkutan jalan. Terkait kualitas pelayanan perhubungan darat misalnya data tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa pemasangan rambu lalu lintas belum optimal yakni 20% ditahun 2016; 5,1% ditahun 2017; dan dalam 3 tahun terakhir yakni 2018 hingga 2020 tidak terdapat pemasangan rambu lalu lintas. Data terkait perlengkapan jalan terutama penerangan jalan juga masih sangat terbatas. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya pengelolaan parkir	Belum Optimalnya Penataan dan Pengelolaan Lahan Parkir
		Belum memadainya kapasitas SDM pengelola parkir
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana parkir yang memadai
	Belum optimalnya layanan transportasi umum	Belum optimalnya penataan trayek angkutan umum
		Masih kurangnya trayek angkutan umum
		Adanya alih fungsi terminal
	Belum Optimalnya kelaikan angkutan umum	Belum memadainya peralatan pengujian kendaraan sesuai standar akreditasi
		Belum memadainya kualifikasi SDM dalam bidang Perhubungan
	Belum optimalnya upaya pengendalian volume kendaraan pada ruas rawan kemacetan	Belum tersedianya dokumen andalalin (analisis dampak lalu lintas); tatralok (tataran transportasi lokal); serta manajemen dan rekayasa lalu lintas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sungai	Kurangnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas
		Minimnya ketersediaan perlengkapan jalan terutama penerangan jalan
		Ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan belum optimal
		Masih kurangnya pemeliharaan fasilitas perhubungan
		Belum optimalnya pengelolaan terminal
		Belum optimalnya pengawasan jalur sungai
		Belum optimalnya pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal
		Kurangnya pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat
		Belum optimalnya kualitas tenaga bidang pelayaran
	Belum optimalnya penyelenggaraan penertiban lalu lintas	Rendahnya ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan muatan maksimal

**4.1.2.10. Komunikasi dan Informatika**

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Manggarai dihadapkan pada masalah pokok terkait minimnya akses informasi publik dan belum optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik. Belum optimalnya pendataan terkait wilayah terjangkau jaringan telekomunikasi merupakan salah satu akar masalah yang berpengaruh terhadap belum optimalnya layanan informasi publik. Terkait integrasi layanan pemerintah, data tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan masih rendahnya perangkat daerah yang terfasilitasi perangkat *e-government* yakni 9,76% ditahun 2017 dan tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan komunikasi dan informatika.



**Tabel 4. 16. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih minimnya akses informasi publik	Belum optimalnya layanan informasi publik	Kurang optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
		Belum maksimalnya jangkauan siaran LPPL RSPD
		Belum optimalnya pengembangan KIM
		Masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi
		Belum optimalnya pengembangan jaringan telekomunikasi di kecamatan
		Peningkatan PPID di tingkat OPD
Belum optimalnya integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya tata kelola TIK	Belum memadainya kapasitas SDM TIK
		Masih terbatasnya peraturan tentang TIK
		Belum optimalnya ketersediaan dokumen pendukung TIK
		Belum adanya master plan/ grand desain system pemerintahan berbasis elektronik
		Belum ada master plan Smart City
		Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi
		Belum adanya penetapan kebijakan tata kelola keamanan sistim informasi daerah
	Masih terbatasnya infrastruktur teknologi dan informasi	belum adanya data center (pusat data) yang terintegrasi

4.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor koperasi dan UKM. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor koperasi dan UKM:

Tabel 4. 17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Rendahnya kapasitas manajerial koperasi	Rendahnya kapasitas SDM pengurus koperasi
		Belum optimalnya pengawasan koperasi
	Menurunnya omzet usaha kecil	Kapasitas produksi usaha kecil belum optimal
		Kapasitas pemasaran usaha kecil belum optimal

4.1.2.12. Penanaman Modal

Rendahnya realisasi investasi merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor penanaman modal. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor penanaman modal:

Tabel 4. 18. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya realisasi nilai investasi	Kurangnya minat berinvestasi	Belum optimalnya identifikasi potensi investasi
		Kurangnya promosi potensi investasi
		Kurangnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara online (LKPM online)
	Belum optimalnya kualitas perizinan	Kapasitas SDM belum memadai
		Sarana dan prasarana belum memadai

4.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Kualitas pemuda dan olahraga merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia di suatu daerah. belum optimalnya sinergitas kepemudaan dan keolahragaan dalam proses pembangunan daerah menjadi masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dukungan pemerintah terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan yang belum optimal. Hal tersebut diperkuat dengan belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Manggarai:

Tabel 4. 19. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sinergitas kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan	Belum optimalnya dukungan terhadap organisasi kepemudaan	Belum optimalnya sosialisasi terkait organisasi kepemudaan
		Belum optimalnya organisasi kepramukaan
	Belum optimalnya dukungan terhadap keolahragaan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung olahraga
		Masih rendahnya kapasitas pelatih
		Belum optimalnya sertifikasi pelatih
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan olahraga daerah
		Belum optimalnya pembinaan minat dan bakat keolahragaan

4.1.2.14. Statistik

Dalam perencanaan pembangunan, statistik merupakan komponen krusial yang menjadi sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Data yang berkualitas serta informasi yang terpercaya dan mudah diakses adalah kunci keberhasilan pembangunan. Statistik menjadi sumber informasi

mengenai kondisi khusus di suatu wilayah yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat membantu proses perumusan masalah, penentuan kebijakan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam urusan statistik. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan statistik Kabupaten Manggarai:

**Tabel 4. 20. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas statistik daerah	Integrasi database daerah belum optimal	Pemetaan, identifikasi, pemenuhan data, dan validasi belum optimal
		Sinergitas forum data/informasi statistik sektoral belum optimal

Penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Manggarai masih terkendala masalah kualitas statistik daerah. Permasalahan integrasi database serta akses terhadap data-data penyelenggaraan pemerintahan daerah yang valid masih menjadi persoalan utama dalam kinerja urusan statistik.

**4.1.2.15. Persandian**

Urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelaksanaan urusan persandian belum menunjukkan progress yang signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah belum optimalnya layanan persandian karena sistem dan manajemen penggunaan persandiaan yang masih belum memadai. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan persandian.

**Tabel 4. 21. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persandian**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan persandian	Prosedur penggunaan persandian masih belum optimal	Kurangnya SDM yang memadai bidang persandian
		Kurangnya sarana dan prasarana bidang persandian

4.1.2.16. Kebudayaan

Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan merupakan masalah pokok urusan kebudayaan di Kabupaten Manggarai. Persoalan ini berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan kebudayaan.

Tabel 4. 22. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan	Pelestarian budaya belum optimal	Penelitian mengenai potensi/ perkembangan budaya belum memadai
		Perencanaan pelestarian budaya belum optimal
		Perlindungan budaya belum optimal
		Pemeliharaan situs-situs budaya belum optimal
		Pemanfaatan budaya belum memadai
		Pengawasan berbagai jenis budaya belum optimal

4.1.2.17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki andil besar terhadap kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai salah satu pusat pembelajaran masyarakat. Peran perpustakaan turut berkontribusi terhadap kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. masalah pokok yang dihadapi terkait urusan perpustakaan adalah masih rendahnya budaya baca masyarakat. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh belum optimalnya layanan perpustakaan, serta minat baca masyarakat yang masih rendah. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan perpustakaan di Kabupaten Manggarai:

Tabel 4. 23. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya budaya baca masyarakat	Belum optimalnya cakupan layanan perpustakaan	Belum adanya layanan perpustakaan online
		Masih terbatasnya fungsi perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pembinaan perpustakaan
		Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling
		Masih terbatasnya SDM pengelola Perpustakaan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang perpustakaan
	Masih rendahnya minat baca masyarakat	Masih kurangnya koleksi buku bacaan sesuai kebutuhan
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan membaca

#### 4.1.2.18. Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Kinerja layanan kearsipan di suatu daerah dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase OPD yang mengelola arsip secara baku. Belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan guna mencapai target indikator tersebut. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kearsipan di Kabupaten Manggarai:

**Tabel 4. 24. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah	Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah	Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah
		Belum adanya SOP terkait penghapusan arsip daerah
		Belum tersedianya tenaga arsiparis
		Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang penyimpanan arsip daerah yang memadai
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola arsip

4.1.3.     **Urusan Pilihan**

Urusan pilihan secara umum berkaitan dengan potensi atau sektor unggulan suatu daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai di bidang urusan pilihan:

4.1.3.1.   **Perikanan**

Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perikanan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perikanan:

**Tabel 4. 25. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perikanan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Rendahnya produksi perikanan tangkap	Rendahnya kapasitas SDM nelayan
		Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
	Rendahnya produksi perikanan budidaya	Rendahnya kapasitas SDM pembudidaya ikan
		Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya
	Belum optimalnya kualitas/ mutu produk perikanan	Standarisasi produk perikanan (syarat teknis, sanitasi dan higienis) masih rendah

4.1.3.2.   **Perindustrian**

Rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perindustrian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perindustrian:

**Tabel 4. 26. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian	Menurunnya nilai produksi IKM	Kapasitas SDM pelaku IKM belum optimal
		Akses bantuan permodalan belum optimal
		Teknologi pengolahan industri kecil masih tradisional
		Bahan baku industri Tenun masih dari luar daerah
	Mutu produk industri Tenun dan mebel belum memadai	Teknologi proses industri belum memadai
		Kapasitas SDM belum optimal

**4.1.3.3. Pariwisata**

Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pariwisata. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pariwisata:

**Tabel 4. 27. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Menurunnya kunjungan wisatawan	Belum optimalnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata
		Belum optimalnya pemasaran destinasi wisata
		Belum optimalnya kerjasama pengembangan wisata
		Kapasitas SDM pelaku pariwisata masih perlu ditingkatkan
	<i>Spend of money</i> wisatawan masih rendah	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif (terutama kerajinan)

**4.1.3.4. Pertanian**

Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pertanian. Persoalan ini



berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pertanian:

**Tabel 4. 28. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Rendahnya produksi komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rendahnya kapasitas SDM petani
		Generasi muda kurang berminat menggeluti pertanian
		Terbatasnya benih unggul bersubsidi
		Terbatasnya pupuk bersubsidi
		Tingginya serangan hama penyakit/ Organisme Pengganggu Tanaman
		Masih kurangnya alat dan mesin pertanian
		Masih terbatasnya jaringan irigasi usaha tani
		Masih adanya lahan tidur yang belum dimanfaatkan
	Belum optimalnya kualitas produk pertanian	Standarisasi penanganan pasca panen belum optimal
	Rendahnya produksi hasil peternakan	Rendahnya kapasitas SDM peternak
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan
		Metode budidaya masih konvensional
		Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Bibit unggul masih berasal dari luar daerah
		Pakan ternak masih berasal dari luar daerah
	Populasi ternak	Tingkat kelahiran ternak masih rendah
		Tingkat kematian ternak masih cukup tinggi
		Masih terjadinya kasus penyakit hewan menular strategis dan penyakit lainnya

4.1.3.5. Perdagangan

Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian dan stabilitas harga barang perdagangan belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perdagangan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perdagangan:

Tabel 4. 29. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan belum optimal	Penerapan metode marketing-mix belum optimal
		Jaringan perdagangan belum optimal
		Kasus sengketa perdagangan masih terjadi
	Revitalisasi pasar tradisional belum optimal	Sarana prasarana perdagangan belum memadai
		Kapasitas SDM pedagang belum optimal
		Akses bantuan permodalan belum optimal
Stabilitas harga barang perdagangan belum optimal	Kurangnya kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Ketidakstabilan persediaan barang lokal (hasil pertanian)
		Ketidakstabilan harga barang pokok dan barang penting (Gula)

4.1.4. Penunjang Urusan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar berjalan dengan baik. Sistem tata kelola pemerintahan terdiri dari urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, kesekretariatan, dan kecamatan. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Manggarai di bidang penunjang urusan pemerintahan:

4.1.4.1. Perencanaan

Kualitas perencanaan menentukan efektivitas proses pembangunan daerah, meskipun demikian perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal. Hal ini antara lain ditandai dengan belum sinergisnya antar dokumen perencanaan dan belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, terutama dalam mendorong capaian kinerja sesuai dengan target. Pemetaan permasalahan di dalam urusan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4. 30. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan	Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan regulasi perencanaan
		Belum optimalnya kapasitas SDM perencanaan
		Belum optimalnya penerapan TIK dalam perencanaan
Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi	Belum terbangunya sistem yang baik dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum adanya sistem data kinerja
		Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pengendalian dan evaluasi
		Orientasi indikator kinerja masih berbasis <i>output</i>

4.1.4.2. Keuangan

Urusan keuangan terkait pengelolaan keuangan secara keseluruhan, mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga terkait kapasitas fiskal daerah. Capaian akuntabilitas keuangan Kabupaten Manggarai sudah baik yang ditandai dengan capaian opini BPK WTP. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon dalam pembangunan mendatang, terutama terkait kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan fluktuatif, bahkan pada tahun 2018-2019 dan 2019-2020 mengalami pertumbuhan minus. Pemetaan permasalahan urusan keuangan sebagai berikut:

**Tabel 4. 31. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi	Adanya kendala dalam penggunaan SIPD, terutama di aspek penatausahaan
		Belum adanya integrasi yang terkoneksi ke kas daerah
		Belum terpenuhinya kebutuhan SDM fungsional pengelola keuangan
	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Belum optimalnya pemutakhiran inventarisasi aset
		Masih perlunya sertifikasi tanah pemda
Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah	Belum optimalnya pendapatan pajak dan retribusi daerah	Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
		Belum diterapkannya sanksi pajak dan retribusi daerah secara tegas
		Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah
		Tidak terdatanya potensi pajak dan retribusi daerah secara baik, benar, dan menyeluruh
		Belum terlaksananya pemutakhiran zona nilai tanah

**4.1.4.3. Kepegawaian**

Urusan kepegawaian terkait dengan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kepada sistem merit. Sistem merit sendiri menekankan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Pelaksanaan urusan kepegawaian di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal yang ditandai dengan Indeks Profesionalitas Pegawai pada nilai 47,59 pada 2020. Aspek kedisiplinan memiliki nilai paling rendah, yaitu 5. Adapun kompetensi dan kualifikasi masing-masing memiliki nilai 8,57 dan 11,61, sedangkan aspek kinerja memiliki capaian tertinggi, yaitu 22,41. Capaian indeks profesionalitas pegawai tersebut, secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang memiliki nilai sebesar 29,72. Berdasarkan pemetaan permasalahan urusan

kepegawaian terdapat beberapa tantangan yang harus direspon dalam pembangunan periode 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 4. 32. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian	Belum optimalnya kualifikasi pegawai	Proporsi pegawai sebagian besar D1 ke bawah
	Belum optimalnya kompetensi pegawai	Tidak terpenuhinya kebutuhan diklat
		Sebagian pejabat struktural belum memenuhi syarat jabatan diklat pim, PKP, dan PKA
	Belum optimalnya kinerja pegawai	TPP belum berbasis pada kinerja, masih kehadiran
	Belum optimalnya disiplin pegawai	Belum optimalnya instrumen pengendalian disiplin berupa <i>fingerprint</i> dan jurnal kerja
	Belum terpenuhinya kebutuhan jabatan	Terdapat eselon 4 yang tidak memiliki pegawai
		Sebagian jabatan pimpinan tinggi pratama dijabat oleh PLT

**4.1.4.4. Penelitian dan Pengembangan**

Upaya menjalankan pembangunan berbasis bukti dan data tidak lepas dari urusan penelitian dan pengembangan (litbang). Litbang juga terkait upaya memunculkan dan menjalankan inovasi daerah untuk akselerasi pelayanan publik. Urusan litbang belum berjalan optimal di Kabupaten Manggarai. Hal ini ditandai dengan belum berjalannya tindak lanjut hasil litbang, serta kegiatan litbang belum terpadu sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemetaan permasalahan di dalam urusan litbang sebagai berikut:

**Tabel 4. 33. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemanfaatan hasil litbang	Belum optimalnya fungsi kelitbangan	Masih terbatasnya tenaga fungsional peneliti
		Belum adanya komitmen dan regulasi yang mengatur terkait dengan pemanfaatan hasil litbang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerapan inovasi daerah	Belum optimalnya dukungan kelembagaan inovasi	Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi daerah
		Belum adanya <i>database</i> inovasi daerah

#### 4.1.4.5. Pengawasan

Urusan pengawasan memiliki peran strategis dalam membangun integritas dan pengendalian intern pemerintah daerah. Urusan pengawasan di Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal yang ditandai dengan capaian level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang masih berada di level 2 pada 2019 atau belum memenuhi standar nasional, sedangkan kapabilitas APIP telah berada di level 3. Pemetaan permasalahan di dalam urusan pengawasan sebagai berikut:

**Tabel 4. 34. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sistem pengawasan	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	Jumlah auditor dan P2UPD tidak proporsional dibanding jumlah obyek pemeriksaan
		Sistem pengendalian masih bergantung kepada perorangan
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Rendahnya komitmen OPD dalam menjalankan tindak lanjut hasil pemeriksaan
		OPD mengalami kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Belum optimalnya pendampingan dari APIP
	Belum optimalnya upaya membangun sistem integritas	Belum ada perangkat daerah yang menjalankan zona integritas

4.1.4.6. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki fungsi memberikan dukungan layanan kepada lembaga DPRD. Optimalnya fungsi DPRD berupa pengawasan, legislasi, dan penganggaran ditopang oleh fungsi sekretariat. Pemetaan permasalahan urusan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

Tabel 4. 35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya dukungan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada DPRD	Belum optimalnya penggunaan TIK dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD

4.1.4.7. Sekretariat Daerah

Fungsi Sekretariat Daerah (Setda) terkait pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Oleh karena itu, fungsi Setda memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan. Capaian tata kelola pemerintahan yang sekaligus menjadi representasi peran Setda Kabupaten Manggarai belum berjalan optimal, antara lain ditandai oleh Indeks Reformasi Birokrasi memiliki predikat CC (53,68), nilai SAKIP pada 2019 sebesar 61,06 dengan predikat B, serta nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebesar 2,7951 pada 2018. Adapun indeks kepuasan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang juga dikoordinir oleh Setda mengalami penurunan nilai dari 80,24 pada 2018 menjadi 79,77 pada 2019. Pemetaan permasalahan urusan Setda sebagai berikut:

Tabel 4. 36. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengendalian penerapan	Belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya pendampingan kepada OPD dalam penerapan SAKIP
		Indikator belum berorientasi kepada <i>outcome</i>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
reformasi birokrasi	Belum optimalnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Penerapan survei kepuasan masyarakat masih terbatas di OPD tertentu
		Belum terpenuhinya target SPM
	Belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Koordinasi penyelesaian persoalan pengelolaan sumber daya alam belum tuntas
		Target pengesahan regulasi tiap tahun belum memenuhi target
		Laporan belanja langsung tidak tepat waktu pelaksanaan APBD
		Belum ada <i>punishment</i> bagi OPD yang tidak taat pelaporan serapan anggaran
		Adanya keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
		Belum adanya jabatan fungsional PBJ
		Masih perlunya validasi data kemiskinan dan penerima bansos

#### 4.1.4.8. Kewilayahan-Kecamatan

Urusan Kewilayahan terkait peran kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan koordinasi fungsi pemerintahan. Fungsi Kecamatan belum berjalan optimal antara lain ditandai dengan belum berjalannya survei kepuasan masyarakat, belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa, serta belum sinergisnya koordinasi OPD dengan kecamatan. Pemetaan permasalahan di dalam fungsi kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 4. 37. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kewilayahan-Kecamatan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya peran kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum berjalannya survei kepuasan masyarakat
		Belum optimalnya pemenuhan syarat SDM dan sarpras pelayanan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum ada kejelasan pelimpahan wewenang dari bupati
		Terbatasnya SDM kecamatan, dan terdapat aparatur kecamatan yang menjadi penjabat di desa
	Belum optimalnya fungsi fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan	Fasilitasi pembangunan desa masih sekedar administrasi, belum substansi
		Belum adanya pembagian wewenang yang jelas dan sinergis antara kecamatan dengan OPD terkait
		Belum optimalnya fungsi pemberdayaan BUMDesa
	Belum optimalnya fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan OPD

## 4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan dalam skala regional, nasional maupun internasional.

### 4.2.1. Isu Internasional

Kondisi global yang sangat dinamis memunculkan berbagai isu internasional yang harus direspon oleh pemerintah nasional maupun pemerintah di level daerah. Terdapat beberapa isu internasional yang saat ini mencuat ke permukaan, antara lain adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berawal dari adanya kesepakatan berupa *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada level nasional isu tersebut telah direspon pemerintah

dengan adanya kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, kondisi global yang terus bergerak ditunjukkan dengan adanya revolusi industri 4.0 yang membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat maupun pemerintah. Kondisi tersebut menuntut masyarakat di berbagai belahan dunia untuk mengedepankan digitalisasi guna tercapainya tujuan efisiensi dan efektivitas dalam setiap aktivitas. Kondisi lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat global adalah adanya Pandemi Covid-19. Seluruh komponen masyarakat global, termasuk pemerintahan di Indonesia mengalami dampak yang signifikan. Terdapat tuntutan penanganan pandemi agar tidak semakin memberikan dampak buruk bagi masyarakat baik dari segi kesehatan maupun perekonomian di level nasional maupun daerah.

#### **4.2.1.1. Sustainable Development Goals (SDGs)**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Milennium Development Goals*. *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memuat 17 tujuan pembangunan yang meliputi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar yaitu 1) *Pembangunan Sosial*; 2) *Pembangunan Ekonomi*; 3) *Pembangunan Lingkungan*; 4) *Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*.

Tujuh belas tujuan *SDGs* dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target *SDGs* tersebut menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, evaluasi mengenai pencapaian target-target *SDGs* perlu dilakukan secara berkala.

#### **4.2.1.2. Revolusi Industri 4.0**

Adanya revolusi industri 4.0 berimplikasi terhadap semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kondisi tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor termasuk sektor pelayanan publik. Adanya revolusi industri 4.0 menimbulkan ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya efisiensi dan kecepatan dalam memberikan pelayanan serta digitalisasi dalam proses pembangunan merupakan salah satu yang menjadi fokus masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai salah satu dampak adanya revolusi industri 4.0.

Hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan tantangan baru bagi sektor-sektor publik terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. salah satu poin paling krusial dari revolusi industri 4.0 adalah proses digitalisasi. Proses digitalisasi termasuk penggunaan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, perizinan, pariwisata dan sektor lainnya.

Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa tingkat inovasi dan digitalisasi Indonesia pada akhir tahun 2020 hanya sebesar 0,08, jauh di bawah Thailand dan Vietman yang masing-masing berada pada angka 0,62 dan 0,44. Lebih dari itu, peringkat Indonesia juga masih berada di bawah negara ASEAN lainnya yaitu Filipina sebesar 0,14 dan Kamboja sebesar 0,12. Karena itu, proses digitalisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah menuju ke arah yang lebih baik. Data lain juga menunjukkan bahwa berdasarkan *E-Government Survey 2020* yang dilakukan oleh United Nations mencatat bahwa tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia berada pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi daya saing penyelenggaraan *e-government* di Indonesia masih berada di bawah negara-negara lain di ASEAN.

Kebijakan transformasi digital di Indonesia diarahkan pada dua sektor prioritas yaitu pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal.

Transformasi digital dalam pelayanan publik bersinggungan dengan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan publik berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai *E-Government*. Kebijakan pemerintah berbasis elektronik sudah digulirkan jauh sebelum isu digitalisasi di Indonesia muncul menjadi agenda publik. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pengembangan *E-Government* ini mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Pada level daerah, digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi ekonomi juga memberikan tantangan dan peluang. Pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan perizinan. Namun demikian, tantangan pada sisi infrastruktur dan kesiapan SDM menjadi hal yang harus lebih dulu diintervensi. Demikian halnya dengan peluang ekonomi digital yang terus tumbuh di daerah. Problem terbesar yang dihadapi adalah kualitas SDM dan jaringan internet yang belum mendukung dan merata di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, isu ini harus menjadi pedoman bagi daerah dalam perumusan isu dan kebijakan strategis di masa yang akan datang.

#### **4.2.1.3. Pandemi Covid-19**

Pada akhir tahun 2019, dunia dihadapkan pada suatu permasalahan besar yang terkait dengan kesehatan, yaitu adanya Covid-19. Kondisi tersebut memaksa seluruh aktivitas sosial dan perekonomian di dunia menjadi lumpuh. Pada awal Maret tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai suatu pandemi yang harus direspon dan ditangani secara serius oleh seluruh dunia. Pandemi Covid-19 ini turut berdampak terhadap seluruh aktivitas masyarakat di Indonesia, pada semester I tahun 2020 kebijakan pembatasan fisik dan pembatasan sosial mulai diberlakukan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian secara nasional.

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tentunya akan menyebabkan berbagai permasalahan lain yang saling berkaitan seperti peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai, peningkatan tingkat inflasi, dan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tentunya perlu kebijakan khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang sifatnya preventif dan responsif sehingga berbagai dampak negatif dari pandemi Covid-19 bisa lebih diminimalkan. Dengan demikian, Covid-19 merupakan isu krusial yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dokumen perencanaan hingga lima tahun ke depan.

#### **4.2.2. Isu Nasional RPJMN 2020-2024**

Isu strategis nasional tidak terlepas dari arahan Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu dasar penyusunan RPJMN 2020-2024, yaitu:

- 1. Pembangunan SDM:** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerjasama industri.
- 2. Pembangunan Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3. Penyederhanaan Regulasi:** Melakukan penyederhanaan terhadap segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law* terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
- 4. Penyederhanaan Birokrasi:** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan eselonisasi.
- 5. Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kesejahteraan bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Arah Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 Agenda Pembangunan dan masing-masing agenda pembangunan memiliki lingkungan dan isu strategis sebagai berikut:

**Tabel 4. 38. Tujuh Agenda pembangunan dengan lingkungan dan isu strategis**

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
1	<p><b>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:</b></p> <p>Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan</li> <li>• Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan dan ketersediaan SDA sebagai modal utama pembangunan makin berkurang.</li> <li>• Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan SDA</li> <li>• Transformasi struktural berjalan lambat, yaitu Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis moneter</li> <li>• Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga, namun tertinggal dalam infrastruktur serta kesiapan dan pemanfaatan oleh masyarakat dan institusi pemerintahan.</li> </ul>
2	<p><b>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:</b></p> <p>Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah</li> <li>• Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang</li> <li>• Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka kemiskinan di wilayah timur Indonesia (18%)</li> <li>• Masih adanya ketimpangan pendapatan dengan rasio gini perdesaan 0,317 dan perkotaan 0,392</li> <li>• Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia, terutama Pulau Jawa</li> <li>• Terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah</li> </ul>

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata</li> <li>• Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim</li> </ul>	tertinggal, desa, kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
3	<p><b>Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing:</b></p> <p>Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan</li> <li>• Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</li> <li>• Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> <li>• Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda</li> <li>• Pengentasan kemiskinan</li> <li>• Peningkatan produktivitas dan daya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan bonus demografi, jika tidak dikelola baik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan</li> <li>• Kesejahteraan penduduk meningkat, namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi</li> <li>• Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk</li> <li>• Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal, kesenjangan gender masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif, serta peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal, serta sebagian memiliki perilaku beresiko</li> <li>• Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat</li> <li>• Produktivitas dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan. Peringkat SDM Indonesia 65 dari 130 negara</li> </ul>

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
4	<b>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:</b> Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila</li> <li>• Pemajuan dan pelestarian kebudayaan</li> <li>• Moderasi beragama</li> <li>• Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa</li> <li>• Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia</li> <li>• Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti</li> <li>• Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama</li> <li>• Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan</li> <li>• Belum optimalnya peran keluarga</li> <li>• Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li> </ul>
5	<b>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:</b> bertujuan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar</li> <li>• Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pembangunan infrastruktur perkotaan</li> <li>• Pembangunan energi dan ketenagalistrikan</li> <li>• Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau</li> <li>• Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman</li> <li>• Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman</li> <li>• Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan yang masih menghadapi tantangan tingkat layanan penyediaan, kuantitas dan kualitas air, dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin air baku</li> <li>• Keselamatan dan keamanan transportasi yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka kematian akibat kecelakaan</li> <li>• Ketahanan kebencanaan infrastruktur</li> <li>• Waduk multiguna dan modernisasi irigasi yang menghadapi tantangan kapasitas tampungan air masih rendah karena terbatasnya jumlah</li> </ul>



No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			<p>bendungan, embung, dan penampung air lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur ekonomi yang menghadapi tantangan pada aspek konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat</li> <li>• Infrastruktur perkotaan yang masih menghadapi tantangan: transportasi perkotaan; energi dan ketenagalistrikan perkotaan; infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan; serta penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, terjangkau di perkotaan.</li> <li>• Energi dan ketenagalistrikan yang menghadapi tantangan keberlanjutan penyediaan, akses dan keterjangkauan, serta kecukupan penyediaan</li> <li>• Transformasi digital memiliki tantangan penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital</li> </ul>
6	<p><b>Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim:</b></p> <p>Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>• Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim</li> <li>• Pembangunan rendah karbon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tren IKLH nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absolut menurun, dan tutupan lahan mengalami perbaikan</li> <li>• Indonesia memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi</li> <li>• Penurunan emisi gas rumah kaca yang mendekati target</li> </ul>
7	<p><b>Memperkuat stabilitas polhukhankam dan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi kelembagaan birokrasi untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika geopolitik global, antara lain depolarisasi pusat gravitasi politik internasional, instabilitas kawasan Timur</li> </ul>

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	<b>transformasi pelayanan publik:</b> Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	pelayanan berkualitas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan</li> <li>• Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber</li> <li>• Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi</li> <li>• Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri</li> <li>• Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan</li> </ul>	Tengah, dinamika kebijakan luar negeri negara adi daya, melemahnya tata kelola global dan menguatnya unilateralisme <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tantangan nasional berupa demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman kedaulatan negara, dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional</li> </ul>

#### 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018-2023 menjadi basis bagi penyusunan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai. Provinsi NTT memiliki visi yang tertuang di dalam dokumen RPJMD. Visi Provinsi NTT periode 2018-2023 adalah “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kelima misi tersebut dirumuskan untuk merespon beberapa isu strategis seperti: 1) pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, 2) produktivitas dan daya saing ekonomi petani, peternak dan nelayan yang berkelanjutan, 3) percepatan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial, 4) penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, 5) peningkatan kualitas hidup masyarakat NTT, 6) reformasi birokrasi.

Isu Strategis Provinsi NTT direspon dengan tujuan dan sasaran di dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Berikut adalah tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023:

**Tabel 4. 39. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
		Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam Perekonomian daerah
		Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk
2.	Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin
3.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
4.	Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata ( <i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i> ) dengan pola pendekatan kawasan

No.	Tujuan	Sasaran
5.	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
6.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
		Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita
7.	Menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

Sumber: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023

Provinsi NTT memiliki konsen yang besar terhadap persoalan daya dukung lingkungan, pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, bencana, perubahan iklim, lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Berbagai persoalan tersebut yang menjadi fondasi untuk menyusun perencanaan pembangunan pada saat ini. Isu strategis Provinsi NTT memiliki karakteristik yang sama dengan Kabupaten Manggarai periode saat ini.

#### 4.2.4. Isu Strategis Daerah Sekitar Kabupaten Manggarai

Kabupaten Manggarai berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten seperti, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai harus memperhatikan arah pembangunan daerah sekitarnya. Berbasis pada narasi tersebut, maka sub-bab ini disusun dengan tujuan mengatur sinergitas arah pembangunan dengan kabupaten sekitar pada periode perencanaan pembangunan yang sama. Berikut adalah telaah RPJMD beberapa kabupaten di sekitar Kabupaten Manggarai:

##### 4.2.4.1. RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024

Kabupaten Manggarai Timur dipilih karena dua alasan, yaitu: 1) Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai. 2) Kabupaten Manggarai Timur

memiliki periode perencanaan yang hampir sama dengan Kabupaten Manggarai. Selain itu Kabupaten Manggarai Timur merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai Timur pada periode RPJMD tahun 2019-2024 memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat Manggarai Timur Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya”. Visi tersebut didukung oleh beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
2. Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung prioritas ekonomi unggulan;
4. Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak;
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat.

Kelima misi tersebut dirumuskan untuk merespon beberapa isu strategis seperti: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, melalui peningkatan kualitas pembangunan kesehatan, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dan mengatasi guncangan sosial masyarakat, 2) pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkesinambungan, 3) pembangunan infrastuktur dasar yang merata dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, 4) reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang optimal.

Isu Strategis Kabupaten Manggarai Timur direspon dengan tujuan dan sasaran di dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebuah kondisi

yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Berikut adalah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024:

**Tabel 4. 40. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024**

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		Menurunnya permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat
2.	Meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa
		Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif
3.	Mengurangi ketimpangan wilayah	Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar yang merata
4.	Meningkatkan mutu lingkungan hidup	Terwujudnya Lingkungan hidup yang lestari
5.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya kinerja pelayanan publik

*Sumber: RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024*

Kabupaten Manggarai Timur memiliki konsen yang besar terhadap persoalan SDM, pembangunan ekonomi, ketimpangan wilayah, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan. Berbagai persoalan tersebut yang menjadi fondasi untuk menyusun perencanaan pembangunan pada saat ini. Isu strategis Kabupaten Manggarai Timur memiliki karakteristik yang sama dengan Kabupaten Manggarai periode saat ini.

**4.2.4.2. RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026**

Kabupaten Manggarai Barat dipilih karena dua alasan, yaitu: 1) Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai. 2) Kabupaten Manggarai Barat memiliki periode perencanaan yang hampir sama dengan Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai Barat pada periode RPJMD tahun 2021-2026 memiliki

visi “Mabar Bangkit – Mabar Mantap (Maju, Unggul, Tangguh, Populer)”. Visi tersebut didukung oleh beberapa misi, yaitu:

1. Membangun Kabupaten Manggarai Barat sebagai pintu gerbang pariwisata nasional yang berkelanjutan dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
4. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Kelima misi tersebut dirumuskan untuk merespon beberapa isu strategis seperti: 1) masih tingginya angka kemiskinan, 2) masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 3) masih timpangnya struktur perekonomian, 4) belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB, 5) masih rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas, 6) masih tingginya tingkat pengangguran, 7) belum optimalnya penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung perekonomian, 8) rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas, 9) belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana yang baik, 10) rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pedesaan, dan 11) belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi.

Isu Strategis Kabupaten Manggarai Barat direspon dengan tujuan dan sasaran di dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Dokumen RPJMD Manggarai Barat masih berada pada tahapan rancangan teknokratik pada saat dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Manggarai ini disusun. Berbasis

pada persoalan tersebut, maka tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Barat belum ada dan belum bisa dimasukkan sebagai basis telaah perencanaan kabupaten sekitar.

#### **4.2.5. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Manggarai**

Isu strategis jangka panjang Kabupaten Manggarai dapat dicermati di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Manggarai tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan jangka panjang ini sangat penting untuk menjamin bahwa dokumen RPJMD periode 2021-2026 sudah disusun dengan konsep *vision based* yang telah ditetapkan. Berikut adalah penelaahan RPJPD Kabupaten Manggarai tahun 2005-2025:

##### **4.2.5.1. Penelaahan RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025**

Isu strategis di dalam RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025 merupakan salah satu dasar bagi penyusunan isu strategis di dalam RPJMD periode 2021-2026. Isu strategis RPJPD dipandang sebagai sebuah tatanan konseptual dengan pendekatan *vision based*. Dokumen RPJPD Kabupaten Manggarai belum memiliki isu strategis, oleh karena itu isu strategis dapat dicermati di dalam misi RPJPD. Berikut adalah misi RPJPD yang dapat memperlihatkan fokus isu strategis jangka panjang:

1. Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Penataan Kelembagaan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Manggarai;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Manggarai;
3. Penataan Birokrasi, Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan dan Ketertiban Sosial Masyarakat Manggarai;
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang berwawasan ekologis dan berbasis tata ruang di Kabupaten Manggarai;
5. Kota Ruteng sebagai pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan serta Kota Molas (Kota Asri).

RPJPD Kabupaten Manggarai saat ini memasuki periode ke empat (2020-2025). Perencanaan pada periode ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Manggarai yang sejahtera, maju, adil dan berkelanjutan melalui percepatan



pembangunan di berbagai bidang kehidupan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan SDM berkualitas dan berdaya saing. Berikut adalah sasaran pokok RPJPD Kabupaten Manggarai 2005-2025 yang harus ditindaklanjuti oleh RPJMD Kabupaten Manggarai periode 2021-2026:

1. **Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.** Kondisi ini ditandai oleh peningkatan dan pemerataan akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; terwujudnya kesetaraan gender; dan bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat makin baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.** Kondisi ini ditandai oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk yang miskin makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan rumah tangga; serta

terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujudlah kota tanpa permukiman kumuh.

3. **Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta.** Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya sistem hukum daerah yang akomodatif; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang maju dan adil.
4. **Keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan** dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi ini untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa depan.

#### **4.2.6. Telaah RTRW Kabupaten Manggarai**

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah, penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai mempedomani RTRW Kabupaten Manggarai. Penyelenggaraan penataan ruang telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang terdiri dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang meliputi rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Penyelarasan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai dengan RTRW Kabupaten Manggarai bertujuan agar terwujudnya keselarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Adapun muatan RTRW secara umum diuraikan pada bagian ini.

##### **4.2.6.1. Isu Strategis**

Berdasarkan gambaran profil wilayah Kabupaten Manggarai dapat disimpulkan bahwa terdapat isu strategis pemanfaatan potensi, terutama

sumber daya alam yang belum optimal serta terdapat permasalahan terkait pengembangan wilayah. Berikut ini akan dijabarkan beberapa isu strategis.

### **1. Ekonomi Kabupaten Manggarai**

- a. Penerapan sapta usaha tani belum optimal;
- b. Masih rendahnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- c. Rendahnya kualitas produksi dan produktivitas nelayan perikanan tangkap dan budidaya;
- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas ternak;
- e. Masih adanya praktek perdagangan monopsoni dan oligopsoni pada perdagangan komoditi perkebunan;
- f. Belum berkembangnya industri kreatif (home industry);
- g. Masih rendahnya kualitas tata kelolah koperasi;
- h. Peningkatan sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara dan konektivitas tol laut wilayah timur dan barat Indonesia;
- i. Belum mantapnya sistem transportasi antar desa dan antar kota dalam wilayah kabupaten manggarai;
- j. Terbatasnya akses komunikasi dan informatika;
- k. Masih adanya desa -desa belum memiliki listrik sebagai sumber penerangan utama di kabupaten manggarai;
- l. Rendahnya kompetensi, produktivitas, perlindungan dan penempatan tenaga kerja;
- m. Tingginya resiko daya rusak air terhadap kawasan budidaya (permukiman, pertanian);
- n. Rendahnya cakupan layanan air minum bersih perkotaan dan perdesaan;
- o. Masih adanya permukiman kumuh dan lingkungan kumuh;
- p. Flores termasuk dalam 25 kawasan pariwisata nasional.

### **2. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai**

- a. Belum terwujudnya kota Ruteng sebagai kota bersih;
- b. Menurunnya debit air minum;

- c. Meningkatnya pencemaran Tanah, Air dan Udara yang disebabkan oleh adanya Usaha/kegiatan;
- d. Belum tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Masih luasnya kawasan kritis di dalam kawasan Hutan dan luar kawasan hutan;
- f. Belum optimalnya patroli Rutin/Terpadu pengamanan hutan dan Penyuluhan;
- g. Pengelolaan pertambangan yang belum mendukung pelestarian lingkungan dan berbasis tata ruang;
- h. Ketidakpastian informasi perubahan iklim; dan
- i. 70,45% wilayah Kabupaten Manggarai berada pada kemiringan lebih dari 40 derajat menyebabkan Manggarai kategori rawan bencana;
- j. Meningkatnya kepadatan penduduk dengan aktifitasnya.

#### **4.2.6.2. Tujuan**

Tujuan penataan ruang Kabupaten Manggarai adalah **Mewujudkan tata ruang Kabupaten Manggarai yang berdaya saing berbasis Agropolitan dan Minapolitan didukung oleh Pariwisata yang berkelanjutan.**

Secara garis besar, tujuan penataan ruang Kabupaten Manggarai dapat diartikan sebagai berikut:

1. **Berdaya Saing**, mampu menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.
2. **Agropolitan**, pengembangan ekonomi berbasis pertanian di Kawasan agribisnis dengan mensinergi berbagi potensi dengan kegiatan produksi, pengolahan hasil, pemasaran, dan aktivitas lain yang berkaitan.
3. **Minapolitan**, pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis Kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan.

4. **Pariwisata**, pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan rencana pariwisata Pulau Flores.
5. **Berkelanjutan**, tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan sehingga mampu dinikmati generasi mendatang.

#### **4.2.6.3. Kebijakan**

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata;
2. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat pusat pelayanan;
3. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang sinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota Daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;
4. Pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata;
5. Pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
6. Peningkatan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pada pelosok;
7. Peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan telekomunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan;
8. Pengoptimalan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;
9. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan

- bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi;
10. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah;
  11. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis budaya dan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;
  12. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata; dan
  13. Pemantapan Kabupaten Manggarai sebagai Kota transit wisata yang didukung oleh kegiatan akomodasi wisata.

#### **4.2.6.4. Strategi**

Strategi penataan ruang Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

**Kebijakan 1:** pemantapan sistem agropolitan, dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan agropolitan dan agroindustry di wilayah-wilayah basis seperti di Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, kecamatan Ruteng, Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Wae Ri'i
- 2) Mengembangkan minapolitan pada wilayah dengan potensi perikanan tinggi di Kecamatan Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, Satar Mese Barat
- 3) Mengembangkan sistem pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terpadu dengan sistem pemasaran

- 4) Meningkatkan aksesibilitas dari sumber produksi, pengolahan, dan pemasaran

**Kebijakan 2:** pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat pelayanan;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan pusat-sub pusat pelayanan yang diintegrasikan dengan jaringan aksesibilitas yang terhubung
- 2) Mengembangkan simpul dan jaringan transportasi pendukung
- 3) Mengembangkan Kawasan perdagangan jasa, dan pelayanan umum sebagai bangkitan dan tarikan
- 4) Mengembangkan sektor perekonomian secara merata di setiap wilayah

**Kebijakan 3:** pengembangan pusat-pusat pelayanan yang sinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan jaringan aksesibilitas penghubung antar pusat pelayanan
- 2) Mengembangkan jalur agrobisnis antar desa basis dengan perkotaan
- 3) Mengembangkan sistem pelayanan umum terpadu dan fasilitas-fasilitas pendukung

**Kebijakan 4:** pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan terminal dan sub terminal serta pelayanan transportasi umum dan angkutan barang
- 2) Mengembangkan bandara, pelabuhan, dan dermaga
- 3) Mengembangkan sistem jaringan jalan dan prasarana jalan
- 4) Mengembangkan lahan parkir
- 5) Mengembangkan sistem drainase dan jalur hijau jalan

**Kebijakan 5:** pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan
- 2) Melestarikan sumber mata air dan sempadan sumber mata air
- 3) Mengembangkan sistem penangkapan air hujan
- 4) Mengembangkan sistem jaringan irigasi

**Kebijakan 6:** peningkatan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pada pelosok;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan jaringan listrik secara merata ke seluruh wilayah perencanaan
- 2) Mengembangkan energi terbarukan
- 3) Memanfaatkan listrik secara bijaksana

**Kebijakan 7:** peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan telekomunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan layanan menara telekomunikasi dan sistem jangkauan
- 2) Mengembangkan wilayah sadar telekomunikasi
- 3) Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi nirkabel/ fiber optik dengan ducting Bersama

**Kebijakan 8:** pengoptimalan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan TPA yang telah diuji sesuai standar
- 2) Mengembangkan TPS terpadu secara merata terutama di pusat-pusat kegiatan



- 3) Mengembangkan pemilahan sampah
- 4) Mengembangkan sistem *zero waste* di sumber pertama
- 5) Mengembangkan bank sampah

**Kebijakan 9:** pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi;

**Strategi:**

- 1) Menetapkan Kawasan hutan lindung dan melestarikan hutan lindung melalui pengembalian rona awal dan penanaman gerakan cinta alam;
- 2) Menetapkan perlindungan terhadap Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sempadan sungai bukan untuk Kawasan terbangun;
- 3) Melestarikan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng;
- 4) Menetapkan perlindungan terhadap Kawasan ekosistem mangrove dan melaksanakan reboisasi terumbu karang di sekitar kawasan;

**Kebijakan 10:** pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan kawasan pertanian yang terintegrasi dengan Kawasan industri pengolahannya
- 2) Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah serta sarana pemasaran
- 3) Mengembangkan jaringan jalan dan simpul transportasi sehingga memberikan kemudahan akses pengembangan agropolitan dan minapolitan
- 4) Melestarikan pertanian dengan budaya sawah lodok dan mengembangkannya sebagai objek wisata

- 5) Mengintegrasikan antar objek wisata sehingga dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang dipertimbangkan

**Kebijakan 11:** pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis budaya dan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan kawasan agropolitan, minapolitan, dan pariwisata yang merupakan potensi basis Kabupaten Manggarai sebagai Kawasan strategis ekonomi
- 2) Mengembangkan Kawasan hutan lindung dan Kawasan taman wisata alam Ruteng sebagai Kawasan strategis lingkungan hidup untuk tetap dilestarikan dan dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak

**Kebijakan 12:** pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata.

**Strategi:**

- 1) Menata lingkungan estuaria yang lestari melalui konservasi bakau dan terumbu karang serta pencegahan reklamasi di Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, dan Satar Mese Barat
- 2) Melindungi Kawasan sempadan pantai dari peruntukan Kawasan terbangun

**Kebijakan 13:** pemantapan Kabupaten Manggarai sebagai Kota transit wisata yang didukung oleh kegiatan akomodasi wisata

**Strategi:**

- 1) Mengembangkan infrastruktur dan transportasi untuk mempermudah akses pencapaian lokasi wisata
- 2) Mengembangkan atraksi wisata, meningkatkan kualitas amenities destinasi wisata, dan memperkuat promosi

- 3) Mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata

#### **4.2.6.5. Telaahan isu strategis penataan ruang**

Telaahan isu strategis penataan ruang harus dijalankan agar berbagai intervensi program pembangunan daerah selaras dengan arah rencana pola ruang/ rencana struktur di dalam RTRW Kabupaten Manggarai. Berikut telaahan isu strategis penataan ruang Kabupaten Manggarai:

Tabel 4. 41. Telaah Isu Strategis Penataan Ruang

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Perwujudan Struktur Ruang: Perwujudan Sistem Perkotaan				
Pengembangan dan pemantapan PKW Langke Rembong untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/ kota	Kecamatan Langke Rembong dengan pusat pelayanan di Kelurahan Mbaumuku, Pitak, Watu dan Pau	1. Program perekonomian dan pembangunan 2. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah		<b>Program perekonomian dan pembangunan</b> dengan indikator: 1. Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti  <b>Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah</b> , dengan indikator: 1. Persentase konsistensi RKPD dengan Renja 2. Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD
Pengembangan dan pemantapan PKL Reok untuk kegiatan utama pelayanan umum (Civic Centre) dan pusat koleksi dan distribusi perdagangan dan Jasa regional, serta transportasi regional		1. Program perekonomian dan pembangunan 2. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah		<b>Program perekonomian dan pembangunan</b> dengan indikator: 1. Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti  <b>Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah</b> , dengan indikator: 1. Persentase konsistensi RKPD dengan Renja 2. Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD
Pengembangan dan pemantapan PPK: • PPK Ruteng, untuk kegiatan utama sebagai pusat pelayanan di wilayah tengah Kabupaten Manggarai dengan fungsi utama perdagangan dan jasa, transportasi, dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan	• PPK Ruteng di Kecamatan Ruteng dengan pusat pelayanan di Kelurahan Wae Belang dan Desa Bulan; • PPK Satar Mese di Kecamatan Satar Mese dengan pusat pelayanan di Desa Iteng; dan • PPK Satar Mese Barat di Kecamatan Satar Mese Barat dengan pusat pelayanan di Desa Satar Lenda.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar 2. Indeks Kelembagaan 3. Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal B 4. Persentase OPD yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik 5. Persentase OPD dengan indeks kelembagaan yang efektif

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPK Satar Mese untuk kegiatan perdagangan dan jasa, transportasi, perikanan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan, dan</li> <li>• PPK Satar Mese Barat untuk kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, transportasi, perikanan, dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan</li> </ul>				
Pengembangan dan pemantapan PPL untuk kegiatan utama pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa serta kegiatan skala lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecamatan Wae Rii, pusat pelayanan di Desa Wae Rii, Golocador dan Desa Ranaka.</li> <li>• Kecamatan Rahong Utara, pusat pelayanan di Desa Buar dan Pong Lengor.</li> <li>• Kecamatan Lelak, pusat pelayanan di Desa Bangka Lelak.</li> <li>• Kecamatan Cibal, pusat pelayanan di Kelurahan Pagal.</li> <li>• Kecamatan Cibal Barat, pusat pelayanan di Desa Golowoi</li> <li>• Kecamatan Reok Barat, pusat pelayanan di Desa Sambu dan Kajong.</li> <li>• Kecamatan Satar Mese Utara, pusat pelayanan di Desa Nao.</li> </ul>	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar
Penyusunan RDTR	Kabupaten Manggarai	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>		dengan indikator: Presentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR, Rencana Kawasan strategis)
Penyusunan peraturan zonasi, RTBL, dan panduan rancang kota	Kabupaten Manggarai			

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Perwujudan Struktur Ruang: Rencana Sistem Transportasi Jalan				
Peningkatan dan pemantapan jaringan jalan	1. Malwatar - Bts Kota Ruteng; 2. Jln Komodo (Kota Ruteng); 3. Batas Kota Ruteng - Km 210,	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Permukiman		Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator: 1. Persentase jalan kabupaten terbangun HRS 2. Persentase jalan kabupaten terbangun lapen 3. Persentase jalan kabupaten terbangun telford 4. Persentase Jembatan terbangun 5. Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi  Program Pengembangan Permukiman dengan indikator: 1. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
Jalan Arteri Primer Status Jalan Nasional bukan jalan tol	1. Malwatar - Bts Kota Ruteng; 2. Jln Komodo (Kota Ruteng); 3. Batas Kota Ruteng - Km 210, 4. Jln A. Yani (Kota Ruteng); 5. Jln Ranaka (Kota Ruteng); 6. Km 210 - Batas Kab. Manggarai; 7. Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa.			
Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) Status Jalan Nasional bukan jalan tol	1. Bts Kota Ruteng – Reo – Kendidi; 2. Jl. Mutang Rua (Ruteng); 3. Jl. Wae Cees (Ruteng); dan 4. Jl. Satar Tacik (Ruteng)			
Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) Status Jalan Provinsi	a. Cibal – Reok; dan b. Sp Cumbi-Golo Cala-Iteng			
lokal primer dan lokal sekunder yang menjadi kewenangan kabupaten	1. ruas jalan yang menghubungkan Iteng - Narang; 2. ruas jalan yang menghubungkan Satar Mese Barat – Satar Mese Utara - Lelak 3. ruas jalan yang menghubungkan Langke Rembong – Satar Mese 4. ruas jalan yang menghubungkan Langke Rembong – Wae Ri’i 5. ruas jalan yang menghubungkan Wae Ri’i – Rahong Utara 6. ruas jalan yang menghubungkan Ruteng – Rahong			

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
	Utara 7. ruas jalan yang menghubungkan Cibal – Cibal Barat			
Jalan desa, jalan poros desa di luar jalan lokal primer	Jalan yang menghubungkan desa-desa setiap kecamatan			
Perwujudan Struktur Ruang: Pengembangan terminal				
Pengembangan Terminal tipe B	Mena Kelurahan Bangke Tuke Kecamatan Langke Rembong	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		dengan indikator: presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik
Pengembangan Terminal tipe C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok,</li><li>• Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong</li><li>• Langgo Kecamatan Wae Rii</li><li>• Kec Langke Rembong (rencana baru)</li></ul>			
Pengembangan terminal barang	Kecamatan Reok, Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Ruteng			
Perwujudan Struktur Ruang: Sistem Jaringan Transportasi Laut				
Pengembangan Pelabuhan Kendidi sebagai pelabuhan barang dan penumpang	Kecamatan Reok	Program Pengelolaan Pelayaran		dengan indikator: presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik
Pengembangan dermaga lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Reok</li><li>• Kecamatan Reok Barat</li><li>• Kecamatan Satar Mese</li><li>• Kecamatan Satar Mese Barat</li></ul>			
Perwujudan Struktur Ruang: Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi				

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Penerapan telekomunikasi berbasis teknologi modern (Data)	Kabupaten Manggarai	Program informasi dan komunikasi publik		Dengan indikator: Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah
Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah wilayah pusat pertumbuhan	Kabupaten Manggarai			Dengan indikator: Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)
Pembentukan jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibu kota kabupaten	Kabupaten Manggarai	Program aplikasi informatika		Dengan indikator: Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Pembangunan secara bersama pada satu tower BTS dalam beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama.	Kabupaten Manggarai			Dengan indikator: Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi
Perwujudan Struktur Ruang: Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air				
Pemeliharaan sumber air permukaan seperti sungai, mata air, waduk/ bendungan, embung	Kabupaten Manggarai	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Persentase titik sampling air yang memenuhi baku mutu 3. Persentase mata air yang memenuhi nilai baku mutu
Pengembangan bangunan pengambilan air baku untuk sumber air baku mata air, air tanah	seluruh Kecamatan di Kabupaten Manggarai	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaaan Lingkungan
Pengembangan dan pemantapan jaringan irigasi	Kabupaten Manggarai	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator: Presentase Jaringan irigasi usaha tani ber kondisi baik



RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Pengendalian banjir diseluruh Kecamatan	Kabupaten Manggarai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Presentase bangunan pengendali bencana Banjir dalam kondisi baik
Konservasi lahan	Kabupaten Manggarai	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase luas penataan RTH Publik
Pembuatan tanggul dan perkuatan tebing	Kabupaten Manggarai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Presentase bangunan pengendali bencana erosi dalam kondisi baik
Normalisasi sungai	Kabupaten Manggarai			Presentase bangunan pengendali bencana Banjir dalam kondisi baik
Pemeliharaan embung atau bendungan	Bendungan: Bendungan Wae Mantar 1, Wae Mantar 2, dan Bendungan Wae Mau, Wae Kuli, Wae Rem Embung: Desa Kenda Kecamatan Wae Ri'I, Wae Lerong Kecamatan Langke Rembong, Desa Nenu Kecamatan Cibai, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Satar Mese Utara, dan Kecamatan Reok			
Perwujudan Struktur Ruang: Rencana Jaringan Prasarana Lainnya				
pengembangan sistem pelayanan air minum perpipaan: 1. unit air baku yang berasal dari mata air di seluruh kecamatan, unit air baku yang berasal dari pengolahan air di air baku sungai dan mata air serta pemurnian air laut; 2. unit produksi yang di kelola PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan. 3. unit distribusi yang dikembangkan di setiap kecamatan.	Kecamatan Ruteng, Kecamatan Langke Rembong,	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		1. Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik 2. Persentase SPAM yang direhabilitasi/ditingkatkan

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
4. unit pelayanan yang ada di seluruh kabupaten Manggarai.				
bukan jaringan perpipaan, berupa sumur, sumur gali, sumur bor, bak penampungan air hujan, sumur dangkal dan sumur pompa untuk kawasan permukiman, perkotaan dan perdesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai			
sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), di wilayah industri, perdagangan dan jasa serta fasilitas umumnya	Kabupaten Manggarai	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		Persentase IPAL terbangun
sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di lokasi TPA	TPA Ncolang	Program Pengelolaan Persampahan		Presentasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS dalam kondisi baik
sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal	Kabupaten Manggarai	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		Persentase IPAL terbangun

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Pengembangan TPST: 1. Kluster wilayah Ruteng melayani Kecamatan Ruteng, Kecamatan Rahong Utara, Kecamatan Lelak 2. Kluster wilayah Reok melayani Kecamatan Kecamatan Reok dan Reok Barat 3. Kluster wilayah Satar Mese Barat melayani Satar Mese Barat, Satar Mese Utara dan Satar Mese	Kelurahan Reo Kecamatan Reok	Program Pengelolaan Persampahan		1. Persentase sampah yang dikelola dengan 3R 2. Persentase bank sampah aktif
Pengembangan sistem pengelolaan persampahan menjadi sistem berlapis-lapis (sanitary landfill) serta kapasitas pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ncolang.	Kelurahan Watu, Kelurahan Mbaumuku, , Kelurahan Pitak, Kelurahan Wali, Kelurahan Lawir, Kelurahan Tenda, Kelurahan Karot, Kelurahan Carep dan Kelurahan Golo Dukal			Presentasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS dalam kondisi baik
mengembangkan tempat penampungan sampah terpadu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prediksi perkembangan penduduk				1. Persentase sampah yang dikelola dengan 3R 2. Persentase bank sampah aktif

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Pengembangan sistem persampahan 3R (reduse, reuse dan recycle), dan pengembangan prasarana dan sarana persampahan untuk mencukupi kebutuhan dari lingkungan permukiman terkecil hingga skala pelayanan perkotaan	Setiap kelurahan dan desa di Kabupaten Manggarai			Persentase sampah yang dikelola dengan 3R
Pemantapan jalur evakuasi bencana melalui jalur evakuasi, titik lokasi evakuasi dan rambu evakuasi	Kabupaten Manggarai	Program penanggulangan bencana		1. Persentase desa tangguh bencana 2. Persentase SDM penanganan bencana terlatih 3. Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana 4. Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana 5. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 6. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 7. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
<b>Perwujudan Pola Ruang: Kawasan Peruntukan Lindung</b>				
Perlindungan dan pelestarian kawasan sempadan sungai serta pengelolaan sungai	Setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase luas penataan RTH Publik
Perlindungan dan Pelestarian kawasan keunikan batuan dan fosil	Kabupaten Manggarai			

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Penetapan dan pelestarian Kawasan imbuhan air tanah	Kabupaten Manggarai			
perlindungan wilayah- wilayah rawan bencana dari kegiatan pengembangan budidaya, serta peningkatan mitigasi bencana.	Kabupaten Manggarai	Program perlindungan dan jaminan sosial		Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
Pelestarian situs cagar budaya meliputi: a. Kawasan Liang Bua	Kabupaten Manggarai	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya		Persentase cagar budaya yang dilestarikan
Penetapan dan perlindungan Kawasan terumbu karang	Kabupaten Manggarai	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan
Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi;	Kecamatan Satar Mese			
Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta perladangan berpindah;	Kecamatan Satar Mese			Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan
Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi konversi untuk kegiatan pertanian (perkebunan dan tanaman pangan) sesuai dengan potensinya;	Kecamatan Satar Mese	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Pengembangan pola hutan tanaman industri;	Kecamatan Satar Mese	Program perencanaan dan pembangunan industri		Persentase peningkatan pelaku industri mebel dan bambu yang terlatih
Peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan oleh KPH (Perhutani) dan dinas yang menaungi bidang kehutanan.	Cibal, Cibal Barat, Langke Rembong, Lelak, Rahong Utara, Reok, Reok Barat, Ruteng, Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara	Progran Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH		Persentase Kelompok Masyarakat Adat yang dibina
Usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Pengembangan kegiatan Agropolitan	Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Langke Rembong, Lelak, Rahong Utara, Reok, Reok Barat, Ruteng, Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar	1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Program perizinan usaha pertanian		<p><b>Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kelompok petani yang memiliki benih unggul sesuai standar</li> <li>2. Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar</li> <li>3. Persentase kelompok petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar</li> <li>4. Persentase kelompok peternak yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan</li> <li>5. Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit sesuai standar</li> <li>6. Persentase kelompok peternak (ternak besar) yang memiliki hijauan pakan ternak</li> <li>7. Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan</li> </ol> <p><b>Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase prasarana pertanian berkondisi baik</li> <li>2. Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian</li> <li>3. Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik.</li> </ol> <p><b>Program perizinan usaha pertanian</b>, dengan indikator:            Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha</p>

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan		1. Program perencanaan dan pembangunan industri 2. Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		<b>Program perencanaan dan pembangunan industri</b> dengan indikator: Persentase peningkatan pelaku IKM pengolahan pangan dan pasca panen yang terlatih  <b>Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan,</b> dengan indikator: 1. Persentase peningkatan stok cadangan pangan daerah 2. Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang ber kondisi baik
Penyediaan jaringan irigasi dan pupuk organik	Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Langke Rembong, Lelak, Rahong Utara, Reok, Reok Barat, Ruteng, Satar Mese, Satar Mese Barat, dan Wae Ri'i.	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar



RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Kawasan Perkebunan	Cibal, Cibal Barat, Langke Rembong, Lelak, Rahong Utara, Reok, Reok Barat, Ruteng, Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, dan Wae Rii	1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Program perizinan usaha pertanian		<p><b>Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kelompok petani yang memiliki benih unggul sesuai standar</li> <li>2. Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar</li> <li>3. Persentase kelompok petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar</li> <li>4. Persentase kelompok peternak yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan</li> <li>5. Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit sesuai standar</li> <li>6. Persentase kelompok peternak (ternak besar) yang memiliki hijauan pakan ternak</li> <li>7. Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan</li> </ol> <p><b>Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase prasarana pertanian berkondisi baik</li> <li>2. Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian</li> <li>3. Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik.</li> </ol> <p><b>Program perizinan usaha pertanian</b>, dengan indikator:            Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha</p>

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Kawasan Perikanan	Kecamatan Reok dan Reok Barat	1. Program pengelolaan perikanan tangkap 2. Program pengelolaan perikanan budidaya 3. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		<p><b>Program pengelolaan perikanan tangkap</b>, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kelompok nelayan terlatih</li> <li>2. Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar</li> </ol> <p><b>Program pengelolaan perikanan budidaya</b>, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih</li> <li>2. Persentase kelompok pembudiaya ikan yang memiliki sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai standar</li> </ol> <p><b>Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</b>, dengan indikator:</p> <p>Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar</p>
Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten Manggarai	Program perencanaan dan pembangunan industri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan</li> <li>2. Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern</li> <li>3. Tingkat ketersediaan bahan baku produksi tenun</li> <li>4. Persentase peningkatan pelaku industri tenun yang terlatih</li> <li>5. Persentase peningkatan pelaku industri mebel dan bambu yang terlatih</li> <li>6. Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya</li> </ol>
Pengembangan industry rumah tangga	Kabupaten Manggarai			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan</li> <li>2. Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern</li> <li>3. Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya</li> </ol>

Kawasan peruntukan pariwisata budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampung Adat Ruteng Pu'u, Kampung Adat Tenda, Kampung Adat</li> <li>• Bangka Tuke dan Mbaru Wunut Kecamatan Langke Rembong;</li> <li>• Kampung Adat Wae Rebo dan Kampung Adat Todo Kecamatan</li> <li>• Satarmese Barat;</li> <li>• Kampung Adat Pongkor dan Kampung Adat Mocok Kecamatan</li> <li>• Satarmese;</li> <li>• Kampung Adat Cibal dan Kampung Adat Wudi Kecamatan Cibal; dan</li> <li>• Kawasan Pithecanthropus Erectus dan Homo Floresiensis Liang Bua,</li> <li>• Kecamatan Rahong Utara.</li> </ul> <p>Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hutan Inembelle, Kecamatan Satarmese;</li> <li>Pulau Mules Desa Nuca Molas, Pantai Nenu Nakeng dan Pantai Pasir</li> <li>Putih Borik Kecamatan Satarmese Barat;</li> <li>Air Terjun Tengku Lese dan Cunca Lega, Kecamatan Rahong Utara;</li> <li>Air Terjun Wae Garit, Kecamatan Langke Rembong;</li> <li>Wae Rem, Liang Woja, Watu Heping, Golo Wua, Liang Warwetu,</li> <li>Liang Nderu dan Longka Lala Kecamatan Cibal;</li> <li>Pantai Ketebe, Pantai Sengari dan Hutan Bambu Laut Robek</li> </ol>			
		Program pemasaran pariwisata		Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Kawasan peruntukan pariwisata buatan	a. Lodok Cara di Desa Meler Kecamatan Ruteng; dan b. Pemancingan Nanga Woja di Kecamatan Satarmese. Kawasan peruntukan pariwisata religius meliputi antara lain : a. Golo Curu dan Gereja Katedral Lama Kecamatan Langke Rembong; b. Gereja Pagal Kecamatan Cibal; dan c. Gua Maria Torong Besi Kecamatan Reok.	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program pemasaran pariwisata 3. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		<p><b>Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</b>, dengan indikator: Persentase destinasi wisata yang berkembang</p> <p><b>Program pemasaran pariwisata</b> dengan indikator: Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan</p> <p><b>Program pemasaran pariwisata</b>, dengan indikator: Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin</p>
Kawasan Permukiman	<p><b>Pengembangan Kawasan permukiman pedesaan</b> Cibal, Cibal Barat, Langke Rembong, Lelak, Rahong Utara, Reok, Reok Barat, Ruteng, Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Wae Rii</p> <p><b>Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan</b> Langke Rembong, Reok, Ruteng</p>	Program Kawasan Permukiman		<p>1. Persentase rumah tangga mengakses rumah layak huni</p> <p>2. Persentase penurunan luas wilayah permukiman kumuh</p>
<b>Perwujudan Kawasan Strategis: Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b>				
Kawasan agropolitan	wilayah pusat pengembangan pada Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese Barat serta kecamatan Ruteng	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		<p>1. Persentase prasarana pertanian ber kondisi baik</p> <p>2. Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian</p> <p>3. Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik</p>

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Kawasan minapolitan dengan prioritas perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri olahan sumber daya laut, industri dan jasa kemaritiman serta pengembangan minawisata	Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, dan Satar Mese Barat	1. Program pengelolaan perikanan tangkap 2. Program pengelolaan perikanan budidaya 3. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		<p><b>Program pengelolaan perikanan tangkap</b>, dengan indikator:</p> 1. Persentase kelompok nelayan terlatih 2. Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar
Kawasan pariwisata	Kecamatan Satar Mese Utara dan Satar Mese Barat	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Program pemasaran pariwisata 3. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		<p><b>Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</b>, dengan indikator:</p> Persentase destinasi wisata yang berkembang
				<p><b>Program pemasaran pariwisata</b> dengan indikator:</p> Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan
				<p><b>Program pemasaran pariwisata</b>, dengan indikator:</p> Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin

RTRW Kabupaten Manggarai		Ranwal RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026		Telaah Keselarasan RPJMD dengan RTRW
Rencana Pola Ruang/ Rencana Struktur/ Indikasi Program	Lokasi	Program Prioritas	Lokasi	
Pengembangan kampung adat budaya Kampung Todo, perkampungan tradisional Wae Rebo, Lingko Meler, dan Situs Homo Floresiensis	kampung todo di Kecamatan Satar Mese Utara, perkampungan tradisional Wae Rebo di Kecamatan Satar Mese Barat, lingko meler di Kecamatan Ruteng dan situs homo floresiensis di Liang Bua Kecamatan Rahong Utara.	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program pengembangan kesenian tradisional		<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b> dengan indikator: Persentase budaya yang dilestarikan  <b>Program pengembangan kesenian tradisional</b> dengan indikator: Persentase kesenian yang dikembangkan
rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas (PLTU/G) Ulumbu	Kecamatan Satar Mese	Program Penataan Bangunan Gedung		Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan
Kawasan hutan lindung	Kecamatan Satar Mese Barat, Lelak, Ruteng, Cibal, Satar Mese Utara, Reok Barat, dan Reok	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase luas penataan RTH Publik
Kawasan pelestarian alam Ruteng	Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Satar Mese, dan Wae Ri'i	<b>1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b> <b>2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b> dengan indikator: 1. Persentase titik sampling air yang memenuhi baku mutu 2. Persentase mata air yang memenuhi nilai baku mutu 3. Persentase ketersediaan alat ukur kualitas udara 4. Persentase titik sampling udara yang memenuhi baku mutu  <b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b> dengan indikator: 1. Persentase luas penataan RTH Publik

Sumber: Analisis data RTRW Kabupaten Manggarai, 2021

#### **4.2.7. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Manggarai**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Ketujuhbelas tujuan SDGs dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDGs meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan.

1. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan  
Dicapai dengan usaha dalam pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan  
Dicapai dengan usaha dalam mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera  
Dicapai dengan usaha dalam menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas  
Dicapai dengan usaha dalam memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
5. Tujuan 5 - Kesetaraan gender  
Dicapai dengan usaha dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak  
Dicapai dengan usaha dalam menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau  
Dicapai dengan usaha dalam memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

8. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi  
Dicapai dengan usaha dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur  
Dicapai dengan usaha dalam membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan  
Dicapai dengan usaha dalam mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
11. Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan  
Dicapai dengan usaha dalam membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab  
Dicapai dengan usaha dalam memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim  
Dicapai dengan usaha dalam mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Tujuan 14 - Ekosistem laut  
Dicapai dengan usaha dalam perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15. Tujuan 15 - Ekosistem daratan  
Dicapai dengan usaha dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh  
Dicapai dengan usaha dalam mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan akhir  
Dicapai dengan usaha dalam menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka diperlukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam dokumen perencanaan RPJMD. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan Rencana dan Program. Berikut merupakan hasil telaah KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai periode 2021-2026.

#### **4.2.7.1. Capaian TPB Kabupaten Manggarai**

Analisis SDG's Kabupaten Manggarai memberikan gambaran mengenai capaian awal pembangunan berkelanjutan/SDG's di Kabupaten Manggarai. Selain itu, digunakan pula sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai (khususnya Perangkat Daerah terkait) dalam melakukan penyiapan program dan kegiatan yang terkait pencapaian indikator- indikator SDG's di Kabupaten Manggarai. Pada subbab ini dijelaskan mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di masa depan dan capaian indikator TPB. Kategori capaian TPB Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB yang tidak dilaksanakan dan tidak mencapai target (TT);
4. Indikator TPB yang tidak/belum memiliki Data (NA).

Tabel 4. 42. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Manggarai

No	TPB	Pilar	SS	SB	TT	NA	Total Indikator	Ketercapaian (SS/Total indikator*100) (%)
1	Tanpa Kemiskinan	Sosial	12	12	0	0	24	50
2	Tanpa Kelaparan	Sosial	6	1	0	4	11	54.55
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Sosial	9	8	0	11	28	32.14
4	Pendidikan Berkualitas	Sosial	4	7	0	2	13	30.77
5	Kesetaraan Gender	Sosial	4	7	0	3	14	28.57
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Lingkungan	4	4	2	4	14	28.57
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Ekonomi	1	0	0	1	2	50
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Ekonomi	7	7	0	4	18	38.89
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Ekonomi	6	2	0	3	11	54.55
10	Berkurangnya Kesenjangan	Ekonomi	2	5	0	1	8	25
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	Lingkungan	5	2	1	0	8	62.5
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Lingkungan	2	0	0	3	5	40
13	Penanganan Perubahan Iklim	Lingkungan	2	0	0	0	2	100
14	Ekosistem Lautan	Lingkungan	0	0	0	0	0	0
15	Ekosistem Daratan	Lingkungan	2	0	1	0	3	66.67
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Hukum	6	6	0	4	16	37.5
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	Ekonomi	3	3	0	2	8	37.5
Total			75	64	4	42	185	40.54

Sumber: Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Manggarai berjumlah 185 indikator, dengan rincian 75 (40.54%) indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sedangkan 64 (34.59%) indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, 4 (2.16%) indikator tidak dilaksanakan dan tidak ada target, serta 42 (22.70%) indikator tidak memiliki data. Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Perlu dijadikan pertimbangan terutama TPB yang belum dilaksanakan atau memiliki indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan maupun jika dibandingkan dengan target nasional capaiannya masih rendah. Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Manggarai terhadap target nasional, maka terdapat 2 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- a. Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dengan indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 12 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional, sedangkan 12 indikator lainnya sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional.
- b. Tujuan 3 yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 28 indikator dan sebanyak 9 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dan 8 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sedangkan 11 indikator lainnya tidak memiliki data (NA).

#### **4.2.7.2. Isu Strategis Kabupaten Manggarai Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026**

Hasil telaah permasalahan dan isu strategis dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa terdapat 4 kelompok besar isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yakni Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Tata Kelola. Permasalahan dan Isu Strategis ini kemudian akan

menjadi fokus dan pertimbangan dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tabel di bawah ini menunjukkan daftar permasalahan dan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai:

**Tabel 4. 43. Isu Strategis Kabupaten Manggarai Berdasarkan Analisis dalam KLHS**

PILAR	Permasalahan	Isu Strategis
Sosial	Pencapaian nilai GAP dari presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 12,55%	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan baru 20,55%
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan memiliki selisih GAP 70,46% dengan nasional	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan masih mencapai 24,54%
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Memiliki tren perkembangan yang justru menurun	Berkurangnya minat penduduk untuk mengikuti program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan
	GAP persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas Kabupaten Manggarai dengan nasional masih 3,62%	penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas di Kabupaten Manggarai masih 13,50%
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Meningkat	Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin sehingga mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
	rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan memiliki GAP dengan nasional sebesar 19,1%	rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum 100% dan masih 80,9%
	GAP jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kab Manggarai dengan nasional mencapai 25,97	rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kab Manggarai masih 74,03%
	Penduduk umur 0-17th yang memiliki akta kelahiran masih sedikit dan memiliki GAP dengan nasional mencapai 19,766%	Penduduk umur 0- 17th yang memiliki akta kelahiran masih 57.234%
	GAP rumah tangga miskin dan rentan dengan tingkal kelistrikan nasional masih 21,37%	Capaian penerangan listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan belum 100% dan masih 78,63%
	GAP IRBI Kab Manggarai terhadap target nasional adalah 20,15	Capaian IRBI Kabupaten Manggarai masih tinggi yaitu 138,75

PILAR	Permasalahan	Isu Strategis
	GAP kualitas konsumsi pangan di Kab Manggarai dengan nasional masih 7,44%	rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan masih 85,06
	Angka kematian balita di Kab Manggarai justru meningkat	Angka kematian balita seharusnya menurun 11,38
	GAP persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kab Manggarai dengan nasional mencapai 3,77%	persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kab Manggarai masih 91,23% sehingga masih di bawah target nasional
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa di Kab Manggarai dengan Nasional memiliki selisih 13,10%	Prevalensi HIV pada populasi dewasa di Kab Manggarai masih 13,60%
	GAP atau selisih Total Fertility Rate (TFR) di Kab Manggarai dengan nasional adalah 1,12	Total Fertility Rate (TFR) di Kab Manggarai masih 3,4
	Selisih persentase unmet need pelayanan kesehatan di kab Manggarai dengan nasional adalah 4,61%	Unmet need pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai masih 14,52%
	GAP atau selisih Persentase SD/MI berakreditasi minimal B di Kab Manggarai dengan nasional masih 5,13%	Capaian Persentase SD/MI berakreditasi minimal B di Kab Manggarai masih 79,07%
	GAP atau selisih Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B di Kab Manggarai dengan nasional masih 1,93%	Capaian Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B masih 79,07
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat di Kabupaten Manggarai memiliki selisih 4,59% dengan target nasional	Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat di Kab Manggarai masih 109,5%
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15th di Kab Manggarai memiliki selisih sebesar 0,8 tahun dari target nasional	Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun di Kab Manggarai adalah 8 tahun
	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kab manggarai justru menurun dimana target nasional seharusnya meningkat	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah 88
	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik di kab Manggarai justru menurun dibandingkan dengan target nasional untuk meningkat	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik mencapai 27,42

PILAR	Permasalahan	Isu Strategis
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir di kab manggarai justru meningkat, dimana sesuai target nasional seharusnya menurun	dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir mencapai 0,94
	GAP Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan di Kabupaten Manggarai dengan target nasional sebesar 8,83%	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan di kab manggarai mencapai 29,31%
	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif di Kab Manggarai memiliki selisih dengan target nasional sebesar 21,61%	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif di Kab Manggarai mencapai 48,39%
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di Kabupaten Manggarai justru menurun, dimana target nasional seharusnya naik	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial seharusnya meningkat
	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) di Kab Manggarai memiliki selisih sebesar 4,61% dengan target nasional	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) di Kab Manggarai masih mencapai 14,52%
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern di Kab Manggarai memiliki selisih sebesar 16,69% dengan target nasional	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern di Kab Manggarai mencapai 68,31%
Ekonomi	Rasio elektrifikasi di Kab Manggarai memiliki selisih sebesar 21,37% dengan target nasional	Rasio elektrifikasi di Kab Manggarai mencapai 78,63%
	Persentase tenaga kerja formal di kab Manggarai memiliki selisih sebesar 48,19% dibandingkan target nasional	Persentase tenaga kerja formal masih 2,81
	Tingkat setengah pengangguran di Kab Manggarai justru meningkat, dimana target nasional menurun	Tingkat setengah pengangguran sebesar 92408
	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) menurun, dimana seharusnya sesuai target nasional meningkat	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) sebesar 1,78%

PILAR	Permasalahan	Isu Strategis
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB di Kab Manggarai memiliki selisih sebesar 6,70% dengan target nasional	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB masih 1,31%
	Jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan	Jumlah wisatawan mancanegara sebesar 339 jiwa
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Menurun	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 7757
	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit menurun sehingga tidak sesuai dengan target nasional	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kab Manggarai sebesar 19,14%
	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB Menurun, sehingga tidak sesuai dengan target nasional	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB di Kab Manggarai sangat kecil sebesar 0,002999
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Kab Manggarai menurun	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam sebesar 72,24
	Koefisien Gini di Kab Manggarai memiliki selisih sebesar 0,06 dengan target nasional	Koefisien Gini di Kab Manggarai sebesar 0,3
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi menurun	Rata-rata pertumbuhan
	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya menurun	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya mencapai 1,24
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB memiliki GAP sebesar 11,590% dari target nasional	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya sebesar 0,31%
	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik menurun	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik hanya sebesar 1,26
Lingkungan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau di Kab Manggarai justru menurun, sedangkan target nasional meningkat	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau mencapai 83042
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kab Manggarai memiliki selisih sebesar 25,97% dari target nasional	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak masih mencapai 74,03%
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani di Kab Manggarai memiliki selisih sebesar 7,36% dengan target nasional	Persentase sampah perkotaan yang tertangani masih mencapai 72,64%

PILAR	Permasalahan	Isu Strategis
Tata Kelola	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya justru menurun, sedangkan taget nasional adalah meningkat	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 48,39%
	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui justru menurun, sedangkan target nasional meningkat	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui sebesar 95% (atau stabil)

Sumber: Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

### 4.2.7.3. Keterkaitan Kelompok Isu Strategis dengan Indikator TPB

#### A. Pilar Sosial

Tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar Sosial di Kabupaten Manggarai meliputi tujuan 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun), tujuan 2 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan), tujuan 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia), tujuan 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua), dan tujuan 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan). Dari tujuan pembangunan tersebut dapat disimpulkan terdapat beberapa isu mencakup kemiskinan dan ketahanan pangan terkait pertanian berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu kesehatan masyarakat terkait pandemi COVID-19 juga menjadi perhatian khusus.

Tabel 4. 44. Keterkaitan Kelompok Isu Startegis Pilar Sosial dengan Indikator TPB

KELOMPOK ISU STRATEGIS	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB
Sosial	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
	1.3.1 .(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
	1.3.1 .(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.



KELOMPOK ISU STRATEGIS	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB
	1.3.1 .(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
	1.3.1 .(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
	1.4.1 .(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
	1.4.1 .(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
	1.4.1 .(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
	1.4.1 .(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
	1.5.1 .(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
	2.2.2 .(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
	3.2.1 *	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
	3.2.2 .(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
	3.3.1 .(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
	3.7.2 .(a)	Total Fertility Rate (TFR).
	3.8.1 .(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.
	4.1.1 .(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
	4.1.1 .(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
	4.1.1 .(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
	4.1.1 .(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
	4.4.1 *	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
	4.c.1 *	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
	5.2.1 *	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
	5.2.1 .(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
	5.2.2 .(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
	5.5.2 *	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

KELOMPOK ISU STRATEGIS	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB
	5.6.1 .(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
	5.6.1 .(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

Sumber: Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

### B. Pilar Ekonomi

Isu strategis di pilar ekonomi di Kabupaten Manggarai terkait pengangguran dan tenaga kerja, wisata, dan pengembangan ekonomi lokal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi tujuan 7 (Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua), tujuan 8 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua), tujuan 9 (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi), tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara) , dan tujuan 17 (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan).

**Tabel 4. 45. Keterkaitan Kelompok Isu Startegis Pilar Ekonomi dengan Indikator TPB**

KELOMPOK ISU STRATEGIS	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB
Ekonomi	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
	8.9.1*	Pariwisata terhadap PDB.
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
	8.10.1 .(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

KELOMPOK ISU STRATEGIS	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB
	10.1.1	Koefisien Gini.
	10.1.1	Rata-rata pertumbuhan
	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
	17.1.1 .(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
	17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Sumber: Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

### C. Pilar Lingkungan

Isu strategis pilar lingkungan yakni pencemaran lingkungan, kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah, yang kemudian disandingkan dengan Tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai meliputi tujuan 6 (Air Bersih dan Layak Sanitasi), tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), 12 (Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan), tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan tujuan 15 (Pelestarian dan pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan).

Tabel 4. 46. Keterkaitan Kelompok Isu Startegis Pilar Lingkungan dengan Indikator TPB

KELOMPOK ISU STRATEGIS	NO INDIKATOR	INDIKATOR TPB
Lingkungan	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau- pulau.
	6.2.1.( b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Sumber: Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

### D. Pilar Tata Kelola

Isu strategis untuk pilar tata Kelola terkait keamanan dan kelembagaan khususnya terkait penganggaran dengan Tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua,

dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

**Tabel 4. 47. Keterkaitan Kelompok Isu Startegis Pilar Tata Kelola dengan Indikator TPB**

KELOMPOK ISU STRATEGIS	NO	INDIKATOR TPB
Tata Kelola	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

*Sumber: Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026*

**4.2.8. Penentuan Isu Strategis Menggunakan Konsep *Dynamic Governance***

Isu strategis Kabupaten Manggarai dirumuskan menggunakan konsep *dynamic governance*. Konsep ini yang digunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 untuk menentukan isu strategis daerah di dalam RPJMD. Konsep *dynamic governance* ini kemudian diolah menggunakan tabel silang dengan memperhatikan isu strategis di tingkat nasional, Provinsi NTT, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Mangarai Timur. Isu strategis juga dirumuskan dengan mencermati RPJPD Kabupaten Manggarai, RTRW, evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya dan isu strategis dalam KLHS. Berikut adalah tabel operasional yang menggambarkan penentuan isu strategis Kabupaten Manggarai:

Tabel 4. 48. Penentuan Isu Strategis Kabupaten Manggarai

Kategorisasi Isu Strategis	Think Ahead		Think Across					Think Again		Isu Strategis RPJMD Kab. Manggarai Periode 2021-2026
	RPJPD Manggarai	RTRW Kab. Manggarai	Isu Internasional (SDGs, Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid 19)	Isu Strategis Nasional (RPJMN)	Isu Strategis Provinsi (RPJMD Provinsi NTT)	Isu Strategis Kab. Manggarai Timur	Isu Strategis Kab. Manggarai Barat	Isu Strategis KLHS	Evaluasi RPJMD Manggarai Periode 2016-2021	
Sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Manggarai		Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia	Pembangunan SDM: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kategori isu strategis pilar sosial	Kualitas sumber daya manusia masih rendah	Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
			Revolusi industri 4.0				Masih rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas			Masih rendahnya kesejahteraan sosial
			Pandemi Covid-19				Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pedesaan			

Kategorisasi Isu Strategis	Think Ahead		Think Across					Think Again		Isu Strategis RPJMD Kab. Manggarai Periode 2021-2026
	RPJPD Manggarai	RTRW Kab. Manggarai	Isu Internasional (SDGs, Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid 19)	Isu Strategis Nasional (RPJMN)	Isu Strategis Provinsi (RPJMD Provinsi NTT)	Isu Strategis Kab. Manggarai Timur	Isu Strategis Kab. Manggarai Barat	Isu Strategis KLHS	Evaluasi RPJMD Manggarai Periode 2016-2021	
			Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan			Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak	Masih tingginya tingkat pengangguran			
Ekonomi	Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Penataan Kelembagaan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Manggarai	Kategori isu strategis rumpun ekonomi	Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun  Revolusi industri 4.0  Pandemi Covid-19	Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal	Masih tingginya angka kemiskinan	Kategori isu strategis pilar ekonomi	Kemiskinan masih tinggi	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan
			Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan		Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)		Masih timpangnya struktur perekonomian		Pemerataan kesejahteraan belum optimal	

Kategorisasi Isu Strategis	Think Ahead		Think Across					Think Again		Isu Strategis RPJMD Kab. Manggarai Periode 2021-2026
	RPJPD Manggarai	RTRW Kab. Manggarai	Isu Internasional (SDGs, Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid 19)	Isu Strategis Nasional (RPJMN)	Isu Strategis Provinsi (RPJMD Provinsi NTT)	Isu Strategis Kab. Manggarai Timur	Isu Strategis Kab. Manggarai Barat	Isu Strategis KLHS	Evaluasi RPJMD Manggarai Periode 2016-2021	
			Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	rakyat Indonesia.			Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB		Pertumbuhan ekonomi cenderung menurun selama pandemi Covid-19	
Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang berwawasan ekologis dan berbasis tata ruang di Kabupaten Manggarai	Kategori isu strategis rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Tujuan 13: Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya				Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana yang baik	Kategori isu strategis pilar lingkungan	Kualitas lingkungan hidup mulai menurun	Belum optimalnya Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan
			Tujuan 15: Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan							

Kategorisasi Isu Strategis	Think Ahead		Think Across					Think Again		Isu Strategis RPJMD Kab. Manggarai Periode 2021-2026
	RPJPD Manggarai	RTRW Kab. Manggarai	Isu Internasional (SDGs, Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid 19)	Isu Strategis Nasional (RPJMN)	Isu Strategis Provinsi (RPJMD Provinsi NTT)	Isu Strategis Kab. Manggarai Timur	Isu Strategis Kab. Manggarai Barat	Isu Strategis KLHS	Evaluasi RPJMD Manggarai Periode 2016-2021	
			degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati							
Tata Kelola	Penataan Birokrasi, Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan dan Ketertiban Sosial Masyarakat Manggarai		Tujuan 16: Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level	Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi	Kategori isu strategis pilar tata kelola	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
			Revolusi industri 4.0 Pandemi Covid-19	Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law						



Kategorisasi Isu Strategis	Think Ahead		Think Across					Think Again		Isu Strategis RPJMD Kab. Manggarai Periode 2021-2026
	RPJPD Manggarai	RTRW Kab. Manggarai	Isu Internasional (SDGs, Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid 19)	Isu Strategis Nasional (RPJMN)	Isu Strategis Provinsi (RPJMD Provinsi NTT)	Isu Strategis Kab. Manggarai Timur	Isu Strategis Kab. Manggarai Barat	Isu Strategis KLHS	Evaluasi RPJMD Manggarai Periode 2016-2021	
				terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.						
Infrastruktur	Kota Ruteng sebagai pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan serta Kota Molas (Kota Asri).	Kategori isu strategis rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Tujuan 6: Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua	Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan an kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung prioritas ekonomi unggulan	rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas	Kategori isu strategis pilar ekonomi	Infrastruktur pendukung ekonomi dan pelayanan dasar belum memadai	Belum optimalnya Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan
			Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkebangan inovasi				Belum optimalnya penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung perekonomian			

Kategorisasi Isu Strategis	Think Ahead		Think Across					Think Again		Isu Strategis RPJMD Kab. Manggarai Periode 2021-2026
	RPJPD Manggarai	RTRW Kab. Manggarai	Isu Internasional (SDGs, Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid 19)	Isu Strategis Nasional (RPJMN)	Isu Strategis Provinsi (RPJMD Provinsi NTT)	Isu Strategis Kab. Manggarai Timur	Isu Strategis Kab. Manggarai Barat	Isu Strategis KLHS	Evaluasi RPJMD Manggarai Periode 2016-2021	
			Revolusi industri 4.0	baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.						
			Tujuan 11: Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan							

Sumber: Analisis Terhadap Berbagai Dokumen Perencanaan dan KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026

#### **4.2.9. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Manggarai**

Kabupaten Manggarai menghadapi isu strategis dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup. Isu strategis tersebut disusun berdasarkan permasalahan pembangunan daerah di berbagai urusan pemerintahan. Isu strategis juga disusun dengan memperhatikan dinamika isu strategis di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut merupakan uraian isu strategis Kabupaten Manggarai:

##### **4.2.9.1. Masih Rendahnya kesejahteraan sosial**

Isu strategis rumpun urusan sosial Kabupaten Manggarai yaitu masih rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan sinergitas kategori masalah pokok dari hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah rumpun urusan sosial dengan berbagai isu strategis rumpun sosial di tingkat nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kabupaten sekitar Kabupaten Manggarai. Isu rendahnya kesejahteraan sosial mewadahi beberapa urusan, yaitu keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pemberdayaan masyarakat dan desa; dan kebudayaan.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Belum optimalnya penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)
- b. Masih adanya gangguan terhadap kohesivitas sosial
- c. Rendahnya keberdayaan perempuan dan anak
- d. Masih rendahnya tingkat kemandirian desa
- e. Belum optimalnya pemberdayaan potensi kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu melakukan beberapa agenda prioritas untuk menjawab isu strategis tersebut. Misalnya dengan peningkatan penegakan Perda, peningkatan kebijakan responsif gender, peningkatan pelestarian budaya lokal, dan peningkatan status desa mandiri.

#### **4.2.9.2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan**

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal akibat menurunnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Manggarai.

Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya peningkatan kontribusi ekonomi dari sektor pengolahan, industri dan sektor non-sumber daya alam lainnya. Padahal beberapa sektor tersebut menjadi sebuah isu strategis yang menjadi perhatian nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya peningkatan kontribusi sektor ekonomi non-SDA dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Jika semakin tinggi kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, maka nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah di sektor non-tambang akan semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus memperhatikan aspek kekuatan. Kekuatan pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai dengan laju inflasi daerah. Kabupaten Manggarai harus mampu mengendalikan laju inflasi daerah dengan memperhatikan faktor-faktor determinannya. Salah satu upaya yang dapat dijalankan adalah pengendalian impor dan peningkatan produksi barang dan jasa dari dalam daerah. Upaya ini tentu harus diikuti dengan pengembangan jaringan pemasaran antara produsen dan konsumen di dalam daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai juga harus memperhatikan pengembangan Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) Labuan Bajo. Kabupaten Manggarai memiliki daya tarik wisata yang dapat dikembangkan seperti Todo dan Wae Rebo. Kedua destinasi ini harus dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan KSPN Labuan Bajo dan pariwisata Pulau Flores secara umum. Kabupaten Manggarai juga dapat

menopang pemenuhan kebutuhan hortikultura dan daging bagi konsumsi wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di wilayah KSPN Labuan Bajo. Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian yang diikuti oleh pengembangan industri pangan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung pengembangan KSPN Labuan Bajo.

Isu mengenai pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan juga masih menjadi perhatian utama bagi Kabupaten Manggarai selama beberapa tahun ke depan. Pemerataan kesejahteraan dinilai dengan indeks gini. Ketimpangan pendapatan antara penduduk pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Semakin menurun tingkat pengangguran di pedesaan dan perkotaan, maka pendapatan masyarakat akan semakin merata. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di pedesaan dapat menjadi upaya yang dapat dijalankan untuk menurunkan indeks gini, sekaligus menjadi pengungkit bagi perbaikan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di dalam Kabupaten Manggarai.

Isu kemiskinan juga menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan pada periode perencanaan ke depan. Isu ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran dapat ditekan, maka kemiskinan juga akan semakin menurun. Upaya ini dapat berjalan dengan baik kecuali jika terdapat faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh, seperti kebocoran ekonomi regional. Walaupun tingkat pengangguran terbuka dan produktivitas barang dan jasa di Kabupaten Manggarai bisa dinaikan, namun jika koneksi jaringan pemasaran antara produsen dengan konsumen tidak terjalin dengan baik, maka impor dari luar daerah dapat terjadi. Kondisi ini akan mengakibatkan uang yang beredar di Kabupaten Manggarai mengalir ke luar daerah, sehingga upaya pengentasan kemiskinan menjadi semakin melambat.

#### **4.2.9.3. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus penting dalam proses pembangunan baik di level daerah maupun nasional. Sumber daya manusia seringkali dijadikan sebagai salah satu tolok ukur daya

saing pembangunan. Pada level global, target pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara eksplisit menyasar pembangunan sosial yang meliputi pengembangan SDM. Melihat kebijakan nasional, pembangunan manusia juga menjadi salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pada level daerah, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 menempatkan isu SDM sebagai salah satu fokus pembangunan. Isu strategis yang berkaitan dengan SDM di level Provinsi lebih berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan terhadap semua penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SDM menjadi salah satu pilar utama yang menunjang pada pembangunan di sektor lainnya.

Secara umum, kualitas SDM di suatu daerah dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM dapat mengukur pembangunan manusia dengan melihat 3 komponen, yaitu pendidikan, kesehatan dan tingkat kehidupan layak. Capaian IPM Kabupaten Manggarai mengalami tren yang meningkat dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Manggarai setiap tahunnya adalah 0,8. Capaian IPM Kabupaten Manggarai pada tahun 2019 adalah 64,15. Capaian tersebut termasuk baik jika dibandingkan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan guna mengejar ketertinggalan dengan daerah lain seperti Kabupaten Ngada dan Ende.

Isu pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus utama pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai. Pemenuhan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kualitas pemberi layanan baik di bidang kesehatan maupun pendidikan masih perlu menjadi perhatian. Beberapa hal mendasar tersebut yang turut menentukan keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai.

#### **4.2.9.4. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah krusial yang menopang pembangunan daerah yang berkelanjutan. Aspek lingkungan hidup merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan di Kabupaten Manggarai meliputi tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan tujuan 15 (Pelestarian dan pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan).

Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup atau kecenderungan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dikarenakan terkendala beberapa aspek yakni kualitas udara yang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2019, dan mengalami peningkatan di tahun 2020. Begitu pula dengan kondisi tutupan lahan yang mengalami penurunan di tahun 2019, dan kembali meningkat di tahun 2020. Kualitas air mengalami peningkatan dan stagnan di angka 70 hingga tahun 2020, yang termasuk ke dalam kelas cukup. Adanya nilai yang fluktuatif ini juga disebabkan oleh belum adanya alat pengujian laboratorium yang lengkap yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan kualitas udara, air, dan tutupan lahan yang merupakan komponen penyusun indeks kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan lainnya yakni belum optimalnya pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA. Semakin berkurangnya daya tampung TPA eksisting yang menjadikan perlunya pembangunan lokasi TPA baru yang kemudian berhadapan dengan persoalan keterbatasan lahan. Beberapa agenda prioritas dalam lingkup urusan lingkungan hidup antara lain adalah peningkatan pengawasan lingkungan hidup, peningkatan sarana, prasarana, dan kapasitas pengendalian lingkungan hidup.

#### **4.2.9.5. Belum optimalnya Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pembangunan daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan

infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai masih perlu ditingkatkan. Kabupaten Manggarai masih terkendala beberapa permasalahan pada berbagai aspek. Pengelolaan sumber daya air, jaringan transportasi terutama kualitas jaringan jalan, telekomunikasi, serta infrastruktur pendukung yang belum optimal akan mempengaruhi tingkat konektivitas antar wilayah. Selain itu, ketersediaan utilitas seperti perumahan dan permukiman; akses air bersih dan air minum; ketersediaan sanitasi yang dapat diakses oleh semua kelompok termasuk orang dengan disabilitas menjadi indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai. Aspek lainnya yakni penataan ruang yang belum diselenggarakan dengan optimal berdampak pada daya saing pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Manggarai.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air, serta pemanfaatan air sesuai kebutuhan. Kabupaten Manggarai memiliki kendala pengelolaan sumber daya air terkait dukungan terhadap ketahanan pangan, salah satunya yakni jaringan irigasi. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi belum berjalan optimal, data tahun 2020 menyebutkan bahwa persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 68.789%, sedangkan Rasio Jaringan Irigasi di lahan budidaya pertanian masih sebesar 21,80%. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya panjang jaringan irigasi serta belum optimalnya jaringan irigasi eksisting dikarenakan kerusakan jaringan irigasi akibat rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan, serta bencana alam.

Data panjang jaringan jalan berdasarkan kelas jalan yakni Jalan Negara dan Jalan Provinsi dengan total panjang 166,04 km; Jalan Kabupaten 1493,73 km; dan Jalan Desa 410,87 km. Meskipun antar Kecamatan sudah saling terhubung, namun pendeknya total panjang jalan desa menunjukkan belum optimalnya pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa maupun kampung sehingga perencanaan dan pembangunan jalan masih perlu ditingkatkan. Disamping ketersediaan jalan, peningkatan konektivitas antar wilayah juga didukung oleh tersedianya pelayanan transportasi umum yang memadai. Kondisi transportasi umum di Kabupaten Manggarai masih belum



memadai, jumlah armada yang kurang memadai terutama di kecamatan yang berada jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Data Dinas Perhubungan tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah armada di Kota Ruteng mencapai 118 unit, sedangkan Kecamatan Satar Mese 5 unit, Kecamatan Reok 11 unit, Kecamatan Ruteng 0 unit, dan belum terdapat data untuk kecamatan lainnya. Selain itu, pengelolaan terminal dan trayek angkutan umum juga belum optimal. Data tahun 2019 menunjukkan terdapat 4 terminal di Kabupaten Manggarai yang kemudian menjadi 3 di tahun 2020. Perubahan tersebut mengakibatkan jalur dan trayek menjadi tidak sesuai sehingga diperlukan penataan dan pengelolaan lebih lanjut untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan transportasi.

Permasalahan utama terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase yaitu belum optimalnya akses terhadap pemukiman layak huni. Data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menunjukkan Rasio Rumah Layak huni di tahun 2020 sebesar 88,75%, sedangkan presentase Rumah Tangga menggunakan air bersih sebesar 80,90% dengan presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum sebesar 85,65%. Data tersebut menunjukkan nilai yang cukup baik, namun belum adanya ketersediaan data yang akurat menjadikan belum optimalnya akses terhadap rumah layak huni yang merata. Permasalahan infrastruktur lainnya yakni di bidang komunikasi dan informatika yaitu terbatasnya dan belum meratanya akses dan jangkauan telekomunikasi yang menyebabkan adanya kesenjangan perolehan informasi antara daerah Kota Ruteng dan sekitarnya dengan Kecamatan lainnya yang berada jauh dari pusat Ibukota Kabupaten.

Berbagai tantangan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Manggarai masih dihadapkan pada isu strategis yaitu perlunya peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa agenda prioritas terkait isu tersebut adalah peningkatan akses dan kualitas jaringan jalan, peningkatan fasilitas dan cakupan layanan

perhubungan, peningkatan kualitas permukiman, serta optimalisasi infrastruktur dan pemanfaatan IPTEK di Kabupaten Manggarai.

#### **4.2.9.6. Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kepatuhan hukum, responsivitas dalam pelayanan, dan profesionalitas. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkup internal pemerintah daerah maupun dalam relasinya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan menentukan efektivitas pembangunan di berbagai sektor lain.

Isu tata kelola pemerintahan aktual antara lain berupa penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mewujudkan birokrasi yang lincah dengan penyederhanaan struktur, regulasi, dan sistem pelayanan. Isu aktual tersebut perlu direspon oleh pemerintah daerah, agar tata kelola pemerintahan daerah dapat responsif terhadap perkembangan jaman dan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang diarahkan untuk segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam aspek pelayanan antar instansi pemerintah maupun pelayanan kepada publik. Kondisi saat ini pemerintah daerah telah menjalankan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada aspek perencanaan, keuangan, dan kinerja, meskipun masih terdapat beberapa kendala.

Realitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai pada beberapa aspek telah memiliki kinerja yang baik, antara lain capaian akuntabilitas keuangan yang sudah memiliki predikat Opini BPK WTP. Meskipun demikian, pada aspek lain, kinerja akuntabilitas belum optimal. Nilai SAKIP memiliki predikat B dengan nilai 61,06 pada 2019 dan EKPPD memiliki nilai 2,7951 pada 2018. Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sosial mengalami penurunan nilai dari 80,24 pada 2018 menjadi 79,77 pada 2019. Aspek penguatan integritas dan pengendalian intern

pemerintah daerah belum optimal yang ditandai dengan level SPIP 2 dan belum terdapat perangkat daerah yang menjalankan zona integritas. Pada aspek profesionalitas pegawai sebagai agen pelayan masyarakat memiliki capaian indeks profesionalitas pegawai 47,59 pada 2020.

Berdasarkan capaian kinerja beberapa aspek tata kelola pemerintahan tersebut menegaskan adanya isu strategis berupa **belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan** di Kabupaten Manggarai. Beberapa aspek di dalam isu tersebut yang perlu direspon dalam periode pembangunan mendatang antara lain pembangunan akuntabilitas kinerja dengan sistem manajemen kinerja yang baik antara kepala daerah dengan perangkat daerah, pembangunan sistem pelayanan publik yang responsif dan dikendalikan oleh survei kepuasan layanan secara reguler. Selain itu, tidak kalah penting peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah untuk memperkuat capaian dan komitmen pada kebijakan anti korupsi. Tata kelola pemerintahan mensyaratkan pula kolaborasi dan inovasi antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini kolaborasi antar perangkat daerah dengan mereduksi ego sektoral maupun kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sektor dunia usaha. Percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga menjadi agenda mendesak mengingat tuntutan perkembangan jaman dan kebijakan nasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan dan pelayanan publik.

# BAB V

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang kondisi makro pembangunan Kabupaten Manggarai yang akan dicapai dan dijalankan, yakni dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dipadukan dengan berbagai pendekatan perencanaan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan kondisi yang akan dicapai dan dihasilkan dalam periode pembangunan jangka menengah. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

### 5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan. Rumusan visi menjadi dasar dalam perumusan arah dan prioritas pembangunan. Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 masih berada dalam lingkup rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang adalah **“Manggarai yang Makmur, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan”**. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang dan berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis, maka dirumuskan Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, yaitu:

### **“MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING”**

Rumusan visi RPJMD periode 2021-2026 memiliki keterkaitan secara substansi maupun kata dengan Visi RPJPD. **Adil** merupakan rumusan pokok visi yang memiliki persamaan dengan visi RPJPD, sedangkan **Maju** dan **Berdaya**

**Saing** tidak terdapat di dalam visi RPJPD, namun tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut berupa harapan tentang kondisi daerah yang semakin maju dan berdaya saing di akhir periode pembuangan jangka panjang, sehingga mampu mencapai visi RPJPD makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan di tahun 2025.

Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 juga dioperasionalkan melalui jargon “**Manggarai Mberes**” yang artinya Manggarai Kuat. Hal tersebut merupakan bentuk operasionalisasi visi Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing melalui penguatan-penguatan pada sektor unggulan yang akan menjadi dasar penopang kekuatan Kabupaten Manggarai, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui jargon tersebut diharapkan kedepannya tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing memiliki peran untuk menciptakan Kabupaten Manggarai yang maju dan kuat ketahanan ekonomi dan sumber daya manusianya.

Penjelasan tentang setiap pokok-pokok visi RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 5. 1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<b>Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing</b>	<b>Manggarai</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memiliki makna <b>spasial</b> sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindari adanya ketimpangan.</li><li>Memiliki makna <b>masyarakat beserta sosial budaya Manggarai</b> yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.</li></ul>
	<b>Maju</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis.</li></ul>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal.</li> <li>• Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>
	Adil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.</li> <li>• Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan.</li> <li>• Adil dalam konteks <i>outcome</i> dan <i>impact</i> pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.</li> <li>• Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat.</li> <li>• Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan.</li> </ul>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adil menjadi kata kunci yang menjadi dasar bagi penyusunan misi sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan.</li> </ul>
	<b>Berdaya Saing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi.</li> <li>Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.</li> <li>Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.</li> </ul>

## 5.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

### 5.2.1. Misi 1 Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia

Masyarakat dunia dalam kondisi aktual sedang menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin dinamis dengan Revolusi Industri 4.0 yang

membawa digitalisasi di berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, juga tengah disibukkan penanganan Pandemi Covid-19 yang membawa dampak tidak saja bagi kesehatan, sekaligus bagi perekonomian dan kehidupan sosial. Melihat berbagai konteks lingkungan strategis tersebut, maka peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Manggarai merupakan misi penting yang harus dijalankan.

Peningkatan mutu SDM Manggarai dijalankan secara menyeluruh yang akan ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan mutu dan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan merupakan upaya prioritas dalam meningkatkan mutu SDM. Di samping aspek pendidikan dan kesehatan, mutu SDM juga ditopang pemajuan kebudayaan Manggarai. Kabupaten Manggarai memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan agar bermanfaat bagi SDM Manggarai yang tetap memiliki pijakan budaya yang kuat di tengah upaya menjawab tuntutan perkembangan global yang semakin cepat. Pembangunan yang berjalan juga diharapkan tidak membawa ketimpangan gender, sehingga dapat menyediakan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam menjalankan dan merasakan manfaat pembangunan. Di samping berprespektif gender, pembangunan mutu SDM yang inklusif juga ditempuh melalui peningkatan keberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan mutu SDM tidak kalah penting juga diperkuat dengan penguatan budaya literasi yang merupakan kebutuhan mendesak di tengah arus keterbukaan informasi, serta pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka menciptakan daya saing daerah dan mempersiapkan generasi penerus Manggarai.

### **5.2.2. Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Misi 2 terkait upaya pemulihan sektor perekonomian secara sistematis untuk mendukung kebijakan nasional dan memperkuat setiap sektor yang ada di dalamnya secara menyeluruh. Orientasi pembangunan perekonomian berupa penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif. Inklusivitas yang tercapai ketika pertumbuhan ekonomi, sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat.



Dalam hal ini kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin menurun di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin meningkat.

Kabupaten Manggarai membawa orientasi ekonomi kerakyatan dalam upaya mencapai ekonomi inklusif. Ekonomi kerakyatan merupakan sektor riil yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Manggarai. Manggarai memiliki sektor agro sebagai unggulan yang akan difasilitasi secara komprehensif mulai dari peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah hasil produksi, dan jaminan akses pasar. Ekonomi kerakyatan juga ditopang oleh sektor UMKM dan Koperasi yang akan difasilitasi dalam penguatan kelembagaan, penerapan inovasi dan perluasan pasar berbasis teknologi informasi. Dalam konteks penanaman modal dan perizinan, orientasi pembangunan ekonomi tetap terbuka bagi investasi, namun disertai upaya perlindungan bagi konten lokal dan sektor ekonomi kerakyatan. Pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan nilai tambah potensi lokal, berupa pengolahan pasca panen dan berbasis *home industry*, pengelolaan dan pengawasan sarana perdagangan, serta kemudahan perizinan bagi industri kecil berbasis digital. Pembangunan ekonomi kerakyatan terkait erat dengan pembangunan berbasis desa. Optimalisasi potensi lokal desa melalui BUMDesa maupun usaha ekonomi lainnya diharapkan mampu mengakselerasi perekonomian masyarakat, serta menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah pedesaan.

Upaya menjalankan Misi 2 juga ditopang dengan peningkatan kesempatan kerja, baik melalui pelatihan bagi calon tenaga kerja maupun penguatan kapasitas masyarakat agar dapat berwirausaha. Peningkatan kesempatan kerja diarahkan bersifat inklusif dengan membuka kesempatan luas bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk meningkatkan keterampilan. Akselerasi pembangunan perekonomian juga diperkuat dengan pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran mobilitas barang dan jasa, sarana-prasarana perhubungan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta infrastruktur irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Pembangunan infrastruktur juga terkait dengan pengentasan kemiskinan,

terutama dengan orientasi peningkatan rumah layak huni beserta fasilitasnya bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

### **5.2.3. Misi 3 Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup**

Upaya meningkatkan mutu lingkungan hidup perlu diangkat menjadi misi karena mengingat urgensi untuk pembangunan berkelanjutan yang memiliki orientasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup menentukan manfaat pembangunan untuk generasi saat ini maupun masa depan. Orientasi yang kuat kepada lingkungan hidup diharapkan menjadi pengendali bagi perencanaan maupun proses pembangunan yang akan berjalan, sehingga laju pembangunan mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang diangkat dalam Misi 3 memiliki dimensi luas, yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam aspek air, udara, dan tutupan lahan. Berbagai upaya yang perlu dijalankan dalam Misi 3, antara lain pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; perlindungan mata air di luar kawasan hutan dan pengelolaan sungai; serta pengelolaan masalah persampahan, yang salah satunya melalui pengolahan sampah terpadu dan partisipatif. Pengelolaan sampah berbasis komunitas merupakan upaya penting sebagai bentuk kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang tidak hanya membawa manfaat bagi lingkungan hidup, sekaligus berpotensi membawa peluang ekonomi bagi masyarakat desa/kelurahan.

Orientasi kepada lingkungan hidup tidak kalah penting juga terkait upaya menjalankan pembangunan yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang Kabupaten Manggarai adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian yang sinergis demi terwujudnya kehidupan seluruh masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata. Pembangunan yang berjalan diharapkan mampu menaati rencana pola ruang berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Ketaatan pembangunan pada tata ruang dan dikendalikan oleh

perspektif lingkungan hidup, maka diharapkan pula semakin meningkatkan ketangguhan daerah terhadap resiko bencana dan perubahan iklim.

#### **5.2.4. Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani**

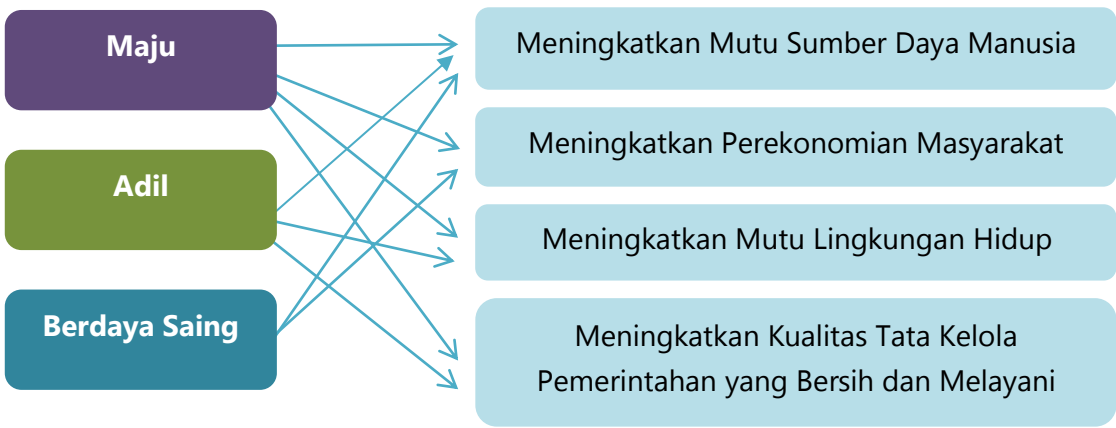
Upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berpijak pada upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain berupa akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, dan profesionalitas. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi penopang bagi efektivitas pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Misi 4 juga terkait dengan orientasi pembangunan berkelanjutan yang memiliki Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi instrumen bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik secara transparan dan sesuai kaidah regulasi merupakan langkah penting, namun tidak kalah penting pula adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik yang berorientasi kepada kinerja atau hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih perlu ditopang pula dengan penguatan integritas bagi aparatur maupun melalui pembangunan sistem pengendalian intern pemerintah. Penguatan profesionalitas aparatur juga menjadi fokus pembangunan, yang orientasinya berupa penguatan kompetensi dan kinerja pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Terwujudnya birokrasi yang semakin baik dalam memberikan pelayanan juga ditopang dengan penerapan standar pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga diperkuat dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi tidak hanya dalam perencanaan pembangunan dan demokrasi prosedural melalui pemilu, sekaligus juga diharapkan lebih substantif dalam mengawal proses pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini bertindak untuk memfasilitasi akses partisipasi maupun merekognisi ruang partisipasi dan mengakomodasi

aspirasi yang tumbuh di tengah masyarakat. Pelaksanaan prinsip partisipasi merupakan perwujudan semangat gotong royong yang merupakan nilai dan budaya luhur masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di Manggarai.

Substansi keempat misi tersebut diarahkan untuk mencapai kondisi yang telah dirumuskan di dalam visi RPJMD. Oleh karena itu, setiap rumusan misi memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok visi, sebagai berikut:



Gambar 5. 1. Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok-Pokok Visi

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan, maka rumusan visi dan misi Kabupaten Manggarai harus memiliki keterkaitan dengan visi dan misi perencanaan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Identifikasi keterkaitan visi dan misi antara RPJMD Kabupaten Manggarai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai dengan Visi dan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023
<b>Visi:</b> Terwujudnya Indonesia <b>Maju</b> yang <b>Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian</b> Berlandaskan Gotong Royong	<b>Visi:</b> Manggarai <b>Maju, Adil, dan Berdaya Saing</b>	<b>Visi</b> NTT <b>Bangkit</b> Mewujudkan Masyarakat <b>Sejahtera</b> dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026	RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023
<p><b>Misi 1:</b> Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia</p> <p><b>Misi 5:</b> Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p>	<p><b>Misi 1:</b> Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia</p>	<p><b>Misi 4:</b> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</p>
<p><b>Misi 2:</b> Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing</p> <p><b>Misi 3:</b> Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</p>	<p><b>Misi 2:</b> Meningkatkan Perekonomian Masyarakat</p>	<p><b>Misi 1:</b> Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Adil</p> <p><b>Misi 2:</b> Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i>)</p> <p><b>Misi 3:</b> Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan</p>
<p><b>Misi 4:</b> Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p>	<p><b>Misi 3:</b> Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup</p>	<p><b>Misi 3:</b> Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan</p>
<p><b>Misi 6:</b> Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p> <p><b>Misi 7:</b> Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Bagi pada Seluruh Warga</p> <p><b>Misi 8:</b> Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p> <p><b>Misi 9:</b> Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>	<p><b>Misi 4:</b> Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani</p>	<p><b>Misi 5:</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p>

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi, perencanaan pembangunan daerah harus menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam setiap tujuan memiliki rumusan sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang bersifat *outcome* atau *impact*. Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya dalam setiap misi sebagai berikut:

Tabel 5. 3. Tujuan dan Sasaran Misi 1 Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia										
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64,54	66,24	67,01	67,77	68,54	69,30	69,30
	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Indikator Sasaran: Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,37	7,61	7,72	7,82	7,93	8,04	8,04
		Indikator Sasaran: Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,41	13,53	13,66	13,78	13,91	14,03	14,03
		Indikator Sasaran: Rata-rata nilai ujian	Nilai	56,40	56,42	56,45	56,47	56,49	56,52	56,52
	Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	Indikator Sasaran: Indeks Literasi Masyarakat/ Indeks Minat Baca	Angka	12	12	14	14	15	15	15
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indikator Sasaran: Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	67,03	67,77	68,14	68,51	68,88	69,24	69,24
		Indikator Sasaran: Persentase kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	16,67	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia										
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Indikator Sasaran: Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,07	2,056	2.042	2,028	2,014	2,00	2,00
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Indikator Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Angka	n.a	9,19	9,33	9,47	9,61	9,75	9,75
		Indikator Sasaran: Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Angka	6	5	5	5	4	4	4
	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	Indikator Sasaran: Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	55%	64%	73%	82%	91%	100%	100%
Meningkatnya Keberdayaan sosial masyarakat		Indikator Tujuan: Angka PMKS	Angka	19.589	19.089	18.589	18.059	17.589	17.089	17.089
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indikator Sasaran: Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0,13	1,12	2,11	3,1	4,09	5,08	5,08



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia										
		Indikator Tujuan: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65,61	65,84	65,88	65,93	65,97	66,02	66,02
	Menurunnya ketimpangan gender	Indikator Sasaran: TPAK perempuan	Angka	63,11	64,16	65,22	66,27	67,32	68,37	68,37
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Indikator Sasaran: Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	26,5	25,45	24,39	23,34	22,29	21,24	21,24
		Indikator Sasaran: Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,021	0,019	0,018	0,016	0,015	0,014	0,014
Meningkatnya ketahanan sosial		Indikator Tujuan: Angka konflik sosial	Angka	6	6	5	4	4	3	3
	Meningkatnya ketertiban umum	Indikator Sasaran: Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persentase	721 kasus	13,86%	16,10%	28,79%	40,43%	67,87%	67,87%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia										
	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	Indikator Sasaran: Angka konflik sosial	Kasus	6	6	5	4	4	3	3
		Indikator Tujuan: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12	97,12
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indikator Sasaran: Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Indikator Sasaran: Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persentase	16.60%	23.74%	32.55%	41.36%	48.17%	58.60%	58.60%

Tabel 5. 4. Tujuan dan Sasaran Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat										
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		Indikator Tujuan: Laju pertumbuhan ekonomi	Angka	-0,79	4,93	5,19	5,20	5,22	5,23	5,23
		Indikator Tujuan: PDRB Per Kapita (ADHK, ribu Rp)	Ribu Rp per penduduk	9.572	10.125	10.497	10.885	11.288	11.706	11.706
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Indikator Sasaran: Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	0,86	2,44	2,93	3,32	3,84	3,85	3,85
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Indikator Sasaran: Laju pertumbuhan sub-sektor perikanan	Angka	0,86	2,44	2,93	3,32	3,84	3,85	3,85
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Indikator Sasaran: Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	-1,30	5,62	5,85	6,08	6,31	6,53	6,53
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Indikator Sasaran: Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	-32,94	4,56	5,59	5,63	5,68	5,72	5,72

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat										
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	<b>Indikator Sasaran:</b> Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Angka	-4,63	5,16	5,44	5,73	6,01	6,30	6,30
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	NA	5	5	5	5	5	25
		<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	NA	5	5	5	5	5	25
	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	<b>Indikator Sasaran:</b> Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	53,21	56,15	59,08	62,02	64,95	67,88	67.88
	Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	72	76,2	79,7	81,7	84,8	88	88
	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	<b>Indikator Sasaran:</b> Presentase Luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	77	81,71	86,42	91,13	95,84	100	100
	Meningkatnya pelayanan perhubungan	<b>Indikator Sasaran:</b> Rasio Konektivitas	Angka	NA	0,81	0,84	0,85	0,86	0,89	0.89

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat										
		Indikator Sasaran: Kinerja Lalu lintas	Angka	NA	46,22	49,37	53,65	59,37	65,94	65,94
		Indikator Tujuan: Laju inflasi	Angka	1,84	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indikator Sasaran: Indeks ketahanan pangan	Angka	71,70	74,60	76,09	77,99	79,94	81,94	81,94
	Meningkatnya stabilitas harga barang	Indikator Sasaran: Indeks harga konsumen	Angka	106,28	110,57	112,79	115,04	117,34	119,69	119,69
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan		Indikator Tujuan: Indeks gini	Angka	0,295	0,289	0,286	0,283	0,280	0,276	0,276
	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persentase	NA	90%	92,5%	95%	97,5%	100%	100%
		Indikator Sasaran: Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persentase	NA	50%	55%	60%	65%	70%	70%
Menurunnya kemiskinan		Indikator Tujuan: Tingkat kemiskinan	Angka	20,34	19,47	18,88	18,30	17,71	17,12	17,12
	Menurunnya pengangguran	Indikator Sasaran: Tingkat pengangguran terbuka	Angka	4,09	3,09	2,84	2,58	2,33	2,08	2,08

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat										
	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Indikator Sasaran: Rasio Rumah Layak Huni	Angka	88,75	90,75	91,75	92,75	93,75	94,75	94,75
		Indikator Sasaran: Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase	74,03	78,092	81,037	83,982	86,927	89,872	89,872
		Indikator Sasaran: Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase	86	88	89	91	92	93	93
	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Indikator Sasaran: Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persentase	12	22	32	42	52	62	62
Meningkatnya tingkat kemandirian desa		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,576	0,601	0,613	0,625	0,638	0,650	0,650
	Meningkatnya keberdayaan desa	Indikator Sasaran: Persentase status desa berkembang	Persentase	32,41	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	65,51

Tabel 5. 5. Tujuan dan Sasaran Misi 3 Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator	Angka	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup										
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		<b>Indikator Tujuan:</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	80,59	81,36	81,36	81,75	81,86	82,16	82,16
	Meningkatnya kualitas air	<b>Indikator Sasaran:</b> Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70	71,50	71,50	72,00	72,00	72,50	72,50
	Meningkatnya kualitas udara	<b>Indikator Sasaran:</b> Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87,87	88,37	88,37	88,87	88,87	88,87	88,87
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	<b>Indikator Sasaran:</b> Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	85,32	85,32	85,32	85,32	85,82	86,32	86,32
	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase sampah tertangani	Persentase	18,74%	20,97	23,21	25,44	27,68	29,91	29,91
		<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persentase	NA	26,13	31,24	36,35	41,46	46,57	46,57

Tabel 5. 6. Tujuan dan Sasaran Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayanai										
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, profesional, dan responsif terhadap pelayanan publik		Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	49,83 C	50,10 CC	54,00 CC	56,00 CC	58,00 CC	60,10 B	60,10 B
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indikator Sasaran: Nilai SAKIP	Angka	B	63.1 (B)	64.5 (B)	66 (B)	67.5 (B)	68 (B)	68 (B)
		Indikator Sasaran: Peringkat EKPPD	Peringkat		Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Indikator Sasaran: Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indikator Sasaran: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	NA	Perlu Perbaikan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Indikator Sasaran: Indeks Kapasitas Fiskal	Angka	0.541 (Rendah)	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Indikator Sasaran: Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko	Angka		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indikator Sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	1,91	2,1	2,4	2,6	2,8	3	3



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		<b>Indikator Sasaran:</b> Indeks Profesionalitas ASN	Angka	47,59	71 (Sedang)	74 (Sedang)	78 (sedang)	81 (Tinggi)	83 (Tinggi)	83 (Tinggi)
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	<b>Indikator Sasaran:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,59	80	81,5	82,5	83,5	84,5	84,5

# **BAB VI**

## **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi adalah cara untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah fokus dan lokus dari strategi. Program pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi. Program ini memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Daerah. Berikut adalah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Manggarai:

### **6.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang berkesinambungan untuk mewujudkan misi yang tepat sasaran serta mencapai tujuan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dari pemetaan masalah pembangunan pada Bab VI. Strategi dan arah kebijakan disusun dengan mengkaji potensi serta tantangan di Kabupaten Manggarai. Strategi merupakan langkah atau tindakan sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing tujuan dan sasaran yang diurutkan berdasarkan misi kepala daerah terpilih di Kabupaten Manggarai:

Tabel 6. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai 2021-2026

Visi: Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing			
Misi 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tingkat PAUD	Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pendidikan tingkat PAUD
			Standarisasi penyelenggaraan PAUD
			Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
		Peningkatan fasilitas pendidikan	Pembebasan lahan yang layak bangun
			Pembaharuan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
			Peningkatan efektifitas bangunan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan kompetensi guru
			Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
			Peningkatan akreditasi sekolah SD dan SMP
			Peningkatan kompetensi siswa
			Pengembangan kurikulum lokal
		Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pendidikan	Peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan dana pendidikan
			Peningkatan monitoring pengelolaan sistem pendidikan
	Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	Peningkatan budaya baca dan literasi	Peningkatan fasilitas penunjang layanan perpustakaan
			Peningkatan koleksi buku perpustakaan
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan
			Pengembangan layanan perpustakaan
			Peningkatan pembinaan perpustakaan

			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan membaca
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	Peningkatan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
			Peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan
			Peningkatan penanganan komplikasi saat persalinan
			Peningkatan penanganan komplikasi pasca persalinan/nifas
			Peningkatan kunjungan K1 dan K4
		Peningkatan kualitas kesehatan bayi	Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
			Peningkatan gizi bayi
			Peningkatan imunisasi dasar Lengkap (IDL)
		Peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting	Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil
			Pemenuhan gizi bayi dan balita
			Optimalisasi pemberian PMT
			peningkatan penerapan PHBS
		Peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang
			Peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyakit menular dan tidak menular
		Peningkatan penanganan ODGJ	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa (ODGJ)
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan
			Peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas
			Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan
			Peningkatan pengawasan obat dan makanan
		Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Peningkatan peran kader kesehatan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan kesehatan

	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan penyelenggaraan dan cakupan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan partisipasi/akseptor KB aktif
			Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta advokasi kepada masyarakat terkait pentingnya KB
			Peningkatan pendataan fasilitas Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
		Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk	Pengembangan <i>grand design</i> kependudukan
			Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pengembangan organisasi kepemudaan	Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan
			Peningkatan dukungan dan fasilitasi aktivitas dan kegiatan organisasi kepemudaan
		Optimalisasi peran dan pengembangan organisasi kepramukaan	Peningkatan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah
		Peningkatan fasilitasi dan dukungan terhadap bidang keolahragaan	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
			Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM pelatih
			Peningkatan pembinaan atlet muda berdasarkan minat dan bakat
			Peningkatan fasilitasi terhadap organisasi keolahragaan daerah
	Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	Peningkatan pelestarian budaya	Peningkatan penelitian potensi dan perkembangan budaya
			Optimalisasi perencanaan pelestarian budaya
			Peningkatan pemeliharaan dan perlindungan situs budaya
			Peningkatan pemanfaatan budaya
Meningkatnya Keberdayaan	Meningkatnya kesejahteraan	Optimalisasi penanganan PMKS	Peningkatan verifikasi dan validasi data PMKS

sosial masyarakat	sosial masyarakat		Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
			Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
		Peningkatan kualitas pelayanan sosial	Peningkatan kapasitas pekerja sosial
			Peningkatan cakupan pelayanan PMKS
	Menurunnya kesenjangan gender	Optimalisasi peran perempuan dalam politik	Peningkatan kapasitas perempuan
			Peningkatan minat perempuan dalam politik
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan fasilitas pendampingan perempuan
			Peningkatan peran lembaga perlindungan perempuan (terutama keluarga pekerja migran)
		Peningkatan hak-hak anak	Optimalisasi desa dan paroki layak anak
	Meningkatnya ketahanan sosial	Peningkatan penegakan Perda	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda
			Peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP
		Peningkatan pencegahan potensi konflik sosial	Peningkatan deteksi dini konflik sosial
			Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
			Peningkatan peran lembaga adat
			Peningkatan wawasan kebangsaan
			Peningkatan kerukunan umat beragama
		Peningkatan pemberdayaan ormas dan orpol	Peningkatan partisipasi politik masyarakat
			Peningkatan pembinaan organisasi politik
			Peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan Desa tangguh bencana
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana
			Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana
			Optimalisasi penanganan pasca bencana

		Optimalisasi penanganan kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
			Peningkatan kapasitas pemadam kebakaran
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur penahan erosi
			Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur penahan banjir
			Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur penahan abrasi
	Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Peningkatan produksi komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
			Pengembangan gerakan petani milenial
			Peningkatan ketersediaan benih unggul bersubsidi
			Peningkatan ketersediaan pupuk bersubsidi
			Peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian
			Penurunan serangan hama penyakit
			Peningkatan kualitas prasarana pertanian lainnya
			Pemanfaatan lahan tidur
		Peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan kapasitas SDM peternak
			Peningkatan penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis
			Peningkatan pemanfaatan teknologi peternakan
			Peningkatan ketersediaan bibit unggul dari dalam daerah
			Peningkatan ketersediaan pakan ternak dari dalam daerah
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan kualitas prasarana pendukung peternakan lainnya
Peningkatan populasi ternak	Peningkatan kelahiran ternak		
Penurunan kematian ternak			

			Penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan penyakit lainnya
		Peningkatan kualitas produk pertanian dan peternakan	Optimalisasi standarisasi penanganan pasca panen
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan kapasitas SDM nelayan
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan tangkap
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan kapasitas SDM perikanan budidaya
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya
		Peningkatan kualitas produk perikanan	Peningkatan standarisasi produk perikanan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri	Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (fokus: pertanian, perikanan, tenun, mebel dan bambu)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan akses permodalan
			Pengembangan metode / teknologi pengolahan modern
			Peningkatan ketersediaan bahan baku industri tenun
		Peningkatan mutu produk industri tenun, mebel dan bambu	Peningkatan kapasitas SDM pelaku industri tenun, mebel dan bambu
			Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung industri
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Optimalisasi pengembangan daya tarik destinasi wisata
			Optimalisasi pemasaran destinasi wisata
			Optimalisasi kerjasama pengembangan wisata
			Pengembangan kapasitas pelaku wisata dan masyarakat
		Peningkatan <i>spend of money</i> wisatawan	Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif (terutama kerajinan)
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Optimalisasi kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	Optimalisasi penerapan metode marketing-mix
			Optimalisasi jaringan perdagangan produk pertanian dan perikanan
			Penurunan kasus sengketa perdagangan



		Revitalisasi pasar tradisional	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perdagangan
			Peningkatan kapasitas SDM pedagang
			Optimalisasi akses bantuan permodalan
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Peningkatan minat investasi	Optimalisasi identifikasi potensi investasi
			Peningkatan promosi potensi investasi
			Peningkatan kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kegiatan penanaman modal secara online (LKPM online)
		Peningkatan kualitas perizinan	Peningkatan kapasitas SDM
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perizinan
	Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Peningkatan pemerataan pembangunan jalan
			Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya
			Peningkatan pengawasan konstruksi jalan dan jembatan
	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Optimalisasi kualitas jaringan drainase perkotaan	Peningkatan ketersediaan jaringan drainase perkotaan
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan
	Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi teknis primer	Pembangunan jaringan irigasi Primer
			Pemeliharaan/rehabilitasi Jaringan Irigasi primer
			Peningkatan jaringan irigasi primer
	Meningkatnya pelayanan perhubungan	Peningkatan layanan transportasi umum	Optimalisasi penataan trayek angkutan umum
			Peningkatan jumlah trayek angkutan umum
		Peningkatan kelaikan angkutan umum	Peningkatan ketersediaan peralatan pengujian kendaraan sesuai standar akreditasi
			Peningkatan kualifikasi SDM dalam bidang Perhubungan
		Peningkatan ketersediaan sarana dan	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan terutama penerangan jalan dan trotoar

		prasarana perlengkapan jalan dan sungai	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan
			Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal
			Optimalisasi pengelolaan terminal
			Optimalisasi Koordinasi dengan mitra kerja dalam bidang pelayaran (Pol Air, Sabandar Pelabuhan dan Stakeholder lainnya)
			Peningkatan pengawasan jalur sungai
			Peningkatan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal
			Peningkatan pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat
			Peningkatan kualitas tenaga bidang pelayaran
		Optimalisasi pengelolaan parkir	Optimalisasi Penataan dan Pengelolaan Lahan Parkir
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola parkir
			Peningkatan sarana dan prasarana parkir yang memadai
		Peningkatan upaya pengendalian volume kendaraan pada ruas rawan kemacetan	Peningkatan ketersediaan dokumen andalalin (analisis dampak lalu lintas); tatralok (tataran transportasi lokal); serta manajemen dan rekayasa lalu lintas
			Peningkatan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan
		Peningkatan keterjangkauan pangan	Optimalisasi fungsi lumbung pangan
			Penurunan daerah rawan pangan

		Peningkatan pemanfaatan pangan	Peningkatan diversifikasi pangan lokal (seperti sorgum, jagung, ubi dan lain sebagainya)
			Penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan
	Meningkatnya stabilitas harga barang	Peningkatan kelancaran distribusi barang	Peningkatan ketersediaan barang lokal
			Peningkatan stabilitas harga barang pokok dan barang penting
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Peningkatan kualitas manajerial koperasi	Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi
			Peningkatan pengawasan koperasi
		Peningkatan omzet usaha mikro	Peningkatan kapasitas produksi usaha mikro
			Peningkatan kapasitas pemasaran usaha mikro
Menurunnya kemiskinan	Menurunnya pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
			Peningkatan penempatan tenaga kerja
		Penurunan konflik/ kasus hubungan industrial	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial
	Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan ketersediaan RLH
			Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak
			Peningkatan pengembangan kawasan permukiman terpadu
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh
			Optimalisasi pendataan rumah korban bencana

			Peningkatan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
			Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan PSU di kawasan permukiman dan perumahan	Peningkatan rumah tangga yang teraliri listrik
		Optimalisasi pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Peningkatan ketersediaan jaringan drainase lingkungan
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan
			Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis
			Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
		Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
			Peningkatan pembangunan sanitasi yang menjamin akses dan partisipasi semua kelompok/ Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan air minum	Peningkatan ketersediaan jaringan perpipaan air bersih
			Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan	Peningkatan perencanaan Perda Tata Ruang

	penataan ruang	pengendalian tata ruang	Peningkatan pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kabupaten
			Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perda tata ruang
			Peningkatan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan spasial
			Peningkatan ketersediaan dokumen RDTR
		Optimalisasi penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	Peningkatan data kepemilikan lahan masyarakat yang belum tersertifikat dan bersertifikat
		Peningkatan ketersediaan bangunan	Peningkatan ketersediaan gedung dan prasarana lainnya
		Peningkatan kualitas bangunan	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan
			Peningkatan pengawasan bangunan
			Optimalisasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
			Optimalisasi Pembinaan jasa konstruksi
			Peningkatan kualitas tenaga terampil konstruksi
Meningkatnya tingkat kemandirian desa	Meningkatnya keberdayaan desa	Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa	Peningkatan kapasitas dan peran Bumdes
			Peningkatan tertib administrasi
			Optimalisasi teknologi tepat guna
			Peningkatan peran PKK

			Optimalisasi fungsi lembaga adat di desa
			Peningkatan penataan desa
<b>Misi 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Optimalisasi pengendalian pencemaran air	Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah
			Peningkatan ketersediaan peralatan laboratorium lingkungan
			Optimalisasi pemantauan kualitas air
			Optimalisasi Konservasi mata air belum optimal
			Peningkatan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas udara	Optimalisasi pengendalian pencemaran udara	Peningkatan ketersediaan alat ukur kualitas udara
			Optimalisasi pemantauan kualitas udara
	Meningkatnya kualitas tutupan vegetasi	Optimalisasi ketersediaan dan kualitas Tutupan lahan	Peningkatan ketersediaan RTH publik perkotaan
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Optimalisasi pengelolaan persampahan	Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA
			Peningkatan ketersediaan TPA
			Peningkatan ketersediaan sarana persampahan di TPA
			Peningkatan ketersediaan TPS
			Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS

			Peningkatan pengelolaan sampah 3R
			Peningkatan penanganan sampah berbasis komunitas
		Optimalisasi pengelolaan limbah B3	Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3
			Peningkatan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbayu dan beracun (limbah B3)
MISI 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel, Professional, dan responsif terhadap pelayanan publik	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan	Peningkatan sinergisitas antar dokumen perencanaan
			Peningkatan kualitas penerapan TIK dalam perencanaan
		Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi	Peningkatan kualitas data kinerja
			Pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan
		Peningkatan pengendalian penerapan SAKIP	Peningkatan kualitas indikator kinerja berbasis <i>outcome</i>
		Peningkatan efektifitas sistem pengendalian kebijakan daerah	Peningkatan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Peningkatan kualitas produk hukum daerah
			Peningkatan pengendalian kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan
			Peningkatan koordinasi penyelesaian persoalan pengelolaan SDA
			Peningkatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan

			Peningkatan pengendalian kebijakan bidang administrasi umum
			Peningkatan kualitas kelembagaan daerah
			Peningkatan fasilitasi pendampingan penerapan SAKIP di OPD
			Peningkatan pelayanan protokol dan kehumasan
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	peningkatan kualitas administrasi desa
		Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD
			Pengembangan penggunaan TIK dalam fasilitasi tugas dan fungsi DPRD
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Optimalisasi TIK dalam pelaporan keuangan
			Peningkatan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan daerah
		Peningkatan pengelolaan aset daerah	Peningkatan pemutakhiran inventarisasi aset
			Peningkatan legalisasi tanah pemerintah daerah
		Peningkatan kinerja keuangan daerah	Peningkatan <i>reward and punishment</i> dalam penyerapan belanja
			Peningkatan penyusunan DAB penyerapan anggaran sesuai standar
		Peningkatan pengelolaan	Penyusunan/revisi kebijakan (Perda/Perbup) tentang objek dan tarif pajak serta retribusi

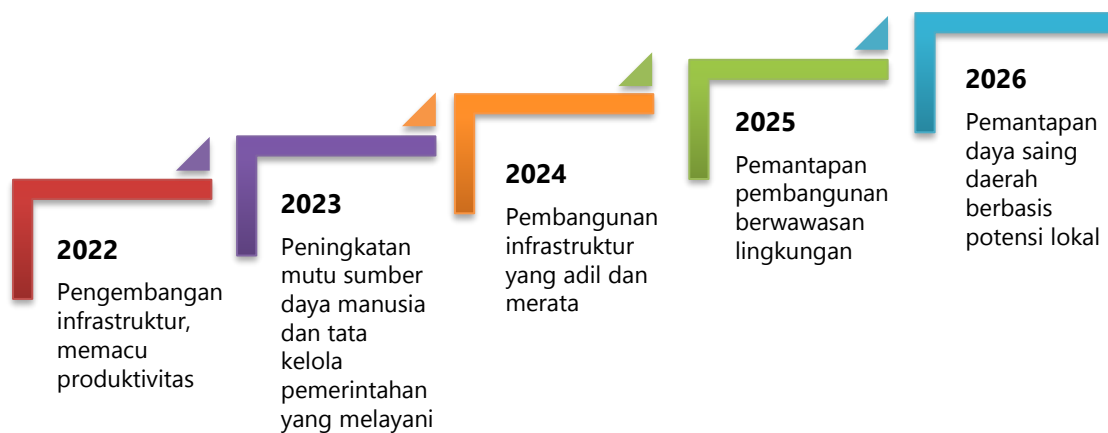


		kapasitas fiskal daerah	Ekstensifikasi pajak dan retribusi
			Peningkatan inovasi melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi
		Peningkatan sistem pengawasan	Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah
			Penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
			Peningkatan perangkat daerah dalam menjalankan zona integritas
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Peningkatan akses informasi publik	Peningkatan kualitas layanan informasi publik
			Peningkatan jangkauan diseminasi informasi publik
			Penguatan PPID dan PPID pembantu di OPD
			Peningkatan pengembangan kelompok informasi masyarakat
		Peningkatan kualitas integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan kualitas tata kelola TIK
			Peningkatan infrastruktur teknologi dan informasi
			Peningkatan ketersediaan dokumen pendukung TIK
			Peningkatan keamanan informasi pemerintah
		Peningkatan sistem merit	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai

		dalam manajemen kepegawaian	Peningkatan kinerja pegawai
			Peningkatan disiplin pegawai
			Pemenuhan kebutuhan jabatan
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan pengendalian kualitas pelayanan pubik	Peningkatan Sistem pengendalian pelayanan publik
			Peningkatan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
			Peningkatan fasilitas pendukung pelayanan kecamatan
		Peningkatan peran kecamatan dalam menjalankan fungsi kewilayahan	Peningkatan fasilitasi pemberdayaan desa/kelurahan
			Peningkatan kejelasan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten
		Peningkatan jangkauan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan kualitas pelayanan dokumen
			Perluasan jangkauan akses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
		Peningkatan penyelamatan dan perlindungan arsip	Peningkatan sistem pengelolaan arsip
			Peningkatan pembinaan arsip terhadap OPD

6.2. Tema dan Fokus Pembangunan

Penentuan tema/fokus pembangunan tahunan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Tema/fokus pembangunan daerah memberikan panduan dan arahan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan pembangunan pada akhir periode perencanaan. Fokus/tema pembangunan tahunan Kabupaten Manggarai dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



**Gambar 6. 1. Tema/ Fokus Pembangunan Kabupaten Manggarai**

Tema/ fokus pembangunan pada tahun pertama (2022) adalah pengembangan infrastruktur, meningkatkan produktivitas. Tema ini diangkat untuk mengembangkan infrastruktur guna memperbaiki kinerja perekonomian yang menurun akibat pandemi Covid-19. Tema ini kemudian dilanjutkan dengan tema/ fokus pembangunan tahun ke dua (2023), yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang melayani. Tema ini dipilih untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Kabupaten Manggarai dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

Tema/ fokus pembangunan pada tahun ketiga (2024) adalah pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara adil dengan lokus di wilayah-wilayah tertinggal. Pembangunan dijalankan untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Upaya ini dijalankan untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Manggarai, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang pembangunan dapat terwujud.

### 6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program yang langsung mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah. Program ini memiliki daya ungkit yang besar, oleh karena itu berbagai program ini mendapat prioritas yang lebih besar. Berikut adalah program pembangunan daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026:

Tabel 6. 2. Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia																
Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	64,54	66,24		67,01		67,77		68,54		69,30		69,30		
Sasaran: Meningkatnya akses, kualitas, dan daya saing pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,37	7,61		7,72		7,82		7,93		8,04		8,04		Dinas Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,41	13,53		13,66		13,78		13,91		14,03		14,03		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Rata-rata nilai ujian	Angka	56,40	56,42		56,45		56,47		56,49		56,52		56,52		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Angka	49,53	49,66	50.000.000	49,78	815.000.000	49,91	50.000.000	50,03	74.533.476	50,16	100.000.000	50,16	1.089.533.476	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	93,77	94,04	16.199.390.550	95,08	17.082.568.610	96,58	15.054.057.383	98,08	13.818.551.199	100,00	12.991.700.837	100,00	75.146.268.579	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	100	100	8.948.283.450	100	9.570.421.654	100	8.013.768.175	100	8.459.656.020	100	8.267.256.828	100	43.259.386.128	
	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	93,77	100	44.811.400.000	100	44.835.558.496	100	44.811.400.000	100	44.811.400.000	100	44.811.400.000	100	224.081.158.496	
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan		100	100	1.611.000.000	100	1.711.000.000	100	1.661.000.000	100	1.611.000.000	100	1.611.000.000	100	8.205.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen														
	Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	25,38	100	4.142.80 0.000	100	4.242.8 00.000	100	4.142.8 00.000	100	4.092.8 00.000	100	4.092.800.000	100	20.714.00 0.000	
Program pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Persen	N/A	26,45	19.568.3 90.955	26,91	19.521. 170.156	27,37	18.371. 170.15 6	27,83	17.521. 170.156	28,29	17.371.170.15 6	28,29	92.353.07 1.579	
	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikat	Persen	N/A	56,12	222.000. 000	58,92	229.992 .000	61,73	221.98 2.240	64,53	221.982 .240	67,34	221.982.240	67,34	1.117.938 .720	
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD dan SMP yang terakreditasi	Persen	75	75,3	600.000. 000	75,59	621.600 .000	75,89	599.95 2.000	76,18	599.952 .000	76,48	588.946.482	76,48	3.010.450 .482	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pengembangan kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	40,70	100.000.000	52,53	259.000.001	61,76	200.000.000	70,99	255.379.567	80,22	264.573.231	80,22	1.078.952.799	
	Persentase siswa yang menjuarai perlombaan	Persen	N/A	1,75	50.000.000	3,5	51.800.000	5,26	49.996.000	7,01	70.000.000	8,77	100.000.000	8,77	321.796.000	
Sasaran: Meningkatkan literasi/minat baca masyarakat	Indeks Literasi Masyarakat/Indeks Minat Baca	Angka	12	12		14		14		15		15		15		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pembangunan Daerah																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pembinaan perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0358	0,0360	202.550. 000	0,0361	136.500 .000	0,0362	-	0,0364	-	0,0365	-	0,0365	339.050.0 00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n	
	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	Persen	0,0059%	0,0059%	748.693. 100	0,0088 %	748.693 .100	0,0118 %	748.69 3.100	0,0147 %	748.693 .100	0,0177 %	748.693.100	0,0177 %	3.743.465 .500		Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
	SKM layanan perpustakaan	Nilai	N/A	3,064	34.548.2 00	3,065	44.548. 200	3,066	34.548. 200	3,067	34.548. 200	3,070	34.548.200	3,070	182.741.0 00		
	Rasio kunjungan perpustakaan	Rasio	0,051	0,051	24.509.5 00	0,053	50.000. 000	0,056	50.000. 000	0,058	38.770. 000	0,061	38.770.000	0,061	202.049.5 00		
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen	NA	6	13.385.0 00	8	40.381. 000	10	40.381. 000	12	40.381. 000	14	30.381.000	14	164.909.0 00		



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	67,03	67,7		68,14		68,51		68,88		69,24		69,24		Dinas Kesehatan dan RSUD
	Persentase Kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Persen	16,67	100		100		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah																
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,7	100	15.532.194.148	100	15.379.923.615	100	15.644.810.858	100	15.555.462.826	100	15.569.929.432	100	15.532.194.148	
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan	Persen	79,7	100	3.601.596.574	100	3.601.596.574	100	3.707.551.469	100	3.671.812.258	100	3.677.598.901	100	18.260.155.776	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pelayanan kesehatan															
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	90,2	100	12.518.549.648	100	12.366.279.115	100	12.631.166.353	100	12.541.818.326	100	12.556.284.932	100	62.614.098.374	
	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	79,9	100	3.601.596.574	100	3.601.596.574	100	3.707.551.469	100	3.671.812.258	100	3.677.598.901	100	18.260.155.776	
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	60,33	100	3.601.596.574	100	3.601.596.574	100	3.707.551.469	100	3.671.812.258	100	3.677.598.901	100	18.260.155.776	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	6,38	100	3.601.59 6.576	100	3.601.5 96.576	100	3.707.5 51.469	100	3.671.8 12.258	100	3.677.598.901	100	18.260.15 5.780	
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	40,1	100	3.601.59 6.574	100	3.601.5 96.574	100	3.707.5 51.469	100	3.671.8 12.258	100	3.677.598.901	100	18.260.15 5.776	
	Persentase balita gizi kurang	Persen	13,6	12,06	13.284.9 00.748	11,28	13.132. 630.215	10,51	13.397. 517.45 3	9,74	13.308. 169.426	8,97	13.322.636.03 2	8,97	66.445.85 3.874	
	Prevalensi stunting	Persen	21,9	19,4	12.961.3 53.498	16,90	12.809. 082.965	14,40	13.073. 970.20 3	11,90	12.984. 622.176	9,40	12.999.088.78 2	9,40	64.828.11 7.624	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Persen	100	100	12.586.0 13.248	100	12.433. 742.715	100	12.698. 629.95 3	100	12.609. 281.926	100	12.623.748.53 2	100	62.951.41 6.374	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pelayanan TBC sesuai standar															
	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persen	21	100	5.891.15 2.898	100	5.738.8 82.365	100	6.003.7 69.603	100	5.914.4 21.576	100	5.928.888.182	100	29.477.11 4.624	
	Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persen	100	100	5.926.15 7.898	100	5.773.8 87.365	100	6.038.7 74.603	100	5.949.4 26.576	100	5.963.893.182	100	29.652.13 9.624	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	Persen	72,9	100	2.375.86 1.686	100	2.375.8 61.686	100	2.640.7 48.924	100	2.551.4 00.897	100	2.565.867.503	100	12.509.74 0.696	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	91.23	92.05.00	9.007.823.686	93.76	9.007.823.686	95.03.00	9.272.710.924	96.03.00	9.183.362.897	97.56.00	9.197.829.503	97.56.00	45.669.550.696	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	67,6	100	6.005.877.886	100	6.005.877.886	100	6.270.765.124	100	6.181.417.097	100	6.195.883.703	100	30.659.821.696	
	Nilai IKM Lab Kes, Rumah sakit dan Puskesmas	Nilai	82.21	83.52.00	29.402.419.613	84,83	30.451.442.112	86,14	29.756.038.948	87,45	29.919.694.884	88,76	30.036.752.008	88,76	149.566.347.565	
	Persentase pemenuhan jenis layanan spesialistik	Persen	44%	56%	1.219.147.044	67%	1.263.036.337	78%	1.251.669.372	89%	1.258.429.092	100%	1.263.352.541	100%	6.255.634.386	
	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	50	100	24.864.000	100	24.864.000	100	24.864.000	100	24.864.000	100	24.864.000	100	124.320.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase puskesmas terakreditasi	Persen	87	87.05	1.635.254.000	88	1.635.254.000	92	1.635.254.000	96	1.635.254.000	100	1.635.254.000	100	8.176.270.000	
	Jumlah kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Jumlah	2	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	250.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	Persen	98,08	98,46	637.850.000	98.84	637.850.000	99.23.00	937.850.000	99.06.00	937.850.000	100	937.850.000	100	4.089.250.000	
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	Persen	100	100	612.496.000	100	612.496.000	100	812.496.000	100	812.496.000	100	812.496.000	100	3.662.480.000	
	Persentase obat layak edar pada sarana	Persen	80	88,89	58.895.000	89.58.00	58.895.000	91.67	98.895.000	94	98.895.000	96	98.895.000	96	414.475.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	pelayanan kefarmasian															
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa siaga aktif mandiri	Persen	39,77	45,91	180.671.200	48.98	180.671.200	52.05.00	380.671.200	55.12.00	180.671.200	58.19.00	180.671.200	58.19.00	1.103.356.000	
<b>Sasaran:</b> Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,07	2,05		2,04		2,02		2,01		2,00		2,00		Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
Program Pembangunan Daerah																
Program Pembinaan	Persentase peserta KB Aktif	Persen	44,36	44,89	656.661.800	45,35	689.494.890	45,82	579.175.708	46,28	584.967.465	46,74	549.869.417	46,74	3.060.169.280	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Keluarga Berencana																
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen	11,38	11,21	656.661.800	11,04	689.494.890	10,87	579.175.708	10,7	584.967.465	10,53	549.869.417	10,53	3.060.169.280	
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	72,72	73,22	656.661.800	73,72	689.494.890	74,23	579.175.708	74,73	584.967.465	75,23	549.869.417	75,23	3.060.169.280	
	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	2,17	2,46	656.661.800	2,75	689.494.890	3,04	579.175.708	3,33	584.967.465	3,62	549.869.417	3,62	3.060.169.280	



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengendalian Penduduk	Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	2,44	2,44	21.000.000	4,88	105.000.000	7,32	97.650.000	9,76	98.626.500	12,2	99.612.765	12,2	421.889.265	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga sejahtera	Persen	28,62	29,22	329.502.333	29,82	359.157.543	30,43	305.283.912	31,03	308.336.751	31,63	308.953.424	31,63	1.611.233.963	
	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	Persen	0,00	8,33	329.502.333	16,67	359.157.543	25	305.283.912	33,33	308.336.751	41,67	308.953.424	41,67	688.659.876	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	N/A	9,19		9,33		9,47		9,61		9,75		9,75		Dinas Pendidikan
	Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Peringka t	6	5		5		5		4		4		4		
Program Pembangunan Daerah																
Program Pengembanga n Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	N/A	50	10.000.0 00	54	35.000. 000	58	20.000. 000	62	20.000. 000	66	20.000.000	66	105.000.0 00	
	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/mengikut i pelatihan	Persen	N/A	2	180.000. 000	2	200.000 .000	4	180.00 0.000	4	200.000 .000	6	200.000.000	6	960.000.0 00	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	N/A	1,69	10.000.000	1,74	35.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	105.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Persen	N/A	25	100.000.000	26,79	100.000.000	28,57	100.000.000	30,36	100.000.000	32,14	100.000.000	32,14	500.000.000	
	Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan	Persen	N/A	25	105.000.000	38	105.000.000	38	50.000.000	50	84.996.000	50,00	90.000.000	50,00	434.996.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih yang bersertifikat	Persen	N/A	30,00	30.000.130	35	50.000.000	40	29.925.200	45	29.925.200	50	20.000.000	50	159.850.530	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase atlet muda yang dibina	Persen	N/A	10	100.000.000	11	100.000.000	12	100.000.000	13	90.000.000	14	90.000.000	14	480.000.000	
	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	N/A	50	-	55	830.000.000	58	50.000.000	60	50.000.000	63	50.000.000	63	980.000.000	
	Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar	Persen	N/A	50	400.000.000	55	400.000.000	58	400.000.000	60	400.000.000	63	400.000.000	63	2.000.000.000	
Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	55%	64%		73%		82%		91%		100%		100%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembangunan Daerah																
Program Pengembang an Kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	31	1.487.145.600	54	1.527.140.201	69	1.425.708.752	85	1.470.859.028	100	1.491.599.721	100	7.402.453.302	
Program pengembang	Persentase kesenian yang dikembangkan	Persen	29	43	187.709.296	57	192.757.462	71	179.954.664	86	185.653.585	100	188.271.500	100	934.346.507	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
n kesenian tradisional																
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	8%	31	1.487.145.600	54	1.527.140.201	69	1.425.708.752	85	1.470.859.028	100	1.491.599.721	100	7.402.453.302	
Tujuan: Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat	Angka PMKS	Angka	19.589	19.089		18.589		18.059		17.589		17.089		17.089		Dinas Sosial
Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0,13	1,12		2,11		3,1		4,09		5,08		5,08		
Program Pembangunan Daerah																
Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi	Persen	N/A	100	124.876.000	100	128.622.280	100	102.897.824	100	102.897.824	100	103.926.802	100	563.220.730	
	Persentase warga negara	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial															
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang berdaya	Persen	71%	76%	342.400.000	81%	352.672.000	86%	324.458.240	91%	317.404.800	96%	320.578.848	96%	1.657.513.888	
	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	N/A	100	44.978.000	100	46.327.340	100	45.400.793	100	40.768.059	100	41.175.740	100	218.649.932	
	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase warga negara/gelanda ngan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pekerja sosial profesional	Persen	68%	73%	576.368. 000	78%	593.659 .040	83%	516.48 3.365	88%	522.419 .955	93%	501.523.157	93%	2.710.453 .517	
Program penanganan bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat	Persen	N/A	100	66.696.0 00	100	68.696. 880	100	54.957. 504	100	55.507. 079	100	56.062.150	100	301.919.6 13	
	<b>Indikator Tujuan:</b> Indeks	Angka	65,61	65,84		65,88		65,93		65,97		66,02		66,02		Dinas Pengendalia n Penduduk

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemberdayaan Gender															dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran: Menurunnya kesenjangan gender	Indikator Sasaran: TPAK Perempuan	Persen	63,11	64,16		65,22		66,27		67,32		68,37		68,37		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	2,44	4,88	6.699.333	7,32	26.797.333	9,76	24.921.520	12,2	25.170.735	14,63	25.296.589	14,63	108.885.510	
	Persentase perempuan aktif dalam politik	Persen	11,43	15,14	6.699.333	18,86	26.797.333	22,57	24.921.520	26,28	25.170.735	30	25.296.589	30	108.885.510	
Sasaran: Menurunnya kasus kekerasan terhadap	Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Angka	26,5	25,45		24,39		23,34		22,29		21,24		21,24		



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
perempuan dan anak																
	Angka kasus kekerasan terhadap anak	Angka	0,021	0,019		0,018		0,016		0,015		0,14		0,14		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Perlindungan Perempuan	Pesertase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100	35.800.000	100	71.600.000	100	66.588.000	100	67.253.880	100	67.590.149	100	308.832.029	
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	Persen	100	100	75.996.000	100	151.992.000	100	141.352.560	100	142.766.086	100	143.479.916	100	655.586.562	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya ketahanan sosial	Angka Konflik Sosial	Angka	6	6		5		4		4		3		3		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Persen	721 kasus	13,86%		16,10%		28,79%		40,43%		67,87		67,87%		
Program Pembangunan Daerah																
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	100	100	329.370.916	100	362.870.916	100	305.870.916	100	315.870.916	100	293.095.916	100	1.607.079.580	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	Persen	N/A	100	263.012.000	100	272.000.000	100	195.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	950.012.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	hukum Perda dan Perkada															
Sasaran: Menurunnya gangguan kohesivitas sosial	Angka Konflik Sosial	Angka	6	6		5		4		4		3		3		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Program Pembangunan Daerah																
Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	79%	80%	1.008.015.000	81%	1.038.255.450	82%	1.351.273.942	83%	1.379.490.630	84%	1.379.490.630	84%	6.156.525.652	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan	Persentase masyarakat yang paham terhadap	Persen	N/A	100	169.310.000	100	187.260.821	100	243.439.067	100	243.439.067	100	263.960.615	100	1.107.409.570	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Karakter Kebangsaan	ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan															
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	N/A	100	644.177.560	100	663.502.887	100	855.918.724	100	855.918.724	100	855.918.724	100	3.875.436.619	
Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	Persen	N/A	100	57.374.000	100	59.095.220	100	75.641.882	100	75.641.882	100	75.641.882	100	343.394.866	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembinaan dan pengembanga n ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	Persen	N/A	100	120.990. 000	100	124.619 .700	100	159.51 3.216	100	159.513 .216	100	159.513.216	100	724.149.3 48	
	<b>Indikator Tujuan:</b> Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	97,12	97,12		97,12		97,12		97,12		97,12		97,12		Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
Sasaran: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Sedang (0,49)	Sedang (0,49)		Sedang (0,49)		Sedang (0,49)		Sedang (0,49)		Sedang (0,49)		Sedang (0,49)		
Program Pembangunan Daerah																
Program Penanggulanga n Bencana	Persentase desa tangguh bencana	Persen	7,17	-	-	9,42	63.000. 000	12	64.250. 000	13,90	65.500. 000	16,14	66.800.000	16,14	259.550.0 00	Badan Penanggula ngan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase SDM penanganan bencana terlatih	Persen	9,09	31,82	8.100.00 0	54,55	8.100.0 00	77	8.100.0 00	100	8.100.0 00	100	8.100.000	100	40.500.00 0	Bencana Daerah
	Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	Persen	63,63	69,69	10.472.0 00	75,75	85.709. 000	81,81	85.709. 000	90,90	85.709. 000	100	85.709.000	100	353.308.0 00	
	Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	Persen	100	100	266.833. 124	100	266.833 .124	100	266.83 3.124	100	266.833 .124	100	266.833.124	100	1.334.165 .620	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	N/A	100	31.348.0 00	100	31.348. 000	100	31.348. 000	100	31.348. 000	100	31.348.000	100	156.740.0 00	
	Persentase warga negara yang	Persen	N/A	100	43.889.0 00	100	43.889. 000	100	43.889. 000	100	43.889. 000	100	43.889.000	100	219.445.0 00	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana															
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	N/A	100	28.832.500	100	28.832.500	100	28.832.500	100	28.832.500	100	28.832.500	100	144.162.500	
Pencegahan, penanggulang an,	Persentase penurunan korban bencana	Persen	16,94	15.25	10.100.000	14.40	10.100.000	13.55	10.100.000	12,71	10.100.000	11,86	-	11,86	40.400.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	N/A	-	-	9,42	63.000. 000	12	64.250. 000	13,90	65.500. 000	16,14	66.800.000	16,14	259.550.0 00	
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana	<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	16.60	23.74		32.55		41.36		48.17		58.60		58.60		<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
Program Pembangunan Daerah																
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Presentase bangunan pengendali bencana erosi	Persen	22.40	43,83	1.349.63 9.400	56,26	1.389.9 99.952	94,8	1.028.5 99.964	96,23	1.028.5 99.964	100	1.028.599.964	100	5.825.439 .245	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	dalam kondisi baik															
	Presentase bangunan pengendali bencana Banjir dalam kondisi baik	Persen	22.40%	33,11		43,83	1.150.000.000	54,54	851.000.000	62,28	851.000.000	75,43	1.004.692.497	75,43	3.856.692.497	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Presentase bangunan pengendali bencana abrasi dalam kondisi baik	Persen	5%	5,00	1.793.660.000	10,00	1.845.653.892	15	1.365.783.880	20	1.365.783.880	25	1.365.783.880	25	7.736.665.532	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat																
Tujuan: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	Angka	-0,79	4,93		5,19		5,20		5,22		5,23		5,23		
	PDRB Per Kapita	ribu Rp per penduduk	9.572	10.125		10.497		10.885		11.288		11.706		11.706		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian	Laju pertumbuhan sektor pertanian	Angka	0,86	2,44		2,93		3,32		3,84		3,85		3,85		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penyuluhan pertanian	Persentase SDM petani yang terlatih (kelompok)	Persen	0,07	0,08	152.907. 500	0,10	155.96 5.650	0,11	152.84 6.335	0,13	154.37 4.798	0,15	155.918.846	0,15	772.013.1 29	Dinas Pertanian
	Persentase kelompok petani yang meningkat kelas taninya	Persen	5,42	5,54	822.974. 972	5,82	839.43 4.471	5,93	822.64 5.782	6,10	830.87 2.240	6,38	839.180.962	6,38	4.155.108. 427	
	Persentase peningkatan petani milenial	Persen	N/A	8	774.610. 000	10	790.10 2.200	12	774.30 0.156	14	782.04 3.158	16	789.863.589	16	3.910.919. 103	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok petani yang memiliki benih unggul sesuai standar	Persen	22,99	29,51	3.847.371.239	31,88	3.924.318.664	34,25	3.845.832.290	36,62	3.884.290.613	38,99	3.923.133.519	38,99	23.348.079.844	Dinas Pertanian
	Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar	Persen	31,02	31,97	2.564.914.159	32,54	2.616.212.442	33,11	2.563.888.194	33,69	2.589.527.076	34,26	2.615.422.347	34,26	15.565.386.565	
	Persentase kelompok petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar	Persen	24,01	25	1.182.750.000	26,13	1.206.405.000	27,27	1.182.276.900	28,40	1.194.099.669	29,54	1.206.040.666	29,54	7.177.612.901	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian	Luas area tanam yang terserang hama penyakit	Hektar	4,12	4,17	489.915.972	3,53	499.714.291	2,89	489.720.000	2,25	494.617.200	1,61	499.563.372	1,61	1.479.199.344	
Program Penyediaan dan pengembanga n prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian berkondisi baik	Persen	32,70	35,14	19.905.200.000	36,24	20.303.304.000	37,33	19.897.235.920	38,43	20.096.208.279	39,53	20.297.170.362	39,53	100.499.118.561	
	Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian	Persen	0,02	0,04	330.100.000	0,05	336.702.000	0,06	329.967.960	0,08	333.267.640	0,09	336.600.316	0,09	1.666.637.916	
Program Penyuluhan pertanian	Persentase peternak yang terlatih (kelompok)	Persen	0,3	0,62	50039000	0,83	50039000	1,03	51244300	1,24	51523000	1,44	52431000	1,44	204.032.000	Dinas Peternakan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen	1,28	9,86	5180000 0	9,99	518000 00	10,24	53050 000	10,49	53336 600	10,61	54275000	10,61	264.261.6 00	Dinas Peternakan
Program Penyediaan dan pengembanga n sarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan	Persen	5,79	4,79	1000000 0	5,34	10000 000	5,87	10241 000	6,40	10296 000	6,91	10474500	6,91	61.486.00 0	
	Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit sesuai standar	Persen	1,28	9,86	1780000 0	9,99	178000 00	10,24	18229 000	10,49	18328 000	10,61	18651000	10,61	90.808.00 0	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kelompok peternak (ternak besar) yang memiliki hijauan pakan ternak	Persen	40	1,36	136550000	2,03	136550000	2,37	139840800	2,71	140600000	3,05	143076000	3,05	839.692.800	
	Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan	Persen	1,28	9,86	2480544000	9,99	2480544000	10,24	2540324000	10,49	2554118400	10,61	2599100000	10,61	15.253.730.400	
Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	Persen	100	100	58600000	100	249490000	100	60012300	100	60338000	100	61400700	100	551.241.700	
Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	Tingkat kelahiran ternak	Persen	1,6	1,6	5000000	1,6	5000000	1,6	500000	1,6	5148000	1,6	5239000	1,6	25.387.000	
	Tingkat kematian ternak	Persen	0,63	0,61	823911596	0,60	823911600	0,59	843766500	0,58	848349000	0,57	863289000	0,57		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
masyarakat veteriner															4.203.227.696	
	Persentase ternak yang tidak terserang penyakit	Persen	95,49	96,55	19600000	96,92	19600000	97,3	20313400	97,67	20182000	98,05	20536500	98,05	100.231.900	
	Persentase produk hasil peternakan yang ditangai sesuai standar ASUH	Persen	40,50	40,50	5000000	40,50	5000000	40,50	5000000	40,50	5148000	40,50	5239000	40,50	30.626.000	
Program Penyuluhan pertanian	Persentase produk pertanian yang ditangani sesuai standar SNI	Persen	100	100	6.412.285.398	100	6.540.531.106	100	6.409.720.484	100	6.473.817.89	100	6.538.555.866	100	19.488.807.456	Dinas Pertanian
Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan	Laju pertumbuhan sub-sektor perikanan	Angka	0,86	2,44		2,93		3,32		3,84		3,85		3,85		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
sektor perikanan																
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan perikanan tangkap	Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	44,59	56,70	14,200,000	60,79	14,200,000	64,89	14,200,000	68,99	14,200,000	73,09	14,200,000	73,09	71.000.000	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen	100	100	375,159,296	100	375,159,296	100	375,159,296	100	375,159,296	100	375,159,296	100	1.875.796.480	
Program Pengelolaan perikanan budidaya	Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih	Persen	55,56	69,53	26,957,500	76,52	26,957,500	83,51	26,957,500	90,49	26,957,500	97,48	26,957,500	97,48	134.787.500	
	Persentase kelompok pembudiaya	Persen	55,56	58,18	943,145,916	59,49	1,102,553,427	60,80	1,168,455,214	62,11	1,201,863,488	63,42	1,326,160,794	63,42	5.742.168.839	



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan budidaya sesuai standar															Dinas Perdagangan
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar	Persen	N/A	60	189,900,000	70	189,900,000	80	189,900,000	90	189,900,000	100	189,900,000	100	949.500.000	
Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	Angka	-1,30	5,62		5,85		6,08		6,31		6,53		6,53		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan pelaku IKM pengolahan pangan dan pasca panen yang terlatih	Persen	27,3	36,4		45,5	95.000.000	54,5	95.000.000	63,6	96.900.000	72,7	101.745.000	72,7	388.645.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan	Persen	29,1	32,6	219.698.224	36,2	230.683.135	39,7	230.683.135	43,3	235.296.798	46,8	247.061.638	46,8	1.163.422.930	
	Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern	Persen	25,0	33,3		41,7	62.000.000	50,0	62.000.000	58,3	63.240.000	66,7	66.402.000	66,7	253.642.000	
	Tingkat ketersediaan bahan baku produksi produksi tenun	Persen	N/A	100	229.253.100	100	240.715.755	100	240.715.755	100	245.530.070	100	257.806.574	100	1.214.021.254	
	Persentase peningkatan pelaku industri tenun yang terlatih	Persen	14,3	18,6		22,9	90.000.000	27,1	90.000.000	31,4	91.800.000	35,7	96.390.000	35,7	368.190.000	
	Persentase peningkatan pelaku industri	Persen	10	11		12,0	88.500.000	13,0	88.500.000	14,0	90.270.000	15,0	94.783.500	15,0	362.053.500	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	mebel dan bambu yang terlatih															
	Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya	Persen	N/A	3,5	5.301.599.400	7,1	1.000.000.000	10,6	1.000.000.000	14,2	1.000.000.000	17,7	1.000.000.000	17,7	9.301.599.400	
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum	Angka	-32,94	4,56		5,59		5,63		5,68		5,72		5,72		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang berkembang	Persen	33	47	2.580.693.620	60	2.650.097.592	73	2.474.080.197	87	2.552.430.986	100	2.588.423.005	100	12.845.725.400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran pariwisata	Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan	Persen	33	47	1.107.885.000	60	1.137.679.943	73	1.062.116.137	87	1.095.751.925	100	1.111.203.205	100	5.514.636.210	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembanga n sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Persen	29	43	279.638. 914	57	287.159 .392	71	268.08 6.492	86	276.576 .430	100	280.476.455	100	1.391.937. 683	
	Persentase pelaku pariwisata bersertifikat	Persen	N/A	20	1.009.80 7.188	40	1.036.9 64.472	60	968.09 0.109	80	998.748 .219	100	1.012.831.642	100	5.026.441. 630	
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya (terutama kerajinan)	Persen	41	55	264.103. 418	59	271.20 6.093	73	253.19 2.798	86	261.21 1.073	100	264.894.429	100	1.314.607. 811	
Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Angka	-4,63	5,16		5,44		5,73		6,01		6,30		6,30		
Program Pembangunan Daerah:																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix	Persen	N/A	11,1	94.800.000	22,2	99.540.000	33,3	99.540.000	44,4	101.530.800	55,6	106.607.340	55,6	502.018.140	Dinas Perdaganga n
	Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing-mix	Persen	N/A	3,3	-	6,7	70.300.000	10,0	70.300.000	13,3	71.706.000	16,7	75.291.300	16,7	287.597.300	
	Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian	Persen	N/A	3,3	69.200.000	6,7	72.660.000	10,0	72.660.000	13,3	74.113.200	16,7	77.818.860	16,7	366.452.060	
Program standarisasi dan	Persentase penurunan	Persen	N/A	40	35.600.000	50	37.380.000	60	37.380.000	80	38.127.600	100	40.033.980	100	188.521.580	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
perlindungan konsumen	kasus sengketa perdagangan															
Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	Persen	74	82	69.300.00 0	86,0	72.765. 000	89,0	72.765. 000	92,0	74.220. 300	96,0	77.931.315	96,0	366.981.6 15	
	Persentase kelompok pedagang yang terlatih	Persen	N/A	11,1	-	22,2	90.000. 000	33,3	90.000. 000	44,4	91.800. 000	55,6	96.390.000	55,6	368.190.0 00	
	Persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan permodalan	Persen	N/A	11,1	-	22,2	50.000. 000	33,3	50.000. 000	44,4	51.000. 000	55,6	53.550.000	55,6	204.550.0 00	
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi PMDN	Persen	N/A	5		5		5		5		5		25		
	Persentase peningkatan realisasi PMA	Persen	N/A	5		5		5		5		5		25		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	50	60	18.000.000	70,00	19.000.000	80,00	20.000.000	90,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	97.000.000	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Program Promosi penanaman modal	Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanjuti	Persen	4	16	16.062.000	20,00	30.659.912	20,00	28.000.000	20,00	28.000.000	20,00	33.000.000	100,00	135.721.912	
Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal melalui LKPM online	Persen	24	40	374.223.000	50,00	377.000.000	70,00	373.000.000	84,00	374.000.000	100,00	377.000.000	100,00	1.875.223.000	
Program Pelayanan penanaman modal	Persentase petugas pelayanan yang terlatih	Persen	2,5	5	350.224.108	7,50	353.000.000	10,00	352.000.000	12,50	352.000.000	17,81	353.000.000	17,81	1.760.224.108	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase sarana prasarana perizinan yang memadai	Persen	34,66	36,66	37.307.800	37,91	40.000.000	39,25	38.000.000	40,84	39.000.000	42,37	40.000.000	42,37	194.307.800	
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan	Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	53.21	56.2		59.1		62		65		67.9		67.9		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penyelenggara an Jalan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS	Persen	18.29	19,39	44.924.616.047	20,25	46.106.640.987	21,61	34.579.980.740	22,72	34.579.980.740	22,83	34.579.980.740	22,83	194.771.199.254	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase jalan kabupaten terbangun lapen	Persen	70.78	72,97	49.507.485.000	75,15	50.809.581.107	77,34	38.107.185.830	79,53	38.107.185.830	81,71	38.107.185.830	81,71	214.638.623.597	
	Persentase jalan kabupaten terbangun telford	Persen	5.16	6,32	4.495.000.000	7,47	4.617.769.000	8,63	3.463.326.750	9,78	3.463.326.750	10,94	3.463.326.750	10,94	19.502.749.250	



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase Jembatan terbangun dengan kondisi baik	Persen	77.80%	80	22.580.850.000	82,22	23.177.468.270	84,44	17.383.101.203	86,67	17.383.101.203	89,17	17.383.101.203	89,17	97.907.621.879	
	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	14.67	20	39.138.359.064	40	40.168.784.071	60	30.126.588.053	80	30.126.588.053	100	30.126.588.053	100	169.686.907.294	
Sasaran: Meningkatnya jaringan drainase perkotaan	Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	72	76.2		79.7		81.7		84.8		88		88		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	72	76,2	6.474.907.300	79,7	6.649.549.871	81,7	4.987.162.403	84,8	4.987.162.403	88	4.987.162.403	88	28.085.944.381	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran: Meningkatnya infrastruktur pengairan lahan	Rasio Luas Daerah terlayani irigasi primer	Presenta se Luas daerah terlayani irigasi primer	77	81.71		86.42		91.13		95.84		100		100		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan jaringan irigasi Primer	Persen	80%	83	1.175.67 6.000	86	1.211.4 78.711	89	877.13 8.376	92	877.138 .376	95	1.030.830.873	95	5.172.262 .336	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan/re habilitasi Jaringan Irigasi primer	Persen	45%	50	1.090.95 3.400	55	1.124.5 36.379	60	877.13 8.376	65	877.138 .376	70	1.030.830.873	70	5.000.597 .404	
	Peningkatan jaringan irigasi primer	Persen	40%	48,00	6.590.07 1.200	52,00	5.627.7 31.065	58	4.164.5 20.988	65	4.164.5 20.988	74	4.164.520.988	74	24.711.36 5.229	
Sasaran: Meningkatnya pelayanan perhubungan	Rasio Konektivitas	Rasio	N/A	0.81		0.84		0.85		0.86		0.89		0.89		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kinerja Lalu lintas	Persen	N/A	46.2		49.4		53.7		59.4		65.9		65.9		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	51.85	59.25	1.930.631.778	64.81	2.037.974.905	68.51	1.000.342.002	74	1.227.465.812	77.07	1.195.849.012	77.07	7.392.263.509	Dinas Perhubungan
	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	37.5	50.0	1.106.400.000	62.5	1.243.593.600	75.0	1.000.000.000	87.5	1.527.862.029	100.0	1.748.959.088	100.0	6.626.814.717	
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	43.37	46.22	584.494.000	49.37	590.358.000	53.65	400.000.000	59.37	644.782.200	65.94	387144391	65.94	2.606.778.591	
	presentase terminal sesuai	Persen	0	25	1.650.436.200	50	1.847.950.800	75	1.478.806.563	100	1.478.806.563	100	1.478.806.563	100	7.934.806.689	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	standar/ dalam kondisi baik															
	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	40.00	49.18	80.000.000	52.88	87.533.398	67.42	108.593.083	85.93	109.755.029	87	209.755.029	87	595.636.539	
	Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	100	80	170.000.000	66	145.300.000	53	124.100.000	40	102.000.000	26	139.361.969	26	680.761.969	
Program Pengelolaan Pelayaran	presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	50	62.5	15.400.000	87,5	19.250.000	100	1.021.656.250	100	0	100	0	100	1.056.306.250	Dinas Perhubungan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	0	20	38.200.000	60	47.951.000	80	61.120.000	100	68.760.000	100	0	100	216.031.000	
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju inflasi	Angka	1,84	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan	Angka	71,70	74,60		76,09		77,99		79,94		81,94		81,94		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase peningkatan stok cadangan pangan daerah	Persen	100	100	5,887,000	100	5,887,000	100	5,887,000	100	5,887,000	100	5,887,000	100	29.435.000	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
	Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana	Persen	62,50	70	5,632,000	77,5	5,632,000	85	5,632,000	92,5	5,632,000	100	5,632,000	100	28.160.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	yang berkondisi baik															
Program Penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah yang masuk ke dalam kategori sulit untuk pendistribusian pangan	Persen	N/A	1,17	55,536,000	0,58	55,536,000	0,58	55,536,000	0,58	55,536,000	0,58	55,536,000	0,58	277.680.000	
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi pangan lokal	Persen	N/A	60	362,138,000	70	362,138,000	80	362,138,000	90	362,138,000	100	362,138,000	100	1.810.690.000	
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan	Persen	N/A	60	7,713,000	70	7,713,000	80	7,713,000	90	7,713,000	100	7,713,000	100	38.565.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya stabilitas harga barang	Indeks harga konsumen	Angka	106,28	110,57		112,79		115,04		117,34		119,69		119,69		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat ketersediaan barang lokal	Persen	100	100	342.501.324	100	359.626.390	100	359.626.390	100	359.626.390	100	377.607.710	100	1.798.988.204	Dinas Perdaganga n
	Tingkat stabilitas harga barang pokok dan barang penting	Persen	100	100	135.394.000	100	142.163.700	100	142.163.700	100	142.163.700	100	149.271.885	100	711.156.985	
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Indeks gini	Angka	0,295	0,289		0,286		0,283		0,280		0,276		0,276		
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kontribusi koperasi dan	Persentase koperasi yang meningkat SHU- nya	Persen	N/A	90		92,5		95		97,5		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
UKM terhadap perekonomian	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	N/A	50		55		60		65		70		70		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase SDM pengurus koperasi yang terlatih	Persen	41,66	55,56	390.304.000	69,44	400.000.000	79,86	391.000.000	90,28	405.000.000	100,00	408.000.000	100,00	1.994.304.000	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase penurunan koperasi yang merugikan masyarakat	Persen	89,51	90,91	29.500.000	92,91	30.000.000	94,41	29.000.000	96,50	29.000.000	100,00	31.000.000	100,00	148.500.000	
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	Persen	10	20	44.463.000	40,00	45.000.000	60,00	44.000.000	80,00	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00	266.216.500	



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya	Persen	10	20	45.216.500	40,00	57.000.000	60,00	51.000.000	80,00	55.000.000	100,00	58.000.000	100,00	223.463.000	
<b>Tujuan:</b> Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Persen	20,34	19,47		18,88		18,30		17,71		17,12		17,12		
<b>Sasaran:</b> Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,09	3,09		2,84		2,58		2,33		2,08		2,08		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Persen	5,31	10,62	395.115.554	15,93	399.000.000	21,24	398.000.000	26,55	400.000.000	31,80	401.000.000	31,80	1.993.115.554	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	20,34	26,38	59.765.0 00	32,43	70.000. 000	38,47	70.000. 000	44,52	70.000. 000	50,57	71.000.000	50,57	340.765.0 00	
Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	56,88	67,92	149.363. 600	79,66	153.000 .000	87,66	151.03 9.662	97,85	152.122 .330	100,00	153.909.988	100,00	759.435.5 80	
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	88.75	90.8		91.8		92.8		93.8		94.8		94.8		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Kawasan Permukiman	persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	Persen	88.75	90.11	3.640.57 0.800	91,47	3.703.3 82.216	92,83	3.777.4 49.860	94	3.785.0 04.760	95,55	3.785.383.261	95.55	18.691.79 0.897	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukima

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	Persen	2.25	5.2	100.000.000	8,20	125.000.000	11,20	175.000.000	14,20	185.000.000	17,20	195.000.000	17,20	780.000.000	n dan Pertanian
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Persen	N/A	32.5	255.040.000	37,50	280.040.000	42,50	305.040.000	47,50	310.040.000	52,50	315.040.000	52.50	1.465.200.000	
Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase rumah tangga yang teraliri listrik	Persen	44.33	44.89	330.000.000	45,45	355.000.000	46	400.000.000	46,56	410.000.000	47,12	420.000.000	47.12	1.915.000.000	
	Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	Persen	16.4	33.60	747.118.279	35	749.329.018	38	774.498.914	41	775.801.291	44	775.956.451	44	3.822.703.952	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengembanga n Permukiman	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	26,58	28,33	3.441.021.000	31,67	2.544.490.472	35,83	1.908.367.854	38,3	1.908.367.853	41,67	1.908.367.855	41,67	11.710.615.034	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Presentase Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis dalam kondisi baik	Persen	N/A	30%		70%	1.000.000.000	90%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.250.000.000	
	<b>Indikator sasaran</b> Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	74.03	78.1		81		84		86.9		89.9		89.9		
Program Pembangunan Daerah:																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pengelolaan dan pengembanga n sistem air limbah	Persentase IPAL terbangun	Persen	75.147	78.092	9.564.25 8.000	81.04	9.819.8 41.560	83.98	7.266.6 82.754	86.93	7.266.6 82.754	89.87	7.266.682.754	89.87	41.184.14 7.823	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator sasaran Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	86	88		89		91		92		93		93		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik	Persen	80	84	23.945.4 36.000	88	24.577. 806.423	92	18.433. 354.81 7	96	18.433. 354.817	100	18.433.354.81 7	100,00	103.823.3 06.874	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Penyediaan Air Minum	Persentase SPAM yang direhabilitasi/dit ingkatkan	Persen	86	89	20.073.2 34.000	92	20.608. 152.731	95	15.250. 033.02 1	98	15.250. 033.021	100	15.250.033.02 1	100,00	86.431.48 5.794	
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	<b>Indikator sasaran:</b> Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	12	22		32		42		52		62		62		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Presentase ketersediaan dokumen penyelenggaraa n penataan ruang	Persen	5	14	1.963.53 9.100	36	1.067.6 33.311	50	800.72 4.983	55	800.724 .983	64	800.724.983	64,00	5.433.347 .360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	Persen	4	7	1.120.03 0.000	11	1.154.3 74.786	15	865.78 1.000	19	865.781 .000	22	865.781.000	22,00	4.871.747 .786	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(Rencana Detail Tata Ruang)															
	Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang)	Persen	6	26		36	1.000.0 00.000	46	750.00 0.000	56	750.000 .000	66	750.000.000	66,00	3.250.000 .000	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	Persen	60	100	100.000. 000	100	125.000 .000	100	175.00 0.000	100	185.000 .000	100	195.000.000	100	780.000.0 00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukima n dan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	Angka	0.0058	0,012	377.572. 000	0,018	392.464 .386	0,023	290.42 3.646	0,0290	290.423 .646	0,036	444.116.143	0,036	1.794.999 .820	Dinas Pekerjaan Umum dan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengembanga n Jasa Konstruksi	Presentase tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25	38	517.711. 300	53	536.275 .336	68	402.20 6.502	83	402.206 .502	95	555.898.998	95,00	2.414.298 .638	Penataan Ruang
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya tingkat kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Angka	0,576	0,601		0,613		0,625		0,638		0,650		0,650		
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase peningkatan status desa berkembang	Persen	32,41	42,06		47,93		53,79		59,65		65,51		65,51		
Program Pembangunan Daerah:																
Program administrasi	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	0	7,86	71.422.0 00	15,71	74.993. 100	23,57	61.459. 463	31,43	60.044. 722	39,29	58.350.936	39,29	326.270.2 21	Dinas Pemberdaya an



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	Persen	48,28	55,17	238.080. 000	62,07	249.984 .000	68,97	256.23 3.600	75,86	269.045 .280	82,76	282.497.544	82,76	1.295.840. 424	Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakata n, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	Persen	2,76	-	-	4,14	94.100. 745	5,52	61.459. 463	6,90	60.044. 722	8,28	58.350.936	8,28	273.955.8 66	
	Persentase tim penggerak PKK yang aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	699.682. 299	100	685.591 .144	100	588.32 3.090	100	583.292 .075	100	566.837.622	100	3.123.726. 230	
	Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif	Persen	19,31	26,21	80.902.7 16	33,79	69.103. 045	48,28	61.459. 463	63,45	60.044. 722	80	58.350.936	80	329.860.8 82	
	Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat	Persen	N/A	100	80.902.7 16	100	69.103. 045	100	61.459. 463	100	60.044. 722	100	58.350.936	100	329.860.8 82	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program penataan desa	Persentase desa yang ditata	Persen	29,31	37,93	461.602.299	46,55	435.607.144	55,17	349.512.886	63,79	314.246.795	72,41	284.340.158	72,41	1.845.309.282	
Misi 3: Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup																
Tujuan: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	80.59	81,36		81,36		81,75		81,86		82,16		82,16		
Sasaran: Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Angka	70	71,50		71,50		72,00		72,00		72,50		72,50		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	Persen	N/A	8.71	67.075.900	10.78	70.000.000	12.85	70.050.658	14.92	80.000.000	16.99	80.000.000	16.99	367.126.558	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase ketersediaan peralatan laboratorium lingkungan	Persen	0	-	-	100	200,000,000	-	-	-	-	-	-	100	200.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase titik sampling air yang memenuhi baku mutu	Persen	100	100	67.075.90 0	100	70.000. 000	100	700506 57,5	100	800000 00	100	80000000	100	367.126.5 58	
	Persentase mata air yang memenuhi nilai baku mutu	Persen	88,24	91,01	225.238.0 00,00	92.53	250.000 .000,00	93.96	250.000 .000,00	95.39	444.389 .800,00	96.82	454.389.800,00	96.82	1.624.017. 600	
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Persentase Kelompok Masyarakat Adat yang melakukan konservasi lingkungan	Persen	N/A	1,5	41.188.00 0	3	41.188. 000	4,5	41.188. 000	6	66.188. 000	7,5	66.188.000	7,5	255.940.0 00	Dinas Lingkunga n Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	Persen	7	9	275.620.0 00	11	275.620 .000	13	275.620 .000	15	305.620 .000	17	305.620.000	17	1.438.100. 000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	taat terhadap izin lingkungan															
Sasaran: Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Angka	87.87	88,37		88,37		88,87		88,87		88,87		88,87		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan alat ukur kualitas udara	Persen	0	-	-	66.67	75.000.000	100	45.000.000	-	-	-	-	100	120.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase titik sampling udara yang memenuhi baku mutu	Persen	100	100	40.000.000	100	34.389.800	100	30.000.000	100	45.000.000	100	35.000.000	100	184.389.800	
Sasaran: Meningkatnya kualitas tutupan vegetasi	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	85.32	85,32		85,32		85,32		85,82		86,32		86,32		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas penataan RTH Publik	Persen	N/A	13,78	140.445.000	22,97	140.445.000	32,16	140.445.000	41,35	190.445.000	50,54	190.445.000	50,54	802.225.000	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran: Meningkatkan pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	Persen	18.74	20.97		23.21		25.44		27.68		29.91		29.91		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	28.30%	28.30	4.821.007.000	28.30	4.952.317.383	31.36	3.786.599.964	31.36	3.786.599.964	31,36	3.786.599.964	31,36	21.133.124.276	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Persampahan	Presentasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS dalam kondisi baik	Persen	N/A	8,70	3.668.000.000	30	3.618.182.033	52,17	2.934.554.793	73,91	3.873.036.114	100	2.468.474.703	100	16.562.247.643	Dinas Lingkungan Hidup

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	Persen	0,04	0,05	3.341.843.169	2.5	3.676.027.486	5,00	4.043.630.234	7.5	4.447.993.258	10	4.892.792.584	10	20.402.286.731	Dinas Lingkunga n Hidup
	Persentase bank sampah aktif	Persen	0	100	625346000	100	640979650	100	657004141,3	100	673429244,8	100	690264975,9	100	3.287.024.012	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 dikelola sesuai peraturan perundangan-undangan	Persen	15,91	21,02	99.761.000	26,13	99.761.000	31,24	99.761.000	36,35	114.761.000	41,46	114.761.000	41,46	528.805.000	
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani																
Tujuan: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih akuntabel,	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	49.83 CC	50,10 CC		54,00 CC		56,00 CC		58,00 CC		60,10 B		60,10 B		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
professional, dan responsif terhadap pelayanan publik																
Sasaran: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Angka	61,60 B	63,10 B		64,5 B		66,00 B		67,5 B		68 B		68 B		
Program Pembangunan Daerah																
Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja	Persen	100	100	893.194.900	100	925.528.555	100	922.937.075	100	927.920.936	100	931.539.827	100	4.601.121.293	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Persen	54	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase realisasi target program	Persen	54	100	1.011.050.600	100	1.047.650.632	100	1.044.717.210	100	1.050.358.683	100	1.054.455.082	100	5.208.232.207	
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	Persen	54	100	465.906.900	100	482.772.730	100	481.420.966	100	484.020.639	100	485.908.320	100	2.400.029.555	
Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	Persen	100	100	135.000.000	100	141.750.000	100	145.293.750	100	152.558.438	100	160.186.359	100	734.788.547	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran: Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peringkat EKPPD	Peringkat	N/A	Tinggi			Tinggi		Sangat tinggi		Sangat tinggi		Sangat tinggi		Sangat tinggi	
Program Pembangunan Daerah																



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase PD dengan indeks kelembagaan yang efektif	Persen	100	100	71.465.000	100	78.611.500	100	86.472.650	100	95.119.915	100	104.631.906,50	100	436.300.972	Bagian Organisasi
	Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	39,02	48,78	57.175.000	58,54	62.892.500	68,29	69.181.750	73,17	76.099.925	85,37	83.709.918	85,37	349.059.093,00	
	Persentase palayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	Persen	100	100	284.173.840	100	290.573.840	100	297.373.840	100	299.173.840	100	300.773.840	100	1.472.069.200	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH, dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100	100	16.767.182.057	100	17.218.110.839	100	16.090.142.483	100	16.177.510.152	100	17.218.110.839	100	83.471.056.370	Bagian Umum

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase OPD yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	33,33	34,66	104.370.000	59,99	114.807.000	73,32	126.287.700	86,65	138.916.470	100	152.808.117	100	637.189.287	Bagian Organisasi
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	99.89	99.91	477,130,000	99.94	496,744,289	99.96	362,623,333	99.98	382,204,992	100	532,325,749	100	2.251.028.363	Bagian Administrasi Pemerintahan
	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	9,281,968,804	100	9,514,850,549	100	8,912,079,927	100	8,96514,1225	100	9,003,731,862	100	45.677.772.367	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran	Persen	100	100	860,125,000	100	900,000,000	100	860,000,000	100	860,000,000	100	860,000,000	100	4.340.125.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	Persen	100	100	267,011,924	100	293,713,116	100	323,084,428	100	355,392,871	100	390,932,158	100	1.630.134.497	Bagian Hukum
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	48.000.000	100	50.500.000	100	60.000.000	100	60.500.000	100	61.000.000	100	280.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	93,88	100	225,210,524	100	230.000.000	100	240.000.000	100	260.000.000	100	265.000.000	100	1.220.210.524	Bagian Administrasi Pembangunan
	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procement	Persen	49	60	250.000.000	70	300.000.000	80	300.000.000	90	350.000.000	90	350.000.000	90	1.550.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Presentasi jumlah pengadaan	Persen	49,19	55	454.043.192	60	385.336.144	60	350.779.850	60	307.048.564	60	331.593.154	60	1.828.800.904	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	yang dilakukan dengan metode kompetitif															
	Rasio Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	35,89	40	450.250.000	40	500.000.000	45	500.000.000	45	500.000.000	50	500.000.000	50	2.450.250.000	
	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	96	97	47.600.000	98	50.100.000	99	59.600.000	100	60.100.000	100	60.600.000	100	278.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	28	30	7,909,400,000	32	8,045,950,000	33	7,672,118,000	35	7,772,118,000	37	7,672,118,000	37	39.071.704.000	Sekretariat DPRD
Sasaran: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indikator Sasaran: Opini BPK	Peringkat	WTP	WTP	228.972.531.165	WTP	234.871.389.020	WTP	218.956.867.172	WTP	220.016.225.375	WTP	220.890.695.776	WTP	220.890.695.776	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program Pembangunan Daerah																	
Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	512.798.000	100	860.611.665	100	463.101.114	100	595.168.729	100	587.203.348	100	3.018.882.856	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Program Pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Persen	100	100	1.788.054.648	100	1.841.696.287	100	1.896.947.176	100	1.953.855.591	100	2.012.471.259	100	9.493.024.961		
Sasaran: Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indikator Sasaran: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	N/A	N/A		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik			
Program Pembangunan Daerah																	
Program pengelolaan	Persentase penyerapan belanja daerah	Persen	90	90	346.002.484	90	580.684.351	90	312.470.282	90	401.580.854	90	396.206.337	90	2.036.944.308	Badan Keuangan	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
keuangan daerah	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Persen	75	75	222.403.490.937	75	227.898.273.645	100	212.694.305.225	100	213.632.244.525	100	214.488.592.109	100	1.091.116.906.441	dan Aset Daerah
Sasaran: Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indikator Sasaran: Indeks Kapasitas Fiskal	Angka	0,541 Rendah	Sedang		Sedang		Sedang		Tinggi		Tinggi		Tinggi		
Program Pembangunan Daerah																
Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase realisasi target pajak	Persen	71	75,20	881.912.496	76,78	904.903.785	78,33	899.287.092	79,90	907.420.786	81,43	913.532.765	81,43	4.507.056.924	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase realisasi target retribusi daerah	Persen	81	82,00	587.941.664	83	602.345.658	83,50	606.577.052	84	609.021.843	85	609.021.843	85	3.014.908.060	
Sasaran: Meningkatkan birokrasi yang	Indikator Sasaran:	Angka														

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
bersih dan akuntabel	Indeks Kematangan Penerapan Manajemen dan Resiko															
Program Penyelenggara an Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	72,81	77,34	667.408.000	79,6	827.408.000	81,86	735.314.114	84,12	750.000.000	86,39	755.943.283	86,39	3.736.073.397	Inspektorat Daerah
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persen	38,17	39,29	667.408.000	39,85	827.408.000	40,41	735.314.114	40,97	750.000.000	41,53	755.943.283	41,53	3.736.073.397	
	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	667.408.000	100	827.408.000	100	735.314.114	100	750.000.000	100	755.943.283	100	3.736.073.397	
Program perumusan kebijakan,	Persentase objek pemeriksaan	Persen	50	50	12.587.000	50	4.000.000	50	4.000.000	50	4.000.000	50	4.000.000	50	28.587.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
pendampingan , asistensi	yang dilakukan pengawasan															
Sasaran: Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indikator Sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	1,91	2,10 Cukup		2,4 Cukup		2,6 Baik		2,8 Baik		3,0 Baik		3,0 Baik		
Program Pembangunan Daerah																
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	66,67	75	135.000.000	80	141.750.000	83,3	145.293.750	85,7	152.558.438	87,5	160.186.359	87,50	734.788.547	Dinas Komunikasi dan Indormatika
	Persentase diseminasi dan layanan	Persen	100	100	350.000.000	100	367.500.000	100	376.687.500	100	395.521.875	100	415.297.969	100	1.905.007.344	



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)															
Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	500.000.000	100	525.000.000	100	538.125.000	100	565.031.250	100	593.282.813	100	2.721.439.063	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	13,33	20	125.000.000	26,67	131.250.000	33,33	134.531.250	40	141.257.813	46,67	148.320.703	46,67	680.359.766	
Program penyelenggara an persandian	Persentase perangkat daerah yang	Persen	100	100	358.813.869	100	376.754.562	100	386.173.427	100	405.482.098	100	425.756.203	100	1.952.980.159	Dinas Komunikasi

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
untuk pengamanan informasi	telah menggunakan sandi dalam komunikasi															dan Informatika
Sasaran: Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indikator Sasaran: Indeks profesionalitas ASN	Angka	47,59	71,00 (sedang)		74,00 sedang		78 sedang		81 tinggi		83 tinggi		83 tinggi		
Program Pembangunan Daerah																
Program Kepegawaian daerah	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Persen	5,28	7,55	2,666,565 ,800	9,62	3,148,7 34,363	10,68	2,858,3 64,353	10,71	2,747,5 75,398	10,75	2,620,711,241	10,75	14.041.95 1.155	Badan Kepegawaia n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	Persen	83,21	85,50	466,015,4 00	87,50	489,316 ,170	90,50	329,455 ,948	92,50	349,332 ,791	94,92	370,203,475	94,92	2.004.323. 784	
	Persentase pegawai yang memiliki nilai	Persen	84,91	85,41	650,175,6 50	85,91	739,451 ,677	86,41	776,424 ,261	86,91	815,245 ,474	87,41	856,007,748	87,41	3.837.304. 810	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	SKP minimal baik															
	Tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,10	0,09	68,080,900	0,08	68,080,900	0,07	68,080,900	0,06	68,080,900	0,05	68,080,900	0,05	340.404.500	
Sasaran: Meningkatkan pelayanan publik yang prima	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,59	80		81,50		82,50		83,50		84,50		84,50		
Program Pembangunan Daerah																
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen	N/A	100	1.064.984.900	100	1.138.867.834	100	1.028.172.411	100	1.122.024.408	100	1.229.812.485	100	5.583.862.038	Kecamatan
Program penyelenggara an urusan	Persentase koordinasi pemerintahan	Persen	N/A	100	254.000.000	100	298.204.994	100	244.814.965	100	262.359.447	100	300.218.832	100	1.359.598.238	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
pemerintahan umum	umum yang ditindaklanjuti															
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	427.680.300	100	479.357.812	100	426.743.520	100	476.693.372	100	526.386.758	100	2.336.861.762	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	449.669.000	100	483.813.300	100	418.429.254	100	447.947.192	100	476.483.009	100	2.276.341.755	
Program pengelolaan profil kependudukan	Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	Persen	0	4.35	30,899,000.00	8.7	50,899,000.00	13.04	45,899,000.00	17.39	49,400,000.00	30.43	49,400,000.00	30.43	226.497.000,00	Dnas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program pengelolaan informasi	Persentase peningkatan data	Persen	N/A	8.7	255,960,472.00	13.04	255,960,472.00	17.39	240,960,472.00	21.74	240,960,472.00	26.09	245,960,472.00	26.09	1.239.802.360,00	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
administrasi kependudukan	kependudukan yang valid															
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan e- KTP	Persen	87	89	121,101,4 36.80	91	140,301 ,436.80	95	119,901 ,436.80	97	119,901 ,436.80	100	120,301,436.80	100	621.507.1 84,00	
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	Persen	36.76	38.65	75,688,39 8.00	41.48	87,688, 398.00	46.19	74,938, 398.00	48.08	74,938, 398.00	49.02	75,188,398.00	49.02	388.441.9 90,00	
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	Persen	0.72	0.75	105,963,7 57.20	0.82	122,763 ,757.20	0.87	104,913 ,757.20	0.94	104,913 ,757.20	1	105,263,757.20	1	543.818.7 86,00	
Program Pencatatan Sipil	persentase kepemilikan dokumen akta kematian	Persen	N/A	5	41,856,19 0.20	6.67	52,506, 190.20	8.33	33,006, 190.20	12	35,856, 190.20	13.33	36,006,190.20	13.33	199.230.9 51,00	
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen	296.87	301.3	125,568,5 70.60	309.7	157,518 ,570.60	312.4	99,018, 570.60	316.6	107,568 ,570.60	320	108,018,570.60	320	597.692.8 53,00	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung gjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kepemilikan dokumen akta perceraian	Persen	N/A	16.7	41,856,190.20	25	52,506,190.20	36.36	33,006,190.20	45.45	35,856,190.20	50	36,006,190.20	50	199.230.951,00	
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta pernikahan	Persen	0.23	25.8	69,760,317.00	27.3	87,510,317.00	28.81	55,010,317.00	30.31	59,760,317.00	32.57	60,010,317.00	32.57	332.051.585,00	
Program pengelolaan arsip	Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar	Persen	14,34	14,73	13,000,000	15,12	53,534,343	15,50	53,534,343	15,89	40,951,505	16,28	33,072,425	16,28	194.092.616	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa n
Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Persen	100	100	34,928,800	100	57,099,197	100	37,771,819	100	39,928,454	100	29,928,454	100	199.656.724	

## 6.4. Integrasi Program Rekomendasi KLHS

Perumusan program pembangunan daerah dilakukan melalui berbagai pendekatan diantaranya pendekatan teknokratik, politik, juga memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dokumen perencanaan yang memperhatikan SDGs berupaya mengarahkan pembangunan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Telaah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah dianalisis di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merumuskan beberapa rekomendasi program pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026.

Skenario rekomendasi penyempurnaan KRP merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Manggarai, serta indikator kinerja daerah maupun indikator urusan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026.

Secara umum rekomendasi yang diberikan merupakan masukan bagi kebijakan, rencana dan program yang perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan juga upaya peningkatakan koordinasi lintas perangkat daerah dengan filantropi serta pelaku usaha yang ada di Kabupaten Manggarai. Berikut integrasi rekomendasi program KLHS dalam RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026:

**Tabel 6. 3. Integrasi Program Rekomendasi KLHS**

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																				
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1														
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6					
1.01.0 2	PROGRA M PENGELO LAAN PENDIDIK AN	V																																																
1.01.0 4	PROGRA M PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDID IKAN	V																																																
1.02.0 2	PROGRA M PEMENUH AN UPAYA KESEHATA N PERORAN GAN DAN UPAYA KESEHATA	V																																																



KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																															
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																			
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1													
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6					
	N MASYARA KAT																																																
1.02.0 5	PROGRA M PEMBERD AYAAN MASYARA KAT BIDANG KESEHATA N	V																																															
1.03.0 2	PROGRA M PENGELO LAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													V																																			
1.03.0 3	PROGRA M PENGELO LAAN DAN PENGEMB																																																

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																															
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																			
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1													
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	
	ANGAN SISTEM PENYEDIA AN AIR MINUM																																																
1.03.0 5	PROGRA M PENGELO LAAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM AIR LIMBAH																																																
1.04.0 3	PROGRA M KAWASA N PERMUKI MAN																																																
1.04.0 5	PROGRA M PENINGK ATAN PRASARA																																																

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																															
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																			
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1													
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	
	NA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																																																
1.05.0 3	PROGRA M PENANGG ULANGAN BENCANA																																																
1.06.0 4	PROGRA M REHABILIT ASI SOSIAL																																																
1.06.0 5	PROGRA M PERLINDU NGAN DAN JAMINAN SOSIAL																																																
2.07.0 3	PROGRA M PELATIHA																																																

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																				
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1														
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6		
	N KERJA DAN PRODUKTI VITAS TENAGA KERJA																																																	
2.07.0 4	PROGRA M PENEMPA TAN TENAGA KERJA																																																	
2.07.0 5	PROGRA M HUBUNG AN INDUSTRI AL																																																	
2.08.0 2	PROGRA M PENGARU SUTAMAA N GENDER DAN PEMBERD	V																																																

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																													
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																	
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1											
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6			
	AYAAN PEREMPU AN																																														
2.08.0 3	PROGRA M PERLINDU NGAN PEREMPU AN	V																																													
2.08.0 7	PROGRA M PERLINDU NGAN KHUSUS ANAK	V																																													
2.11.0 3	PROGRA M PENGEND ALIAN PENCEMA RAN DAN/ATA U KERUSAK																																														

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																													
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																	
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1											
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	
	AN LINGKUN GAN HIDUP																																														
2.11.1 1	PROGRA M PENGELO LAAN PERSAMP AHAN																																														
2.12.0 2	PROGRA M PENDAFT ARAN PENDUDU K																																														
2.12.0 3	PROGRA M PENCATA TAN SIPIL																																														
2.12.0 4	PROGRA M PENGELO LAAN INFORMA SI																																														



KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																			
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																							
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1																	
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6					
3.26.0 2	PROGRA M PENINGK ATAN DAYA TARIK DESTINAS I PARIWISA TA																																																				
3.26.0 3	PROGRA M PEMASAR AN PARIWISA TA																																																				
3.27.0 3	PROGRA M PENYEDIA AN DAN PENGEMB ANGAN PRASARA NA PERTANIA N																																																				





KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ANGAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0.01.0 3	PROGRA M PENGEMB ANGAN KURIKULU M	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.02.0 4	PROGRA M SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATA N DAN MAKANA N MINUMA N			V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03.0 4	PROGRA M PENGEMB ANGAN SISTEM DAN PENGELO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																													
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																	
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1											
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6			
	LAAN PERSAMP AHAN REGIONAL																																														
1.03.1 1	PROGRA M PENGEMB ANGAN JASA KONSTRU KSI																																														
1.05.0 2	PROGRA M PENINGK ATAN KETENTER AMAN DAN KETERTIB AN UMUM																																														
1.05.0 3	PROGRA M PENANGA NAN BENCANA																																														

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																				
		T1						T2				T3				T1								T 2	T3				T 4	T1				T1																
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 1 0	S 1 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6				
2.09.0 3	PROGRA M PENINGK ATAN DIVERSIFI KASI DAN KETAHAN AN PANGAN MASYARA KAT																																																	
2.13.0 5	PROGRA M PEMBERD AYAAN LEMBAGA KEMASYA RAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARA KAT HUKUM ADAT																																																	

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																					
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																									
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1																			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6					
2.14.0 4	PROGRA M PEMBERD AYAAN DAN PENINGK ATAN KELUARG A SEJAHTER A (KS)				V																																																		
2.17.0 5	PROGRA M PENDIDIK AN DAN LATIHAN PERKOPER ASIAN																											V																											
2.17.0 7	PROGRA M PEMBERD AYAAN USAHA MENENG AH, USAHA																											V																											

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																															
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																			
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1													
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6			
	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																																																
2.17.0 8	PROGRA M PENGEMB ANGAN UMKM																																																
2.19.0 3	PROGRA M PENGEMB ANGAN KAPASITA S DAYA SAING KEOLAHRA GAAN																																																
2.19.0 4	PROGRA M PENGEMB ANGAN KAPASITA S																																																

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																										
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4														
		T1						T2				T3				T1										T2	T3				T4	T1				T1								
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S1	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6		
	KEPRAMUKAAN																																											
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMATANAN INFORMASI																																											
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL																																											
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																																											





KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	PERTANIA N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																															
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																			
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1													
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6		
	AIAN DAERAH																																																
	PROGRA M PENINGK ATAN KUALITAS KELUARG A																																																
	PROGRA M PENGEND ALIAN PERIZINA N PENDIDIK AN																																																
	PROGRA M PENINGK ATAN PENDIDIK AN, PELATIHA N DAN PENYULU																																																

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																				
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1														
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6		
	HAN LINGKUN GAN HIDUP UNTUK MASYARA KAT																																																	
	PROGRA M PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																																																	
	PROGRA M PENGEMB ANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFA ATAN DAN PERLINDU NGAN																																																	

KODE PROG RAM	REKOMEN DASI PROGRA M KLHS RPJMD KABUPAT EN MANGGA RAI	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI 2021-2026																																																
		Misi 1												Misi 2												Misi 3				Misi 4																				
		T1						T2				T3				T1										T 2	T3				T 4	T1				T1														
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6		
	HAK KEKAYAA N INTELEKT UAL																																																	
	PROGRA M PENGELO LAAN APLIKASI INFORMA TIKA																																																	

**Keterangan: S (Sasaran), T (Tujuan)**

*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026*

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Manggarai terdapat rekomendasi beberapa program yang diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai. Adapun rekomendasi program KLHS terdiri dari 62 program. Dari seluruh rekomendasi program tersebut, secara substansi hampir sama dengan program yang ada di RPJMD dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, ada 6 program yang tidak ada dalam RPJMD tetapi secara substansi telah terintegrasi di dalam RPJMD. Berikut nama-nama program rekomendasi KLHS yang secara substantif sama dengan program di RPJMD.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Program tersebut fokus pada kesetaraan gender dan hak anak. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya melalui kesejahteraan keluarga, sudah diakomodir dalam Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan: Program tersebut lebih berfokus pada penerbitan izin Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, bukan berfokus pada sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan diakomodir dalam Program Pengelolaan Pendidikan
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sudah diwakili oleh Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah.	program pengembangan SDM sudah diwakili program kepegawaian daerah. Program Kepegawaian daerah berfokus pada peningkatan Kapasitas SDM dan

		kualitas manajemen Kepegawaian daerah
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sudah diwadahi dalam program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang secara detail akan diturunkan dalam kegiatan dan sub kegiatan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Program pengelolaan aplikasi informatika sudah diwakili program aplikasi informatika

## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan terkait indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Manggarai yang mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Bab ini juga berisi tentang target program dan pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada Bab III (Tiga) RPJMD terutama berkaitan dengan kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026

Kode	Kapasitas Riil Keuangan/ Belanja	Proyeksi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	<b>Kapasitas Riil Keuangan</b>	<b>1.365.390.078.426</b>	<b>1.401.572.372.345</b>	<b>1.293.040.822.035</b>	<b>1.330.007.589.796</b>	<b>1.365.074.409.017</b>
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.345.390.078.426</b>	<b>1.381.572.372.345</b>	<b>1.283.040.822.035</b>	<b>1.290.007.589.796</b>	<b>1.295.074.409.017</b>
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>782.161.894.796</b>	<b>791.842.260.351</b>	<b>791.544.046.877</b>	<b>806.815.696.002</b>	<b>818.645.916.388</b>
	Belanja Pegawai	426.868.373.194	432.036.362.926	435.411.817.462	443.031.524.268	449.676.997.132
	Belanja Barang dan Jasa	288.257.978.560	291.199.998.953	292.450.271.958	293.425.275.702	311.633.152.719
	Belanja Bunga	-	-	-	9.595.119.000	9.595.119.000
	Belanja Hibah	57.035.543.042	58.605.898.472	58.681.957.457	58.763.777.032	45.740.647.537
	Belanja Sosial	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	<b>Belanja Modal</b>	<b>327.632.537.491</b>	<b>349.607.674.882</b>	<b>255.752.810.228</b>	<b>245.951.694.576</b>	<b>240.102.414.110</b>
	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>
	<b>Belanja Transfer</b>	<b>225.595.646.139</b>	<b>230.122.437.111</b>	<b>230.743.964.930</b>	<b>232.240.199.219</b>	<b>234.826.078.519</b>

Ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai, melainkan juga dari APBN maupun sumber pendanaan lainnya. Meskipun begitu, kerangka pendanaan pembangunan daerah pada bagian ini hanya mencantumkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Manggarai. Kerangka pendanaan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program atau pagu indikatifnya. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD.



Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	X	X	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	95	96	488.87 5.359.9 36	97	501.61 7.019.4 66	98	502.09 4.811.1 17	99	503.96 7.949.5 41	100	508.712.7 26.138	100	1.008.30 3.001.52 6	Seluruh Perangkat Daerah
					Persentase PD dengan indeks kelembagaa n yang efektif	Persen	100	100	71,465, 000	100	78,611, 500	100	86,472, 650	100	95,119, 915	100	104,631,9 06.50	100	436.300. 972	Bagian Organisasi
					Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	39,02	48,78	57,175, 000	58,54	62,892, 500	68,29	69,181, 750	73,17	76,099, 925	85,37	83,709,91 8	85,37	349.059. 093	
					Persentase palayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	100	100	284.17 3.840	100	290.57 3.840	100	297.37 3.84	100	299.17 3.840	100	300.773.8 40	100	1.472.06 9.200	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar															
				Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH, dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100	100	16.767.182.057	100	17.218.110.839	100	16.090.142.483	100	16.177.510.152	100	17.218.110.839	100	83.471.056.370	Bagian Umum
				Persentase OPD yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	33,33	34,66	104.370.000	59,99	114.807.000	73,32	126.287.700	86,65	138.916.470	100	152.808.117	100	637.189.287	Bagian Organisasi
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
1	1			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan															
1	0	0	Program pengelolaan pendidikan	APK PAUD	Angka	49,53	49,66	50.000.000	49,78	815.000.000	49,91	50.000.000	50,03	74.533.476	50,16	100.000.000	50,16	1.089.533.476	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	93,77	94,04	16.199.390.550	95,08	17.082.568.610	96,58	15.054.057.383	98,08	13.818.551.199	100,00	12.991.700.837	100,00	75.146.268.579	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2022		2023		2024		2025		2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	100	100	8.948.283.450	100	9.570.421.654	100	8.013.768.175	100	8.459.656.020	100	8.267.256.828	100	43.259.386.128		
				Persentase warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	93,77	100	44.811.400.000	100	44.835.558.496	100	44.811.400.000	100	44.811.400.000	100	44.811.400.000	100	224.081.158.496		
				Persentase warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	1.611.000.000	100	1.711.000.000	100	1.661.000.000	100	1.611.000.000	100	1.611.000.000	100	8.205.000.000		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	25,38	100	4.142.800.000	100	4.242.800.000	100	4.142.800.000	100	4.092.800.000	100	4.092.800.000	100	20.714.000.000	
				Persentase SD dan SMP yang terakreditasi	Persen	75	75,3	600.000.000	75,59	621.600.000	75,89	599.952.000	76,18	599.952.000	76,48	588.946.482	76,48	3.010.450.482	
1	01	03	Program pengembangan kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	N/A	40,70	100.000.000	52,53	259.000.001	61,76	200.000.000	70,99	255.379.567	80,22	264.573.231	80,22	1.078.952.799	
				Persentase siswa yang menjuarai perlombaan	Persen	N/A	1,75	50.000.000	3,5	51.800.000	5,26	49.996.000	7,01	70.000.000	8,77	100.000.000	8,77	321.796.000	
1	01	04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Persen	N/A	26,45	19.568.390.955	26,91	19.521.170.156	27,37	18.371.170.156	27,83	17.521.170.156	28,29	17.371.170.156	28,29	92.353.071.579	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				persentase tenaga kependidikan yang bersertifikat	Persen	N/A	56,12	222.000.000	58,92	229.992.000	61,73	221.982.240	64,53	221.982.240	67,34	221.982.240	67,34	1.117.938.720	
1	2			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1	02	02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,7	100	15.532.194.148	100	15.379.923.615	100	15.644.810.858	100	15.555.462.826	100	15.569.929.432	100	15.532.194.148	Dinas Kesehatan RSUD
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	79,7	100	3.601.596.574	100	3.601.596.574	100	3.707.551.469	100	3.671.812.258	100	3.677.598.901	100	18.260.155.776	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	90,2	100	12.518.549.648	100	12.366.279.115	100	12.631.166.353	100	12.541.818.326	100	12.556.284.932	100	62.614.098.374	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	79,9	100	3.601.596.574	100	3.601.596.574	100	3.707.551.469	100	3.671.812.258	100	3.677.598.901	100	18.260.155.776	
				Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	60,33	100	3.601.596.574	100	3.601.596.574	100	3.707.551.469	100	3.671.812.258	100	3.677.598.901	100	18.260.155.776	
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	6,38	100	3.601.596.576	100	3.601.596.576	100	3.707.551.469	100	3.671.812.258	100	3.677.598.901	100	18.260.155.780	
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	40,1	100	3.601.596.574	100	3.601.596.574	100	3.707.551.469	100	3.671.812.258	100	3.677.598.901	100	18.260.155.776	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab	
							2022		2023		2024		2025					2026
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
				Persentase balita gizi kurang	Persen	13,6	12,06	13.284.900.748	11,28	13.132.630.215	10,51	13.397.517.453	9,74	13.308.169.426	8,97	13.322.636.032	8,97	66.445.853.874
				Prevalensi stunting	Persen	21,9	19,4	12.961.353.498	16,90	12.809.082.965	14,40	13.073.970.203	11,90	12.984.622.176	9,40	12.999.088.782	9,40	64.828.117.624
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	12.586.013.248	100	12.433.742.715	100	12.698.629.953	100	12.609.281.926	100	12.623.748.532	100	62.951.416.374
				Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persen	21	100	5.891.152.898	100	5.738.882.365	100	6.003.769.603	100	5.914.421.576	100	5.928.888.182	100	29.477.114.624
				Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persen	100	100	5.926.157.898	100	5.773.887.365	100	6.038.774.603	100	5.949.426.576	100	5.963.893.182	100	29.652.139.624

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	Persen	72,9	100	2.375.861.686	100	2.375.861.686	100	2.640.748.924	100	2.551.400.897	100	2.565.867.503	100	12.509.740.696	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	91.23	92.05.00	9.007.823.686	93.76	9.007.823.686	95.03.00	9.272.710.924	96.03.00	9.183.362.897	97.56.00	9.197.829.503	97.56.00	45.669.550.696	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	67,6	100	6.005.877.886	100	6.005.877.886	100	6.270.765.124	100	6.181.417.097	100	6.195.883.703	100	30.659.821.696	
				Nilai IKM Lab Kes, Rumah Sakit dan Puskesmas	Nilai IKM	82.21	83.52.00	29.402.419.613	84,83	30.451.442.112	86,14	29.756.038.948	87,45	29.919.694.884	88,76	30.036.752.008	88,76	149.566.347.565	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pemenuhan jenis layanan spesialistik	Persen	44%	56%	1.219.147.044	67%	1.263.036.337	78%	1.251.669.372	89%	1.258.429.092	100%	1.263.352.541	100%	6.255.634.386	
				Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	50	100	24.864.000	100	24.864.000	100	24.864.000	100	24.864.000	100	24.864.000	100	124.320.000	
				Persentase puskesmas terakreditasi	Persen	87	87.05	1.635.254.000	88	1.635.254.000	92	1.635.254.000	96	1.635.254.000	100	1.635.254.000	100	8.176.270.000	
				Jumlah kecamatan yang terverifikasi melaksanakan 5 pilar STBM GESI	Jumlah	2	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	250.000.000	
1	02	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	Persen	98,08	98,46	637.850.000	98.84	637.850.000	99.23.00	937.850.000	99.06.00	937.850.000	100	937.850.000	100	4.089.250.000	
1	02	04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase makanan dan minuman yang lolos uji	Persen	100	100	612.496.000	100	612.496.000	100	812.496.000	100	812.496.000	100	812.496.000	100	3.662.480.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Persen	80	88,89	58.895.000	89.58.00	58.895.000	91.67	98.895.000	94	98.895.000	96	98.895.000	96	414.475.000	
1	02	05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase desa siaga aktif mandiri	Persen	39,77	45,91	180.671.200	48.98	180.671.200	52.05.00	380.671.200	55.12.00	180.671.200	58.19.00	180.671.200	58.19.00	1.103.356.000	
1	3			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang															
				Presentase jaringan teknis primer terbangun	Persen	80%	83	1.175.676.000	86	1.211.478.711	89	877.138.376	92	877.138.376	95	1.030.830.873	95,00	5.172.262.336	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Prosentase Jaringan Irigasi primer dalam kondisi baik		45%	50	1.090.953.400	55	1.124.536.379	60	877.138.376	65	877.138.376	70	1.030.830.873	70,00	5.000.597.404	
				Presentase jaringan irigasi primer yang ditingkatkan kualitasnya		40%	48,00	6.590.071.200	52,00	5.627.731.065	58	4.164.520.988	65	4.164.520.988	74	4.164.520.988	74,00	24.711.365.229	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentase bangunan pengendali bencana erosi dalam kondisi baik	Persen	22.40%	43,83	1.349.639.400	56,26	1.389.999.952	94,8	1.028.599.964	96,23	1.028.599.964	100	1.028.599.964	100,00	5.825.439.245	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Presentase bangunan pengendali bencana Banjir dalam kondisi baik	Persen	22.40%	33,11		43,83	1.150.000.000	54,54	851.000.000	62,28	851.000.000	75,43	1.004.692.497	75,43	3.856.692.497	
				Presentase bangunan pengendali bencana abrasi dalam kondisi baik	Persen	5%	5,00	1.793.660.000	10,00	1.845.653.892	15	1.365.783.880	20	1.365.783.880	25	1.365.783.880	25,00	7.736.665.532	
1	03	03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik	Persen	80	84	23.945.436.000	88	24.577.806.423	92	18.433.354.817	96	18.433.354.817	100	18.433.354.817	100,00	103.823.306.874	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase SPAM yang direhabilitasi /ditingkatkan	Persen	86	89	20.073.234.000	92	20.608.152.731	95	15.250.033.021	98	15.250.033.021	100	15.250.033.021	100,00	86.431.485.794	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	28.30%	28.30	4.821.007.000	28.30	4.952.317.383	31.36	3.786.599.964	31.36	3.786.599.964	31,36	3.786.599.964	31,36	21.133.124.276	
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase IPAL terbangun	Persen	75.147	78.092	9.564.258.000	81.04	9.819.841.560	83.98	7.266.682.754	86.93	7.266.682.754	89.87	7.266.682.754	89.87	41.184.147.823	
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	72.2%	76,2	6.474.907.300	79,7	6.649.549.871	81,7	4.987.162.403	84,8	4.987.162.403	88	4.987.162.403	88,00	28.085.944.381	
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Persen	26,58	28,33	3.441.021.000	31,67	2.544.490.472	35,83	1.908.367.854	38,3	1.908.367.853	41,67	1.908.367.855	41,67	11.710.615.034	
				Presentase Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis dalam kondisi baik	Persen	N/A	30%		70%	1.000.000.000	90%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.250.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan ber IMB persatuan bangunan	Angka	0.0058	0,012	377.572.000	0,018	392.464.386	0,023	290.423.646	0,0290	290.423.646	0,036	444.116.143	0,04	1.794.999.820	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten terbangun HRS	Persen	18.29	19,39	44.924.616.047	20,25	46.106.640.987	21,61	34.579.980.740	22,72	34.579.980.740	22,83	34.579.980.740	22,83	194.771.199.254	
				Persentase jalan kabupaten terbangun lapen	Persen	70.78	72,97	49.507.485.000	75,15	50.809.581.107	77,34	38.107.185.830	79,53	38.107.185.830	81,71	38.107.185.830	81,71	214.638.623.597	
				Persentase jalan kabupaten terbangun telford	Persen	5.16	6,32	4.495.000.000	7,47	4.617.769.000	8,63	3.463.326.750	9,78	3.463.326.750	10,94	3.463.326.750	10,94	19.502.749.250	
				Persentase Jembatan terbangun dengan kondisi baik	Persen	77.80%	80	22.580.850.000	82,22	23.177.468.270	84,44	17.383.101.203	86,67	17.383.101.203	89,17	17.383.101.203	89,17	97.907.621.879	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang direhabilitasi	Persen	14.67%	20	39.138.359.064	40	40.168.784.071	60	30.126.588.053	80	30.126.588.053	100	30.126.588.053	100,00	169.686.907.294	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/tek nisi/analisis/ yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25	38	517.711.300	53	536.275.336	68	402.206.502	83	402.206.502	95	555.898.998	95,00	2.414.298.638	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase ketersediaan dokumen penyelengga raan penataan ruang	Persen	5	14	1.963.539.100	36	1.067.633.311	50	800.724.983	55	800.724.983	64	800.724.983	64,00	5.433.347.360	
				Presentase kawasan yang sesuai dengan RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang)	Persen	6	7	1.120.030.000	11	1.154.374.786	15	865.781.000	19	865.781.000	22	865.781.000	22,00	4.871.747.786	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Presentase Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)	Persen	4	26		36	1.000.000.000	46	750.000.000	56	750.000.000	66	750.000.000	66,00	3.250.000.000	
1	4			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman															
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	Persen	N/A	32.5	255.040.000	37,50	280.040.000	42,50	305.040.000	47,50	310.040.000	52,50	315.040.000	52.5	1.465.200.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	Persen	88.75	90.11	3.640.570.800	91,47	3.703.382.216	92,83	3.777.449.860	94	3.785.004.760	95,55	3.785.383.261	95.55	18.691.790.897	
				Persentase luas wilayah kumuh yang tertangani	Persen	2.25	5.2	100.000.000	8,20	125.000.000	11,20	175.000.000	14,20	185.000.000	17,20	195.000.000	17.2	780.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase rumah tangga yang teraliri listrik	Persen	44.33	44.89	330.00 0.000	45,45	355.00 0.000	46	400.00 0.000	46,56	410.00 0.000	47,12	420.000.0 00	47.12	1.915.00 0.000	
				Persentase unit kawasan permukiman yang terpasang lampu penerangan jalan umum	Persen	16.4	33.60	747.11 8.279	35	749.32 9.018	38	774.49 8.914	41	775.80 1.291	44	775.956.4 51	44	3.822.70 3.952	
	1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantribum yang diselesaikan	Persen	N/A	100	329.37 0.916	100	362.87 0.916	100	305.87 0.916	100	315.87 0.916	100	293.095.9 16	100	1.607.07 9.580	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persen	N/A	100	263.01 2.000	100	272.00 0.000	100	195.00 0.000	100	110.00 0.000	100	110.000.0 00	100	950.012. 000	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab	
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	05	03	Program penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana	Persen	7,17	-	-	9,42	63.000.000	12	64.250.000	13,90	65.500.000	16,14	66.800.000	16,14	259.550.000	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
				Persentase SDM penanganan bencana terlatih	Persen	9,09	31,82	8.100.000	54,55	8.100.000	77	8.100.000	100	8.100.000	100	8.100.000	100	40.500.000	
				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	Persen	57,14	69,69	10.472.000	75,75	85.709.000	81,81	85.709.000	90,90	85.709.000	100	85.709.000	100	353.308.000	
				Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	Persen	100	100	266.833.124	100	266.833.124	100	266.833.124	100	266.833.124	100	266.833.124	100	1.334.165.620	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	N/A	100	31.348.000	100	31.348.000	100	31.348.000	100	31.348.000	100	156.740.000			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	N/A	100	43.889.000	100	43.889.000	100	43.889.000	100	43.889.000	100	43.889.000	100	219.445.000	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	N/A	100	28.832.500	100	28.832.500	100	28.832.500	100	28.832.500	100	28.832.500	100	144.162.500	
1	05	04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran	Persentase penurunan korban bencana	Persen	16,94	15.25	10.100.000	14.40	10.100.000	13.55	10.100.000	12,71	10.100.000	11,86	-	11,86	40.400.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	Persen	N/A	100	15.000.000	100	15.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	60.000.000	
1	06			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial															
1	06	02	Program pemberdayaan sosial	Persentase pekerja sosial profesional	Persen	68%	73%	576.368.000	78%	593.659.040	83%	516.483.365	88%	522.419.955	93%	501.523.157	93%	2.710.453.517	Dinas Sosial
1	06	04	Rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang berdaya	Persen	71%	76%	342.400.000	81%	352.672.000	86%	324.458.240	91%	317.404.800	96%	320.578.848	96%	1.657.513.888	
				Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	N/A	100	44.978.000	100	46.327.340	100	45.400.793	100	40.768.059	100	41.175.740	100	218.649.932	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
1	06	05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi	Persen	N/A	100%	124.876.000	100	128.622.280	100	102.897.824	100	102.897.824	100	103.926.802	100	563.220.730	
				Persentase warga negara korban bencana	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial															
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat	Persen	N/A	100	66.696.000	100	68.696.880	100	54.957.504	100	55.507.079	100	56.062.150	100		301.919.613
2				Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
2	7			Urusan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan															
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Persen	5,31	10,62	395.115.554	15,93	399.000.000	21,24	398.000.000	26,55	400.000.000	31,80	401.000.000	31,80	1.993.115.554	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	0	0	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	20,34	26,38	59.765.000	32,43	70.000.000	38,47	70.000.000	44,52	70.000.000	50,57	71.000.000	50,57	340.765.000	
2	0	0	Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	56,88	67,92	149.363.600	79,66	153.000.000	87,66	151.039.662	97,85	152.122.330	100,00	153.909.988	100,00	759.435.580	
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																
2	0	0	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	2,44	4,88	6.699.333	7,32	26.797.333	9,76	24.921.520	12,2	25.170.735	14,63	25.296.589	14,63	108.885.510	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase perempuan aktif dalam politik	Persen	11,43	15,14	6.699.333	18,86	26.797.333	22,57	24.921.520	26,28	25.170.735	30	25.296.589	30	108.885.510	
2	0	0	Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan	Persen	100	100	35.800.000	100	71.600.000	100	66.588.000	100	67.253.880	100	67.590.149	100	308.832.029	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				perlindunga n															
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	Persen	100	100	75.996.000	100	151.992.000	100	141.352.560	100	142.766.086	100	143.479.916	100	655.586.562	
2	09			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan															
2	09	02	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase peningkatan stok cadangan pangan daerah	Persen	100	100	5.887.000	100	5.887.000	100	5.887.000	100	5.887.000	100	5.887.000	100	29.435.000	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
				Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik	Persen	62,50	70	5.632.000	77,5	5.632.000	85	5.632.000	92,5	5.632.000	100	5.632.000	100	28.160.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	09	03	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi pangan lokal	Persen	N/A	60	362.138.000	70	362.138.000	80	362.138.000	90	362.138.000	100	362.138.000	100	1.810.690.000	
2	09	04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah yang masuk ke dalam kategori sulit untuk pendistribusi an pangan	Persen	N/A	1,17	55.536.000	0,58	55.536.000	0,58	55.536.000	0,58	55.536.000	0,58	55.536.000	0,58	277.680.000	
2	09	05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase penurunan penggunaan obat kimia di luar ambang batas untuk produk pangan	Persen	N/A	60	7.713.000	70	7.713.000	80	7.713.000	90	7.713.000	100	7.713.000	100	38.565.000	
2	10			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian															



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab		
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	1	0	5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	Persen	60	100	100.00 0.000	100	125.00 0.000	100	175.00 0.000	100	185.00 0.000	100	195.000.0 00	100	780.000. 000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	1	1			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
2	1	0	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencaaan Lingkungan yang diimplement asikan	Persen	11,11	44,44	615.14 9.500	55,56	315.149 .500	-	-	77.78	300.000 .000	100,00	300.000.0 00	100,00	1.530.29 9.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	0	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	Persen	N/A	8,71	67.075. 900	10,78	70.000. 000	12,85	70.050. 658	14,92	80.000. 000	16,99	80.000.00 0	16,99	367.126. 558		
					Persentase ketersediaan peralatan laboratorium lingkungan	Persen	0	-	-	100	200,000 ,000	-	-	-	-	-	-	100	200.000. 000		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase titik sampling air yang memenuhi baku mutu	Persen	100	100	67.075.900	100	70.000.000	100	70.050.658	100	80.000.000	100	80.000.000	100	367.126.558	
				Persentase mata air yang memenuhi nilai baku mutu	Persen	88,2	91,1	225.238.000,0	92,5	250.000.000	93.96	250.000.000	95,39	444.389.800	96.82	454.389.800	96.82	1.624.017.600	
				Persentase ketersediaan alat ukur kualitas udara	Persen	0	-	-	66.67	75.000.000	100	45.000.000	-	-	-	-	100	120.000.000	
				Persentase titik sampling udara yang memenuhi baku mutu	Persen	100	100	40.000.000	100	34.389.800	100	30.000.000	100	45.000.000	100	35.000.000	100	184.389.800	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas penataan RTH Publik	Persen	N/A	13,78	140.445.000	22,37	140.445.000	32	140.445.000	41	190.445.000	51	190.445.000	51	802.225.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	1	0	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 dikelola sesuai peraturan perundangan-undangan	Persen	15,91	21,02	99.761.000	26,13	99.761.000	31,24	99.761.000	36,35	114.761.000	41,46	114.761.000	41,46	528.805.000	
2	1	0	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	Persen	7	9	275.620.000	11	275.620.000	13	275.620.000	15	305.620.000	17	305.620.000	17	1.438.100.000	
2	1	0	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH	Persentase Kelompok Masyarakat Adat yang melakukan konservasi lingkungan	Persen	N/A	1,5	41.188.000	3	41.188.000	4,5	41.188.000	6	66.188.000	7,5	66.188.000	7,5	255.940.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
2	1	1	0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan yang dapat ditangani	Persen	100	100	41.281.000	100	41.281.000	100	41.281.000	100	51.281.000	100	51.281.000	100	226.405.000	
2	1	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS dalam kondisi baik	Persen	N/A	8,70	3.668.000.000	30	3.618.182.033	52,17	2.934.554.793	73,91	3.873.036.114	100	2.468.474.703	100	16.562.247.643	
					Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	Persen	0,04	0,05	3.341.843.169	2.5	3.676.027.486	5,00	4.043.630.234	7.5	4.447.993.258	10	4.892.792.584	10	20.402.286.731	
					Persentase bank sampah aktif	Persen	N/A	100	625.346.000	100	640.979.650	100	657.004.141	100	673.429.245	100	690.264.976	100	3.287.024.012	
2	1	2			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	1	2	2	Program pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan e-KTP	Persen	87%	89%	121.101.436.80	91%	140.301.436.80	95%	119.901.436.80	97%	119.901.436.80	100	120.301.436.80	100%	621.507.184.00	
					Persentase peningkatan kepemilikan	Persen	36.76	38.65	75.688.398.00	41.48	87.688.398.00	46.19	74.938.398.00	48.08	74.938.398.00	49.02	75.188.398.00	49.02	388.441.990.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab	
							2022		2023		2024		2025					2026
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
				dokumen KIA														
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	Persen	0.72	0.75	105.96 3.757.20	0.82	122.763 .757.20	0.87	104.91 3.757.20	0.94	104.913 .757.20	1	105.263.7 57.20	1	543.818. 786.00
2	1 2	3	Program pencatatan sipil	persentase kepemilikan dokumen akta kematian	Persen	N/A	5	41.856. 190.20	6.67	52.506. 190.20	8.33	33.006. 190.20	12	35.856. 190.20	13.33	36.006.19 0.20	13.33	199.230. 951.00
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen	296.87	301.3	125.56 8.570.60	309.7	157.518 .570.60	312.4	99.018. 570.60	316.6	107.568 .570.60	320	108.018.5 70.60	320	597.692. 853.00
				Persentase kepemilikan dokumen akta perceraian	Persen	N/A	16.7	41.856. 190.20	25	52.506. 190.20	36.36	33.006. 190.20	45.45	35.856. 190.20	50	36.006.19 0.20	50	199.230. 951.00
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen	Persen	0.23	25.8	69.760. 317.00	27.3	87.510. 317.00	28.81	55.010. 317.00	30.31	59.760. 317.00	32.57	60.010.31 7.00	32.57	332.051. 585.00

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				akta pernikahan															
2	12	4	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase peningkatan data kependuduk an yang valid	Persen	N/A	8.7	255.96 0.472.0 0	13.04	255.960 .472.00	17.39	240.96 0.472.0 0	21.74	240.960 .472.00	26.09	245.960.4 72.00	26.09	1.239.80 2.360.00	
2	12	5	Program pengelolaan profil kependudukan	Presentase peningkatan ketersediaan data profil kependuduk an sesuai ketentuan	Persen	0	4.35	30.899. 000.00	8.7	50.899. 000.00	13.04	45.899. 000.00	17.39	49.400. 000.00	30.43	49.400.00 0.00	30.43	226.497. 000.00	
2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	13	4	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase bumdes yang berkembang	Persen	0	7.86	71.422. 000	15.71	74.993. 100	23.57	61.459. 463	31.43	60.044. 722	39.29	58.350.93 6	39.29	326.270. 221	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase desa tertib administrasi	Persen	48.28	55.17	238.08 0.000	62.07	249.98 4.000	68.97	256.23 3.600	75.86	269.04 5.280	82.76	282.497.5 44	82.76	1.295.84 0.424	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	13	05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	Persen	2.76	-	-	4.14	94.100.745	5.52	61.459.463	6.90	60.044.722	8.28	58.350.936	8.28	273.955.866	
				Persentase tim penggerak pkk yang dalam pembanguna n	Persen	100	100	699.682.299	100	685.591.144	100	588.323.090	100	583.292.075	100	566.837.622	100	3.123.726.230	
				Persentase desa yang memiliki lembaga adat aktif	Persen	19.31	26.21	80.902.716	33.79	69.103.045	48.28	61.459.463	63.45	60.044.722	80	58.350.936	80	329.860.882	
				Persentase konflik sosial yang diselesaikan oleh lembaga adat	Persen	N/A	100	80.902.716	100	69.103.045	100	61.459.463	100	60.044.722	100	58.350.936	100	329.860.882	
2	13	02	Program penataan desa	Persentase desa yang ditata	Persen	29.31	37.93	461.602.299	46.55	435.607.144	55.17	349.512.886	63.79	314.246.795	72.41	284.340.158	72.41	1.845.309.282	
2	14			Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	14	02	Program pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalia n penduduk	Persen	2.44	2.44	21.000.000	4,88	105.000.000	7,32	97.650.000	9,76	98.626.500	12,2	99.612.765	12,2	421.889.265	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	Program pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB Aktif	Persen	44.36	44,89	656.661.800	45,35	689.494.890	45,82	579.175.708	46,28	584.967.465	46,74	549.869.417	46,74	3.060.169.280	
				Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen	11.38	11,21	656.661.800	11,04	689.494.890	10,87	579.175.708	10,7	584.967.465	10,53	549.869.417	10,53	3.060.169.280	
				Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	72.72	73,22	656.661.800	73,72	689.494.890	74,23	579.175.708	74,73	584.967.465	75,23	549.869.417	75,23	3.060.169.280	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
				Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependuduk an Keluarga Berencana dan Pembanguna n Keluarga (KKBPK)	Persen	2.17	2,46	656.66 1.800	2,75	689.49 4.890	3,04	579.17 5.708	3,33	584.96 7.465	3,62	549.869.4 17	3,62	3.060.16 9.280		
2	1 4	0 4	Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	28.62	29,22	329.50 2.333	29,82	359.15 7.543	30,43	305.28 3.912	31,03	308.33 6.751	31,63	308.953.4 24	31,63	1.611.23 3.963		
				Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	Persen	0	8,33	329.50 2.333	16,67	359.15 7.543	25	305.28 3.912	33,33	308.33 6.751	41,67	308.95 3.424	41,67	688.659. 876		
2	1 5			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
2	1	0	2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	51.85	59.25	1.930.631.778	64.81	2.037.974.905	68.51	1.000.342.002	74	1.227.465.812	77.07	1.195.849.012	77.07	7.392.263.509	Dinas Perhubungan
					Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	37.5	50.0	1.106.400.000	62.5	1.243.593.600	75.0	1.000.000.000	87.5	1.527.862.029	100.0	1.748.959.088	100.0	6.626.814.717	
					Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	43.37	46.22	584.494.000	49.37	590.358.000	53.65	400.000.000	59.37	644.782.200	65.94	387144391	65.94	2.606.778.591	
					Persentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	Persen	0	25	1.650.436.200	50	1.847.950.800	75	1.478.806.563	100	1.478.806.563	100	1.478.806.563	100	7.934.806.689	
					Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	40.00	49.18	80.000.000	52.88	87.533.398	67.42	108.593.083	85.93	109.755.029	87	209.755.029	87	595.636.539	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	100	80	170.000.000	66	145.300.000	53	124.100.000	40	102.000.000	26	139.361.969	26	680.761.969	
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase fasilitas pelabuhan penumpang dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	50	62.5	15.400.000	87.5	19.250.000	100	1.021.656.250	-	-	-	-	100	1.056.306.250	Dinas Perhubungan
				Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	0	20	38.200.000	60	47.951.000	80	61.120.000	100	68.760.000	-	-	100	216.031.000	
2	16			Urusan pemerintahan Bidang komunikasi dan informatika															
2	16	2	Program informasi dan komunikasi publik	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	66.67	75	135.000.000	80	141.750.000	83.3	145.293.750	85.7	152.558.438	87.5	160.186.359	87.50	734.788.547	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	100	100	350.000.000	100	367.500.000	100	376.687.500	100	395.521.875	100	415.297.969	100	1.905.007.344	
2	16	3	Program aplikasi informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	500.000.000	100	525.000.000	100	538.125.000	100	565.031.250	100	593.282.813	100	2.721.439.063	
				Persentase layanan administrasi pemerintaha n yang terintegrasi	Persen	13.33	20	125.000.000	26.67	131.250.000	33.33	134.531.250	40	141.257.813	46.67	148.320.703	46.67	680.359.766	
2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	17	03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase penurunan koperasi yang merugikan masyarakat	Persen	89.51	90.91	29.500.000	92.91	30.000.000	94.41	29.000.000	96.50	29.000.000	100.00	31.000.000	100.00	148.500.000	Dinas Penanaman Modal. Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
2	17	05	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase SDM pengurus koperasi yang terlatih	Persen	41.66	55.56	390.304.000	69.44	400.000.000	79.86	391.000.000	90.28	405.000.000	100.00	408.000.000	100.00	1.994.304.000	
2	17	07	Program pemberdayaan usaha menengah. usaha kecil. dan usaha mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya	Persen	10	20	44.463.000	40.00	45.000.000	60.00	44.000.000	80.00	45.000.000	100.00	45.000.000	100.00	223.463.000	
2	17	08	Progam pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	Persen	10	20	45.216.500	40.00	57.000.000	60.00	51.000.000	80.00	55.000.000	100.00	58.000.000	100.00	266.216.500	
2	18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	18	02	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikas i	Persen	50	60	18.000.000	70.00	19.000.000	80.00	20.000.000	90.00	20.000.000	100.00	20.000.000	100.00	97.000.000	Dinas Penanaman Modal. Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
2	18	03	Program promosi penanaman modal	Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanju ti	Persen	4	16	16.062.000	20.00	30.659.912	20.00	28.000.000	20.00	28.000.000	20.00	33.000.000	100.00	135.721.912	
2	18	04	Program pelayanan penanaman modal	Persentase petugas pelayanan yang terlatih	Persen	2.5	5	350.224.108	7.50	353.000.000	10.00	352.000.000	12.50	352.000.000	17.81	353.000.000	17.81	1.760.224.108	
				Persentase sarana prasarana perizinan yang memadai	Persen	34.66	36.66	37.307.800	37.91	40.000.000	39.25	38.000.000	40.84	39.000.000	42.37	40.000.000	42.37	194.307.800	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	18	05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal melalui lkpm online	Persen	24	40	374.223.000	50.00	377.000.000	70.00	373.000.000	84.00	374.000.000	100.00	377.000.000	100.00	1.875.223.000		
2	19			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga																
2	19	02	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	N/A	10.000.000	54	35.000.000	58	20.000.000	62	20.000.000	66	20.000.000	66	105.000.000	10.000.000	Dinas Pendidikan	
				Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/mengikuti pelatihan	Persen	N/A	180.000.000	2	200.000.000	4	180.000.000	4	200.000.000	6	200.000.000	6	960.000.000	180.000.000		
				Persentase pemuda yang mengikuti organisasi kepemudaan	Persen	N/A	10.000.000	1,74	35.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	105.000.000	10.000.000		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				dan organisasi sosial kemasyarakan															
2	19	03	Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih yang bersertifikat	Persen	N/A	30,00	30.000.130	35	50.000.000	40	29.925.200	45	29.925.200	50	20.000.000	50	159.850.530	
				Persentase atlet muda yang dibina	Persen	N/A	10	100.000.000	11	100.000.000	12	100.000.000	13	90.000.000	14	90.000.000	14	480.000.000	
				Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	N/A	50	-	55	830.000.000	58	50.000.000	60	50.000.000	63	50.000.000	63	980.000.000	
				Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar	Persen	N/A	50	400.000.000	55	400.000.000	58	400.000.000	60	400.000.000	63	400.000.000	63	2.000.000.000	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	19	04	Program pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaa n yang aktif	Persen	N/A	25	100.00 0.000	26,79	100.00 0.000	28,57	100.00 0.000	30,36	100.00 0.000	32,14	100.000.0 00	32,14	500.000. 000	
				Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaa n	Persen	N/A	25	105.00 0.000	38	105.00 0.000	38	50.000. 000	50	84.996. 000	50,00	90.000.00 0	50,00	434.996. 000	
2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik															
2	20	2	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	Persen	100	100	135.00 0.000	100	141.75 0.000	100	145.29 3.750	100	152.55 8.438	100	160.186.3 59	100	734.788. 547	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian															
2	21	2	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunaka n sandi dalam komunikasi	Persen	100	100	358.81 3.869	100	376.75 4.562	100	386.17 3.427	100	405.48 2.098	100	425.756.2 03	100	1.952.98 0.159	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	2	0	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	31	1.487.145.600	54	1.527.140.201	69	1.425.708.752	85	1.470.859.028	100	1.491.599.721	100	7.402.453.302	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	2	0	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian yang dikembangk an	Persen	29	43	187.709.296	57	192.757.462	71	179.954.664	86	185.653.585	100	188.271.500	100	934.346.507	
2	2	0	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	8%	31	1.487.145.600	54	1.527.140.201	69	1.425.708.752	85	1.470.859.028	100	1.491.599.721	100	7.402.453.302	
2	2			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan															
2	2	0	Program pembinaan perpustakaan	Rasio ketercukup a n koleksi perpustakaa n dengan penduduk	Rasio	0,0358	0,0360	202.550.000	0,0361	136.500.000	0,0362	-	0,0364	-	0,0365	-	0,0365	339.050.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase perpustakaa n sesuai standar nasional	Persen	0,0059%	0,0059 %	748.693.100	0,0088 %	748.693.100	0,0118 %	748.693.100	0,0147 %	748.693.100	0,0177 %	748.693.100	0,0177%	3.743.465.500	
				SKM layanan Perpustakaa n	Nilai SKM	N/A	3,064	34.548.200	3,065	44.548.200	3,066	34.548.200	3,067	34.548.200	3,070	34.548.200	3,070	182.741.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				rasio kunjungan perpustakaa n	Rasio	0,051	0,051	24.509.500	0,053	50.000.000	0,056	50.000.000	0,058	38.770.000	0,061	38.770.000	0,061	202.049.500	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Persen	N/A	6	13.385.000	8	40.381.000	10	40.381.000	12	40.381.000	14	30.381.000	14	164.909.000	
2	24			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan															
2	24	2	Program pengelolaan arsip	Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar	Persen	14.34	14.73	13.000.000	15.12	53.534.343	15.50	53.534.343	15.89	40.951.505	16.28	33.072.425	16.28	194.092.616	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Persen	100	100	34.928.800	100	57.099.197	100	37.771.819	100	39.928.454	100	29.928.454	100	199.656.724	
3				Urusan Pemerintahan Pilihan															
3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan															
3	25	02	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	44.59	56.70	14.200.000	60.79	14.200.000	64.89	14.200.000	68.99	14.200.000	73.09	14.200.000	73.09	71.000.000	Dinas Kelautan. Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen	100	100	375.159.296	100	375.159.296	100	375.159.296	100	375.159.296	100	375.159.296	100	1.875.796.480	
3	25	03	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih	Persen	55.56	69.53	26.957.500	76.52	26.957.500	83.51	26.957.500	90.49	26.957.500	97.48	26.957.500	97.48	134.787.500	
				Persentase kelompok pembudiaya ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen	55.56	58.18	943.145.916	59.49	1.102.553.427	60.80	1.168.455.214	62.11	1.201.863.488	63.42	1.326.160.794	63.42	5.742.168.839	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
3	2	0	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar	Persen	N/A	60	189.900.000	70	189.900.000	80	189.900.000	90	189.900.000	100	189.900.000	100	949.500.000		
3	2	6		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																
3	2	0	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang berkembang	Persen	33	47	2.580.693.620	60	2.650.097.592	73	2.474.080.197	87	2.552.430.986	100	2.588.423.005	100	12.845.725.400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	2	0	Program pemasaran pariwisata	Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosika n	Persen	33	47	1.107.885.000	60	1.137.679.943	73	1.062.116.137	87	1.095.751.925	100	1.111.203.205	100	5.514.636.210		
3	2	0	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kerjasama pengemban gan wisata yang terjalin	Persen	29	43	279.638.914	57	287.159.392	71	268.086.492	86	276.576.430	100	280.476.455	100	1.391.937.683		
				Persentase pelaku pariwisata bersertifikat	Persen	N/A	20	1.009.807.188	40	1.036.964.472	60	968.090.109	80	998.748.219	100	1.012.831.642	100	5.026.441.630		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya (terutama kerajinan)	Persen	41	55	264.103.418	59	271.206.093	73	253.192.798	86	261.211.073	100	264.894.429	100	1.314.607.811	
3	27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian															
3	27	02	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok petani yang memiliki benih unggul sesuai standar	Persen	22.99	29.51	3.847.371.239	31.88	3.924.318.664	34.25	3.845.832.290	36.62	3.884.290.613	38.99	3.923.133.519	38.99	23.348.079.844	Dinas Pertanian
				Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar	Persen	31.02	31.97	2.564.914.159	32.54	2.616.212.442	33.11	2.563.888.194	33.69	2.589.527.076	34.26	2.615.422.347	34.26	15.565.386.565	
				Persentase kelompok petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar	Persen	24.01	25	1.182.750.000	26.13	1.206.405.000	27.27	1.182.276.900	28.40	1.194.099.669	29.54	1.206.040.666	29.54	7.177.612.901	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Persentase kelompok peternak yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan	Persen	5.79	4.79	100000 00	5.34	100000 00	5.87	10241 000	6.40	10296 000	6.91	1047450 0	6.91	61.486.0 00	Dinas Peternakan
				Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit sesuai standar	Persen	1.28	9.86	17800 000	9.99	17800 000	10.24	18229 000	10.49	18328 000	10.61	1865100 0	10.61	90.808.0 00	
				Persentase kelompok peternak (ternak besar) yang memiliki hijauan pakan ternak	Persen	40	1.36	13655 0000	2.03	13655 0000	2.37	13984 0800	2.71	14060 0000	3.05	1430760 00	3.05	839.692. 800	
				Persentase kelompok peternak	Persen	1.28	9.86	248054 4000	9.99	248054 4000	10.24	25403 24000	10.49	255411 8400	10.61	25991000 00	10.61	15.253.7 30.400	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				yang memperoleh bantuan permodalan															
3	27	03	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian berkondisi baik	Persen	32.70	35.14	19.905 .200.00 0	36.24	20.303 .304.00 0	37.33	19.897 .235.92 0	38.43	20.096 .208.27 9	39.53	20.297.17 0.362	39.53	100.499. 118.561	Dinas Pertanian
				Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian	Persen	0.02	0.04	330.10 0.000	0.05	336.70 2.000	0.06	329.96 7.960	0.08	333.26 7.640	0.09	336.600.3 16	0.09	1.666.63 7.916	
				Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	Persen	100	100	586000 00	100	249490 000	100	60012 300	100	603380 00	100	61400700	100	551.241. 700	Dinas Peternakan
3	27	04	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kelahiran ternak	Persen	1.6	1.6	50000 00	1.6	50000 00	1.6	50000 00	1.6	51480 00	1.6	5239000	1.6	25.387.0 00	Dinas Peternakan
				Tingkat kematian ternak	Persen	0.63	0.61	82391 1596	0.60	823911 600	0.59	84376 6500	0.58	84834 9000	0.57	8632890 00	0.57	4.203.22 7.696	
				Persentase ternak yang tidak	Persen	95.49	96.55	19600 000	96.92	19600 000	97.3	20313 400	97.67	20182 000	98.05	2053650 0	98.05	100.231. 900	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				terserang penyakit															
				Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH	Persen	40.50	40.50	5000000	40.50	5000000	40.50	5000000	40.50	5148000	40.50	5239000	40.50	30.626.000	
3	27	05	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas area tanam yang terserang hama penyakit	Hektar	4.12	4.17	489.915.972	3.53	499.714.291	2.89	489.720.000	2.25	494.617.200	1.61	499.563.372	1.61	1.479.199.344	Dinas Pertanian
3	27	06	Program perizinan usaha pertanian	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha	Persen	17.89	23.63	32.600.00	25.63	33.252.000	27.63	32.586.960	29.63	32.912.830	31.63	33.241.958	31.63	165.235.706	
3	27	07	Program penyuluhan pertanian	Persentase SDM petani yang terlatih (kelompok)	Persen	0.07	0.08	152.907.500	0.10	155.965.650	0.11	152.846.335	0.13	154.374.798	0.15	155.918.846	0.15	772.013.129	Dinas Pertanian
				Persentase kelompok petani yang	Persen	5.42	5.54	822.974.972	5.82	839.434.471	5.93	822.645.782	6.10	830.872.240	6.38	839.180.962	6.38	4.155.108.427	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				meningkat kelas taninya															
				Persentase peningkatan petani milenial	Persen	N/A	8	774.610.000	10	790.102.200	12	774.300.156	14	782.043.158	16	789.863.589	16	3.910.919.103	
				Persentase peternak yang terlatih (kelompok)	Persen	0.3	0.62	50039000	0.83	50039000	1.03	51244300	1.24	51523000	1.44	52431000	1.44	204.032.000	Dinas Peternakan
				Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen	1.28	9.86	51800000	9.99	51800000	10.24	53050000	10.49	53336600	10.61	54275000	10.61	264.261.600	Dinas Peternakan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase produk pertanian yang ditangai sesuai standar SNI	Persen	100	100	6.412.285.398	100	6.540.531.106	100	6.409.720.484	100	6.473.817.89	100	6.538.555.866	100	19.488.807.456	Dinas Pertanian
3	30			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan															
3	30	03	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	Persen	74	82	69.300.000	86.0	72.765.000	89.0	72.765.000	92.0	74.220.300	96.0	77.931.315	96.0	366.981.615	Dinas Perdagangan
				Persentase kelompok pedagang yang terlatih	Persen	N/A	11.1	-	22.2	90.000.000	33.3	90.000.000	44.4	91.800.000	55.6	96.390.000	55.6	368.190.000	
				Persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan permodalan	Persen	N/A	11.1	-	22.2	50.000.000	33.3	50.000.000	44.4	51.000.000	55.6	53.550.000	55.6	204.550.000	
3	30	04		Stabilisasi harga barang kebutuhan	Tingkat ketersediaan barang lokal	Persen	100	100	342.501.324	100	359.626.390	100	359.626.390	100	359.626.390	100	377.607.710	100	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			pokok dan barang penting	Tingkat stabilitas harga barang pokok dan barang penting	Persen	100	100	135.394.000	100	142.163.700	100	142.163.700	100	142.163.700	100	149.271.885	100	711.156.985	
3	30	06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase penurunan kasus sengketa perdagangan	Persen	N/A	40	35.600.000	50	37.380.000	60	37.380.000	80	38.127.600	100	40.033.980	100	188.521.580	
3	30	07	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix	Persen	N/A	11.1	94.800.000	22.2	99.540.000	33.3	99.540.000	44.4	101.530.800	55.6	106.607.340	55.6	502.018.140	
				Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing-mix	Persen	N/A	3.3	-	6.7	70.300.000	10.0	70.300.000	13.3	71.706.000	16.7	75.291.300	16.7	287.597.300	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian	Persen	N/A	3.3	69.200.000	6.7	72.660.000	10.0	72.660.000	13.3	74.113.200	16.7	77.818.860	16.7	366.452.060	
3	31			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian															
3	31	02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan pelaku IKM pengolahan pangan dan pasca panen yang terlatih	Persen	27.3	36.4	-	45.5	95.000.000	54.5	95.000.000	63.6	96.900.000	72.7	101.745.000	72.7	388.645.000	Dinas Perdagangan
				Persentase IKM yang mendapatka n bantuan permodalan	Persen	29.1	32.6	219.698.224	36.2	230.683.135	39.7	230.683.135	43.3	235.296.798	46.8	247.061.638	46.8	1.163.422.930	
				Persentase IKM yang menggunaka n teknologi pengolahan modern	Persen	25.0	33.3	-	41.7	62.000.000	50.0	62.000.000	58.3	63.240.000	66.7	66.402.000	66.7	253.642.000	
				Tingkat ketersediaan bahan baku	Persen	N/A	100	229.253.100	100	240.715.755	100	240.715.755	100	245.530.070	100	257.806.574	100	1.214.021.254	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				produksi tenun															
				Persentase peningkatan pelaku industri tenun yang terlatih	Persen	14.3	18.6	-	22.9	90.000.000	27.1	90.000.000	31.4	91.800.000	35.7	96.390.000	35.7	368.190.000	
				Persentase peningkatan pelaku industri mebel dan bambu yang terlatih	Persen	10	11	-	12.0	88.500.000	13.0	88.500.000	14.0	90.270.000	15.0	94.783.500	15.0	362.053.500	
				Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya	Persen	N/A	3.5	5.301.599.400	7.1	1.000.000.000	10.6	1.000.000.000	14.2	1.000.000.000	17.7	1.000.000.000	17.7	9.301.599.400	
4				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
4	1			Sekretariat Daerah															
4	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintaha	Persen	99.89	99.91	477.130.000	99.94	496.744.289	99.96	362.623.333	99.98	382.204.992	100	532.325.749	100	2.251.028.363	Bagian Administrasi Pemerintahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				n yang ditindaklanjuti															
				Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	9.281.968.804	100	9.514.850.549	100	8.912.079.927	100	8.965141.225	100	9.003.731.862	100	45.677.772.367	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Persentase penyaluran Bansos tepat saaran	Persen	100	100	860.125.000	100	900.000.000	100	860.000.000	100	860.000.000	100	860.000.000	100	4.340.125.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	Persen	100	100	267.011.924	100	293.713.116	100	323.084.428	100	355.392.871	100	390.932.158	100	1.630.134.497	Bagian Hukum
4	1	3	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang	Persen	100	100	48.000.000	100	50.500.000	100	60.000.000	100	60.500.000	100	61.000.000	100	280.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				ditindaklanjuti															
				Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	93.88	100	225.210.524	100	230.000.000	100	240.000.000	100	260.000.000	100	265.000.000	100	1.220.210.524	Bagian Administrasi Pembangunan
				Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procement	Persen	49	60	250.000.000	70	300.000.000	80	300.000.000	90	350.000.000	90	350.000.000	90	1.550.000.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Presentasi jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	49.19	55	454.043.192	60	385.336.144	60	350.779.850	60	307.048.564	60	331.593.154	60	1.828.800.904	
				Rasio Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	35.89	40	450.250.000	40	500.000.000	45	500.000.000	45	500.000.000	50	500.000.000	50	2.450.250.000	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	96	97	47.600.000	98	50.100.000	99	59.600.000	100	60.100.000	100	60.600.000	100	278.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4	2			Sekretariat DPRD															
4	2	2	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	28	30	7.909.400.000	32	8.045.950.000	33	7.672.18.000	35	7.772.18.000	37	7.672.118.000	37	39.071.704.000	Sekretariat DPRD
5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
5	1			Perencanaan															
5	1	2	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja	Persen	100	100	893.194.900	100	925.528.555	100	922.937.075	100	927.920.936	100	931.539.827	100	4.601.121.293	BAPPELITBANG DA
				Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Persen	54	100		100		100		100		100				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	1	3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase realisasi target program	Persen	54	100	1.011.050.600	100	1.047.650.632	100	1.044.717.210	100	1.050.358.683	100	1.054.455.082	100	5.208.232.207	
5	2			Keuangan															
5	2	2	Program Pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyerapan belanja daerah	Persen	90	90	346.002.484	90	580.684.351	90	312.470.282	90	401.580.854	90	396.206.337	90	2.036.944.308	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Persen	75	75	222.403.490.937	75	227.898.273.645	100	212.694.305.225	100	213.632.244.525	100	214.488.592.109	100	1.091.116.906.441	
				Persentase OPD yang menyajikan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	512.798.000	100	860.611.665	100	463.101.114	100	595.168.729	100	587.203.348	100	3.018.882.856	
5	2	3	Program Pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisa si	Persen	100	100	1.788.054.648	100	1.841.696.287	100	1.896.947.176	100	1.953.855.591	100	2.012.471.259	100	9.493.024.961	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5	2	4	Program Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase realisasi target pajak daerah	Persen	71	75.20	881.91 2.496	76.68	904.903 .785	78.33	899.28 7.092	79.90	907.42 0.786	81.43	913.532.7 65	81.43	4.507.05 6.924	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase realisasi target retribusi daerah	Persen	81	82.00	587.94 1.664	83	602.34 5.658	83.50	606.57 7.052	84	609.02 1.843	85	609.021.8 43	85	3.014.90 8.060	
5	3			Kepegawaian															
5	3	2	Program Kepegawaian daerah	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Persen	5.28	7.55	2.666.5 65.800	9.62	3.148.7 34.363	10.68	2.858.3 64.353	10.71	2.747.5 75.398	10.75	2.620.711. 241	10.75	14.041.9 51.155	Badan Kepegawaian dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia Daerah
				Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	Persen	83.21	85.50	466.01 5.400	87.50	489.316 .170	90.50	329.45 5.948	92.50	349.332 .791	94.92	370.203.4 75	94.92	2.004.32 3.784	
				Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	Persen	84.91	85.41	650.17 5.650	85.91	739.451 .677	86.41	776.42 4.261	86.91	815.245 .474	87.41	856.007.7 48	87.41	3.837.30 4.810	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0.10	0.09	68.080.900	0.08	68.080.900	0.07	68.080.900	0.06	68.080.900	0.05	68.080.900	0.05	340.404.500	
5	5			Penelitian dan Pengembangan															
5	5	2	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatka n	Persen	54	100	465.906.900	100	482.772.730	100	481.420.966	100	484.020.639	100	485.908.320	100	2.400.029.555	BAPPELITBANG DA
6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan															
6	1			Inspektorat Daerah															
6	1	2	Program Perumusan kebijakan. pendampingan. asistensi	Persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Persen	50	50	12.587.000	50	4.000.000	50	4.000.000	50	4.000.000	50	4.000.000	50	28.587.000	Inspektorat Daerah
6	1	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	72.81	77.34	667.408.000	79.6	827.408.000	81.86	735.314.114	84.12	750.000.000	86.39	755.943.283	86.39	3.736.073.397	
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persen	38.17	39.29	667.408.000	39.85	827.408.000	40.41	735.314.114	40.97	750.000.000	41.53	755.943.283	41.53	3.736.073.397	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	667.408.000	100	827.408.000	100	735.314.114	100	750.000.000	100	755.943.283	100	3.736.073.397	
7				Unsur Kewilayahan															
7	1			Kecamatan															
7	1	1	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen	N/A	100	1.064.984.900	100	1.138.867.834	100	1.028.172.411	100	1.122.024.408	100	1.229.812.485	100	5.583.862.038	Kecamatan
7	1	2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	427.680.300	100	479.357.812	100	426.743.520	100	476.693.372	100	526.386.758	100	2.336.861.762	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	1	3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	254.000.000	100	298.204.994	100	244.814.965	100	262.359.447	100	300.218.832	100	1.359.598.238	
7	1	4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Persen		100	449.669.000	100	483.813.300	100	418.429.254	100	447.947.192	100	476.483.009	100	2.276.341.755	
8				Unsur Pemerintahan Umum															
8	1			Kesatuan Bangsa dan Politik															
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	N/A	100	169.310.000	100	187.260.821	100	243.439.067	100	243.439.067	100	263.960.615	100	263.960.615	Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungja wab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	N/A	100	644.177.560	100	663.502.887	100	855.918.724	100	855.918.724	100	855.918.724	100	855.918.724	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyaraka tan yang aktif dalam kegiatan kemasyaraka tan	Persen	N/A	100	57.374.000	100	59.095.220	100	75.641.882	100	75.641.882	100	75.641.882	100	75.641.882	
8	01	05	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial. dan budaya	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	Persen	N/A	100	120.990.000	100	124.619.700	100	159.513.216	100	159.513.216	100	159.513.216	100	159.513.216	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	Persen	79%	80%	1.008.015.000	81%	1.038.255.450	82%	1.351.273.942	83%	1.379.490.630	84%	1.379.490.630	84%	1.379.490.630	



## BAB VIII

# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Sementara itu, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

### 8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan untuk satu periode ke depan. IKU daerah adalah indikator makro di bidang sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Adapun IKU daerah Kabupaten Manggarai yang ditetapkan, yaitu sebanyak 14 IKU. sebagai berikut:

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	64.54	66.24	67.01	67.77	68.54	69.30	69.30
2	Angka PMKS	Angka	19.589	19.089	18.589	18.059	17.589	17.089	17.089
3	Prevalensi Stunting	Persen	21.9	19.40	16.90	14.40	11.90	9.40	9.40
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	65.61	65.84	65.88	65.93	65.97	66.02	66.02
5	Indeks Risiko Bencana	Angka	97.12	97.12	97.12	97.12	97.12	97.12	97.12
6	Indeks Desa Membangun	Angka	0.576	0.601	0.613	0.625	0.638	0.650	0.650
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0.79	4.93	5.19	5.20	5.22	5.23	5.23
8	PDRB Per Kapita	Ribu Rp per penduduk	9.572	10.125	10.497	10.885	11.288	11.706	11.706
9	Indeks Gini	Angka	0.295	0.289	0.286	0.283	0.280	0.276	0.276
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	20.34	19.47	18.88	18.30	17.71	17.12	17.12
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	80.59	81.36	81.36	81.75	81.86	82.16	82.16
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Predikat	49.83 C	50.10 CC	54.00 CC	56.00 CC	58.00 CC	60.10 B	60.10
13	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP	Nilai		63.10 (B)	64.50 (B)	66 (B)	67.50 (B)	68 (B)	68 (B)

## 8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

IKU Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU daerah. IKU OPD ini akan menjadi indikator sasaran di dalam rencana strategis perangkat daerah. Berikut ini adalah IKU masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2026

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Sekretariat Daerah	Nilai LPPD	Nilai	2.7951 Status kinerja sedang	3.0551 Status kinerja sedang	3.3151 Status kinerja sedang	3.5751 Status kinerja tinggi	3.8351 Status kinerja tinggi	4.0951 Status kinerja tinggi	4.0951 Status kinerja tinggi
2	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Nilai	50	58	63	68	71	75	75
3	Inspektorat Daerah	Maturitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Kapabilitas SPIP	Level	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4	Dinas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.37	7.61	7.72	7.82	7.93	8.04	8.04
		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.41	13.53	13.66	13.78	13.91	14.03	14.03
		Rata-rata nilai ujian	Nilai	56.40	56.42	56.45	56.47	56.49	56.52	56.52
		Peringkat pada event olahraga daerah (POPDA)	Peringkat	6	5	5	5	4	4	4

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	NA	9.19	9.33	9.47	9.61	9.75	9.75
5	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu	Angka	79.05	76.5	75.2	74	72.7	71.4	71.4
		Angka Kematian Bayi	Angka	13.44	12.36	11.82	11.28	10.73	10.19	10.19
		Angka Kesakitan	Angka	23.54	22.69	21.78	20.81	19.77	18.68	18.68
		Angka Kematian Anak dan Balita	Angka	0.16	0	0	0	0	0	0
		Persentase Kecamatan terverifikasi melaksanakan 5 Pilar STBM GESI	Persen	16,67	100	100	100	100	100	100
6	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Angka	0.13	1.12	2.11	3.1	4.09	5.08	5.08
7	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan dan	Status Kabupaten Layak Anak	Status	Tahap Pengembang an	Tahap Pengembanga n	Tahap Pengembang an	Tahap Pengembangan	Pratama	Pratama	Pratama
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	63.11	64.16	65.22	66.27	67.32	68.37	68.37

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Perlindungan Anak	Angka kekerasan terhadap perempuan	Persen	26.5	25.45	24.39	23.34	22.29	21.24	21.24
		Angka kekerasan terhadap anak	Persen	0.021	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014
		Total Fertility Rate	Angka	2.07	2.056	2.042	2.028	2.014	2.00	2.00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Literasi Masyarakat	Indeks	12	12	14	14	15	15	15
		IKM Kearsipan	Angka	-	3.064	3.065	3.066	3.067	3.068	3.068
9	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Produksi perikanan tangkap	Ton	7.067.11	7.084.21	7.101.30	7118.40	7.135.49	7.152.59	7.152.59
		Produksi perikanan budidaya	Ton	149.69	2.157.51	165.34	173.16	180.98	188.8	188.8
		Persentase produk perikanan yang memiliki sertifikasi mutu	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
		Indeks ketersediaan	Nilai	89.8	89.85	89.9	89.95	90	90.05	90.05
		Indeks pemanfaatan	Nilai	63.07	63.12	63.17	63.22	63.27	63.32	63.32

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks keterjangkauan	Nilai	67.54	67.59	67.64	67.69	67.74	67.79	67.79
10	Dinas Pertanian	Produksi padi sawah	Ton GKG	111.881	113.000	114.130	115.271	116.424	117.588	117.588
		Produksi jagung	Ton PK	14.964	15.114	15.265	15.418	15.572	15.728	15.728
		Produksi kedelai	Ton BK	395	399	403	407	411	415	415
		Produksi Bawang Merah	Ton UB	280	281	282	283	284	285	285
		Produksi Cabe	Ton UB	229	231	234	236	237	238	238
		Produksi Kubis	Ton UB	340	341	342	343	344	345	345
		Produksi Petsai	Ton UB	476	477	478	479	480	481	481
		Produksi Kopi	Ton BK	2.638	2.643	2.648	2.652	2.657	2.662	2.662
		Produksi Cengkeh	Ton BK	9.030	9.046	9.063	9.079	9.095	9.112	9.112
		Produksi Jambu Mete	Ton BK	1.515	1.518	1.520	1.523	1.526	1.529	1.529
		Produksi Kemiri	Ton BK	1.699	1.702	1.705	1.708	1.711	1.714	1.714
		Persentase produk pertanian bersertifikat SNI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Dinas Peternakan	Produksi daging	Ton	564.986.50	649.945.00	692.424.00	734.904.00	777.383.00	819.862.00	819.862.00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Produksi telur	Kg	506.233	556.856	612.541	673.796	741.175	815.293	815.293
		Populasi Sapi	Ekor	26.303	27.339	27.872	28.415	28.970	29.534	29.534
		Populasi Kerbau	Ekor	8.103	8.394	8.543	8.696	8.850	9.008	9.008
		Populasi Kuda	Ekor	189	196	199	202	206	209	209
		Populasi Kambing	Ekor	11.952	12.648	13.011	13.384	13.768	14.164	14.164
		Populasi Babi	Ekor	42.052	44.847	46.314	47.828	49.392	51.007	51.007
		Populasi Ayam Buras	Ekor	200.743	205.184	207.441	209.723	212.029	214.362	214.362
		Populasi Itik/ Bebek	Ekor	4.914	5.151	5.273	5.399	5.527	5.659	5.659
		Persentase produk hasil peternakan yang bersertifikat NKV	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan investor	Persen	50.00	60	70	80	90	100	100
		Persentase koperasi yang aktif	Persen	89.51	90.91	92.91	94.41	96.5	100	100

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase koperasi yang sehat	Persen	89.51	90.91	92.91	94.41	96.5	100	100
		Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya	Persen	NA	10	20	30	40	50	50
		Tingkat kesempatan kerja	Persen	NA	70	74	78	82	86	86
		Persentase konflik/kasus hubungan industrial	Persen	81.82	63.63	45.45	27.27	9.09	0	0
13	Dinas Perdagangan	Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan	Persen	21.92	28.77	35.62	42.47	49.32	56.16	56.16
		Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai produksi IKM (fokus: pertanian. perikanan. tenun. mebel dan bambu)	Nilai	40.117.470.000	40.919.819.400	41.738.215.788	42.572.980.104	43.424.439.706	44.292.928.500	44.292.928.500



No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase produk industri tenun. mebel dan bambu yang tersertifikasi	Persen	NA	1	2	3	4	5	5
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	48	10	10	10	10	10	50
		Persentase peningkatan <i>spend of money</i> wisatawan	Persen	1.275.000 (100%)	1	10	10	10	10	41
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	55	64	73	82	91	100	100
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Presentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	persen	53.21	56.15	59.08	62.02	64.95	67.88	67.88
		Persentase drainase perkotaan yang terbangun	Persen	72	76.2	79.7	81.7	84.8	88	88
		Presentase Luas daerah terlayani irigasi primer	Persen	77	81.71	86.42	91.13	95.84	100	100
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses	Level	74.03	78.092	81.037	83.982	86.927	89.872	89.872

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan								
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persen	86	88%	89%	91%	92%	93%	93%
		Persentase cakupan pemanfaatan ruang yang terkendali	Persen	12	22	32	42	52	62	62
		Persentase kawasan rawan bencana yang memiliki bangunan pengendali bencana	Persen	16.50	23.74	32.55%	41.36%	48.17%	58.60%	58.60%
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	88.75	90.75	91.75	92.75	93.75	94.75	94.75
17	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	70	71.50	71.50	72.00	72.00	72.50	72.50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87.87	88.37	88.37	88.87	88.87	88.87	88.87

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	85.32	85.32	85.32	85.32	85.82	86.32	86.32
		Persentase sampah tertangani	Persen	18.74%	20.97	23.21	25.44	27.68	29.91	29.91
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	NA	26.13	31.24	36.35	41.46	46.57	46.57
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen	13.58	16.18	18.78	21.38	23.98	26.58	26.58
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	26.56	30.03	32.47	34.90	37.33	39.76	39.76
		IKM Disdukcapil	Nilai	78.36	78.50	79.20	79.45	8.30	80.50	80.50
19	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas	Rasio	NA	0.81	0.84	0.85	0.86	0.89	0.89
		Kinerja Lalu Lintas	Persen	NA	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Nilai	1.91	2.1	2.4	2.6	2.8	3	3
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Berkembang	Persen	32.41	39.31	46.21	53.10	60.00	66.90	66.90

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Persen	Sedang (0.49)	Sedang (0.49)	Sedang (0.49)	Sedang (0.49)	Sedang (0.49)	Sedang (0.49)	Sedang (0.49)
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase penurunan pelanggaran perda	Persen	721 kasus	13.86%	16.10%	28.79%	40.43%	67.87%	61.62%
		Respons time rate	Menit	15	15	15	15	15	15	15
24	Bappelitbangda	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	Persen	54	100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi sasaran	Persen	54	100	100	100	100	100	100
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pengelolaan asset yang sesuai standar	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tertib administrasi keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
26	Badan Pendapatan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Nilai	0.541	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Persentase peningkatan PAD	Persen	1	1	2	2.4	3	4	4

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
27	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Indeks profesionalitas pegawai	Nilai	47.59	71 (sedang)	74 (sedang)	78 (sedang)	81 (tinggi)	83 (tinggi)	83 (tinggi)
28	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Angka Konflik Sosial	Angka	6	6	5	4	4	3	3
29	Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	NA	76.61	77	79	80	81	81
30	RSUD	IKM Rumah Sakit	Nilai	82.21	83.52	84.83	86.14	87.45	88.76	88.76

### 8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Adapun IKK Kabupaten Manggarai yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Tahun 2022 - 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1.1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	25.38	100	100	100	100	100	100
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	93.77	100	100	100	100	100	100
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5	APK PAUD	Persen	49.53	49.66	49.78	49.91	50.03	50.16	50.16
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	93.77	93.84	93.9	93.97	94.03	94.10	94.10
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8	persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Persen	NA	26.45	26.91	27.37	27.83	28.29	28.29
1.9	persentase tenaga pendidik yang bersertifikat	Persen	NA	56.12	58.92	61.73	64.53	67.34	67.34
1.10	Persentase SD dan SMP yang terakreditasi	Persen	75	75.3	75.59	75.89	76.18	76.48	76.48
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0.0588%	0.0590%	0.0592%	0.0594%	0.0596%	0.0598%	0.0598%
2.2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	50	100	100	100	100	100	100
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	70.7	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	98.7	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	90.2	100	100	100	100	100	100
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	79.9	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	60.33	100	100	100	100	100	100
2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	6.38	100	100	100	100	100	100
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	40.1	100	100	100	100	100	100
2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	21	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	67.6	100	100	100	100	100	100
2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	72.9	77.034	81.168	85.302	89.436	93.57	93.57
2.15	persentase balita gizi kurang	Persen	13.6	12.06	11.28	10.51	9.74	8.97	8.97
2.16	Persentase balita stunting	Persen	21.9	19.78	18.72	17.66	16.6	15.54	15.54
2.17	persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100
2.18	persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	50	100	100	100	100	100	100
2.19	persentase puskesmas terakreditasi	Persen	87	87.5	88	92	96	100	100
2.20	persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	Persen	98.08	98.46	98.84	99.23	99.06	100	100
2.21	persentase makanan dan minuman yang lolos uji	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.22	persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Persen	80	88.89	89.58	91.67	94	96	96
2.23	persentase desa siaga aktif mandiri	Persen	39.77	45.91	48.98	52.05	55.12	58.19	58.19
2.24	Angka Kematian Ibu	Angka	79,05	76,5	75,2	74	72,7	71,4	71,4
2.25	Penurunan jumlah kematian ibu per tahun	Persen	NA	2.55	2,53	2,52	2,51	2,49	2,49



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.26	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Angka	NA	231/100.000	230/100.000	227/100.000	225/100.000	224/100.000	224/100.000
2.27	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak treinfeksi HIV	Persen	NA	0.19	0,19	0,15	0,14	0,13	0,12
2.28	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM	Persen	NA	90%	93%	95%	97%	100%	100%
2.29	<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	Persen	NA	90%	93%	95%	97%	100%	100%
2.30	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	NA	71%	73%	75%	76%	78%	78%
2.31	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	NA	59%	60%	63%	65%	67%	67%
2.32	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen	NA	8.9%	8,7%	8,6%	8,5%	8,3%	8,3%
2.33	Persentase puskesmas melaksanakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Persen	NA	40%	45%	47%	48%	50%	50%
2.34	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen	NA	90%	93%	95%	96%	97%	97%
2.35	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Persen	NA	49%	50%	52%	53%	55%	55%
2.36	Persentase sarana produksi Usaha Mikro Obat Tradisional	Persen	NA	60%	62%	63%	64%	65%	65%
3	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	22.40%	33.11%	43.83%	54.54%	62.26%	75.43%	75.43%
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	Persen	5%	5%	10%	15%	20%	25%	25%
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	77	81.71	86.42	91.13	95.84	100	100
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	86	88	89	91	92	93	93
3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	74.03	78.09	81.04	83.98	86.93	89.87	89.87
3.6	Rasio kepatuhan IMB	Persen	0.646	0.692	0.74	0.79	0.83	0.882	0.882
3.7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	53.21	56.15	59.08	62.02	64.95	67.88	67.88
3.8	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	25	39	54	69	84	100	100
3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	17	33	50	67	83	100	100
3.10	Persentase jaringan perpipaan air bersih dalam kondisi baik	Persen	80	84	88	92	96	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11	Persentase jaringan perpipaan air bersih yang direhabilitasi/ditingkatkan	Persen	86	89	92	95	98	100	100
3.12	Persentase sarana dan prasarana air minum yang direhabilitasi/ditingkatkan	Persen	86	89	92	95	98	100	100
3.13	Persentase jalan terbangun	Persen	NA	56.15	59.08	62.02	64.95	67.88	67.88
3.14	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	14.67	20	40	60	80	100%	100%
3.15	Persentase jembatan terbangun	Persen	77.80	80	82.22	84.44	86.67	89.17	89.17
3.16	Persentase jembatan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	77.80	80	82.22	84.44	86.67	89.17	89.17
3.17	Presentase drainase terbangun	Persen	72	76.2	79.7	81.7	84.8	88	88
3.18	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	72	76.2	79.7	81.7	84.8	88	88
3.19	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	Persen	5%	5%	10%	15%	20%	25%	25%
3.20	Presentase luas sawah beririgasi	Persen	52,37	6,00	7,00	2,00	1,00	1,00	69,37
3.21	Panjang jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Meter	54.898,32	4.685,45	4.833,33	2.213,89	1.733,33	1.333,33	69.697,66
3.22	Panjang jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Meter	82.347,47	1.405,64	2.416,67	1.106,94	866,67	666,67	88.810,05

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.23	Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai yang dibangun	km	695	1000	800	600	500	500	4095
3.24	Presentase PDAM dengan kinerja sehat	Persen	NA	83.6%	-	-	-	-	-
3.25	Presentase angka BABS di tempat terbuka	Persen	44,21	39,21	34,21	29,21	24,21	19,21	19,21
3.26	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persen	NA	75.28% penanganan. 9.13% pengurangan					
3.27	Presentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota	Persen	53.21	56.15	59.08	62.02	64.95	67.88	67.88
3.28	Pembangunan jalan daerah mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, Terdepan)	Km	NA	50					
3.29	Penyelesaian materi teknis dari bantuan Teknis RDTR	Jumlah materi teknis	NA	394					
3.30	Pelaksanaan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR	Koordinasi	4	12	12	12	12	12	64%
3.31	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Materi Teknis	NA	125					
3.32	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Materi Teknis	NA	1153					

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.33	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW), (DAS Diluar Kawasan Hutan)	Dokumen	0	0	1	1	1	1	4 Dokumen
3.34	Pelaksanaan Fasilitas penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan (SDEW), (DAS Diluar Kawasan Hutan)	Dokumen	0	0	1	1	1	1	4 Dokumen
4	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>								
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	NA	32.5	37.5	42.5	47.5	52.5	52.5
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	NA	-	-	-	-	-	-
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	2.25	5.2	8.2	11.2	14.2	17.2	17.2
4.4	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah	NA	756	745	734	723	713	713
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	NA	-	-	-	-	-	-
4.6	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	88.75	90.75	91.75	92.75	93.75	94.75	94.75
4.7	Persentase kawasan permukiman terpadu yang direhabilitasi/ditingkatkan	Persen	NA	-	-	-	-	-	-
4.8	Persentase rumah tangga memiliki akses sanitasi layak	Persen	74.03	78.09	81.04	83.9	86.93	89.87	89.87

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.9	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	26.58	28.33	31.57	35.83	38.30	41.67	41.67%
4.10	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	Persen	72.2	76.20	79.70	81.70	84.40	88	88
4.11	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih	Persen	86	88	89	91	92	93	93
4.12	Persentase PSU yang direhabilitasi/ditingkatkan	Persentase peningkatan	19.17	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	60.67
4.13	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	NA	32,5	37,5	42,5	47,5	52,5	52,5
4.14	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Hektar	2,71	6,14	8,39	11,46	14,76	17,60	17,60
4.15	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	unit	7664	6140	5396	4662	3933	3226	3226
5	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>								
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	17.02	17.87	18.72	19.57	20.42	21.28	21.28
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah	NA	100	100	100	100	100	100
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah	NA	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah	NA	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
5.8	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	79%	80%	81%	82%	83%	84%	84%
5.9	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
5.10	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
5.11	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
5.12	Persentase desa tangguh bencana	Persen	7.17	-	9.42	12	13.90	16.14	16.14
5.13	Persentase SDM penanganan bencana terlatih	Persen	9.09	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	90.8
5.14	Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	Persen	63.63	69.69	75.75	81.81	90.90	100	100
5.15	Persentase penanganan tanggap darurat pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.16	Persentase penurunan korban bencana	Persen	16.94	15.25	14.40	13.55	12.71	11.86	11.86
5.17	Persentase penanganan pra bencana	Persen	NA	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.18	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
5.19	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Persen	17,54	23,38	29,22	35,06	40,9	46,74	46,74
5.20	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persen	8,33	-	16,66	-	24,99	24,99	24,99
<b>6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>								
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase desa yang memiliki data PMKS yang tervalidasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase PMKS yang berdaya	Persen	71%	76%	81%	86%	91%	96%	96%
6.5	Persentase pekerja sosial profesional	Persen	68%	73%	78%	83%	88%	93%	93%
6.6	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	NA	3.000	-	-	-	-	-
6.7	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	12	12	12	12	12	12	12



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.8	Persentase layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
6.9	Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
6.10	Bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin	Jumlah	NA	-	-	-	-	-	-
6.11	Persentase Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	Persen	NA	-	-	-	-	-	-
6.12	Peningkatan kapasitas bagi pendamping PKH	Orang	101	101	101	101	101	101	101
6.13	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	NA	-	-	-	-	-	-
6.14	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Orang	NA	-	-	-	-	-	-
6.15	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Orang	NA	-	-	-	-	-	-
6.16	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	Kelompok	NA	-	-	-	-	-	-
6.17	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Orang	NA	-	-	-	-	-	-
6.18	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Orang	NA	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>								
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	5.31	10.62	15.93	21.24	26.55	31.80	31.80
1.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	60	65	70	75	80	85	85
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	50	60	70	80	90	100	100
1.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Manggarai	Persen	20.34	26.38	32.43	38.47	44.52	50.57	50.57
1.6	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Persen	5.31	10.62	15.93	21.24	26.55	31.80	31.80
1.7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	20.34	26.38	32.43	38.47	44.52	50.57	50.57
1.8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	56.88	67.92	79.66	87.66	97.85	100	100
1.9	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipatri, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	2,33	4,67	10,00	13,33	16,67	16,67	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	NA	4500	5000	5500	6000	6500	
1.11	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	NA	565	580	600	620	650	
1.12	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Orang	NA	565	580	600	620	650	
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>								
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0.006	0.011	0.017	0.022	0.027	0.033	0.006
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0.021	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.021
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	26.50	25.45	24.39	23.34	22.29	21.24	26.50
2.4	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	2.44	4.88	7.32	9.76	12.20	14.63	2.44
2.5	Persentase perempuan aktif dalam politik	Persen	11.43	15.14	18.86	22.57	26.28	30.00	11.43
2.6	Pesertase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	NA	85	90	95	100	100	100
2.9	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	65,61	65,84	65,88	65,93	65,97	66,02	66,02

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	Indeks Perlindungan Anak	Angka	NA	-	-	-	-	-	-
2.11	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
2.12	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	63,11	64,16	65,22	66,27	66,32	68,37	68,37
3.	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>								
3.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	70	75	80	85	90	95	95
3.2	Persentase peningkatan stok cadangan pangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.3	Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkategori baik	Persen	62.50	70	77.5	85	92.5	100	100
3.4	Persentase daerah yang masuk ke dalam kategori sulit untuk pendistribusian pangan	Persen	NA	1.17	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
3.5	Persentase peningkatan diversifikasi pangan lokal	Persen	NA	60	70	80	90	100	100
3.6	Persentase cadangan pangan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.7	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	26,90	26,32	25,73	25,15	24,56	23,98	23,98
3.8	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	87,80	88,05	88,30	88,55	88,80	89,05	89,05
3.9	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	NA 85	87,5	90	92,5	95	97,5	97,5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>								
4.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	NA	-	-	-	-	-	-
4.2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	60	100	100	100	100	100	100
4.3	Jumlah Kepala Keluarga Penerima akses reforma agraria	Jumlah kepala keluarga	NA	-	-	-	-	-	-
4.4	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	bidang	NA	-	-	-	-	-	-
4.5	Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Hektar	NA	-	-	-	-	-	-
5	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	80.59243	82.9684	84.1564	85.3444	86.5324	87.7204	87.7204
5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	18.74%	20.97	23.21	25.44	27.68	29.91	29.91
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	7	9	11	13	15	17	17
5.4	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	NA	9	11	13	15	17	17

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/ kota meliputi: a. Jumlah pengurangan timbunan sampah b. Jumlah penanganan timbunan sampah	persen	0.59 16.50	0.05 22.17	2.5 23.95	5 25.66	7.5 27.31	10 28.91	10 28.91
<b>6</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	87	89	91	95	97	100	100
6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	36.76	38.73	41.20	44.50	48.30	50.50	50.50
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	29.69	29.69	29.69	45.51	45.51	45.51	45.51
6.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	2	3	3	3	3	3	3
6.5	Persentase peningkatan data kependudukan yang valid	Persen	NA	8.70	13.04	17.39	21.74	26.09	26.09
6.7	Presentase peningkatan ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	Persen	0	4.35	8.70	13.04	17.39	30.43	30.43
6.8	Persentase kepemilikan e-KTP	Persen	87	89	91	95	97	100	100
6.9	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	Persen	36.76	38.65	41.48	46.19	48.08	49.02	49.02
6.10	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KK	Persen	0.72	0.75	0.82	0.87	0.94	1	1
6.11	persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	Persen	NA	5.00	6.67	8.33	12.00	13.33	13.33

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.12	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen	296.87	301.3	309.7	312.4	316.6	320	320
6.13	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	Persen	NA	16.67	25	36.36	45.45	50	50
6.14	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta pernikahan	Persen	0.23	25.80	27.30	28.81	30.31	32.57	32.57
<b>7.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>								
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	32.41	42.06	47.93	53.79	59.65	65.51	65.51
7.2	persentase peningkatan status desa berkembang	Persen	32.41	42.06	47.93	53.79	59.65	65.51	65.51
7.3	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	0	7.86	15.71	23.57	31.43	39.29	39.29
7.4	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	Persen	2.76	-	4.14	5.52	6.90	8.28	8.28
7.5	Persentase peran tim penggerak PKK dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7.6	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
7.7	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	3218	3228	3238	3248	3258	3268	3268
7.8	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Sistem Pelayanan Kelembagaan	3218	3228	3238	3248	3258	3268	3268
7.9	Jumlah Desa Mandiri	Desa	NA	0	1	2	4	7	7

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.10	Jumlah Desa Berkembang	Desa	47	56	65	75	85	90	90
7.11	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	93	79	60	40	20	0	0
7.12	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	NA	11	22	33	44	55	55
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk. Keluarga Bencana</b>								
8.1	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	persen	2.17	2.461	2.751	3.041	3.331	3.621	2.17
8.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	angka	26.26	25.71	25.15	24.60	24.05	23.50	26.26
8.3	Persentase masyarakat yang tersosialisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	2.171	2.461	2.751	3.041	3.331	3.621	2.171
8.4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	72.72	73.22	73.72	74.23	74.73	75.23	72.72
8.5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8.6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	44.36	44.89	45.35	45.82	46.28	46.74	44.36
8.7	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Persen	44.24	44.49	44.75	45.00	45.25	45.51	44.24
8.8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	57.91	58.60	59.29	59.97	60.66	61.34	57.91
8.9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	44.22	47.40	49.05	50.69	52.34	53.99	44.22



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.10	Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	2.44	2.44	4.88	7.32	9.76	12.20	2.44
8.11	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	28.62	29.22	29.82	30.43	31.03	31.63	28.62
8.12	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	Persen	0	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	0
8.13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	NA	57.00	-	-	-	-	-
8.14	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen	11,38	11,21	11,04	10,87	10,70	10,53	10,53
8.15	Persentase anggota Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	Persen	68,76	71,64	74,51	77,39	80,26	83,14	83,14
<b>9.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>								
9.1	Rasio konektivitas	Persen	NA	0.81	0.84	0.85	0.86	0.89	0.89
9.2	Kinerja lalu lintas	Persen	NA	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
9.3	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik	Persen	40.00	49.18	52.88	67.42	85.93	87	87
9.4	Persentase sarana dan prasarana parkir yang memadai	Persen	40.00	49.18	52.88	67.42	85.93	87	87
9.5	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	51.85	59.25	64.81	68.51	74	77.07	77.07
9.6	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	37.5	50.0	62.5	75.0	87.5	100.0	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.7	Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang direkayasa	Persen	100	80	66	53	40	26	26
9.8	Persentase perlengkapan jalan terutama jaringan jalan	Persen	43.37	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
9.9	Persentase fasilitas keselamatan perhubungan	Persen	43.37	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
9.10	Persentase fasilitas perhubungan yang rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	43.37	46.22	49.37	53.65	59.37	65.94	65.94
9.11	Persentase terminal sesuai standar	Persen	0	25	50	75	100	100	100
9.12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sektor transportasi	Nilai	NA	85	85,2	85,4	85,6	86	86
9.13	<i>One Time Performance</i> Layanan Transportasi	Persen	NA	78,44	78,50	78.70	78.90	79	79
9.14	Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	NA	0,695	0,697	0,698	0,699	0,700	0,700
9.15	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10ribu keberangkatan	Rasio	NA	28,85	28,00	27,00	26,00	25,00	25,00
<b>10</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>								
10.1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10.4	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	66.67	75	80	83.3	85.7	87.5	87.5
10.5	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10.6	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	13.33	20	26.67	33.33	40	46.67	46.67
<b>11</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah</b>								
11.1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	89.51	90.91	92.91	94.41	96.5	100	100
11.2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	50%	55%	60%	65%	70%	70%	50%
11.3	Persentase SDM pengurus koperasi yang terlatih	Persen	41.66	55.56	67.45	79.86	90.28	100	100
11.4	Persentase penurunan koperasi yang merugikan masyarakat	Persen	89.51	90.91	92.91	94.41	96.50	100	100
11.5	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	Persen	10	20	40	60	80	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.6	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya	Persen	10	20	40	60	80	100	100
11.7	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persen	NA	50	60	70	80	90	100
11.18	Meningkatkan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	NA	50	60	70	80	90	100
<b>12</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>								
12.1	Persentase peningkatan investasi	Persen	NA	10	20	30	40	50	50
12.2	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	50	60	70	80	90	100	100
12.3	Persentase promosi investasi langsung yang ditindaklanjuti	Persen	4	16	40	60	80	100	100
12.4	Persentase perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal melalui LKPM online	Persen	24	40	50	70	84	100	100
12.5	Persentase petugas pelayanan yang terlatih	Persen	2.5	5	7.5	10	12.5	17.81	17.81
12.6	Persentase sarana prasarana perizinan yang memadai	Persen	34.66	36.66	37.91	39.25	40.84	42.37	42.37
12.7	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Rupiah	NA	50.000.000.000	60.000.000.000	70.000.000.000	80.000.000.000	90.000.000.000	100.000.000.000
<b>13</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>								
13.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	NA	50	54	58	62	66	66
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	NA	1.69	1.74	1.80	1.86	1.91	1.91

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.3	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina/mengikuti pelatihan	Persen	NA	2	2	4	4	6	6
13.4	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Persen	NA	25	26.79	28.57	30.36	32.14	32.14
13.5	Persentase kegiatan yang diikuti oleh organisasi kepramukaan	Persen	NA	25	38	38	50	50	50.00
13.6	Persentase pelatih yang bersertifikat	Persen	NA	30.00	35	40.00	45	50.00	50.00
13.7	Persentase atlet muda yang dibina	Persen	NA	10	11	12	13	14	14
13.8	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	NA	50	55	58	60	63	63
13.9	Persentase organisasi olahraga yang sesuai standar	Persen	NA	50	55	58	60	63	63
13.10	Peningkatan prestasi olahraga	Medali emas	NA	7	7	6	6	6	6
14	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>								
14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
14.3	Persentase data statistik yang valid	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
15	<b>Urusan Pemerintah Bidang Persandian</b>								
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
16	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	NA	2.51	2.53	2.55	2.57	2.6	2.6
16.2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	12	12	14	14	15	15	15
16.3	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	0.051	0.051	0.053	0.056	0.058	0.061	0.061
16.4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16.5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	0.0059	0.0059	0.0088	0.0118	0.0147	0.0177	0.0177
16.6	SKM layanan Perpustakaan	Persen	NA	3.064	3.065	3.066	3.067	3.070	3.070
16.7	rasio kunjungan perpustakaan	Persen	0.051	0.051	0.053	0.056	0.058	0.061	0.061
16.8	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Persen	0.0358	0.0360	0.0361	0.0362	0.0364	0.0365	0.0365
<b>17</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>								
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	5.998	6.048	6.098	6.148	6.198	6.248	6.248
17.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Persen	12.183.3	12.183.3	12.183.3	12.183.3	12.183.3	12.183.3	12.183.3
17.3	Persentase arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>								
18.1	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	8%	31%	54%	69%	85%	100%	
18.2	Persentase budaya yang dilestarikan	Persen	55	64	73	82	91	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,46
18.4	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	Unit	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
18.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persen	76	76,21	76,36	76,51	76,66	76,80	76,80
18.6	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Unit	460	460	460	460	460	460	460
18.7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persen	3	4	5	6	7	8	8
18.8	Register cagar budaya (pendaftaran. penetapan. pencatatan. pemeringkatan. penghapusan)	Unit	400	420	443	460	470	480	480
18.9	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Unit	NA	-	-	-	-	-	-
18.10	Pembentukan tim pendaftar cagar budaya	orang	50	50	50	50	50	50	50
18.11	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Orang	15	15	15	15	15	15	15
18.12	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang	Persen	044	0,46	048	0,51	0,53	0,55	0,55

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan								
18.13	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>								
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>								
1.1	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	149.69	2.157,51	165.34	173.16	180.98	188.8	188.8
1.2	Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	44.59	56.70	60.79	64.89	68.99	73.09	73.09
1.3	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase kelompok pembudidaya ikan terlatih	Persen	55.56	69.53	76.52	83.51	90.49	97.48	97.48
1.5	Persentase kelompok pembudiaya ikan yang memiliki sarana dan parasarana perikanan tangkap sesuai standar	Persen	55.56	58.18	59.49	60.80	62.11	63.42	63.42
1.6	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar	Persen	NA	60	70	80	90	100	100
1.7	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7.067,11	7.084,21	7.101,30	7.118,40	7.135,49	7.152,59	7.152,59
1.8	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	149.69	157.51	165.34	173.16	180.98	188.8	188.8
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>								



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	NA	20	40	60	80	100	100
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Manggarai	Persen	NA	20	40	60	80	100	100
2.3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	NA	70	75	80	85	90	90
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	-32.94	4.56	5.59	5.63	5.68	5.72	5.72
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	NA	10	15	20	25	30	30
2.6	Persentase destinasi wisata yang berkembang	Persen	33	47	60	73	87	100	100
2.7	Persentase destinasi wisata yang berhasil dipromosikan	Persen	33	47	60	73	87	100	100
2.8	Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Persen	29	43	57	71	86	100	100
2.9	Persentase pelaku pariwisata bersertifikat	Persen	NA	20	40	60	80	100	100
2.10	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omzetnya (terutama kerajinan)	Persen	41	55	59	73	86	100	100
2.11	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	NA	1.398.000.000.000	-	-	-	-	-
2.12	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	9.000-11.000	11.000-13.000	13.000-15.000	15.000-17.000	17.000-19.000	19.000-21000	19.000-21000

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	Kontribusi PDRB Pariwisata	Persen	1.37	1,44	1.5	1,56	1.63	1,69	1,69
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>								
3.1	Produktivitas pertanian per hektas per tahun	Persen	10	20	30	40	50	60	60
3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	15	13	12	10	8	6	6
3.3	Persentase SDM petani yang terlatih	Persen	0.07	0.08	0.10	0.11	0.13	0.15	0.15
3.4	Persentase kelompok petani yang meningkat kelas taninya	Persen	5.42	5.54	5.82	5.93	6.10	6.38	6.38
3.5	Persentase peningkatan petani milenial	Persen	NA	8	10	12	14	16	16
3.6	Persentase kelompok petani yang memiliki benih unggul sesuai standar	Persen	22.99	29.51	31.88	34.25	36.62	38.99	38.99
3.7	Persentase kelompok petani yang memiliki pupuk sesuai standar	Persen	31.02	31.97	32.54	33.11	33.69	34.26	34.26
3.8	Persentase kelompok petani yang memiliki alat dan mesin pertanian sesuai standar	Persen	24.01	25	26.13	27.27	28.40	29.54	29.54
3.9	Luas area tanam yang terserang hama penyakit	Hektar	4.12	4.17	3.53	2.89	2.25	1.61	1.61
3.10	Persentase jaringan irigasi usaha tani ber kondisi baik	Persen	70	75	80	85	90	95	95

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11	Persentase luas lahan tidur yang dikonversi ke lahan pertanian	Hektar	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.09
3.12	Persentase peternak yang terlatih	Persen	0.3	0.62	0.83	1.03	1.24	1.44	1.44
3.13	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen	1.28	9.86	9.99	10.24	10.49	10.61	10.61
3.14	Persentase kelompok peternak yang mampu memanfaatkan teknologi peternakan	Persen	5.79	4.79	5.34	5.87	6.40	6.91	6.91
3.15	Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar	Persen	1.28	9.86	9.99	10.24	10.49	10.61	10.61
3.16	Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar	Persen	1.28	9.86	9.99	10.24	10.49	10.61	10.61
3.17	Persentase kelompok peternak yang memperoleh bantuan permodalan	Persen	1.28	9.86	9.99	10.24	10.49	10.61	10.61
3.18	Tingkat kelahiran ternak	Persen	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
3.19	Tingkat kematian ternak	Persen	0.63	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57
3.20	Persentase ternak yang tidak terserang penyakit	Persen	95.49	96.55	96.92	97.3	97.67	98.05	98.05
3.21	Persentase produk pertanian yang ditangai sesuai standar SNI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.22	Persentase produk hasil peternakan yang ditangai sesuai standar ASUH	Persen	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50	40.50
3.23	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	Persen	NA	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.24	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persen	NA	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6
3.25	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Persen	NA	3,28	3,29	3,30	3,31	3,32	3,32
3.26	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	NA	1.2	-	-	-	-	-
3.27	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	NA	Tamanan pangan= 95	90	85	80	75	75
		Persen	NA	Hortikultura= 90-95	85	80	75	70	70
		Persen	NA	Perkebunan= 80	75	70	65	60	60
3.28	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
4	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>								
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	75	80	85	90	95	100	100
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	85	90	95	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix	Persen	NA	11.1	22.2	33.3	44.4	55.5	55.5
4.5	Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing-mix	Persen	NA	3.3	6.7	10	13.3	16.7	16.7
4.6	Persentase kelompok petani yang memiliki jaringan pemasaran produk pertanian	Persen	NA	3.3	6.7	10	13.3	16.7	16.7
4.7	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik	Persen	27.3	36.4	45.5	54.5	63.6	72.7	72.7
4.8	Persentase kelompok pedagang yang terlatih	Persen	NA	11.1	22.2	33.3	44.4	55.6	55.6
4.9	Persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan permodalan	Persen	NA	11.1	22.2	33.3	44.4	55.6	55.6
4.10	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Persen	NA	6,34	6,72	7,1	7,48	7,86	7,86
4.11	Tertib Usaha	Persen	NA	59	63	67	71	75	75
4.12	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	NA	42	50	60	70	80	80
4.13	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	NA	90	91	92	93	94	94
4.14	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	NA	60	60	60	60	60	60
4.15	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	NA	91	92	93	94	95	95

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.16	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	NA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4.17	Inflasi Pangan bergejolak	Persen	NA	16	16	16	16	16	16
<b>5</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>								
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	20	30	40	50	60	70	70
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase peningkatan pelaku IKM yang terlatih	Persen	50	60	70	80	90	100	100
5.7	Persentase IKM yang mendapatkan bantuan permodalan	Persen	29.1	32.6	36.2	39.7	43.3	46.8	46.8

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8	Persentase IKM yang menggunakan teknologi pengolahan modern	Persen	25.0	33.3	41.7	50	58.3	66.7	66.7
5.9	Tingkat ketersediaan bahan baku produksi	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
5.10	Persentase peningkatan pelaku industri tenun yang terlatih	Persen	14.3	18.6	22.9	27.1	31.4	35.7	35.7
5.11	Persentase peningkatan pelaku industri mebel dan bambu yang terlatih	Persen	10	11	12	13	14	15	15
5.12	Persentase IKM yang meningkat sarana prasarana pendukungnya	Persen	NA	3.5	7.1	10.6	14.2	17.7	17.7
5.13	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
5.14	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Persen	0,393	0,394	0,400	0,401	0,406	0,406	0,406
5.15	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	NA	151,9	152	152,1	152,2	152,3	152,3
5.16	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Rupiah	4,415	4,445	4,475	4,505	4,535	4,565	4,565
<b>D</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>								
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>								
1.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	11.18	0	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	49.19	55	60	60	60	60	60
1.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	35.89	40	40	45	45	50	50
1.4	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	39.02	48.78	58.54	68.29	73.17	85.37	85.37
1.5	Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	99.89	99.91	99.94	99.96	99.98	100	100
1.6	Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	96	97	98	99	100	100	100
1.8	Persentase penyaluran Bansos tepat saaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.9	Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.10	Persentase kebijakan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
1.11	Persentase kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procement	Persen	49	60	70	80	90	90	90
<b>2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>								
2.1	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	28	30	32	33	35	37	37
<b>E</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintah</b>								



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Perencanaan</b>								
1.1	Persentase konsistensi RKPD dengan Renja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD	Persen	54	100	100	100	100	100	100
2	<b>Keuangan</b>								
2.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Rasio	13%	14%	16%	17%	18%	19%	19.87%
2.2	Rasio PAD	Persen	10%	11%	11%	12%	13%	14%	14.85%
2.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	24%	27%	30%	34%	38%	42%	47.03%
2.4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-13.57%	-18%	-21%	-25%	-29%	-32%	-35.16%
2.5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	91.39%	11%	15%	19%	23%	27%	31.47%
2.6	Manajemen aset	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	5%	4%	4%	4%	4%	3%	3%
2.8	Infomasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.11	Persentase penyerapan belanja daerah	Persen	90	90	90	90	90	90	90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	Persentase alokasi anggaran wajib sesuai ketentuan	Persen	75	75	100	100	100	100	100
2.13	Persentase aset daerah yang diinventarisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Persentase realisasi pajak daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Persentase penyajian laporan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>Kepegawaian</b>								
3.1	Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Persen	NA	95.89	96.24	96.59	96.94	97.28	97.98
3.2	Rasio Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Persen	NA	24.88	28.44	31.99	35.55	39.10	42.65
3.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	NA	24.88	28.44	31.99	35.55	39.10	42.65
3.4	Persentase distribusi pegawai sesuai kebutuhan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
3.5	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal baik	Persen	84.91	85.41	85.91	86.41	86.91	87.41	87.41
3.6	Tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05
<b>4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>								
4.1	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Persen	5.28	7.55	9.62	10.68	10.71	10.75	10.75

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	Persen	83.21	85.50	87.50	90.50	92.50	94.92	94.92
4.3	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklat sesuai kebutuhan	Persen	10,20	14,29	18,37	20,41	20,41	20,41	20,41
<b>5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>								
5.1	Persentase realisasi target program	Persen	54	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan	Persen	54	100	100	100	100	100	100
<b>F</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>								
<b>1</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>								
1.1	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
1.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
1.3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	72.81	75.07	77.34	79.60	81.86	84.12	86.39
1.4	Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persen	38.17	38.73	39.29	39.85	40.41	40.97	41.53
<b>G</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>								
<b>1</b>	<b>Kecamatan</b>								
1.1	Persentase layanan kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
1.4	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100

# BAB IX

## PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021- 2026 merupakan pedoman perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Dokumen ini mengakomodasi visi dan misi bupati serta wakil bupati yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan dilakukan secara sistematis dan rinci melalui logika perencanaan yang baik.

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diturunkan ke beberapa tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran diterjemahkan ke beberapa strategi dan arah kebijakan yang kemudian ditetapkan secara formal menjadi program-program prioritas. Dalam rangka memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021- 2026 ini merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD. Substansi dalam dokumen RPJMD akan menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun pertama bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana pembangunan pada RPJMD Periode 2021- 2026 diupayakan secara optimal untuk memenuhi target.

RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021- 2026 juga merupakan pedoman bagi setiap kepala perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Dalam rangka memastikan sinergi antar dokumen perencanaan, hendaknya RPJMD ini dilaksanakan dengan memenuhi beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai, dunia usaha dan masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen ini;
2. Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021- 2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD;
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai wajib menyusun Renstra-PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan dan Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing yang berpedoman pada RPJMD ini. Dokumen ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja- PD);
4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten Manggarai harus memastikan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Manggarai wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke Renstra-PD.

**BUPATI MANGGARAI**

**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2021-2026**

